BADAN POM

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA 2024

BIASAKAN YANG BENAR BUKAN
BENARKAN YANG BIASA

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2024 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama. Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2024 yang disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada pimpinan Badan POM, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Laporan Kinerja menyajikan informasi keberhasilan pencapaian kinerja, upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja, serta evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran program Inspektorat Utama pada tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun kelima atau terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Laporan Kinerja menyajikan progres keberhasilan maupun kendala pencapaian target kinerja pada tahun 2024.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas pelaksanaan kewenangan, penggunaan sumber daya pengawasan intern dan pencapaian target kinerja. Semoga sumbangsih pelaksanan pengawasan intern dan reposisi *trusted advisor* memiliki kontribusi pada peningkatan kinerja dan terciptanya *good governance* dan *clean government* di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, 25 Februari 2025
Inspektur Utama BPOM,

Yan Setiadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

I	Pendahuluan	Latar Belakang	2
		Gambaran Umum Organisasi	3
		Struktur Organisasi	3
		Isu Strategis	5
II	Perencanaan & Perjanjian Kinerja	Rencana Strategis	21
		Rencana Kinerja Tahunan 2024	37
		Perjanjian Kinerja Tahun 2024	39
		Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024	41
		Metode Pengukuran	45
III	Akuntabilitas Kinerja	Capaian Kinerja Organisasi	49
		Evaluasi Tahun ke-5 Inspektorat Utama	181
		Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis	242
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	244
		Pemanfaatan Informasi Kinerja	266
		Realisasi Anggaran	278
IV	Hasil Evaluasi Tahun ke-5 Pada Inspektorat I	Target Kinerja Jangka Menengah	300
		Analisis Capaian Kinerja	307
V	Hasil Evaluasi Tahun ke-5 Pada Inspektorat II	Target Kinerja Jangka Menengah	374
		Analisis Capaian Kinerja	382
VI	Branding Pengawasan	Inovasi Pengawasan (Aplikasi)	444
		Sharing Knowledge	450
		Webinar	454
		Seminar	455
		Penghargaan	457
		Lain-lain	460
VII	Penutup	Kesimpulan	469
		Permasalahan	471
		Saran	471
		LAMPIRAN	474

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan 4
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM 5
Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama Per Triwulan IV Tahun 2024 7
Gambar 4 Komponen Penilaian Kapabilitas APIP 16
Gambar 5 Sasaran Program Inspektorat Utama 2020-2024 22
Gambar 6 Peta Strategi Level 0 BPOM Tahun 2020-2024 37
Gambar 7 Peta Strategi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 37
Gambar 8 Pengukuhan Pembina Dan Anggota Paksi Dan Api 64
Gambar 9 Penyerahan Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengelola Keuangan 64
Gambar 10 Hasil Evaluasi SPIP-T BPOM Tahun 2024 73
Gambar 11 Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan 102
Gambar 12 Grafik Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 . 128
Gambar 13 Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas Apip BPOM Tahun 2024 143
Gambar 14 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Lingkup Inspektorat Utama Dengan Unit Kerja BPOM 161
Gambar 15 Dokumentasi Kunjungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) 450
Gambar 16 Dokumentasi Kunjungan BNN 451
Gambar 17 Dokumentasi Kunjungan LKPP 452
Gambar 18 Dokumentasi Kunjungan Kementerian Ketenagakerjaan 453
Gambar 19 Dokumentasi Kunjungan Badan Informasi Geospasial (BIG) 454
Gambar 20 Dokumentasi Webinar Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dan Investasi Bagi Generasi Milenial 455
Gambar 21 Rapat Kerja Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko Di Lingkungan BPOM 457
Gambar 22 Lomba Inovasi Pengawasan BPKP Tahun 2024 458
Gambar 23 Predikat Unit Kerja Pusat Pengelola BMN Terbaik 459
Gambar 24 Rapat Evaluasi Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 461
Gambar 25 Rapat Tinjauan Manajemen Dan Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan III Tahun 2024 462
Gambar 26 Café Integritas Seri 1 463
Gambar 27 Café Integritas Seri 3 464
Gambar 28 Seri 3 (Pengukuhkan Penyuluh Anti Korupsi (Paksi) Dan Ahli Pembangun Integritas (Api)) 465
Gambar 29 Audiensi Terkait Kebijakan Manajemen Risiko Di Lingkungan BPOM 466
Gambar 30 Pertemuan Internal Inspektorat Utama 467

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA Di Inspektorat Utama 8
Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor 8
Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama Per Per 31 Desember 2024 9
Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2019 S.D.Triwulan Iv Tahun 2024 10
Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan Iv Tahun Anggaran 2024 (Per Kegiatan) 13
Tabel 6 Penyesuaian Indikator Tujuan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 21
Tabel 7 Sasaran, Indikator, Dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama 24
Tabel 8 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2024 39
Tabel 9 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 41
Tabel 10 Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Dan Sasaran Program 46
Tabel 11 Predikat Kinerja Organisasi 47
Tabel 12 Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM Tahun 2024 73
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Indikator “Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM” Tahun 2024 Dengan K/L Lain 74
Tabel 14 Penyesuaian Nomenklatur Dan Target SPIP-T 76
Tabel 15 Capaian Sasaran Program Terwujudnya Organisasi Badan Pom Yang Efektif 78
Tabel 16 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2 80
Tabel 17 Perbandingan Dengan K/L Lain Tahun 2024 85
Tabel 18 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2024 86
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Indikator “ Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Yang Ditindaklanjuti BPOM” Tahun 2024 Dengan K/L Lain 89
Tabel 20 Perbandingan Realisasi Indikator “Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern” Tahun 2024 Dengan K/L Lain 96
Tabel 21 Jumlah Responden Survei Kemanfaatan Kebijakan 102
Tabel 22 Realisasi Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2020-2023 104
Tabel 23 *Matriks Penyesuaian Target 2024 Indikator* Indeks Kebijakan Pengawasan Intern 104
Tabel 24 Capaian Sasaran Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern Yang Berbasis Risiko Tahun 2024 105
Tabel 25 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5 106
Tabel 26 Capaian Iku Persentase Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama Yang Sesuai Standar Mutu Tahun 2024 107
Tabel 27 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Persentase Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama Yang Sesuai Standar Mutu Tahun 2024 108
Tabel 28 Capaian Sasaran Implementasi Pengawasan Intern Yang Efektif Dan Efisien 110
Tabel 29 Capaian Iku Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Yang Ditindaklanjuti Tahun 2024 112

Tabel 30 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Yang Ditindaklanjuti Dengan K/L Lain 114
Tabel 31 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Yang Ditindaklanjuti Tahun 2024..... 116
Tabel 32 Capaian Iku Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Kategori Dan Tepat Waktu 119
Tabel 33 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria Dan Tepat Waktu Dengan K/L Lain..... 120
Tabel 34 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria Dan Tepat Waktu Tahun 2024 121
Tabel 35 Capaian Iku Persentase Permintaan Layanan Konsultansi Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu 123
Tabel 36 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Persentase Permintaan Layanan Konsultansi Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2024 124
Tabel 37 Capaian Iku Indeks Rb Inspektorat Utama 127
Tabel 38 Perbandingan Indikator Indeks Rb Inspektorat Utama Tahun 2024 Dengan K/L Lain 130
Tabel 39 Tabel Efisiensi Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama 130
Tabel 40 Capaian Iku Nilai Akip Inspektorat Utama Tahun 2024 134
Tabel 41 Perbandingan Capaian Indikator Nilai Akip Inspektorat BPOM Dengan K/L Lain 135
Tabel 42 Hasil Evaluasi Akip Satuan Kerja BPOM Tahun 2024 135
Tabel 43 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Nilai Akip Inspektorat Utama Tahun 2024 136
Tabel 44 Capaian Iku Nilai Evaluasi Kapabilitas Apip 142
Tabel 45 Perbandingan Capaian Indikator Level Kapabilitas Apip Dengan K/L Lain. 144
Tabel 46 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Level Kapabilitas Apip Tahun 2024..... 145
Tabel 47 Capaian Iku Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024 147
Tabel 48 Perbandingan Nilai Pengelolaan Kearsipan Dengan Satuan Kerja Di BPOM 147
Tabel 49 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Nilai Pengalolaan Kearsipan Tahun 2024 150
Tabel 50 Capaian Sasaran Program Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama Yang Efektif Tahun 2024 151
Tabel 51 Penyesuaian Target Indeks Profesionalitas Asn Inspektorat Utama Tahun 2024 154
Tabel 52 Capaian Iku Indeks Profesionalitas Asn Inspektorat Utama Tahun 2024 154
Tabel 53 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas Asn Inspektorat Utama Dengan K/L Lain..... 155
Tabel 54 Perbandingan Indikator Indeks Profesionalitas Asn Inspektorat Utama Dengan Satker BPOM 156
Tabel 55 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9..... 159
Tabel 56 Capaian Iku Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Inspektorat Utama Yang Optimal Tahun 2024 160
Tabel 57 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Inspektorat Utama Yang Optimal Tahun 2024 162
Tabel 58 Indikator Ikpa Tahun 2024..... 165
Tabel 59 Indikator Pada Aspek Implementasi..... 166
Tabel 60 Penyesuaian Target Rapk Pada Iku Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2024 167
Tabel 61 Capaian Iku Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama 167

Tabel 62 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10 Banding Target Tahun 2024 168
Tabel 63 Analisis Efisiensi Terhadap Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama 2024 170
Tabel 64 Penyesuaian Target Indikator “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” Tahun 2024 170
Tabel 65 Capaian Iku Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Dan Jasa Tahun 2024 171
Tabel 66 Perbandingan Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Di BPOM 172
Tabel 67 Capaian Iku Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 174
Tabel 68 Perbandingan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Satuan Kerja Di BPOM 175
Tabel 69 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 176
Tabel 70 Capaian Iku Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2024 178
Tabel 71 Perbandingan Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Satuan Kerja Di BPOM 178
Tabel 72 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan Iii Tahun 2024 179
Tabel 73 Capaian Sasaran Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama Secara Akuntabel Tahun 2024 179
Tabel 74 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.1 Tahun 2020-2024 181
Tabel 75 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.1 Tahun 2020-2024 182
Tabel 76 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.2 Tahun 2020-2024 184
Tabel 77 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.2 Tahun 2020-2024 185
Tabel 78 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.3 Tahun 2020-2024 186
Tabel 79 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.3 Tahun 2020-2024 187
Tabel 80 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.4 Tahun 2020-2024 189
Tabel 81 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.4 Tahun 2020-2024 189
Tabel 82 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.5 Tahun 2020-2024 192
Tabel 83 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.5 Tahun 2020-2024 192
Tabel 84 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.6 Tahun 2020-2024 194
Tabel 85 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.6 Tahun 2020-2024 195
Tabel 86 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.7 Tahun 2020-2024 197
Tabel 87 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.7 Tahun 2020-2024 198
Tabel 88 Target Indikator “Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama” Pada Tahun 2025-2029 200
Tabel 89 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.8 Tahun 2020-2024 201
Tabel 90 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.8 Tahun 2020-2024 201
Tabel 91 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.9 Tahun 2020-2024 203
Tabel 92 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.9 Tahun 2020-2024 204
Tabel 93 Target Persentase Laporan Layanan Jasa Assurance Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Mutu Tahun 2025-2029 205
Tabel 94 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.10 Tahun 2020-2024 206
Tabel 95 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.10 Tahun 2020-2024 206
Tabel 96 Target Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Yang Ditindaklanjuti Tahun 2025-2029 208
Tabel 97 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.11 Tahun 2020-2024 208
Tabel 98 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.11 Tahun 2020-2024 209

Tabel 99 Target Indikator “Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Kategori Dan Tepat Waktu” Pada Tahun 2025-2029 210
Tabel 100 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.12 Tahun 2020-2024..... 211
Tabel 101 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.12 Tahun 2020-2024 211
Tabel 102 Target Indikator “Persentase Layanan Jasa Konsultasi Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu” Pada Tahun 2025-2029 213
Tabel 103 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.13 Tahun 2020-2024..... 213
Tabel 104 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.13 Tahun 2020-2024 214
Tabel 105 Target Indikator “Nilai Pembangunan Zona Integritas Di Lingkup Inspektorat Utama” Pada Tahun 2025-2029..... 215
Tabel 106 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.14 Tahun 2020-2024..... 215
Tabel 107 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.14 Tahun 2020-2024 217
Tabel 108 Target Indikator “Nilai Akip Inspektorat Utama” Pada Tahun 2025-2029 .. 218
Tabel 109 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.15 Tahun 2020-2024..... 219
Tabel 110 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.15 Tahun 2020-2024 219
Tabel 111 Target Indikator “Nilai Evaluasi Kapabilitas Apip” Pada Tahun 2025-2029 221
Tabel 112 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.16 Tahun 2020-2024..... 221
Tabel 113 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.16 Tahun 2020-2024 222
Tabel 114 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.17 Tahun 2020-2024..... 224
Tabel 115 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.17 Tahun 2020-2024 224
Tabel 116 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.18 Tahun 2020-2024..... 226
Tabel 117 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.18 Tahun 2020-2024 226
Tabel 118 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.19 Tahun 2020-2024..... 228
Tabel 119 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.19 Tahun 2020-2024 228
Tabel 120 Target Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 230
Tabel 121 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.20 Tahun 2020-2024..... 230
Tabel 122 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.20 Tahun 2020-2024 231
Tabel 123 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.21 Tahun 2020-2024..... 232
Tabel 124 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.21 Tahun 2020-2024 232
Tabel 125 Kertas Kerja Analisis Tren Iksp.22 Tahun 2020-2024..... 234
Tabel 126 Kertas Kerja Analisis Gap Iksp.22 Tahun 2020-2024 234
Tabel 127 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk Nilai Peer Review Atas Pengawasan Intern Tahun 2020-2024 236
Tabel 128 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk Nilai Peer Review Atas Pengawasan Intern Tahun 2020-2024 236
Tabel 129 Kertas Kerja Analisis Tren Nilai Rb BPOM Penguatan Sistem Pengawasan Tahun 2020-2024 237
Tabel 130 Kertas Kerja Analisis Gap Nilai Rb BPOM Penguatan Sistem Pengawasan Tahun 2020-2024 238
Tabel 131 Kertas Kerja Analisis Tren Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 239
Tabel 132 Kertas Kerja Analisis Gap Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 240
Tabel 133 Kertas Kerja Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis Tahun 2020-2024... 242
Tabel 134 Matriks Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja Terhadap Penyesuaian Target Di Penetapan Kinerja 266
Tabel 135 Matriks Indikator Dan Target Kinerja Tahun 2025-2029 272
Tabel 136 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2024..... 279
Tabel 137 Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Program Inspektorat Utama 2024 280

Tabel 138 Capaian Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Inspektorat I 2024 285
Tabel 139 Capaian Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Inspektorat II 2024 287
Tabel 140 Realisasi Anggaran Per Mak Periode Tahun 2023 Sd 2024 290
Tabel 141 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Utama Tahun 2024 294
Tabel 142 Target Kinerja Jangka Menengah Inspektorat I Tahun 2020-2024 300
Tabel 143 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.1 Tahun 2020-2024 308
Tabel 144 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.1 Tahun 2020-2024 309
Tabel 145 Target Indikator “Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas” Pada Tahun 2025-2029 310
Tabel 146 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.2 Tahun 2020-2024 311
Tabel 147 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.2 Tahun 2020-2024 312
Tabel 148 Target Indikator “ Nilai Survei Penilaian Integritas ” Pada Tahun 2025-2029 313
Tabel 149 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.3 Tahun 2020-2024 314
Tabel 150 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.3 Tahun 2020-2024 314
Tabel 151 Target Indikator “ Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM ” Pada Tahun 2025-2029 316
Tabel 152 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.4 Tahun 2020-2024 317
Tabel 153 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.4 Tahun 2020-2024 317
Tabel 154 Target Indikator “Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM” Pada Tahun 2025-2029 319
Tabel 155 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.6 Tahun 2020-2024 320
Tabel 156 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.6 Tahun 2020-2024 321
Tabel 157 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.7 Tahun 2020-2024 323
Tabel 158 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.7 Tahun 2020-2024 323
Tabel 159 Target Indikator “Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Yang Ditindaklanjuti BPOM” Pada Tahun 2025-2029 325
Tabel 160 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.8 Tahun 2020-2024 326
Tabel 161 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.8 Tahun 2020-2024 327
Tabel 162 Target Indikator “ Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat I ” Pada Tahun 2025-2029 329
Tabel 163 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.9 Tahun 2020-2024 330
Tabel 164 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.9 Tahun 2020-2024 331
Tabel 165 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.10 Tahun 2020-2024 333
Tabel 166 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.10 Tahun 2020-2024 334
Tabel 167 Target Indikator “ Persentase Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja Inspektorat I Yang Sesuai Standar Mutu ” Pada Tahun 2025-2029 335
Tabel 168 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.11 Tahun 2020-2024 336
Tabel 169 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.11 Tahun 2020-2024 336
Tabel 170 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.12 Tahun 2020-2024 337
Tabel 171 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.12 Tahun 2020-2024 338
Tabel 172 Target Indikator “Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I Yang Ditindaklanjuti ” Pada Tahun 2025-2029 339
Tabel 173 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.13 Tahun 2020-2024 340
Tabel 174 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.13 Tahun 2020-2024 341
Tabel 175 Target Indikator “Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I Yang Ditindaklanjuti ” Pada Tahun 2025-2029 342
Tabel 176 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.14 Tahun 2020-2024 343
Tabel 177 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.14 Tahun 2020-2024 344

Tabel 178 Target Indikator “Persentase Permintaan Layanan Konsultansi Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu ” Pada Tahun 2025-2029 345
Tabel 179 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.15 Tahun 2020-2024..... 346
Tabel 180 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.15 Tahun 2020-2024 346
Tabel 181 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.16 Tahun 2020-2024..... 347
Tabel 182 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.16 Tahun 2020-2024 348
Tabel 183 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.17 Tahun 2020-2024..... 349
Tabel 184 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.17 Tahun 2020-2024 349
Tabel 185 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.18 Tahun 2020-2024..... 351
Tabel 186 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.18 Tahun 2020-2024 352
Tabel 187 Target Indikator “Nilai Pembangunan Zona Integritas Di Lingkup Inspektorat I” Pada Tahun 2025-2029..... 353
Tabel 188 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.19 Tahun 2020-2024..... 354
Tabel 189 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.19 Tahun 2020-2024 355
Tabel 190 Target Indikator “Nilai Evaluasi Kapabilitas Apip” Pada Tahun 2025-2029 356
Tabel 191 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.20 Tahun 2020-2024..... 357
Tabel 192 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.20 Tahun 2020-2024 357
Tabel 193 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.21 Tahun 2020-2024..... 359
Tabel 194 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.21 Tahun 2020-2024 360
Tabel 195 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.22 Tahun 2020-2024..... 361
Tabel 196 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.22 Tahun 2020-2024 362
Tabel 197 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.23 Tahun 2020-2024..... 363
Tabel 198 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.23 Tahun 2020-2024 364
Tabel 199 Target Indikator “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I” Pada Tahun 2025-2029 366
Tabel 200 Kertas Kerja Analisis Tren Terhadap Indikator Inspektorat I Yang Sudah Tidak Relevan Periode Tahun 2020-2024 367
Tabel 201 Kertas Kerja Analisis Gap Terhadap Indikator Inspektorat I Yang Sudah Tidak Relevan Periode Tahun 2020-2024 369
Tabel 202 Target Kinerja Jangka Menengah Inspektorat II Tahun 2020-2024..... 374
Tabel 203 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.1 Tahun 2020-2024 382
Tabel 204 Target Indikator “Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas” Pada Tahun 2025-2029 385
Tabel 205 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.1 Tahun 2020-2024 386
Tabel 206 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.1 Tahun 2020-2024 387
Tabel 207 Target Indikator “Survei Penilaian Integritas” Pada Tahun 2025-2029 388
Tabel 208 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.3 Tahun 2020-2024 389
Tabel 209 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.3 Tahun 2020-2024 389
Tabel 210 Target Indikator “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPOM” Pada Tahun 2025-2029 391
Tabel 211 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.4 Tahun 2020-2024 392
Tabel 212 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.4 Tahun 2020-2024 392
Tabel 213 Target Indikator “Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM” Pada Tahun 2025-2029 394
Tabel 214 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.5 Tahun 2020-2024 395
Tabel 215 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.6 Tahun 2020-2024 398
Tabel 216 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.6 Tahun 2020-2024 398
Tabel 217 Target Indikator “Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Yang Ditindaklanjuti BPOM” Pada Tahun 2025-2029 400
Tabel 218 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.8 Tahun 2020-2024 401

Tabel 219 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.8 Tahun 2020-2024 402
Tabel 220 Target Indikator “Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat II” Pada Tahun 2025-2029 404
Tabel 221 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.9 Tahun 2020-2024 405
Tabel 222 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.9 Tahun 2020-2024 405
Tabel 223 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.10 Tahun 2020-2024..... 408
Tabel 224 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.10 Tahun 2020-2024 408
Tabel 225 Target Persentase Laporan Layanan Jasa Assurance Pada Mitra Kerja Inspektorat II Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Mutu Tahun 2025-2029 410
Tabel 226 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.11 Tahun 2020-2024..... 411
Tabel 227 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.11 Tahun 2020-2024 411
Tabel 228 Target Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II Yang Ditindaklanjuti Tahun 2025-2029 413
Tabel 229 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.12 Tahun 2020-2024..... 414
Tabel 230 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.12 Tahun 2020-2024 414
Tabel 231 Target Indikator “Persentase Pengaduan Wilayah Pengawasan Inspektorat II Yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria Dan Tepat Waktu” Pada Tahun 2025-2029 416
Tabel 232 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.13 Tahun 2020-2024..... 417
Tabel 233 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.13 Tahun 2020-2024 418
Tabel 234 Target Indikator “Persentase Layanan Jasa Konsultasi Pada Mitra Kerja Inspektorat II Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu” Pada Tahun 2025-2029 419
Tabel 235 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.14 Tahun 2020-2024..... 420
Tabel 236 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.14 Tahun 2020-2024 421
Tabel 237 Target Indikator “Nilai Pembangunan Zona Integritas Di Lingkup Inspektorat II” Pada Tahun 2025-2029..... 422
Tabel 238 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.15 Tahun 2020-2024..... 422
Tabel 239 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.15 Tahun 2020-2024 423
Tabel 240 Target Indikator “Nilai Evaluasi Kapabilitas Apip” Pada Tahun 2025-2029 424
Tabel 241 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.16 Tahun 2020-2024..... 425
Tabel 242 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.16 Tahun 2020-2024 425
Tabel 243 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.17 Tahun 2020-2024..... 428
Tabel 244 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.19 Tahun 2020-2024..... 430
Tabel 245 Kertas Kerja Analisis Gap Iksk.18 Tahun 2020-2024 431
Tabel 246 Kertas Kerja Analisis Tren Iksk.19 Tahun 2020-2024..... 432
Tabel 247 Target Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II 2025-2029 . 435
Tabel 248 Kertas Kerja Analisis Tren Terhadap Indikator Inspektorat II Yang Sudah Tidak Relevan Periode Tahun 2020-2024 436
Tabel 249 Kertas Kerja Analisis Gap Terhadap Indikator Inspektorat II Yang Sudah Tidak Relevan Periode Tahun 2020-2024 439

Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2024. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.
Untuk mendukung Sasaran Program tersebut, Inspektorat Utama Badan POM menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Program dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKSP) yang telah diperjanjikan antara Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran Program Inspektorat Utama adalah (1) Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif; (2) Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel; (3) Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas; (4) Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko; (5) Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien; (6) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan dan layanan konsultansi yang Efektif; (7) Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif; (8) Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal; (9) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama; dan (10) Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel.

Pada tahun 2024 Inspektorat Utama mengawal pengawasan dan turut serta berkontribusi dalam mendapatkan beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh stakeholder Inspektorat Utama, antara lain:

1. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2023, yang merupakan perolehan Opini WTP yang ke-10 secara berturut-turut;

2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK per Semester I Tahun 2024 sebesar 96,15%. Badan POM selalu mendapatkan persentase tindak lanjut tertinggi di Auditorat Keuangan Negara VI;
3. Mengawal nilai SPIP-T BPOM tahun 2024 yang mencapai level 4 dengan skor 4,094 (Level 4) dan termasuk Kementerian/Lembaga dengan nilai SPIPT tertinggi di Lingkup Kedeputian Politik Hukum, Pengembangan Manusia dan Kebudayaan;
4. Mencapai Manajemen Risiko pada level 4 (terkelola dan terukur) skor 4,286 dengan karakteristik Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi;
5. Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
6. Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM tahun 2024 mencapai 8 Besar di antara seluruh Kementerian/Lembaga, dengan skor 83,98;
7. Mengawal keberhasilan pembangunan ZI di tahun 2024 dengan 5 unit kerja memperoleh WBK, dan 3 unit kerja memperoleh WBBM;
8. Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2024 adalah sebagai berikut: 6 (enam) Sasaran Program tercapai dengan Kategori “Sangat Baik”, 1 (satu) Sasaran Program tercapai dengan Kategori “Baik”, dan 3 (tiga) sasaran program belum tercapai dengan kategori “Cukup”. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana tahun 2024 dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **104,57** dengan predikat **“Istimewa”;** dan

9. Penyerapan anggaran Inspektorat Utama tahun 2024 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 25.927.672.899** atau 93,62% (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan Rp 25.908.284.126 atau 93,55% (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu Rp27.693.231.000 dengan *Automatic Adjustment* sebesar Rp999.793.000 dan efisiensi Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp816.301.000.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja tahun 2024, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;
2. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020 sampai dengan 2024 dan indikator kinerja yang telah mencapai target;
3. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
4. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
5. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

HIGHLIGHT KINERJA
INSPEKTORAT UTAMA

Selama tahun 2024, Inspektorat Utama telah melakukan pengawasan internal dengan dukungan pagu anggaran sebesar **Rp27.693.231.000** dengan *Automatic Adjustment* sebesar **Rp999.793.000** dan efisiensi Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar **Rp816.301.000**.

93,62%

RP 27.693.231.000



Belanja Pegawai

100%
Rp 8.191.733.182



Belanja Barang

90,67%
Rp 17.159.261.211



Belanja Modal

100%
Rp 571.998.506

MATURITAS SPIP TAHUN 2024
4,094

MANAJEMEN RISIKO BPOM TAHUN 2024
4,283

IEPK TAHUN 2024
4,000

NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
104,57
ISTIMEWA

NILAI RB BPOM 2024
96,24

NILAI SAKIP ITTAMA 2024
81,58$_A$

SPI TAHUN 2024
83,98

KAPABILITAS APIP TAHUN 2024
3,77

TELAAH SEJAWAT EKSTERN TAHUN 2024
3,77

NILAI KINERJA ANGGARAN TAHUN 2024
98,75

TL REKOM BPK (Semester I 2024)
96,15%



37* Unit WBK
5 diantaranya WBBM
Sampai Tahun 2024

10 KALI
OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
berturut -turut

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1.3 STRUKTUR ORGANISASI
1.4 ISU STRATEGIS

BAB - I

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2024 merujuk kepada Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2024.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

INSPEKTORAT UTAMA

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

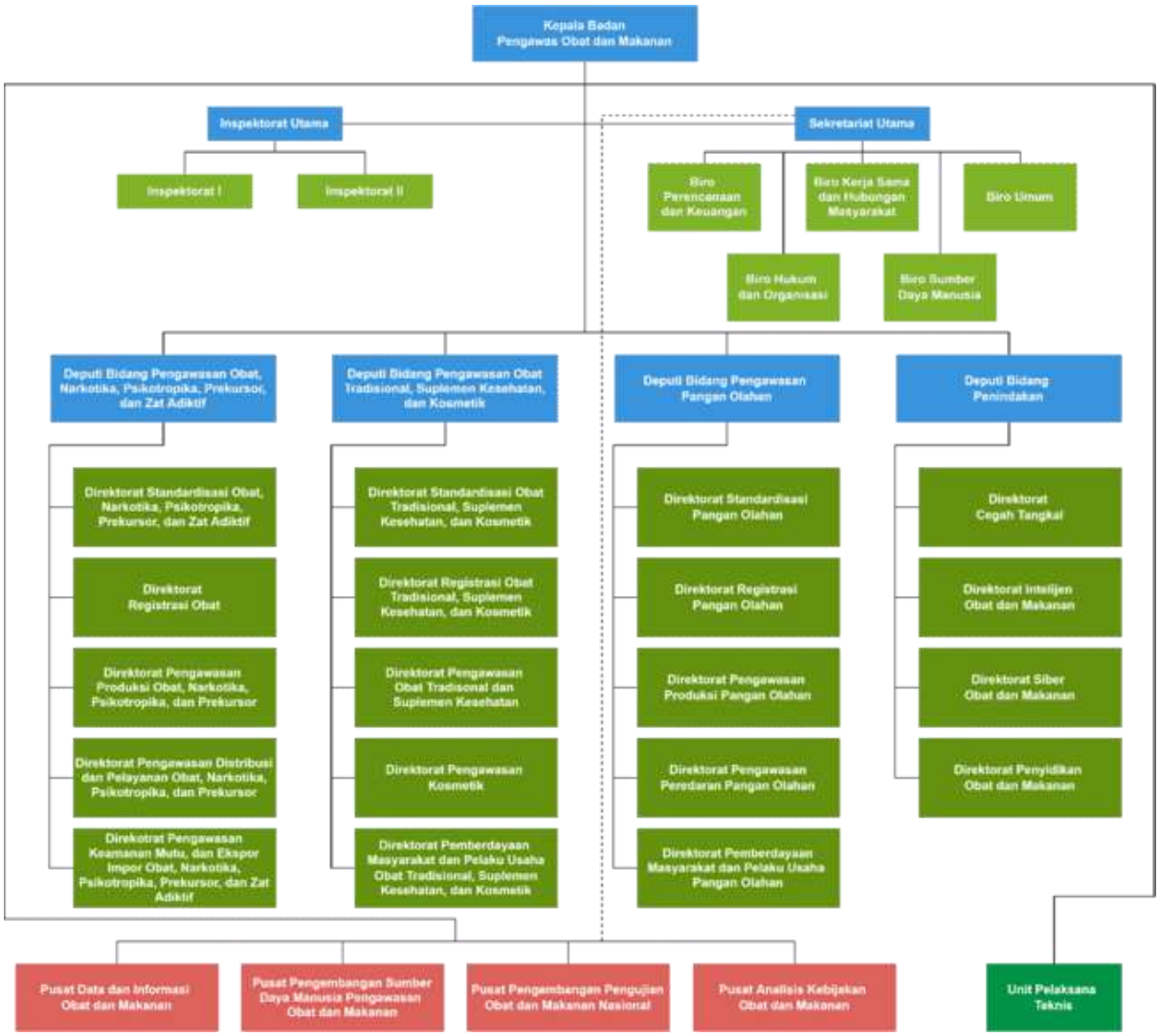
1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat

INSPEKTORAT UTAMA

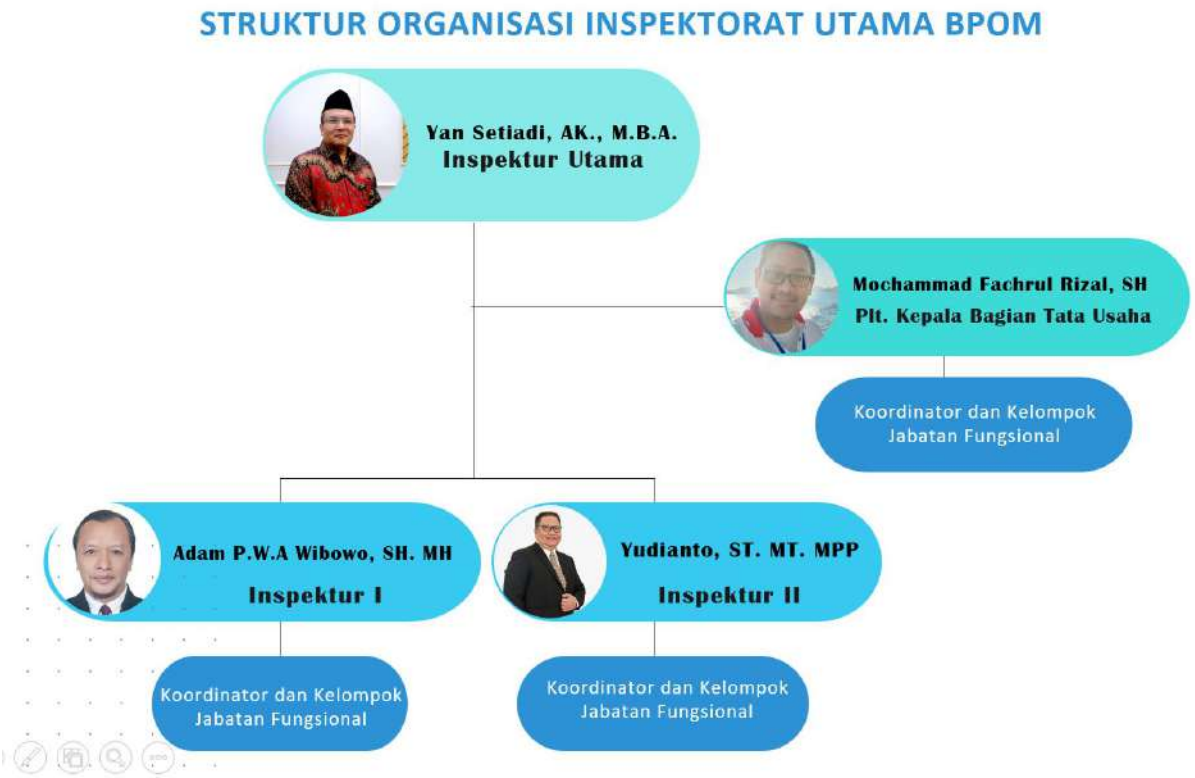
Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

INSPEKTORAT UTAMA

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai

pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, APIP diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan masukan sebagai saran yang solutif kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Mengingat pentingnya reposisi peran APIP sebagai QA dan *trusted advisor*, maka fokus pelaksanaan tugas APIP adalah pendampingan dalam seluruh fungsi manajemen organisasi, dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.

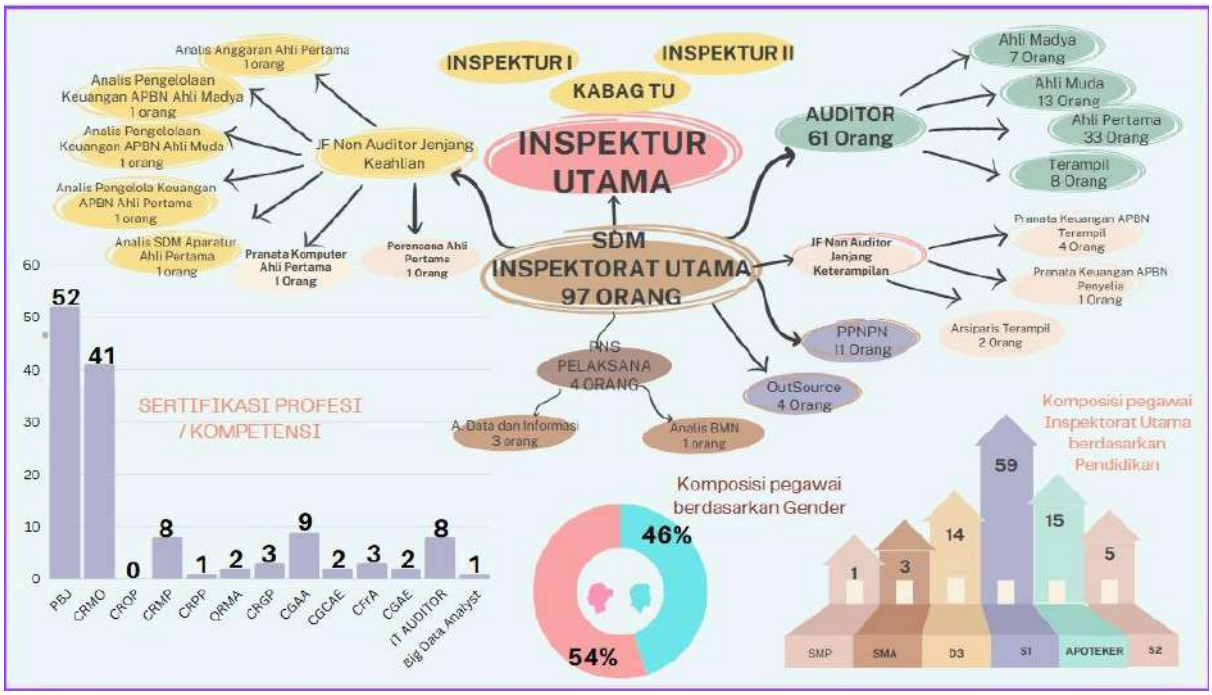
Internal

1) SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Utama Badan POM per 31 Desember 2024 berjumlah 97 (Sembilan Puluh Tujuh) pegawai yang terdiri dari 82 (delapan puluh dua) Aparatur Sipil Negara (ASN), 11 (sembilan) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan 4 (empat) pagawai *Outsource*. Adapun rincian sebanyak 82 ASN, yaitu: 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Plt. Kepala Bagian Tata Usaha, 61 (enam puluh satu) Auditor, 4 (empat) Pranata Keuangan APBN Terampil, 1 (satu) Pranata Keuangan APBN Penyelia, 2 (dua) Arsiparis Terampil, 1 (satu) Analis BMN, 3 (tiga) Analis Data dan Informasi, 1 (satu) Perencana Ahli Pertama, 1 (satu) Pranata Komputer Ahli Pertama, 1 (satu) Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama, 1 (satu) Analis

Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya, 1 (satu) Analis Anggaran Ahli Pertama, 11 (sebelas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan 4 (empat) Tenaga *Outsource*.

Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pengawasan internal, seperti CRMO, CRMP, CFrA, CSEP, CGAA, PBJ dan sertifikat lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama per Triwulan IV tahun 2024

2) JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;

b. Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatori dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain-lain.

BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan sebagai berikut:

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
1	Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu	2	2
2	Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis	6	11
3	Auditor Ahli Muda/Ketua Tim	18	33
4	Anggota Tim		
	a. Auditor Ahli Pertama	54	66
	b. Auditor Penyelia	-	11
	c. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	11
	d. Auditor Pelaksana	-	11
JUMLAH		**80**	**145**

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 31 Desember 2024 adalah sebesar **43,45%** sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan	ABK 31 Desember 2024 (orang)	Existing (orang)	*Gap* (orang)	% pemenuhan Exis/abk*100
Auditor Ahli Utama	2	0	2	0
Auditor Ahli Madya	11	7	4	63,64
Auditor Ahli Muda	33	13	20	39,39

INSPEKTORAT UTAMA

Jabatan	ABK 31 Desember 2024 (orang)	Existing (orang)	*Gap* (orang)	% pemenuhan Exis/abk*100
Auditor Ahli Pertama	66	33	33	50,00
Auditor Penyelia	11	0	11	0
Auditor Mahir	11	0	11	0
Auditor Terampil	11	8	3	72,73
PNS yang diproyeksikan menjadi Auditor	-	2	(2)	-
Auditor yang diberhentikan karena tubel	-	-	-	-
Total	**145**	**63**	**82**	**43,45**

Adapun pemenuhan ABK Pegawai Inspektorat Utama untuk seluruh jabatan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per per 31 Desember 2024

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	*Existing* Desember 2024 (orang)	*Gap* (orang)	Keterangan
Inspektorat I	74	34	40	• *Bezzeting* termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) • ABK dan Bezzeting pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama
Inspektorat II	74	35	39	
Bagian Tata Usaha	34	12	22	
Jumlah	**182**	**81**	**101**	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 31 Desember 2024 adalah sebesar 45,85%**. Untuk mengisi gap ini, Inspektorat Utama merekrut tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 11 (sebelas) orang untuk pekerjaan yang bersifat administrasi.

3) SARANA DAN PRASARANA

Per 31 Desember 2024 Inspektorat Utama masih menempati Gedung Garuda Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama, Ruang Rapat Inspektur Utama dan Tata Usaha. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II dan Auditor, menempati Gedung Mozaik lantai 2.

Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2019 s.d.Triwulan IV tahun 2024

NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aset Tetap							
1.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2.	Sepeda Motor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3.	Lemari Penyimpan	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
4.	Mesin Penghitung Uang	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit
5.	Lemari Besi/Metal	19 unit	19 unit	27 unit	27 unit	19 unit	24 unit
6.	Lemari Kayu	23 unit	47 unit	44 unit	44 unit	44 unit	62 unit
7.	Brandkas	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
8.	Buffet	--	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
9.	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	--	--
10.	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
11.	Alat Penghancur Kertas	4 unit	7 unit	7 unit	8 unit	9 unit	9 unit
12.	Laser Pointer	--	--	--	--	1 unit	1 unit
13.	LCD Projector/Infocus	6 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
14.	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
15.	Meja Kerja Kayu	36 unit	33 unit	30 unit	67 unit	63 unit	68 unit
16.	Kursi Besi/Metal	106 unit	85 unit	84 unit	84 unit	84 unit	133 unit
17.	Kursi Kayu	--	6 unit	6 unit	6 unit	--	--

INSPEKTORAT UTAMA

NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18.	Sice	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
19.	Meja Rapat	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	1 unit	1 unit
20.	Meja Makan Kayu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
21.	Kasur/ Spring Bed	--	--	--	--	--	1 unit
22.	Workstation	2 unit	6 unit	6 unit	5 unit	5 unit	10 unit
23.	Air Cleaner	--	--	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
24.	Lemari Es	2 unit	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit
25.	Kompor Listrik	--	--	--	--	1 unit	1 unit
26.	Teko Listrik	--	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	--
27.	Rice Cooker (Alat Dapur)	--	--	--	--	--	1 unit
28.	Oven Listrik	--	1 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
29.	Blender	--	--	--	--	1 unit	1 unit
30.	Televisi	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	4 unit
31.	Dispenser	--	8 unit	8 unit	8 unit	16 unit	17 unit
32.	Coffee Maker	--	--	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
33.	Karpet	--	--	--	--	--	3 unit
34.	Lampu Belajar	--	--	--	--	--	1 unit
35.	Audio Mixing Console	--	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
36.	Microphone/ Wireless MIC	--	--	--	--	2 unit	2 unit
37.	Voice Recorder	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	10 unit	10 unit
38.	Video Mixer	--	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
39.	Tripod Camera	--	--	--	--	--	1 unit
40.	Camera Digital	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
41.	Camera Conference	--	1 unit	1 unit	3 unit	5 unit	5 unit
42.	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
43.	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
44.	Kursi Zeis	50 unit	30 unit	14 unit	14 unit	14 unit	--
45.	Lightweight Concrete Test Hammer	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
46.	Microwave Oven	--	--	--	--	--	--
47.	Screen Pembatas	--	--	--	--	19 unit	19 unit
48.	P.C Unit	30 unit	37 unit	38 unit	45 unit	42 unit	35 unit
49.	Notebook	60 unit	94 unit	94 unit	105 unit	109 unit	101 unit
50.	Tablet PC	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
51.	Speaker Komputer	--	--	--	--	1 unit	1 unit
52.	Monitor	--	--	--	--	1 unit	1 unit
53.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30 unit	40 unit	44 unit	48 unit	48 unit	37 unit
54.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	2 unit	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit
55.	Server	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
56.	Tempat Tidur Kayu	--	--	--	--	--	1 unit
Aset Tetap Lainnya							
57.	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	--
58.	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	--

4) ANGGARAN

Inspektorat Utama pada Tahun 2024 memiliki pagu sebesar Rp 27.693.231.000,- Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp 25.908.284.126 (93,55%). Untuk lebih detailnya di Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran bagian Realisasi Anggaran.

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 (per Kegiatan)

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 19.857.121.000	Rp 18.544.620.677	93,39%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 7.836.110.000	Rp 7.363.663.449	93,97%
TOTAL		**Rp 27.693.231.000**	**Rp 25.908.284.126**	**93,55%**

*Berdasarkan data OMSPAN per 31 Desember 2024

Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi, Satuan Kerja:

1) Sekretariat Utama;
2) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekusor, dan Zat Adiktif;
3) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
4) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
5) Deputi Bidang Penindakan;
6) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
7) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
8) Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan; dan
9) 42 Balai Besar/Balai POM dan 34 Loka POM di seluruh Indonesia.

1.4.3 Isu Strategis Inspektorat Utama

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

INSPEKTORAT UTAMA

Inspektorat Utama sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

1.4.3.1 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Inspektorat Utama selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi quality assurance dan consultancy SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 diketahui bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah pada Level 3, nilai SPIP Badan POM mengalami kenaikan seiring dengan integrasi antara manajemen risiko dan SPIP didukung dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.02.02.1.7.07.20.267 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/Pemda, pada tahun 2022 Inspektorat Utama selaku Koordinator Penjaminan Kualitas SPIPT telah menyampaikan hasil Penjaminan Kualitas kepada tim Penilaian Mandiri SPIPT.

1.4.3.2 Kapabilitas APIP

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, maka kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang baik sehinga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Untuk dapat menjalankan tugas pengawasan yang berkualitas, APIP harus memenuhi komponen dan aspek penilaian berupa Dukungan Pengawasan berupa Kebijakan, Aktivitas Pengawasan (Implementasi kebijakan), dan Kualitas

Pengawasan (Hasil). Penilaian kapabilitas APIP di Indonesia diperlukan sebagai proses pembinaan APIP sesuai PP nomor 60 Tahun 2008, dan dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

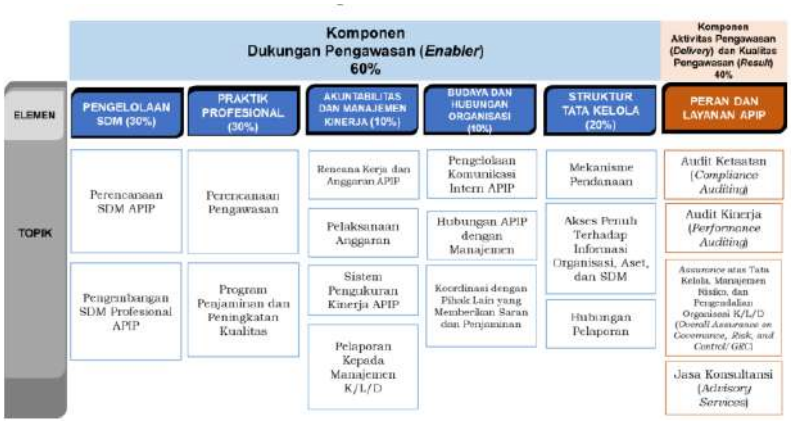
Penilaian kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level kapabilitas APIP.

Kerangka kerja (*Framework*) penilaian terdiri dari:

1. Komponen Penilaian Kapabilitas APIP, terdiri dari:
   a. Komponen dukungan pengawasan (*Enabler*) terdiri dari 5 Elemen, yaitu:
      1) Pengelolaan Sumbner Daya Manusia (SDM)
      2) Praktik Profesional
      3) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
      4) Budaya dan Hubungan Organisasi
      5) Struktur Tata Kelola
   b. Komponen aktivitas pengawasan (*Delivery*)

      Komponen aktivitas pengawasan diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan stakeholders lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.
   c. Komponen kualitas pengawasan (*Result*), ditunjukkan dengan kualitas pengawasan intern yang dapat:
      1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas (3E).
      2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.
      3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola organisasi.
2. Pembobotan Komponen Penilaian Kapabilitas APIP

   Secara keseluruhan, komponen dukungan dan aktivitas pengawasan dalam penilaian kapabilitas APIP dijabarkan ke dalam 6 Elemen dan 18 Topik sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar di bawah. Komponen dukungan pengawasan mendapatkan bobot penilaian sebesar 60%, sedangkan aktivitas dan kualitas pengawasan mendapatkan bobot penilaian sebesar 40%.



Gambar 4 Komponen Penilaian Kapabilitas APIP

Hasil penilaian kapabilitas APIP, akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d Level 5 dengan karakterisitik sebagai berikut:

1. Level 1 (*Initial*): Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan.
2. Level 2 (*Structured*): APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai.
3. Level 3 (*Delivered*): APIp telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata Kelola.
4. Level 4 (*Institutionalized*): APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
5. Level 5 (*Optimized*): APIP memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Tahun 2023, Kapabilitas APIP Inspektorat Utama BPOM telah berada pada level **3 (*Delivery*)** dengan nilai **3,53** mengalami peningkatan dari hasil evaluasi Tahun 2018 dengan nilai 3,00.

1.4.3.3 Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peratutan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

1.4.3.4 Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dasar pembangunan zona integritas adalah pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dengan menandatangani dokumen fakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut atas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

Pembangunan ZI seluruh Unit Kerja, meningkatkan pendampingan dan intervensi terhadap Unit Kerja yang belum mendapatkan predikat WBK/WBBM, meningkatkan sinergitas dan perkuatan implementasi RB dan pembangunan ZI di lingkungan BPOM, dan memperkuat koordinasi dan proaktif melakukan konsultasi kepada Tim Kementerian PANRB.

Berdasarkan Surat Dinas Kepala Badan POM, Badan POM mengajukan 9 (sembilan) Unit Kerja yang diusulkan berpredikat Menuju WBK pada tahun 2023 kepada

Kementerian PANRB. Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PANRB, Badan POM berhasil mendapatkan predikat WBK pada 3 (tiga) Unit Kerja, yaitu BBPOM di Manado, BBPOM di Aceh, dan Balai POM di Kupang.

1.4.3.5 Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

SPBE memegang peranan penting dalam transformasi Reformasi Birokrasi era baru atau yang lebih dikenal dengan RB Tematik. Digitalisasi pemerintahan menjadi elemen untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak. Selain itu, SPBE juga menjadi penekanan dalam upaya pencegahan korupsi. Inspektorat Utama memiliki peran untuk melakukan Audit SPBE sebagai pemenuhan parameter 29, 30, dan 31. Akan tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas, Inspektorat Utama memegang

peranan dalam pengendalian intern utamanya yang mendukung peningkatan implementasi SPBE di tingkat instansi.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



2.1 RENCANA STRATEGIS
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024
1.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2024
2.5 METODE PENGUKURAN

BAB 02

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari pimpinan sampai pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BPOM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat Utama sebagai berikut:

> ***" Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong "***

Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi BPOM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama selaku unit pengawas internal harus menjadi mitra kerja bagi satuan kerja yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama juga berupaya menjadi *agent of change* dalam organisasi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga sesuatu yang masih

terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Utama. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, kapabel dan patuh terhadap peraturan untuk memberikan pelayanan publik yang prima**
2	**Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah kinerja, mengawal perubahan, dan menjaga budaya organisasi Badan POM**

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode

Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah: (1) Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal diukur dengan indikator Indeks Integritas Organisasi dan Survei integritas jabatan dengan kategori A; dan (2) Terwujudnya keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan sumber daya Badan POM telah sesuai dengan peraturan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta meningkatkan kinerja Badan POM, diukur dengan indikator Survei eksternal persepsi korupsi.

Pada tahun 2024, Inspektorat Utama melakukan reviu terhadap indikator tujuan rencana strategis pada Keputusan Inspektur Utama BPOM NO HK.02.02.7.08.24.19 Tahun 2024 tentang Reviu Manual Indikator Tujuan Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024. Seiring perkembangan kebijakan yang berjalan sampai dengan tahun 2024, terdapat beberapa penyesuaian yang harus dilakukan pada indikator tujuan karena terdapat beberapa indikator yang sudah tidak relevan lagi untuk diukur pada tahun 2024. Dengan adanya reviu terhadap 3 (tiga) indikator tujuan, dapat disimpulkan bahwa 2 indikator sudah tidak relevan yakni Indikator ”Indeks Integritas Organisasi” dan ”Survei Integritas Jabatan dengan Kategori A” yang dilakukan penyesuaian dengan indikator ”Nilai Survei Penilaian Integritas” dimana nilai SPI tersebut menjadi indikator kinerja utama pada perjanjian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024. selanjutnya, untuk indikator ”Survei Pengendalian Efektivitas Korupsi” terdapat penyesuaian nomenklatur berdasarkan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021. Dengan tidak relevannya 2 indikator di atas, maka dilakukan penyesuaian indikator tujuan yang memuat GRC yakni dengan bobot nilai SPIP (20%), IEPK (20%), MRI (30%), dan SAKIP (30%). Secara ringkas penyesuaian indikator tujuan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6 Penyesuaian Indikator Tujuan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Tujuan	Indikator	Target 2024	Indikator	Target 2024
Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal;	Indeks integritas organisasi	3,68	Indeks pengelolaan Tata Kelola (Governance), Manajemen Risiko (Risk),dan Pengendalian Intern (Control) yang handal di Badan POM	3,98
	Survei integritas jabatan dengan kategori A	75%		
Terwujudnya keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan sumber daya Badan POM telah sesuai dengan peraturan, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan kinerja Badan POM	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,68		

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

2.1.4 Sasaran

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran program ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan

strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian sasaran program Inspektorat Utama sebagai berikut:



Gambar 5 Sasaran Program Inspektorat Utama 2020-2024

Pencapaian sasaran diukur menggunakan indikator-indikator yang disusun secara ***Spesifik***, ***Measurable*** (dapat diukur), ***Achievable*** (dapat dicapai), ***Relevant***, dan ***Time-Bound*** (terdapat batasan waktu untuk mencapainya). Indikator sasaran dan definisi operasional indikator Inspektorat Utama sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 7 Sasaran, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
1	Stakeholder	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Pembangunan zona integritas diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar Kategori proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar Kategori proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK-WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam mekanisme Pembangunan zona integritas, Untuk dinilai mampu mendapat predikat WBK/WBBM, instansi pemerintah terlebih dahulu perlu memastikan terlaksananya pembangunan Zona Integritas dengan baik. Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian instansi dan unit kerja sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara internal dan pengusulan kepada TPN. Tahap Pembangunan zona integritas adalah pencanangan zona integritas, penetapan zona integritas, Pembangunan unit kerja, pemantauan Pembangunan zona integritas.	Jumlah seluruh unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM (secara kumulatif) / Jumlah seluruh unit/satuan kerja BPOM yang melakukan pelayanan publik yang telah melakukan Pembangunan Zona Integritas
			Nilai Survei Penilaian Integritas	Survei Penilaian Integritas merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan instansi. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing instansi serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. SPI hadir untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber yakni pegawai di lembaga tersebut(internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga(eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut. Adapun penilaian SPI meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas,pengelolaan pengadaan	Berdasarkan dari hasil penilaian survei penilaian integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
				barang dan jasa (PBJ), pengelolaan Sumber Daya Manuisa (SDM), trading in influence (intervensi eksternal untuk pemberianizin/rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi.	
			Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Inspektorat Utama bertangungjawab untuk mengawal keberhasilan pencapaian target Nilai Evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan POM. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.	Berdasarkan dari hasil penilaian evaluasi SAKIP pada BPOM pada komponen Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
			Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemeritah Terintegrasi. Sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sesuai pasal 3 peraturan dimaksud mekanisme penilaian SPIP-T secara internal terdiri dari penilaian mandiri oleh manajemen lembaga dan penilaian penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Lembaga dan selanjutnya penilaian dari tim BPKP. Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM menyampaikan pernyataan telah dilakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lembaga. Selanjutnya evaluator dari BPKP melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM.	Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2		Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.	(Total Pagu BPOM - Total Kesalahan Material dari wilayah Pengawasan Inspektorat I dan Inspektorat II) / Pagu BPOM x100%

INSPEKTORAT UTAMA

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
3		Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.	Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti tuntas/total jumlah rekomendasi x100%
4		Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama. Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah Service Quality (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang dberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness (RATER) sebagai berikut: 1. Wujud Fisik (Tangible); Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern. 2. Keandalan (Reliability); Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja. 3. Kesigapan (Responsiveness); Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu. 4. Jaminan (Assurance); Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern. 5. Empati (Empathy); Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.	Survei dilaksanakan 1 tahun sekali pada mitra kerja: a. Responden dari semula kepala unit kerja menjadi ASN yang telah berinteraksi atau memanfaatkan layanan yang diberikan Inspektorat utama; b. Fokus pertanyaan dari semula berfokus pada pelayanan audit menjadi berfokus pada pelayanan pengawasan intern yang terdiri dari audit, review, evaluasi, analisis dan pengawasan lainnya; c. Jawaban skala likert 1 sd 4; dan Menggunakan pertanyaan kepuasan atas layanan yang telah diberikan dan harapan yang diinginkan responden; d. Diperoleh nilai indeks kepuasan mitra pengawasan intern (Trusted Advisor)

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
5	Internal Process	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku. Tools survei kemanfaatan kebijakan Inspektorat Utama mengadopsi Indeks Kualitas Kebijakan (Checklist Toolkit) yang merupakan Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan pada Instansi Pemerintah yang diterbitkan Pusat Pembinaan Analis Kebjakan Lembaga Administrasi Negara 2016. Dalam rangka mengukur tingkat kemanfaatan kebijakan, maka kami melakukan Survei Kemanfaatan Kebijakan yang disadur dari skema penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan menggunakan aspek utama yaitu Penilaian Agenda Setting, Penilaian Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan. Namun karena yang dinilai adalah kebermanfaatan kebijakan dimana yang dilihat adalah proses implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap dampak kebijakan, maka aspek yang utama dinilai adalah aspek evaluasi kebijakan. Checklist toolkit disadur menjadi bentuk survei dengan skala likert.	Nilai rata-rata persepri mitra pengawasan intern/skala 4 x100%
6		Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultansi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik). Secara tepat, leitch (2008) menegaskan “Work can be divided between the core job and controls done to improve results in the face of uncertainity”. Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reviu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai. Standar mutu yaitu sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan tepat waktu	Jumlah laporan pengawasan intern sesuai standar mutu/jumlah laporan pengawasan intern x 100%

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
7		Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia : Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditi. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi. Manfaat audit intern tidak hanya terletak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektifitas tindak lanjut rekomendasi tersebut. Rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian auditi dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya. Apabila auditi telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, auditor harus menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut. Auditor tidak harus memaksakan rekomendasinya ditindaklanjuti namun harus dapat menerima langkah lain yang ternyata lebih efektif. Pada saat pelaksanaan kegiatan audit intern, auditor harus memeriksa tindak lanjut atas rekomendasi audit intern sebelumnya. Apabila terdapat rekomendasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang belum ditindaklanjuti, auditor harus memperoleh penjelasan yang cukup mengenai sebab rekomendasi belum dilaksanakan, dan selanjutnya auditor wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dalam program kerja penugasan yang akan disusun. Demikian pula terhadap tindak lanjut yang sudah dilaksanakan harus pula menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja penugasan. Auditor harus menilai pengaruh simpulan, fakta, dan rekomendasi yang tidak atau belum ditindaklanjuti terhadap simpulan atau pendapat atas audit intern yang sedang dilaksanakan	Jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi pengawasan intern x100%

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
			Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kategori dan Tepat Waktu	Pengaduan adalah proses atau tindakan mengungkapkan keluhan, masalah, atau ketidakpuasan terhadap suatu hal kepada pihak yang berwenang atau yang dapat melakukan tindakan perbaikan. Pengaduan dapat berkaitan dengan layanan publik, produk, perilaku tidak etis, pelanggaran hukum, atau masalah lainnya yang mempengaruhi organisasi. Dalam hal ini pengaduan yang dimaksud adalah pengaduan masyarakat dan whistleblowing system. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan eksternal yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidaksesuaian penyelenggara pelayanan dan / atau dugaan penyimpangan dan penyalahggunaan wewenang, serta permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan. Whistleblowing system adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Badan POM. Tindak lanjut penanganan pengaduan menjadi penting untuk menegaskan bahwa Inspektorat Utama berperan aktif untuk mewujdukan budaya pelayanan publik yang prima dan mewujudkan organisasi Badan POM yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan fraud.	(Jumlah Pengaduan Masyarakat+ Jumlah WBS) yang telah ditindaklanjuti/ (jumlah pengaduan masyarakat + Jumlah WBS) Note: a. Telah ditindaklanjuti (close) adalah tindak lanjut Inspektorat Utama atas pengaduan masyarakat yang dilaporkan kepada Pimpinan Badan POM; b. Kategori tindak lanjut Inspektorat Utama tertuang pada laporan, telaah, hasil kajian dan lain-lain yang memuat informasi pengaduan tersebut terbukti; tidak terbukti atau tidak dilanjutkan karena kurang barang bukti / identitas pelapor tidak jelas; c. Periode pelaporan pengaduan adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan desember tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja Oktober tahun berjalan (Desember Y-1 sampai dengan Oktober Y); dan d. Jangka waktu penanganan pengaduan masyarakat/WBS harus dapat diselesaikan pada 90 hari kerja, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

INSPEKTORAT UTAMA

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
			Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Peran Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Inspektorat Utama diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. Inspektorat Utama merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government). Dalam ruang lingkup kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama, nilai tambah (added value) akan dihasilkan jika rekomendasi hasil pengawasan dimanfaatkan pimpinan dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan. Pengawasan intern akan menjadi sia-sia tanpa adanya tindakan perbaikan, sehingga mengakibatkan tujuan dari pengawasan intern itu sendiri tidak tercapai. Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola kepemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses kepemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum. Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsutasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai trusted adviser yang membantu permalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.	(Jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI yang dijawab dalam waktu 5 hari kerja/jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI) x100%
8	Learning and Growth	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Satuan Kerja / Unit Kerja Badan POM. Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama menggambarkan capaian kinerja implementasi Reformasi Birokrasi di ingkungan Badan POM	Rata-Rata Akumulasi nilai ZI Unit Inspektorat I dan Inspektorat II (Nilai Inspektorat I + Nilai Inspektorat II)/2
9		Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan sistem penerapan manajemen kinerja Inspektorat Utama yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.	Penilaian evaluasi Kinerja SAKIP dari Tim evaluasi SAKIP BPOM

INSPEKTORAT UTAMA

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
10		Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).	Nilai berdasarkan dari hasil penilaian kapabilitas APIP dari tim BPKP
		Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan: A. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan); B. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan; C. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis); D. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen; E. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/Anggaran.	Formula perhitungan secara rinci dijelaskan dalam self assessment/tools pengawasan kearsipan Nilai berdasarkan dari hasil penilaian penilaian pengelolaan kearsipan oleh Biro Umum
		Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.	Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). Nilai indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama dinilai dari seluruh pegawai ASN Inspektorat Utama termasuk Bagian Tata Usaha, Inspektorat I dan Inspektorat II Perolehan nilai didapat dari Biro Sumber Daya Manusia dan aplikasi SIASN

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
		Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup: 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan dalam sistem BOC a. data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. b. dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan d. tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. e. terdapat data dan informasi dalam sistem boc yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. f. data yang tersedia di BOC diupdate setiap bulan oleh Pusat Data dan Informasi. 2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM Sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup email dan dashboard BOC. a. Email • Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja/bidang/bagian/subdit maupun individu • Akun email yang aktif adalah dilihat dari traffic pengiriman dan penerimaan email b. Dashboard BOC Komponen ini untuk menghitung keaktifan akun pimpinan untuk login dan mengakses dashboard BOC • Jumlah akun login dihitung dalam 1 (satu) bulan (minimal 2 kali dalam seminggu) • Jumlah akun login dan mengakses dashboard dilihat dari aktifitas akses dashboard	Rata-rata dari indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat I dan Inspektorat II • Email (25%) $\frac{\text{Jumlah akun email unit dan individu yang aktif}}{\text{Jumlah total akun email unit dan individu}} \times 100\%$ Pembobotan: - Aspek login 30% - Aspek pemanfaatan Individu 30% - Aspek pemanfaatan Unit 40% Kriteria: - Tidak dimanfaatkan : <30% ; Nilai = 0 - Kurang dimanfaatkan : 30% - 69% ; Nilai = 1 - Dimanfaatkan : 70% - 85% ; Nilai = 2 - Sangat dimanfaatkan : 86% - 100% ; Nilai =3 • Pemanfaatan Dashbord BOC (25%) Pembobotan: - Aspek login 40% - Aspek pemanfaatan Unit 60% Kriteria: - Tidak dimanfaatkan : <55% ; Nilai = 0 - Kurang dimanfaatkan : 55% - 69% ; Nilai = 1 - Dimanfaatkan : 70% - 85% ; Nilai = 2 - Sangat dimanfaatkan : 86% - 100% ; Nilai =3 • Verifikasi Dashboard BOC (50%) $\frac{\text{(Σ) indeks dashboard yang diverifikasi}}{\text{(Σ) indeks seluruh dashboard yang dimiliki}} \times 100\%$ Kriteria: - Tidak dimanfaatkan : 0 ; Nilai = 0 - Kurang dimanfaatkan : <70% ; Nilai = 1 - Dimanfaatkan : 70% - 89% ; Nilai = 2 - Sangat dimanfaatkan : 90% - 100% ; Nilai =3

INSPEKTORAT UTAMA

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
		Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Inspektorat Utama yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).	NKA = (Nilai EKAx50%) + (Nilai IKPAx50%) A. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Indikator pembentuk Nilai Evaluasi Anggaran sebagai berikut: 1) Efektivitas (75) dengan rincian: a. Capaian indikator kinerja program (IKP) dengan bobot 30; b. Agregasi capaian RO Satker dengan bobot 45; 2) Efisiensi (25) dengan rincian: a. Penggunaan SBK dengan bobot 10 b. Efisiensi SBK dengan bobot 15 B. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA): (1) Revisi DIPA (10%); (2) Deviasi Hal III DIPA(10%); (3) Penyerapan Anggaran (20%); (4) Belanja kontraktual (10%); (5) Penyelesaian Tagihan (10%); (6) Pengelolaan UP dan TUP (10%); (7) Dispensasi SPM (5%); (8) Capaian Output (25%);
			Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Sehingga terdapat Surat Sekretaris Utama No B-KP.09.01.24.01.24.40 hal Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian. Nilai pengelolan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 indikator: a. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya b. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa c. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) d. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE e. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE	Total Nilai dari Persentase RUP (20%) + Persentase Penerapan E-Tendering (20%)+Persentase E-Purchasing (20%)+Persentase Non Tendering dan Non e-Purchasing (20%)+Persentase e-Kontrak (20%).

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
			Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	PengelolaanBMN terdiridariberbagaiaspek, yaituPerencanaan Kebutuhandan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanandan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; sertaPembinaan, Pengawasandan Pengendalian. Aspekyang dipergunakanuntukkuantitasiadalahPenatausahaan, Penggunaan, Penghapusandan Pemusnahan.	Penjumlahannilaidarimasing-masing aspekpenilaian: PersentasePenetapanStatus Penggunaan(PSP) (20%), PersentasePenghapusan(20%), PersentasePemusnahan(20%), Penatausahaanyang Baik(30%), KetepatanwaktupenyampaianRKBMN (10%)
			Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan : 1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan. 2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah : - Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%). - Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%). - Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%.

Sasaran, indikator serta definisi operasional telah ditetapkan pada Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.02.02.7.12.23.19 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.07.22.29 Tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.12.21.33 Tentang Manual Indikator Utama Inspektorat Utama Tahun 2020-2024.

2.1.5 Strategi

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

1) Pengawalan program dan kegiatan dengan prinsip “lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli”;
2) Peningkatan efektifitas dan fungsi *Three Lines Model* yang saat ini sedang dikembangkan melalui pemberdayaan satuan tugas (satgas) SPIP, satgas Laporan Keuangan, tim *Management Representative* dan Auditor Internal Manajemen Mutu secara bersinergi;

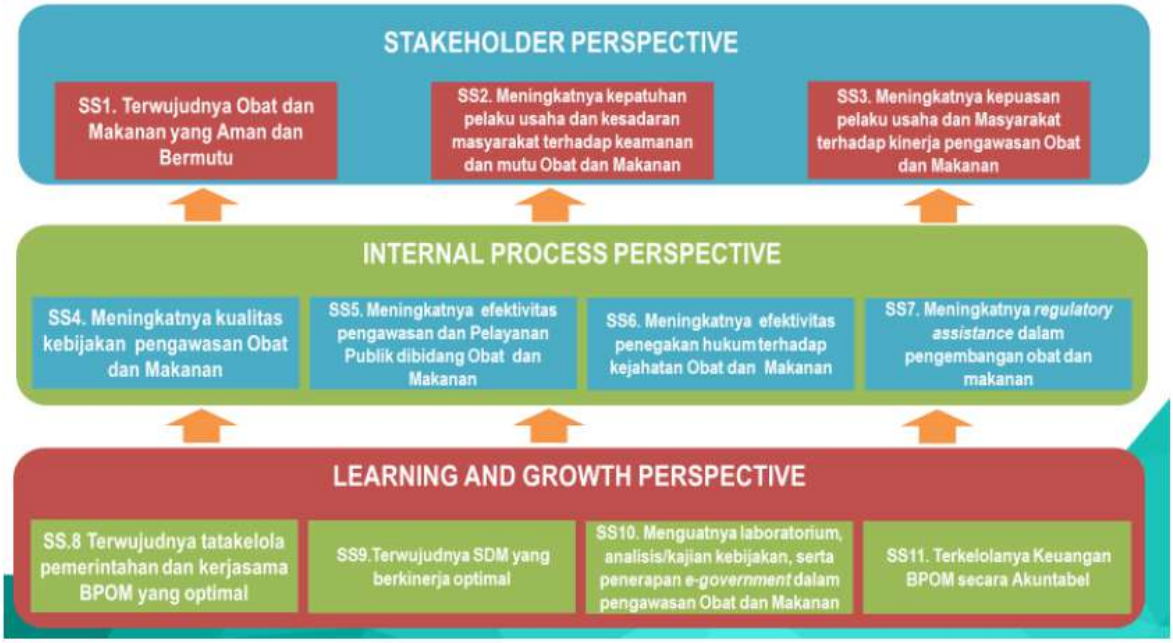
3) Peningkatan Kapasitas kelembagaan pada skema *Internal Audit Capability Model* (IA-CM)
4) Sinergi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dengan Sistem Manajemen Risiko;
5) Meningkatkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern;
6) Mewujudkan Sistem Kendali Pimpinan untuk Kinerja dan Integritas Aparatur melalui:
   a. Automasi pelaksanaan pengawasan intern;
   b. Membangun *Data Event* sebagai *Knowledge Library*;
7) Pemenuhan standar audit dan Piagam Pengawasan Intern;
8) Pengawalan peningkatan mutu pelayanan publik;
9) Membangun pengendalian atas korupsi (*Fraud Control Plan*/FCP)
10) Membangun dan mengimplementasikan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan; dan
11) Meningkatkan *awareness* pelaporan gratifikasi.

2.1.6 Program

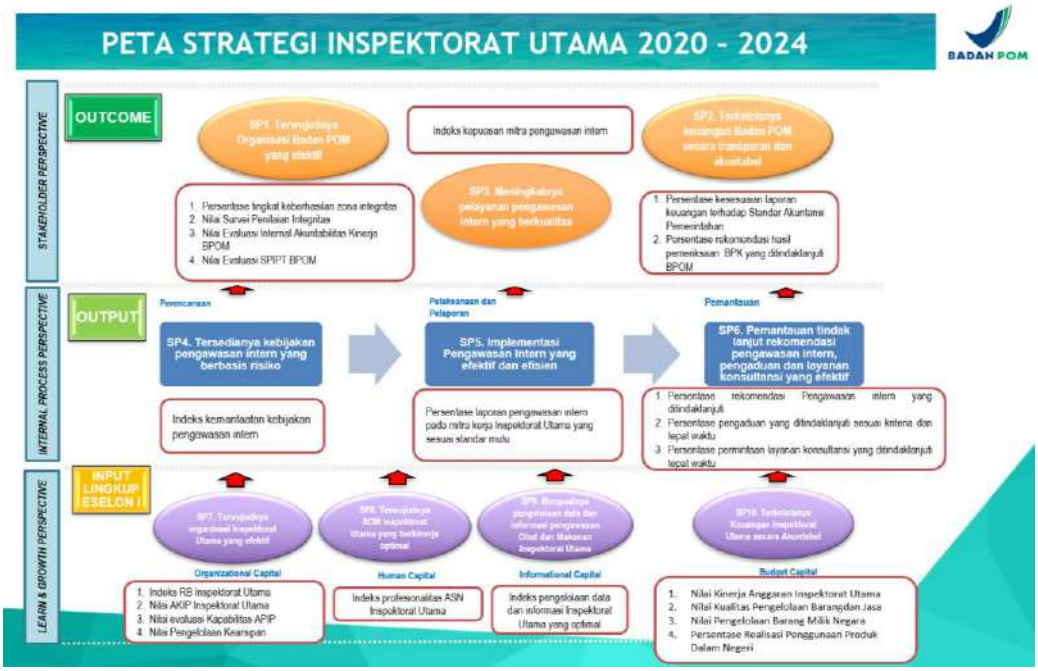
Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan strategi dan program tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional, antara lain:

1) Pelaksanaan pengawasan intern;
2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
3) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan BPOM;
4) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko;
5) Implementasi *Quality Management System*; dan
6) Pengelolaan *Human Capital Management* (HCM)

Program, Sasaran Program, dan Indikator Inspektorat Utama merupakan hasil *cascading* dari strategi di tingkat BPOM. Metode yang diadopsi dalam penjabarannya yaitu *balance score card* (BSC), di mana peta strategi Inspektorat Utama merupakan turunan dari peta strategi BPOM. Peta Strategi BPOM dan Peta Strategi Inspektorat Utama sebagaimana bagan berikut.



Gambar 6 Peta Strategi level 0 BPOM Tahun 2020-2024



Gambar 7 Peta Strategi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2024

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2024. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

Inspektorat Utama memiliki pagu awal tahun 2024 sebesar Rp 32.161.297.000,-, pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.01.2.21.01.24.10 tentang Revisi Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 , Inspektorat melakukan Automatic Adjustment sebesar Rp 999.793.000,-. Kemudian pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor T-KU.02.03.2.21.05.24.390 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Pilot Project Pembayaran Tunjangan Kinerja Terpusat Badan POM TA 2024, Inspektorat Utama melakukan revisi pergeseran anggaran antar-satker sebesar Rp 4.468.066.000,-, sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2024 menjadi Rp 27.693.231.000,-. Inspektorat Utama melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp 816.301.000 berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor PR.05.03.2.11.24.34 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Badan POM TA 2024, serta Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Tanggal 7 November 2024 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan POM pada Tahun 2024, Inspektorat Utama memiliki pagu anggaran sebesar Rp 27.693.231.000,- untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu: (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat I dengan alokasi anggaran Rp 19.857.121.000,-. Alokasi anggaran ini diikuti dengan 4 (empat) Layanan yang mengikat yakni:
   A. Layanan Perkantoran untuk belanja MAK 51 dan belanja mengikat sejumlah Rp 10.573.932.000,- dengan target 1 layanan;
   B. Layanan Sarana Internal sejumlah Rp 250.000.000,- dengan target 54 Unit;
   C. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sejumlah Rp 322.000.000,- dengan target 11 unit; dan

D. Layanan Audit Internal sejumlah Rp 8.711.189.000,- dengan target 33 laporan.

2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat II dengan alokasi anggaran Rp 7.836.110.000,-. Alokasi anggaran ini diikuti dengan 1 (satu) Layanan yang mengikat yakni: Layanan Audit Internal sejumlah Rp 7.836.110.000,- dengan target 33 laporan.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Setelah DIPA Inspektorat Utama Tahun 2024 disahkan, Inspektorat Utama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2024 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2024 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2024 yang telah disahkan. Untuk melihat lebih detail Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKSP 1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30%
		IKSP 2	Nilai Survei Penilaian Integritas	83,48
		IKSP 3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75
		IKSP 4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,85
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKSP 5	Persentase kesesuaian Laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%
		IKSP 6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	94%
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSP 7	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama	86
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	IKSP 8	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,3

INSPEKTORAT UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 9	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu	100%
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, Pengaduan dan layanan konsultansi yang efektif	IKSP 10	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96%
		IKSP 11	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu	100%
		IKSP 12	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,57%
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKSP 13	Indeks RB Inspektorat Utama	86,7
		IKSP 14	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,35
		IKSP 15	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,6
		IKSP 16	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,65
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKSP 17	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92,48
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Inspektorat Utama	IKSP 18	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKSP 19	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	93,74
		IKSP 20	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	82,17
		IKSP 21	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	95
		IKSP 22	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60%

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2024

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2024 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Tabel 9 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target	Target Bulan												Anggaran (Rp)
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
SP1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	3.153.058.000
		IKU2	Nilai Survei Penilaian Integritas	83,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,48	426.610.000
		IKU3	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	20,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,75	63.156.000
		IKU4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85	511.242.000
SP2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKU5	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,01%	1.303.881.000
		IKU6	Persentase rekomendasi hasil	94%	-	-	-	-	-	-	94%	94%	94%	94%	94%	94%	1.961.001.000

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target	Target Bulan												Anggaran (Rp)
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM														
SP3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKU7	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	462.982.000
SP4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	IKU8	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,3	152.510.000
SP5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKU9	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.895.392.000
SP6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKU10	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96%	93%	93%	93%	94%	94%	94%	95%	95%	95%	96%	96%	96%	259.440.000
		IKU11	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu	100%	-	-	40%	45%	50%	60%	65%	70%	80%	85%	90%	100%	570.016.000
		IKU12	Persentase permintaan layanan konsultansi yang	97,57%	93%	93%	93%	95%	95%	95%	96%	96%	96%	97%	97%	97,57%	9.686.667

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target	Target Bulan												Anggaran (Rp)
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			ditindaklanjuti tepat waktu														
SP7	Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKU13	Indeks reformasi birokrasi Inspektorat Utama	86,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,7	151.930.000
		IKU14	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,35	5.566.000
		IKU15	Nilai evaluasi Kapabilitas APIP	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	369.254.667
		IKU16	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,64	6.940.000
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKU17	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	89,67	-	-	58	71,15	71,15	77,39	77,39	77,39	82,93	82,93	82,93	92,48	1.381.330.000
SP9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU18	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	248.016.667
SP10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKU19	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	93,74	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,74	13.717.656.500
		IKU20	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	82,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,17	732.784.000

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target	Target Bulan												Anggaran (Rp)
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		IKU21	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	2.052.860.500
		IKU22	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	725.984.000

Sumber: Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024

Justifikasi penyesuaian target RAPK:

1. **Indikator ”Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama” Tahun 2024:**
   Inspektorat melakukan penyesuaian target pada indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN). Penyesuaian dilakukan karena realisasi di bulan Maret 2024 mencapai 135,5% sehingga diperlukannya reviu target kembali. Penyesuaian target pada indikator IP ASN, dilakukan menggunakan rata-rata IP ASN di setiap bulan selama dua tahun terakhir (Tahun 2022 dan 2023). Penyesuaian target ini dilakukan pada target bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-11. Untuk di bulan ke-12 atau akhir tahun, Inspektorat Utama menemukan bahwa target IP ASN Inspektorat Utama yang diberikan oleh Biro Sumber Daya Manusia memiliki nilai yang lebih rendah dari target Inspektorat I (91,25) dan Inspektorat II (94,84), serta realisasi IP ASN Inspektorat Utama pada tahun 2023 (92,37). Sehingga di bulan ke-12 atau akhir tahun, target IP ASN Inspektorat Utama Tahun 2024 semula **89,67** menjadi **92,48.**
2. **Indikator ”Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” Tahun 2024:**
   Penyesuaian target pada indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA), dilakukan sesuai dengan arahan pada surat Sekretariat Utama No BPR.07.2.21.05.24.382 dengan menghapus target pada bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-11 dan tidak mengubah target pada akhir tahun. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian perhitungan pada komponen IKPA dan EKA yang baru dapat dilakukan perhitungan secara menyeluruh di akhir tahun.

2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kinerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif/polarisasi *maximize*** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif**/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ \text{Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam Laporan Kinerja ini, Kategori pencapaian indikator kinerja dan Sasaran Program yang digunakan adalah:

Tabel 10 Kategori Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100 < x ≤ 120	
Baik	=100	
Cukup	70 ≤ x < 100	
Kurang	<70	

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:

$$NPSS = \Sigma NP / \Sigma P$$

Ket:
NP : Nilai Perspektif
P : Perspektif

Untuk Sasaran Program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran.

Contoh perhitungan NPSS:

Perspektif/SS	Nilai Perspektif/NSS
Stakeholder	**90**
SS1	90
Internal Process	**(100+90+85+90)/4 = 91,25**
SS 2	100
SS 3	90
SS 4	85
SS 5	90
Learning and Growth	**(75+80+60)/3 = 71,67**
SS 6	75
SS 7	80
SS 8	60
NPSS	**(90+91,25+71,67)/3 = 84,30**

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 11 Predikat Kinerja Organisasi

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
3.2 EVALUASI TAHUN KE-5
3.3 EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS
3.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI
3.5 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA
3.6 REALISASI ANGGARAN

BAB 03

INSPEKTORAT UTAMA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024, Inspektorat Utama telah menetapkan 10 (Sepuluh) Sasaran Program dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKSP). Pencapaian Sasaran Program dan IKSP Inspektorat Utama tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKSP Inspektorat Utama tahun 2024

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	NSP	Kategori
SP1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKSP1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30%	56,45%	120,00	106,64	Tidak dapat disimpulkan
		IKSP2	Nilai Survei Penilaian Integritas	83,48	83,98	100,60		Sangat Baik
		IKSP3	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75	20,69	99,71		Cukup
		IKSP4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,85	4,09	106,23		Sangat Baik
SP2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKSP5	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	99,98%	100,98	101,63	Sangat Baik
		IKSP6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	96,15%	102,29		Sangat Baik

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	NSP	Kategori
SP3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKSP7	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	86	88,25	102,62	102,62	Sangat Baik
Capaian Perspective Stakeholder							**103,63**	
SP4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKSP8	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	86,3	84,74	98,19	98,19	Cukup
SP5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKSP9	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100%	100,00%	100,00	100	Baik
SP6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKSP10	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	96%	90,75%	94,53	99,01	Cukup
		IKSP11	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	100%	100,00%	100,00		Baik
		IKSP12	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,57%	100,00%	102,49		Sangat Baik
Capaian Internal Process Perspective						**99,07**	**99,07**	
SP7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKSP13	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	86,7	86,39	99,64	100,84	Cukup
		IKSP14	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,35	81,58	96,72		Cukup

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	NSP	Kategori
		IKSP15	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,6	3,77	104,72		Sangat Baik
		IKSP16	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,65	98,84	102,27		Sangat Baik
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKSP17	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92,48	86,76	93,81	93,81	Cukup
SP9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKSP18	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	3	3,6	120,00	120,00	Sangat Baik
SP10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKSP19	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,74	98,75	105,34	112,23	Sangat Baik
		IKSP 20	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	82,17	100	120,00		Tidak dapat disimpulkan
		IKSP21	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	95	98,41	103,59		Sangat Baik
		IKSP22	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60%	97,22%	120,00		Tidak dapat disimpulkan
Capaian Learning & Growth Perspective							**111,02**	
NPSP TOTAL							**104,57**	

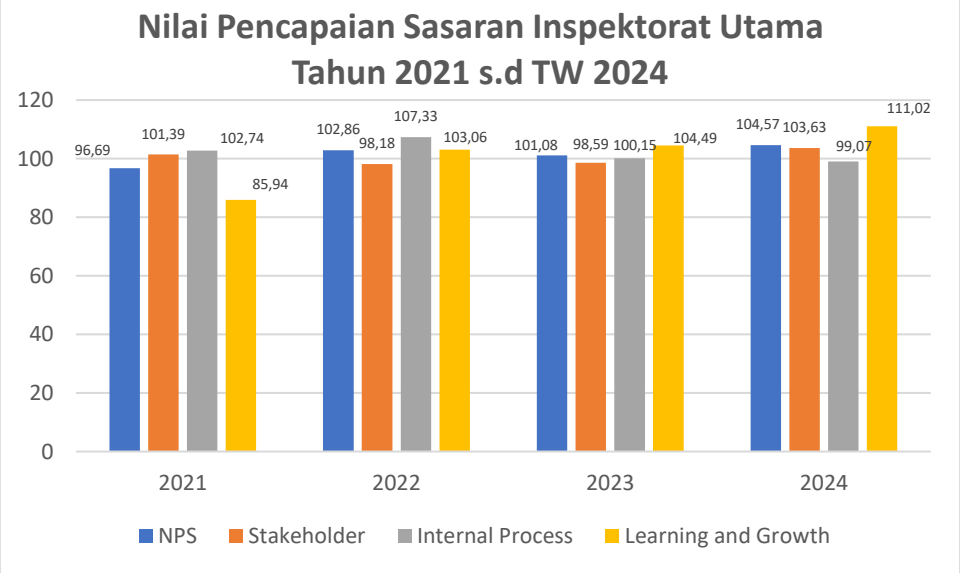
Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 22 (Dua puluh dua) IKU, terdapat 3 (tiga) IKU memperoleh kategori "Tidak dapat disimpulkan", 11 (sebelas) IKU memperoleh Kategori "Sangat Baik", 2 (dua) IKU memperoleh Kategori "Baik", Serta 6 (enam) IKU yang masih belum mencapai target dengan kategori "Cukup".

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **104,57** dengan Kategori **"Istimewa",** Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2 Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*

Perspektif	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran	NPS
Stakeholder	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	106,64	103,63
	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	101,63	
	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	102,62	
Internal Process	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	98,19	99,07
	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	100,00	
	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan layanan konsultansi yang Efektif	99,01	
Learning And Growth	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat utama	100,84	111,02
	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	93,81	
	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	120	
	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	112,23	
Nilai Pencapaian Sasaran			**104,57**

Tabel di atas menyajikan informasi Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*. Secara keseluruhan, Nilai Pencapaian Sasaran pada tahun 2024 sebesar **104,57** yang terdiri dari Nilai Perspektif *stakeholder* (103,63), *Internal Process* (99,07) dan Nilai Perspektif *Learning & Growth* (111,02). Jika dibandingkan dengan nilai pencapaian sasaran tahun 2023, Nilai Pencapaian Sasaran tahun 2024 memiliki *gap* sebesar 3,49 poin. Nilai pencapaian sasaran **tahun 2023** sebesar **101,08** yang terdiri dari Nilai Perspektif *stakeholder* (98,59), *Internal Process* (100,15) dan Nilai Perspektif *Learning & Growth* (104,49).



Gambar 1 Nilai Pencapaian Sasaran berdasarkan perspektif Inspektorat Utama Tahun 2021 s.d tahun 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tedapat peningkatan dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar 3,49 poin. Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama tahun 2024 secara detail akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Utama dapat merealisasikan target output yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja. Rincian realisasi ouput dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

3.1.1 Capaian Sasaran Program 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif

INSPEKTORAT UTAMA

Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, ruang lingkup penguatan sistem pengawasan, mencakup penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan, penanganan *Whistleblowing System*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas, dan APIP. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 Pencapaian sasaran program "Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif" diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas; (2) Nilai Survei Penilaian Integritas; (3) Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM; dan (4) Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3 Pencapaian Sasaran Program 1 Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2023	2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	-	30%	56,45%	188,17%	Tidak dapat disimpulkan
	Nilai Survei Penilaian Integritas	83,48	83,48	83,98	100,60%	Sangat Baik
	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,45	20,75	20,69	99,71%	Cukup
	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM	3,79	3,85	4,09	106,23%	Sangat Baik

IKSP.1 Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. ZI ditetapkan

pada unit kerja instansi pemerintah yang memenuhi syarat dan berkomitmen untuk membangun integritas nasional melalui reformasi birokrasi.

Tujuan Pembangunan Zona Integritas:

A. Mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
B. Membangun budaya kerja yang berintegritas, akuntabel, transparan, dan berkinerja tinggi;
C. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pembangunan ZI diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Zona Integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar Kategori proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar Kategori proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK-WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam mekanisme pembangunan ZI, untuk dinilai mampu mendapat predikat menuju WBK/WBBM, instansi pemerintah terlebih dahulu

perlu memastikan terlaksananya pembangunan Zona Integritas dengan baik. Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian instansi dan unit kerja sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara internal dan pengusulan kepada TPN. Tahap pembangunan ZI adalah pencanangan ZI, penetapan ZI, pembangunan unit kerja, pemantauan pembangunan ZI.

Tabel 4 Capaian IKU Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas tahun 2024

IKU	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas					
T/R	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Y**	**Keterangan**
Target	-	-	-	30%	30%	Berdasarkan jumlah akumulasi keberhasilan ZI (WBK/WBBM) di setiap wilayah pengawasan yang sudah melaksanakan pembangunan ZI: Inspektorat I: 15/30=50% Inspektorat II: 20/32=62,50% Inspektorat Utama: 35/62=56,45%
Realisasi	-	-	-	56,45%	56,45%	
Capaian	-	-	-	188,17 %	188,17%	

Tabel 5 Capaian IKU Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				2024				Target 2024 Akhir renstra	(%) Realisasi terhadap target 2024 (akhir renstra) & Kategori
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Indikator Baru				30%	56,45%	188,17%	Tidak dapat disimpulkan	30%	188,17% (Tercapai/Melampaui)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas tahun 2024 memperoleh realisasi dengan melebihi target dengan capaian >120% sehingga berada pada kategori **"Tidak dapat disimpulkan"**, dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra capaian indikator kinerja masuk pada kategori **"Tercapai/Melampaui".** Realisasi kinerja indikator ini diperoleh dari Jumlah seluruh unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM (secara kumulatif sampai dengan tahun 2024) dibandingkan dengan Jumlah seluruh unit/satuan kerja BPOM yang melakukan pelayanan publik yang telah melakukan Pembangunan Zona Integritas (35/62=56,45%).

Pada tahun 2024, Inspektorat Utama berhasil mengawal pembangunan ZI di BPOM dengan penganugerahan predikat menuju WBBM dari Kementerian PANRB sebanyak 3 unit pelaksana teknis yaitu Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Makassar, Balai POM di Gorontalo. Selain itu, di tahun 2024, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) BPOM mendapat kewenangan dari Kementerian PANRB untuk dapat melaksanakan evaluasi dan penetapan unit kerja bepredikat menuju WBK secara mandiri melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 318 tahun 2024 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi ZI menuju WBK tahun 2024 secara mandiri. Berdasarkan hasil evaluasi TPI, sebanyak 5 (lima) unit kerja memperoleh WBK yaitu Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Balai Besar POM di Palangka Raya, Balai POM di Pangkalpinang, Balai POM di Palu, dan Balai

POM di Kendari dari total 6 (enam) unit kerja yang dievaluasi WBK secara mandiri.

Di tahun 2024 indikator "Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas" merupakan indikator baru dan indikator pengganti dari indikator yang sebelumnya yakni Indikator "Nilai Reformasi Birokrasi Penguatan Pengawasan BPOM". Reformasi Birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja Presiden 2019-2024. Pada tahun 2023, terdapat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan dalam kebijakan evaluasi reformasi birokrasi menjadi reformasi birokrasi berdampak yang dalam penilaiannya terdiri dari reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik. Perubahan tersebut tidak menghitung 8 area secara spesifik seperti dalam Peraturan Menteri PANRB No 26 Tahun 2020. Penilaian pada bagian reformasi birokrasi general terdiri dari: a) capaian strategis; b) capaian pelaksanaan kebijakan RB;dan c) capaian strategi pelaksanaan RB general. Selanjutnya, untuk reformasi birokrasi tematik terdiri dari: a) *implementing agency*; dan b) Non-*implementing agency*.

Indikator ini **belum dapat dilakukan perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lainnya** karena belum ditemukan indikator yang serupa.

Keberhasilan Inspektorat Utama dalam mencapai target indikator ini adalah dengan melaksanakan kegiatan pendukung pembangunan ZI di lingkungan BPOM pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penyusunan Surat Edaran Kepala BPOM tentang PMPZI tahun 2024;
2. Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja;
3. Monitoring Pengisian LKE ZI;
4. Bimbingan Teknis/Intervensi Balai Besar/Balai POM;
5. Pendampingan pembangunan ZI pada Balai POM yang baru;

6. Penyusunan revisi Keputusan Kepala BPOM Nomor 163 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di lingkungan BPOM;
7. *Benchmark* pada Inspektorat VII Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan Evaluasi ZI menuju WBK secara mandiri;
8. Audiensi dengan Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB;
9. Penyamaan Persepsi Evaluasi dan Penetapan Unit Kerja menuju WBK Secara Mandiri di Lingkungan BPOM;
10. Pelaksanaan evaluasi ZI menuju WBK secara mandiri;
11. Pelaksanaan evaluasi ZI menuju WBBM;

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1.026.299.454 atau 100% dari pagu sebesar Rp 1.026.305.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	1.026.305.000	1.026.299.454	100%	188,17 %	88,17	1	-1,00	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan ZI di BPOM adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam mengkomunikasikan pedoman ZI Badan POM bagi seluruh unit kerja, pengoptimalan bimbingan teknis pada Balai Besar/Balai POM dan pelaksanaan desk evaluasi ZI pada unit kerja dan UPT melalui reviu dokumen.

Keberhasilan Inspektorat Utama dalam mencapai target pada indikator ini tentunya akan terus mempertahankan kegiatan-kegiatan

yang dilakukan pada tahun 2024 ke periode rencana strategis tahun 2025-2029. Indikator "Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas" pada periode rencana strategis tahun 2025-2029 dimasukkan langsung pada tingkat eselon II (Inspektorat I dan Inspektorat II) dan untuk di tingkat eselon I merupakan perhitungan gabungan dari nilai RB General BPOM yang berada pada lingkup koordinasi Inspektorat Utama. Sehingga sebagai **rencana tindak lanjut ke depannya**, Inspektorat Utama akan terus mempertahankan kegiatan-kegiatan seperti Sosialisasi Pedoman Zona Integritas di BPOM, pendampingan atau intervensi pemenuhan indikator WBK dan atau WBBM, pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan ZI, serta evaluasi ZI bagi seluruh unit kerja BPOM.

IKSP.2: Nilai Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan instansi. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing instansi serta berdasarkan hasil pemetaan empiris.

SPI hadir untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber yakni pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut. Adapun penilaian SPI meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan Sumber Daya Manuisa (SDM), *trading in influence* (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi.

Cara Perhitungan capaian indikator diperoleh dari Nilai SPI yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tabel 7 Capaian IKU Nilai Survei Penilaian Integritas tahun 2024

IKU	Persentase Nilai Survei Penilaian Integritas					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	83,48	83,48	

Realisasi	-	-	-	83,98	83,98	Berdasarkan Nilai Survei Penialaian Integritas Tahun 2024 hasil resmi KPK
Capaian	-	-	-	100,60%	100,60 %	

Tabel 8 Capaian IKU Nilai Survei Penilaian Integritas tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				2024				Target akhir periode renstra 2024	Realisasi terhadap target akhir periode renstra 2024 & Kategori
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Nilai Survei Penilaian Integritas	Indikator Baru di tahun 2024 Nilai SPI Tahun 2021: 86,91 Nilai SPI Tahun 2022: 84,04 Nilai SPI Tahun 2023: 83,48				83,48	83,98	100,60%	Sangat Baik	83,48	100,60% (Tercapai /Melampaui)

Dari tabel di atas, capaian indikator Nilai Survei Penilaian Integritas tahun 2024 adalah sebesar 100,60% dengan kategori **"Sangat Baik"** dan jika dibandingkan kepada target akhir tahun periode renstra maka masuk dalam kategori **"Tercapai/Melampaui". Realisasi kinerja ini berbeda dengan realisasi yang ada di Berita Acara Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun 2024**, karena realisasi kinerja baru diterima oleh Inspektorat Utama pada akhir Januari 2025 melalui launching nilai SPI 2024 oleh KPK . Realisasi kinerja di BA Eval TW IV 2024 adalah masih kosong/belum terisi.

Sebagai informasi, Reformasi Birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja Presiden 2019-2024. Di tahun 2023, terdapat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan dalam kebijakan evaluasi reformasi birokrasi menjadi reformasi birokrasi berdampak yang dalam penilaiannya terdiri dari reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik. Perubahan tersebut tidak menghitung 8 area secara

spesifik seperti dalam Peraturan Menteri PANRB No 26 Tahun 2020. Penilaian pada bagian reformasi birokrasi general terdiri dari: a) capaian strategis; b) capaian pelaksanaan kebijakan RB; dan c) capaian strategi pelaksanaan RB general. Selanjutnya, untuk reformasi birokrasi tematik terdiri dari: a) *implementing agency*; dan b) Non-*implementing agency*.

Di tahun 2024 indikator "Nilai Survei Penilaian Integritas" merupakan indikator baru dan indikator pengganti dari indikator yang sebelumnya yakni Indikator "Nilai Reformasi Birokrasi Penguatan Pengawasan BPOM". SPI BPOM dilakukan dengan cara KPK melakukan Survei penilaian integritas yang dilakukan kepada pegawai internal BPOM, survei penilaian kepada pengguna layanan, serta penilaian para ahli/stakeholder/eksper. Perolehan nilai 83,98 menunjukkan peningkatan sebesar 0,5 poin jika dibandingkan dengan nilai SPI di tahun 2023 yakni 83,48. Perolehan nilai 83,98 masuk pada kategori hijau atau **TERJAGA**. Hasil tersebut menempatkan BPOM pada urutan **ke-14** di antara kementerian/lembaga dan menjadi urutan **ke-4** untuk Cluster A, yaitu kementerian/lembaga yang memiliki peran strategis, cakupan nasional, serta pengaruh besar dalam tata kelola negara, yang dicirikan di antaranya dengan anggaran dan jumlah pegawai yang besar. Hasil SPI 2024 diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan KPK terhadap 641 instansi, yang terdiri dari 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, dan 2 badan usaha milik negara (BUMN). Penilaian SPI tahun 2024 sedikit berbeda dibandingkan survei yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir. Sebelumnya, penilaian SPI melibatkan pihak ketiga, sementara di tahun 2024 menjadi kali pertama penilaian SPI dengan melibatkan 41 perguruan tinggi nasional. Selain itu, penilaian juga melibatkan pihak lainnya, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta lembaga survei nasional.



Gambar 2. Perbandingan nilai SPI BPOM Tahun 2024 dengan Kementerian/Lembaga lain

Hal ini merupakan capaian yang membanggakan bagi BPOM dan tentunya merupakan potret komitmen nyata BPOM dalam menjaga nilai-nilai integritas. Nilai SPI BPOM merupakan salah satu RB General BPOM yang berada pada koordinasi Inspektorat Utama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mendukung **Keberhasilan** mencapai target indikator sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis aplikasi sang integritas;
2. Sosialisasi program anti korupsi;
3. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan;
4. Bimbingan teknis pelaksanaan SPI;
5. Audiensi kepada KPK mengenai Pencegahan korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan dan juga SPI;
6. Cafe Integritas;
7. Pengukuhan Pejabat Tinggi Madya sebagai pembina PAKSI dan API

Di tahun 2024, Inspektorat Utama memiliki program unggulan yang mewadahi sosialisasi program anti korupsi yaitu cafe integritas. Di tahun 2024, cafe integritas dilaksanakan sampai dengan seri 3. seri pertama dimulai dengan tema ”Mengukir Kejujuran dan Melestarikan Budaya Integritas”, selanjutnya di seri kedua dengan tema ”Cegah Kebocoran dan Bangun Keberlanjutan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Bermanfaat”

dan di series ketiga dibarengi dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) dengan tema “Penguatan Peran Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) di BPOM dalam Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”.



Gambar 8 Pengukuhan pembina dan Anggota PAKSI dan API



Gambar 9 Penyerahan Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Keuangan

Dalam proses pencapaian indikator Survei Penilaian Integritas terdapat **tantangan** yang dihadapi. Sesuai hasil SPI tahun 2023 oleh KPK, BPOM mendapat catatan terkait *respon rate* yang rendah terutama pada responden internal. Rendahnya *respon rate* oleh responden internal di

latar belakangi kurangnya *awareness* dan pemahaman pegawai mengenai pentingnya Survei Penilaian Integritas yang dilakukan oleh KPK setiap tahunnya. Selain itu terdapat kelemahan yang dimiliki Inspektorat Utama, yaitu Inspektorat Utama belum melakukan sosialisasi kepada eksternal terkait upaya pencegahan meliputi kebijakan, regulasi, SOP, serta alur penanganan apabila terjadi penyimpangan integritas.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 597.972.331 atau 100% dari pagu sebesar Rp 597.976.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 9 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Survei Penilaian Integritas Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Survei Penilaian Integritas	597.976.000	597.972.331	100,00	100,60	1,01	1	0,01	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi yang dilakukan pada indikator ini adalah dengan optimalisasi sosialisasi program anti korupsi secara *hybrid.*

Keberhasilan Inspektorat Utama dalam mencapai target pada indikator ini tentunya akan terus mempertahankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 ke periode rencana strategis tahun 2025-2029. Indikator “Nilai Survei Penilaian Integritas” pada periode rencana strategis tahun 2025-2029 dimasukkan langsung pada tingkat eselon II (Inspektorat I dan Inspektorat II) sementara untuk di tingkat eselon I merupakan perhitungan gabungan dari nilai RB General BPOM yang berada pada lingkup koordinasi Inspektorat Utama.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mendukung capaian indikator kinerja utama Nilai Survei Penilaian Integritas, antara lain:

a. Menindaklanjuti rekomendasi KPK atas hasil SPI BPOM tahun 2024 dengan menyusun RATL dan melaksanakannya;
b. Mengawal pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025;
c. Melaksanakan sosialisasi kepada eksternal terkait terkait kebijakan, regulasi, SOP, serta alur penanganan apabila terjadi penyimpangan integritas;
d. Perluasan bimbingan teknis pelaksanaan SPI dan aplikasi sang integritas; usul diubah menjadi Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan SPI dan aplikasi sang integritas secara berkelanjutan untuk memperkuat budaya integritas;
e. Workshop penguatan anti korupsi;
f. Public Campaign Anti Korupsi;

IKSP.3 Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*). Pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat 4 (empat) komponen dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 30); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25). Inspektorat Utama berperan utama dalam pencapaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Secara umum tujuan evaluasi internal akuntabilitas kinerja adalah untuk: (1) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (2) menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (4) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (5) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Cara perhitungan capaian indikator diperoleh dari Indeks internal akuntabilitas kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tabel 10 Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	7,77	8,35	8,08	8,18 atau 20,45	20,75	20,69	99,71	Cukup	20,75	99,71 (Akan Tercapai)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM tahun 2024 adalah 20,69 dari target 20,75 dengan capaian 99,71% yaitu kategori **Cukup**. **Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023** terdapat peningkatan nilai pada tahun 2024 sebesar 0,06 poin. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra adalah **Akan tercapai. Realisasi kinerja ini berbeda dengan realisasi yang ada di Berita Acara Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun 2024**, karena realisasi kinerja baru diterima oleh Inspektorat Utama pada awal februari 2025 melalui surat dari PANRB. Realisasi kinerja di BA Eval TW IV 2024 adalah masih kosong/belum terisi. Berdasarkan Renstra 2020-2024, selama 5 tahun periode Renstra target atas indikator nilai evaluasi internal akuntabilitas ini tidak tercapai setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan dalam rangka perbaikan kinerja belum memberikan hasil yang maksimal dan diperlukan analisis/reviu atas penetapan target indikator nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja pada periode Renstra 2025-2029 berdasarkan realisasi pada periode Renstra 2020-2024. Selain itu pada Renstra Inspektorat Utama 2025-2029, indikator kinerja nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja akan menjadi indikator pada level Eselon II yang akan mendukung indikator kinerja Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama bersama dengan indikator Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas, Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi BPOM, Nilai Survei

Penilaian Integritas BPOM dan Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM.

Indikator "Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM" **belum ditemukan indikator yang serupa dengan K/L lain** sehingga belum dapat dilakukan perbandingan Indikator Kinerja "Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM" dengan K/L lainnya.

Penyebab tidak tercapainya target di tahun 2024, berdasarkan Surat Dinas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No B/673/AA.05/2025 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan evaluasi internal di Lingkungan Badan POM yaitu monitoring dan evaluasi tindak lanjut evaluasi internal pada Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memanfaatkan aplikasi SAPA APIP, namun masih ditemukan sebagian kecil UPT yang belum memanfaatkan aplikasi tersebut dalam menindaklanjuti rekomendasi saran perbaikan dari tim APIP.

Upaya yang dilakukan dalam mendukung capaian indikator adalah dengan:

1. Melakukan pengembang aplikasi SAPA APIP dalam penyempurnaan modul SAKIP pada menu Lembar Kerja Evaluasi, Rekomendasi Hasil Evaluasi dan Monev TL Rekomendasi;
2. Penyampaian surat Inspektorat Utama No PI.04.7.08.24.515 terkait Permohonan Tindak Lanjut atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, dimana seluruh Satuan Kerja di lingkungan BPOM agar menyampaikan bukti tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2023 melalui SAPA APIP;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pada seluruh Satuan Kerja oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi SAPA APIP;
4. Penyusunan manual book penilaian mandiri atas implementasi SAKIP melalui aplikasi SAPA APIP;
5. Penyusunan dan penyampaian Surat Edaran Inspektur Utama Nomor PI.04.7.08.24.02 Tahun 2024 tentang Sub Kriteria Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang digunakan dalam penilaian mandiri oleh Satuan Kerja dan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Utama;

6. Penyampaian Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.04.7.09.24.555 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPOM Tahun 2024 dan Nomor B-PI.04.7.10.24.570 tentang Penyampaian Mekanisme Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM Tahun 2024 kepada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan BPOM;
7. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM Tahun 2024 dan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi oleh tim Inspektorat Utama;
8. Bersama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan Biro Sumber Daya Manusia melakukan revisi Pedoman Penyelenggaraan SAKIP agar dapat meningkatkan/mendorong perbaikan implementasi SAKIP.

Sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan/rencana tindak lanjut, sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi AKIP BPOM oleh Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Utama berkomitmen meningkatkan kualitas evaluasi internal untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP di masing-masing Satker/UPT dengan:

1. Mendorong seluruh Satuan Kerja untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Inspektorat Utama melalui aplikasi SAPA APIP;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dalam aplikasi SAPA APIP secara berkala;
3. Penyempurnaan aplikasi SAPA APIP modul Lembar Kerja Evaluasi, Rekomendasi Hasil Evaluasi dan Monev TL Rekomendasi.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp200.639.190,00 atau 100,00% dari pagu sebesar Rp200.642.000,00 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 11 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Triwulan III Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	200.642.000	200.639.190	100%	99,71%	0,997	1	-0,003	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dapat dilihat dengan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran. Untuk mendukung realisasi anggaran kegiatan yang mendukung capaian indikator ini adalah pelaksanaan Bimtek implementasi SAKIP di UPT, Desk Evaluasi AKIP di UPT, dan pelaksanaan Monev TL SAKIP di UPT sepanjang tahun 2024. Namun demikian, Inspektorat Utama juga mengupayakan efisiensi anggaran dengan dilakukannya kegiatan secara daring untuk Bimtek implementasi SAKIP, Monev TL SAKIP dan Desk Evaluasi AKIP. Meskipun telah dilakukan upaya-upaya tersebut belum dapat mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan dan belum dapat mendukung terciptanya efisiensi anggaran tahun 2024.

Sebagai informasi, di tahun 2022 telah dilakukan evaluasi SAKIP menggunakan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 dimana pada peraturan tersebut terdapat perubahan bobot pada nilai evaluasi internal, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target terhadap perubahan peraturan Menteri PAN dan RB RI No 88 Tahun 2021. Hal ini karena, target saat ini tidak relevan jika digunakan sampai pada akhir periode renstra tahun 2024. Di tahun 2024, penyesuaian target telah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 12 *P*enyesuaian Target Indikator Kinerja "Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM" Tahun 2024

Indikator	Target Semula	Menjadi	
		Indikator	Target
	2024		2024

Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,88	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75

Penyesuaian target di atas berdasarkan konversi bobot dari 10 menjadi 25.

IKSP.4 : Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM

Pemerintah mengamanatkan pelaksanaan pengendalian intern melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP adalah serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1).

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada K/L/Pemda, diperlukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP untuk memastikan pencapaian tujuan SPIP.

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur:

1. Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Manajemen Risiko Indeks
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
4. Kapabilitas APIP

Cara perhitungan capaian indikator adalah dari penilaian maturitas SPIP dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Untuk melihat capaian kinerja SPIP terintegrasi Triwulan IV tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3	3,639	3,732	3,79	3,85	4,09	106,23	Sangat Baik	3,85	106,23 (Tercapai/Melampaui)

No.	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,094
2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,286
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	4,000

Gambar 10 Hasil evaluasi SPIP-T BPOM Tahun 2024

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM tahun 2024 mencapai target dengan kategori **"Sangat Baik"**, jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra maka berada pada kategori **"Tercapai/Melampaui"**. **Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,** realisasi kinerja indikator ini menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya, dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka mengalami peningkatan sebesar 0,3 poin. **Realisasi kinerja ini berbeda dengan realisasi yang ada di Berita Acara Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun 2024**, karena realisasi baru diterima oleh Inspektorat Utama pada akhir januari 2025. Realisasi kinerja di BA Eval TW IV 2024 adalah masih kosong/belum terisi.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga negara lainnya, Nilai SPIP-T BPOM masuk ke dalam 2 besar tertinggi di lingkup kedeputian Politik, Hukum, Keamanan, PMK BPKP bersaing dengan Kementerian PANRB dan BPK (namun nilai belum diketahui). Selanjutnya

untuk kementerian/lembaga negara lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 13 Perbandingan Realisasi indikator "Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM" tahun 2024 dengan K/L Lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM	3,85	4,09[1]	106,23%
Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Level Maturitas SPIP KKP (Level)	3,1	3,56*[2]	114,84%
Informasi Lain				
Inspektorat Jenderal Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral	Nilai Maturitas SPIP Tahun 2023 3,440			

*Menggunakan nilai tahun 2023

Dari data di atas, diketahui realisasi SPIP-T BPOM mampu mencapai target 2024 dan merupakan realisasi kinerja paling tertinggi meskipun capaian kinerjanya terendah terhadap target jika dibanding capaian Kemeterian Kelautan dan Perikanan, Hal ini karena, target yang dimiliki oleh BPOM paling tinggi dibandingkan dengan kementerian di atas.

Nilai maturitas SPIP (4,094) menunjukkan bahwa telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 4 (Terkelola dan Terukur), Indeks Manajemen Risiko (4,286) atau telah memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada level 4, Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (4,000) atau telah memenuhi karakteristik Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada level 4. Meskipun realisasi sudah mencapai target namun masih ditemukan **kendala** terhadap penerapan SPIP BPOM yakni Manajemen Risiko belum dikaitkan dengan kinerja (maturitas manajemen risiko belum dijadikan indikator kinerja), pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

[1] Laporan BPKP No PE.09.03/SP-159/D2/03/2024 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2024

[2] Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

tidak optimal, kebijakan pengawasan PJAS belum memadai di daerah, dan pengawasan kosmetik belum optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menunjang Keberhasilan tercapainya target SPIP-T BPOM di tahun 2024 adalah:

a. Pengusulan manajemen risiko menjadi indikator strategis di BPOM melalui nota dinas Inspektur Utama No PI.06.07.7.06.24.125 hal Usulan Indikator Kinerja Nilai Maturitas Manajemen Risiko pada Renstra BPOM periode 2025-2029;
b. Pemenuhan data dukung penilaian Kapabilitas APIP dalam rangka Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Utama BPOM melalui peningkatan level kapabilitas APIP sebagai tindak lanjut evaluasi SPIP-T BPOM Tahun 2024;
c. Evaluasi penilaian mandiri SPIP-T;
d. Pemantauan tindak lanjut terhadap rencana aksi hasil evaluasi tentang Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Area of Improvement (AoI) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) BPOM Tahun ~~2023~~ 2024
e. Koordinasi dalam penyusunan *Area of Improvement* (AoI) dengan Biro Hukum dan Organisasi;
f. Perluasan bimbingan teknis manajemen risiko;
g. Reviu atas kebijakan manajemen risiko.

Keberhasilan Inspektorat Utama dalam mencapai target pada indikator ini tentunya akan terus mempertahankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 ke periode rencana strategis tahun 2025-2029. Indikator “Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM” pada periode rencana strategis tahun 2025-2029 dimasukkan langsung pada tingkat eselon II (Inspektorat I dan Inspektorat II) dan untuk di tingkat eselon I merupakan perhitungan gabungan dari nilai RB General BPOM yang berada pada lingkup koordinasi Inspektorat Utama. Sebagai informasi, di tahun 2022 Nilai indikator "Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM" menggunakan hasil penilaian BPKP berdasarkan laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP-T pada BPOM No PE.12.02/LHE-264/D203/1/2022 Menurut Tim Validasi dari BPKP, nilai SPIP

Terintegrasi Badan POM hasil validasi sudah cukup tinggi (3,732) jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, namun terdapat catatan yang dapat diimplementasikan pada penilaian selanjutnya.

Pada tahun 2023, telah dilakukan evaluasi paruh waktu renstra 2020-2024. Pada indikator kinerja Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM. **Melihat historis capaian tahun 2022 Jika dibandingkan dengan tahun 2021**, secara persentase capaian Level maturitas SPIP-T Badan POM menurun, hal tersebut karena di tahun 2022 target indikator naik menjadi level 4. Namun secara riil, capaian indikator Level maturitas SPIP-T Badan POM naik dari tahun lalu (nilai tahun 2021 adalah sebesar 3,639). Selanjutnya terkait adanya penyampaian hasil evaluasi dari BPKP yang mencantumkan "nilai" dilihat perlu bagi Inspektorat Utama untuk menyesuaikan nomenklatur dan target di tahun 2023 dan 2024 agar capaian kinerja Inspektorat Utama dapat terukur lebih jelas dan riil. Karena jika tidak dilakukan penyesuaian, hal ini berdampak pada penulisan pelaporan kinerja dimana capaian indikator tidak tercapai, sedangkan secara capaian kinerja Inspektorat terus menunjukkan peningkatan dalam pelaksanaan SPIP-T. Selain itu juga akan berdampak dalam penurunan evaluasi SAKIP Inspektorat Utama pada komponen "capaian kinerja". Inspektorat Utama juga melakukan koordinasi internal dan eksternal Bersama Biro Perencanaan dan Keuangam terkait penyesuaian, dan disepakati sebagai berikut:

Tabel 14 Penyesuaian nomenklatur dan target SPIP-T

Semula		Realisasi 2023	Menjadi	
Indikator	Target 2024		Indikator	Target 2024
Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM	4	3,79	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,85

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp723.216.261 atau 100% dari pagu sebesar Rp723.222.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 15 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	723.222.000	723.216.261	100,00	106,23	1,06	1	0,06	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. **Upaya efisiensi yang telah dilakukan antara lain dengan** melakukan rapat internal secara daring, pelaksanaan sosialisasi terkait pengelolaan manajemen risiko dan bimbingan teknis manajemen risiko secara *hybrid* dan hal tersebut telah mampu mendukung efisiensi anggaran kinerja yang telah diperjanjikan.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mendukung dalam nilai Maturitas SPIP Terintegrasi BPOM, antara lain:

1. Mempertahankan pembentukan unit percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPOM;
2. Melakukan penyusunan kebijakan penilaian maturitas manajemen risiko;
3. Pelaksanaan *desk* manajemen risiko;
4. Sosialisasi berkelanjutan terkait Manajemen Risiko secara berkelanjutan; dan

Selanjutnya untuk melihat capaian Target dan realisasi kinerja Sasaran Program 1 **"Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif"** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 15 Capaian Sasaran Program Terwujudnya organisasi Badan POM yang Efektif

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Indikator baru	30%	56,45%	188,17%	Tidak dapat disimpulkan
	Nilai Survei Penilaian Integritas	Indikator baru (Nilai SPI tahun 2023 83,48)	83,48	83,98	100,60%	Sangat Baik
	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,45	20,75	20,69	99,71%	Cukup
	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM	3,79	3,85	4,09	106,23%	Sangat Baik
	Capaian Sasaran Program				**106,64**	**Sangat Baik**

Sasaran Program 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif memiliki capaian sasaran program dengan **kategori sangat baikdi tahun 2024.** Jika dibandingkan dengan realisasi sasaran program 1 di tahun 2023 (94,01), realisasi di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 12,63 poin. Peningkatan disebabkan adanya peningkatan realisasi kinerja pada seluruh Indikator. Dalam sasaran strategis 1 **dilihat seluruh indikator masih relevan untuk dilanjutkan pada periode Renstra selanjutnya** meskipun dengan dibutuhkan penyesuaian pada definisi operasional masing-masing indikator untuk penyempurnaan.

3.1.2 Capaian Sasaran Program 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel

BPOM selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian, merupakan entitas pemerintah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu wujud pengelolaan APBN yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Inspektorat Utama dalam posisi sebagai *trusted advisor* memiliki peran strategis dalam menjamin laporan keuangan BPOM yang sesuai dengan SAP, baik itu laporan keuangan BPOM secara umum maupun laporan keuangan Satuan Kerja. Penjaminan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang pada prinsipnya diselenggarakan demi menunjang pencapaian tujuan yakni bebas dari kesalahan material pada pemeriksaan BPK, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pencapaian sasaran ini, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi; dan (2) persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 16 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2023	2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,97%	99,01%	99,98%	100,98%	Sangat Baik
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93,82%	94%	96,15%	102,29%	Sangat Baik

IKSP.5 Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sebelum perubahan SOTK, Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan material menjadi alat ukur pencapaian sasaran "Meningkatnya akuntabilitas BPOM" dengan indikator kinerja "Laporan Keuangan Badan POM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material". Parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah capaian opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI, dengan opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian 100% (kesalahan material < 1%). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Indikator “persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan” merupakan perubahan nomenklatur dari “persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi” yang tertuang pada Keputusan Inspektur Utama No. HK.02.02.7.73.06.22.22 tentang reviu rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 pada baseline 2021. Perubahan ini merupakan tindak lanjut terhadap masukan dari Biro Perencanaan dan keuangan. Pada nomenklatur “Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi” indikator tersebut merupakan salah satu indikator dengan pengukuran indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) tidak dapat diakomodir pada aplikasi monitoring dan evaluasi e-performance, sehingga disarankan untuk mengubah menjadi narasi dan pengukuran indikator positif.

Penyesuaian dilakukan agar dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dapat lebih mudah, jelas dan lebih relevan dengan sistem aplikasi monitoring evaluasi dari Biro Perencanaan dan Keuangan dengan capaian ukuran positif. Perubahan nomenklatur masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan arah kebijakan, strategi, kelembagaan dan regulasi Inspektorat Utama dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

Indikator Kinerja Utama persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan *cascading wide* dari IKU level 0 Badan POM. Opini WTP yang diraih oleh Badan POM telah diperoleh sejak pemeriksaan tahun 2015 s.d 2024 dan merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh BPK RI pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan instansi pemerintah yang juga menjadi target dalam RPJMN.

Dalam rangka mempertahankan opini WTP, Inspektorat Utama juga mendorong implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

INSPEKTORAT UTAMA

Pada tahun 2024, Inspektorat Utama telah melakukan pengawalan terhadap pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM TA 2023 melalui kegiatan:

a. Pelaksanaan asistensi pada UPT yang menjadi sasaran sampling BPK maupun yang berdasarkan profil risiko memerlukan adanya pendampingan terkait pengelolaan laporan keuangan, antara lain pada Balai POM di Kediri, Balai POM di Jember, Balai POM di Surakarta, Balai POM di Bengkulu, Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai Besar POM di Surabaya, Balai POM di Tangerang, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM Banda Aceh, Balai POM di Bogor, Balai Besar POM di Makassar, Balai POM di Payakumbuh, Loka POM di Kab. Aceh Tengah, Loka POM di Kab. Aceh Selatan, Balai POM di Ambon, Loka POM di Rejang Lebong, Loka POM di Banyumas, Loka POM di Baubau, Loka POM di Buleleng, Balai POM di Sofifi, Loka POM di Tanjung Balai;
b. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi serta pembahasan temuan pemeriksaan BPK pada satker pusat dan UPT yang menjadi sampling pemeriksaan BPK;
c. Pembahasan komentar instansi dan rencana aksi (*Action Plan*) atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) BPK.

INSPEKTORAT UTAMA



Gambar 2 Ilustrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2015 s.d. 2024

Tabel 18 Capaian IKU Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	0,06%	0,03%	99,93 %	99,97%	99,01%	99,98%	100,98	Sangat Baik	99,01%	100,98 (Tercapai /Melampaui)

Dari tabel di atas, **pencapaian indikator pada tahun 2024** memperoleh kategori **''Sangat Baik''**, dan jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra berada pada kategori **"Tercapai/Melampaui". Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,** realisasi kinerja di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin.

Dalam mendukung Pencapaian indikator kinerja ini perlu **Upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya target dengan realisasi kinerja di tahun 2024** adalah dengan:

1. Terus dilakukan intensifikasi koordinasi yang simultan dan terpadu dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK RI, terutama terkait Laporan Keuangan dan pelaksanaan reviu;
2. Perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti;
3. Melakukan reviu yang dilakukan atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini;
4. Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BPOM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja;
6. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan *Plan of Action* (PoA) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
7. Kontribusi Auditor dalam Forum Group Discussion (FGD) PIPK; dan
8. Pelaksanaan asistensi pengelolaan anggaran

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Tabel 17 Perbandingan dengan K/L lain Tahun 2024

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	99,98%	100,98%
Inspektorat Utama BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	96,67	102,22	105,74%
Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial	Persentase Batas Materialitas Temuan Pengawasan	2%	0.001%	102,04%
Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Batas tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP	<1%	0,12%*[3]	199%
Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase Materialitas Temuan Pengawasan Eksternal dari Total Realisasi Anggaran KemenDesa PDTT	≤3%	0,143%*[4]	195%
Informasi Tambahan				
Kementerian Kesehatan	Opini WTP 11 kali Berturut-turut[5]			
BPOM	Opini WTP 10 Kali Berturut-turut			
BKKBN	Opini WTP 6 Kali Berturut-turut[6]			

Dari data di atas, diketahui capaian kinerja indikator kinerja di **Inspektorat Jenderal** kementerian kelautan dan perikanan dan **Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi** jauh melebihi capaian Inspektorat Utama BPOM. Dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan memiliki opini WTP yang lebih banyak daripada BPOM yakni sebanyak 10 kali berturut-berturut. Pendekatan yang dilakukan dalam indikator ini didefinisikan berbeda oleh sejumlah Kementerian/Lembaga lainnya, bahkan pada banyak K/L tidak menjadi indikator kinerja. Sebagai perbandingan terdapat sekurang-kurangnya 2 Kementerian yang menggunakan pendekatan sejenis namun dengan rumusan yang sedikit berbeda yakni BPS dengan perspektif satuan/unit kerja yang memiliki penyimpangan kerugian

[3] Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023
[4] Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023
[5] Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Semester I Tahun 2024;
[6] https://nasional.kompas.com/read/2024/01/30/20585851/pertahankan-wtp-6-kali-berturut-turut-kepala-bkkbn-minta-jajarannya-kerja

negara maksimal 3% dari realisasi serta Kementerian Sosial dengan definisi batas materialitas. Hal yang dilakukan Kementerian Sosial merupakan konsep yang digunakan Inspektorat Utama BPOM sebelum dilakukan perubahan sebagaimana dijelaskan pada awal bagian ini. Namun meskipun demikian, capaian kinerja BPOM cukup baik untuk dapat bersanding dengan capaian kinerja di kementerian lain. Hal ini merupakan komitmen nyata BPOM dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp980.289.349 atau 100% dari pagu sebesar Rp980.295.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 18 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	980.295.000	980.289.349	100,00	100,98	1,01	1	0,01	Efisien

Dari tabel di atas, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, dimana capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran yang mendukung capaian kinerja ini adalah Asistensi Pengelolaan Keuangan BPOM pada UPT sesuai Profil Risiko, Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK, Pendampingan Pemeriksaan BPK dan Pertemuan Peningkatan Sistem Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan. **Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan adalah dengan** pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan reviu, dan melakukan pertemuan secara *hybrid* namun upaya tersebut belum efisien karena realisasi kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun.

Pada periode rencana strategis tahun 2025-2029, indikator ini tidak lanjutkan karena indikator ini tergambar pada OPINI WTP yang berada pada satuan kerja Sekretariat Utama. Meskipun tidak masuk pada indikator di periode renstra selanjutnya, **Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan capaian indikator kinerja utama Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan atau Opini WTP BPOM antara lain:**

1. Melakukan reviu yang dilakukan atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini;
2. Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BPOM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
3. Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja;
4. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan *Plan of Action* (PoA) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

IKSP.6 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

Capaian indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti oleh BPOM, yang dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan. Angka persentase ini diperoleh dari BPK RI dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester.

Tabel 20 Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93,47%	94,24%	93%	93,82%	94%	96,15%	102,29	Sangat Baik	94%	102,29 (Tercapai/Melampaui)

Pada tahun 2024 indikator "Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM" mencapai 102,29% atau masuk dalam kategori **"sangat baik". Jika dibandingkan target akhir periode renstra** maka masuk dalam kategori **"Tercapai/Melampaui".** Realisasi kinerja ini menggunakan data dari risalah pemeriksaan BPK sampai dengan Semester I Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023, terdapat peningkatan realisasi kinerja sebesar 2,33% di tahun 2024. Realisasi kinerja ini merupakan realisasi kinerja tertinggi di periode renstra 2020-2024.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga negara lainnya, Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 19 Perbandingan Realisasi indikator " Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM" tahun 2024 dengan K/L Lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	96,15%	102,29%
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	92%	95%*[7]	103,26%
Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	70%	76,56*%[8]	109%
Inspektorat Utama DPR	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	89%	90.61%	101,81
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan kementerian Pertanian	85%	100%	117,64
Inspektorat Utama BPS	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	80,18%	81,23%	101,31

*Menggunakan nilai tahun 2023

Dari data di atas, diketahui capaian kinerja indikator kinerja di Inspektorat Jenderal kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, Inspektorat Utama BPS melebihi capaian Inspektorat Utama BPOM. Namun meskipun demikian, realisasi kinerja BPOM cukup baik untuk dapat bersanding dengan capaian kinerja di kementerian lain. Untuk lembaga yang menggunakan angka langsung dari BPK RI, capaian Inspektorat Utama BPOM tidak cukup tinggi apabila dibandingkan dengan K/L lain yang berada di atas 101%. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa realisasi BPOM berada di atas 96% yang notabene masih jauh lebih tinggi dibandingkan Kementerian Sosial maupun Badan Pusat Statistik. Menurut Stevens et al. (2016) dalam publikasinya berjudul *Analysing indicators of performance, satisfaction, or safety using empirical logit transformation* kondisi ini disebut sebagai *ceiling effects* bahwa meningkatkan nilai dari 85% ke 95% cenderung lebih sulit dan lebih membutuhkan upaya serta sumber daya dibandingkan peningkatan

[7] Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2023;
[8] Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2023.

10% namun dari 55% ke 65%.Hal ini merupakan komitmen nyata BPOM dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mendukung pencapaian target indikator ini antara lain:

1. Melakukan pendampingan dalam pemeriksaan BPK pada Unit kerja;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam integrasi data pengawasan intern, melalui aplikasi berbasis web “SAPA APIP” sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan oleh auditee;
3. Meningkatkan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal terkait penyelesaian rekomendasi serta melakukan intensifikasi koordinasi dengan unit keja sebagai auditan terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Utama sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS);
4. Mengupayakan pemahaman bersama, antara lain melakukan kegiatan Lokakarya yang melibatkan unsur pimpinan untuk memperoleh direktif yang relevan dan memadai di level institusi;
5. Koordinasi langsung dengan level Pimpinan di tingkat Satuan Kerja terkait dengan temuan spesifik pada Satuan Kerja tersebut sehingga diperoleh komitmen yang tinggi untuk penyelesaiannya;
6. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait antara lain dengan BPK RI serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang daerah (KPKNL) setempat untuk tindak lanjut yang memerlukan bantuan dari pihak bersangkutan;
7. Penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek-aspek terkait pemeriksaan oleh BPK pada risiko yang harus dikelola baik pada level Instansi maupun pada Unit Kerja.

Selanjutnya, rencana tindak lanjut Inspektorat Utama dalam mempertahankan capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi

hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM pada rencana strategis periode selanjutnya antara lain:

1. Koordinasi lanjutan dengan tim BPK terkait hasil rekomendasi pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti per Tahun 2024
2. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja dengan Satuan Kerja terkait;
3. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas Komentar Instansi dan Rencana Aksi *(Action Plan)* atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP);
4. Pengawalan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja pada Badan POM; dan
5. Pelaksanaan kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM;
6. Pemantauan Rencana Aksi *(Action Plan)* dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp1.376.620.068 atau 100% dari pagu sebesar Rp1.376.628.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 21 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	1.376.628.000	1.376.620.068	100,00	102,29	1,02	1	0,02	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran mendukung pada terlaksananya kegiatan *focus group*

discussion (FGD) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), asistensi pada UPT yang menjadi sasaran sampling BPK, antara lain pada BBPOM di Makassar, Balai POM di Kediri, Balai POM di Jember, Balai POM di Surakarta, Balai Besar POM di Bengkulu, , Balai Besar POM di Yogyakarta, , Balai Besar POM di Surabaya, Balai POM di Tangerang, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM Banda Aceh, Balai POM di Bogor, Loka POM di Kab. Aceh Tengah, Loka POM di Kab. Aceh Selatan, Balai POM di Ambon, Loka POM di Rejang Lebong, Loka POM di Banyumas, Pendampingan Pemeriksaan BPK, Asistensi Pengelolaan Keuangan BPOM pada UPT sesuai Profil Risiko, Pertemuan Peningkatan Sistem Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan, serta Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK.

Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pertemuan dan acara secara *hybrid*, menggabungkan kegiatan lain bukan hanya aktivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK, namun juga dilakukan *sounding* tentang temuan-temuan audit yang perlu dicermati, dan diskusi seputar pengawasan intern lainnya.

Keberhasilan Inspektorat Utama dalam mencapai target pada indikator ini tentunya akan terus mempertahankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 ke periode rencana strategis tahun 2025-2029. Indikator "Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM" pada periode rencana strategis tahun 2025-2029 dimasukkan langsung pada tingkat eselon II (Inspektorat I dan Inspektorat II) dan untuk di tingkat eselon I merupakan perhitungan gabungan dari nilai RB General BPOM yang berada pada lingkup koordinasi Inspektorat Utama.

Selanjutnya untuk melihat capaian Target dan realisasi kinerja Sasaran Program 2 **"Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel"** dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 22 Capaian Sasaran Program Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023	2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,97%	99,01%	99,98%	100,98%	Sangat Baik
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93,82%	94%	96,15%	102,29%	Sangat Baik
	Capaian Sasaran Program				**101,63**	**Sangat Baik**

Sasaran Program 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel memperoleh capaian sebesar 101,63 atau Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 Jika dibandingkan dengan realisasi sasaran program 2 di tahun 2023 (100,39), realisasi sasaran program 2 di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,24 poin. Hal ini dikarenakan Adaya peningkatan capaian kinerja pada seluruh indikator.

3.1.3 Capaian Sasaran Program 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas

Pengawasan intern oleh auditor pada masa lalu dilakukan dengan paradigma *watchdog*, atau sebagai pemeriksa yang mencari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, auditor internal akan menyampaikan temuan, dan rekomendasi yang pada prakteknya tidak terlalu dibutuhkan oleh unit kerja. Perspektif pengawasan intern yang demikian menjadi tidak relevan dalam era persaingan organisasi dan risiko perubahan. Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa

dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah *shifting* dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance* and *consulting*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *trusted advisor*.

Pencapaian sasaran program "Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas" diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 23 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	87,08	86	88,25	102,62	Sangat Baik

IKSP.7 Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability, Assurance, Tangible, Empathy,* dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

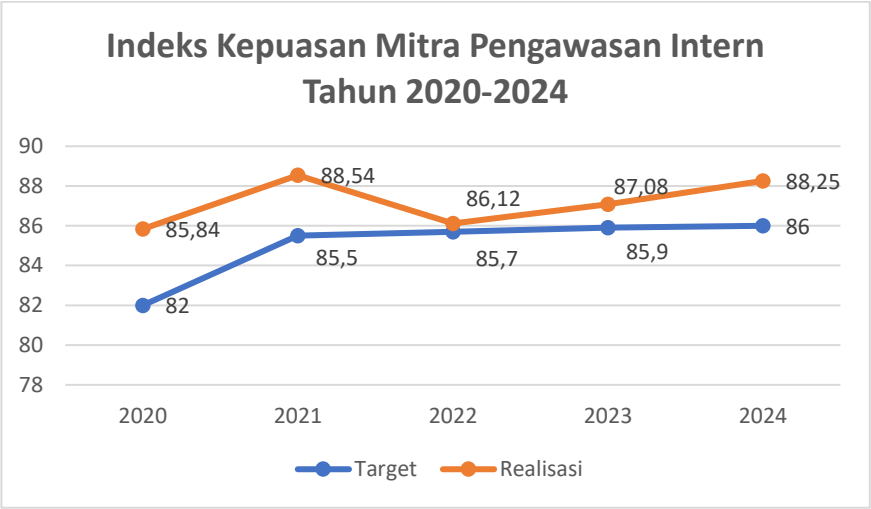
1. **Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
2. **Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.

3. **Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
4. **Empati (*Empathy*)**; Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.
5. **Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.

Tabel 24 Capaian IKU Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	85,84	88,54	86,12	87,08	86	88,25	102,62	Sangat Baik	86	102,62 (Tercapai/Melampaui)

Pada tahun 2024, indikator indeks kepuasan mitra pengawasan intern berhasil mencapai target dengan capaian 102,62% **"Sangat Baik".** Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi kinerja di tahuun 2024 **mengalami peningkatan sebesar 1,17 poin.** Dan jika dibandingkan dengan target akhir periode rencana strategis, sudah masuk dalam kriteria **"Tercapai/Melampaui"**. Realisasi kinerja indeks kepuasan mitra pengawasan intern selama tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuatif namun di tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Namun untuk realisasi kinerja di tahun 2024, masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2021.



Gambar 3 capaian indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga negara lainnya, Indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 20 Perbandingan Realisasi indikator "Indeks kepuasan mitra pengawasan intern" tahun 2024 dengan K/L Lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	86	88,25	102,62%
Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial	Nilai Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Inspektorat Jenderal	90%	93,95%*[9]	104%
Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM	Indeks Kepuasan Layanan Itjen	3,35	3,26*[10]	97,31%

*Menggunakan nilai tahun 2023

Dari data di atas, diketahui baik secara realisasi dan capaian kinerja indikator di **Inspektorat Jenderal** kementerian sosial jauh melebihi capaian Inspektorat Utama BPOM. Namun meskipun demikian, capaian kinerja BPOM cukup baik untuk dapat bersanding dengan capaian kinerja di kementerian lain. Hal ini merupakan komitmen nyata BPOM dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

[9] Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2023
[10] Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp108.706.985 atau 100% dari pagu sebesar Rp108.707.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 25 Efisiensi capaian kinerja indikator Indeks Kepuasaan Mitra Pengawasan Intern

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	108.707.000	108.706.985	100,00	102,62	1,03	1	0,03	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, dikarenakan capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran yang mendukung capaian indikator ini adalah kerja sama lintas sektor. Inspektorat Utama mengupayakan efisiensi anggaran dengan melakukan rapat koordinasi internal secara *full daring*, Pemanfaatan teknologi dalam melakukan pembaharuan aplikasi layanan pengawasan intern.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama Indeks kepuasan mitra pengawasan intern antara lain:

1. Peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi antar auditor dengan unit kerja yang diawasi;
2. Melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan kompetensi serta menyamakan pemahaman dan persepsi antar Auditor;
3. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui:
    a) Peningkatan layanan konsultasi yang difasilitasi dengan pengembangan aplikasi untuk konsultasi online (SOLUSI);
    b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi dengan menggunakan aplikasi sistem informasi monitoring secara elektronik dan dashboard

evaluasi kinerja (SAPA APIP) untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil audit BPK, tindak lanjut Inspektorat Utama, evaluasi manajemen risiko dan evaluasi SAKIP.

c) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan intern melalui pembangunan aplikasi *Inspiring Audit*.

d) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan pengaduan, gratifikasi dan benturan kepentingan melalui pembangunan aplikasi Sang Integritas.

4. Peningkatan sosialisasi hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja pada beberapa kesempatan, antara lain pada Rapat Kerja Nasional tahun 2024, agar suatu temuan pada satu auditan tidak menjadi temuan maupun masalah pada auditan lainnya;
5. Pembahasan hasil audit melalui mekanisme ekspose hasil audit dengan Inspektur Utama BPOM;
6. Peningkatan manajemen waktu audit (pelaksanaan audit hanya pada hari dan jam kerja);
7. Peningkatan keterbukaan informasi hasil pengawasan intern yang dilakukan, misalnya hasil evaluasi SAKIP dan RB, dengan tujuan untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat sasaran; dan
8. Pembaharuan aplikasi pengawasan intern seperti SAPA APIP, SOLUSI, Sang Integritas.

Keberhasilan Inspektorat Utama dalam mencapai target pada indikator ini tentunya akan terus mempertahankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 ke periode rencana strategis tahun 2025-2029. Indikator Indeks Kepuasaan Mitra Pengawasan Intern merupakan indikator yang masih sangat relevan untuk mengukur kualitas pelayanan pengawasan intern terhadap mitra pengawasan di BPOM.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan capaian indikator kinerja utama Indeks kepuasan mitra pengawasan intern, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan.

Selanjutnya untuk melihat capaian sasaran program 3 dapat dilihat lebih detail pada tabel berikut:

Tabel 26 Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang berkualitas

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	2024			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	87,08	86	88,25	102,62	Sangat Baik
	Capaian Sasaran				102,62	Sangat Baik

Capaian Sasaran Program 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang berkualitas berhasil mencapai target dengan capaian sasaran 102,62 dengan kriteria "Sangat Baik". Jika dibandingkan dengan realisasi sasaran program 3 tahun 2023 (101,37), realisasi sasaran program 3 tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,25 poin. Hal ini dikarenakan meningkatnya kepuasan mitra pengawasan intern terhadap pelayanan pengawasan Intern Inspektorat Utama yang telah disinggung di atas. Sasaran program 3 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan pada periode Renstra selanjutnya.**

3.1.4 Capaian Sasaran Program 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko

Kebijakan pengawasan intern merupakan hal yang mutlak ada sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern oleh APIP. Kebijakan pengawasan intern antara lain namun tidak terbatas pada piagam audit, program kerja pengawasan tahunan, serta pedoman-pedoman pelaksanaan pengawasan lainnya seperti pedoman pelaksanaan pelaporan anti korupsi, pelaporan atas harta kekayaan pejabat negara dan ASN, dan lain-lain.

Pencapaian sasaran program "Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko" diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 27 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tersedianya kebijakan	Indeks kemanfaatan	85,71	86,3	84,74	98,19	Cukup

pengawasan intern yang berbasis risiko	kebijakan pengawasan intern					

IKSP.8 Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku. Indeks ini menunjukkan tingkat kemanfaatan suatu kebijakan pengawasan intern yang telah dibuat. Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern diperoleh dengan mengisi nilai-nilai kualitatif terhadap indikator-indikator aspek kemanfaatan.

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern terdiri dari 4 aspek utama yaitu: (1) Penilaian Agenda Setting, (2) Penilaian Formulasi Kebijakan, (3) Implementasi Kebijakan dan (4) Evaluasi Kebijakan.

Untuk mengukur tingkat kemanfaatan kebijakan, dilakukan survei indeks kemanfaatan kebijakan tahun 2024 yang disadur dari skema penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan 2 (dua) aspek utama yaitu Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan.

Tools survei indeks kemanfaatan kebijakan Inspektorat Utama mengadopsi Indeks Kualitas Kebijakan yang merupakan instrumen penilaian kualitas kebijakan pada instansi pemerintah yang diterbitkan pusat pembinaan analis kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) 2016. *Checklist toolkit* disadur menjadi bentuk survei dengan skala likert.

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 28 Capaian IKU Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	86,91	85,74	86,82	85,71	86,3	84,74	98,19	Cukup	86,3	98,19 (Akan tercapai)

Dari data di atas, Capaian Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern Inspektorat Utama pada tahun 2024 belum dapat mencapai target dengan capaian 98,19% atau dalam kategori **"Cukup".** Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023, realisasi di tahun 2024 mengalami **penurunan sebesar 0,97 poin.** Realisasi kinerja di tahun 2024 merupakan realisasi terendah jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2023. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 atau akhir periode renstra, realisasi di tahun 2024 masuk dalam kategori **"Akan Tercapai".**

Di tahun 2024, Survei kemanfaatan kebijakan mengambil tema mengukur tingkat kemanfaatan kebijakan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan pedoman penanganan benturan kepentingan Inspektorat Utama Tahun 2024 yang disadur dari aspek evaluasi kebijakan dengan 2 (dua) aspek utama yaitu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan (Efektivitas, Efisiensi, Dampak, dan *Sustainability*). Penilaian terhadap masing-masing aspek berdasarkan pada pengukuran atas pernyataan "Kenyataan" dan "Harapan". Waktu pelaksanaan survei sampai dengan pelaporan adalah bulan November s.d Desember 2024. Jumlah responden survei tahun 2024 adalah 20% dari jumlah pegawai tiap unit kerja Pusat, Balai Besar POM dan Balai POM. Jumlah responden yang diikutsertakan dalam analisis data Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan pedoman penanganan benturan kepentingan Inspektorat Utama 2024 sebagai berikut:

Tabel 21 Jumlah Responden Survei Kemanfaatan Kebijakan

Responden Mitra Unit Kerja	Tahun 2024
Inspektorat I	1.006
Inspektorat II	1.050
Total Responden	**2.056**

hasil Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan pedoman penanganan benturan kepentingan Inspektorat Utama 2024, dapat dilihat sebagai berikut:

Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan	Inspektorat Utama		
	Harapan	Kenyataan	*Gap*
1. Pelaksanaan Monitoring	90,14	84,72	-5,42
2. Evaluasi Kebijakan			
A. Efektivitas	90,24	84,03	-6,22
B. Efisiensi	89,77	82,92	-6,86
C. Dampak	90,82	86,08	-4,74
D. *Sustainability*	90,78	85,97	-4,82
Indeks	**90,35**	**84,74**	**-5,61**

Gambar 11 Indeks Kemanfaatan Kebijakan pedoman penanganan benturan kepentingan[11]

Dari gambar di atas, Inspektorat Utama mendapatkan indeks kemanfaatan kebijakan pedoman penanganan benturan kepentingan dengan nilai 84,74. Tingkat kenyataan berada pada rentang 84,03 sampai dengan 86,08, dengan tingkat harapan responden berada pada rentang 89,77 sampai dengan 90,82. Indeks kemanfaatan kebijakan dengan tingkat kepuasan tertinggi berada pada Dampak (86,08), dimana aspek dampak menilai tentang kebijakan apakah telah menghasilkan nilai tambah untuk organisasi. Selanjutnya aspek dengan indeks terendah terdapat pada aspek Efisiensi (82,92), hal ini membutuhkan tentunya menjadi pencermatan bagi Inspektorat untuk melihat ulang apakah input yang digunakan dalam pedoman penanganan benturan kepentingan telah menghasilkan output yang diharapkan.

Dari data pada gambar xx, dapat dilihat bahwa di setiap komponennya tidak ada yang mencapai target di tahun 2024. **Ketidakberhasilan dalam mencapai target ini adalah** masih banyaknya upaya-upaya perbaikan yang

[11] Nota Dinas Inspektorat Utama No PI.06.73.12.24.284 hal Laporan Hasil Survei Kemanfaatan Kebijakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BPOM Tahun 2024

diharapkan oleh para stakeholder dalam pedoman penanganan benturan kepentingan. Masukan-masukan yang ada pada survei kemanfaaan kebijakan akan menjadi input yang sangat berarti bagi Inspektorat Utama untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Meskipun belum berhasil mencapai target, **Upaya atau kegiatan yang mendukung** capaian kinerja indikator adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L;
2. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan pengawasan intern pada lingkungan Badan POM;
3. Membuka wadah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI terkait pengawasan intern termasuk kebijakannya.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Utama masih belum menemukan indikator yang relevan sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp21.847.000 atau 100% dari pagu sebesar Rp21.847.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 29 Efisiensi capaian kinerja indikator Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	21.847.000	21.847.000	100,00	98,19	0,98	1	-0,02	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran. kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator tersebut adalah pelaksanaan Kajian/ Pedoman/ Peraturan Inspektorat Utama, Rapat Evaluasi Tingkat Inspektorat Utama, dan Pelaksanaan Survei Kemanfaatan kebijakan. Inspektorat Utama mengupayakan **efisiensi anggaran** dengan melakukan rapat pertemuan yang membahas beberapa kegiatan pengawasan

lainnya sehingga lebih efektif. Pelaksanaan rapat yang dilaksanakan *hybrid* atau bahkan *full daring* di beberapa kesempatan. Namun kegiatan tersebut belum cukup untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Sebagai informasi, Indikator ini melakukan penyesuaian target di tahun 2024 dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2023 sebagai berikut:

Tabel 22 Realisasi Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2020-2023

Indikator	Realisasi			
	2020	2021	2022	2023
Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,91	85,74	86,82	85,71

Selama tahun 2020-2023, nilai indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern, mengalami fluktuatif bahkan menurun di tahun 2023. Di tahun 2024, indikator indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern sebesar 88 dan sulit untuk dicapai jika melihat dari historis realisasi selama tahun 2020-2023. Tema kebijakan yang disurvei setiap tahunnya juga berbeda dari tahun 2020-2023 dan realisasi sangat ditentukan oleh pihak eksternal, sehingga indikator ini termasuk dalam tingkat kendali IKU rendah. Penyesuaian target dirasa perlu pada tahun 2024 untuk dapat mengukur kinerja yang lebih realistis dan *achievable*. Sehingga penyesuaian target pada indikator Indeks Kebijakan Pengawasan Intern dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 23 *Matriks Penyesuaian target 2024 indikator* Indeks Kebijakan Pengawasan Intern

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator 2024	Target 2024	Indikator 2024	Target 2024	
Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	88	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,30	• Terdapatnya fluktuatif tehadap nilai indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 • Penentuan target mempertimbangkan perhitungan rata-rata • Jenis kebijakan yang di survei setiap tahun adalah berbeda-beda.

Melihat perkembangan kinerja indikator yang tidak berhasil mencapai target pada akhir periode renstra, hasil reviu indikator menunjukkan menurun meskipun dengan strategi penyesuaian target. Sehingga pada periode renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 indikator ini tidak dilanjutkan karena indikator ini juga tidak dapat dibandingkan kinerjanya secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya, karena survei yang dilakukan memiliki tema yang berbeda atau tidak dapat menggambarkan progress kemajuan atas saran di tema kebijakan yang sebelumnya.

Selanjutnya, untuk Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 24 Capaian sasaran Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023	2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	85,71	86,3	84,74	98,19	Cukup
	Capaian Sasaran Program				98,19	-

Capaian Sasaran Program 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko di tahun 2024, belum dapat mencapai target yakni **98,19%** atau masuk dalam kriteria **"Cukup"**. Jika dibandingkan dengan capaian strategis tahun 2023 (97,95), capaian program di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,24 poin. Melihat realisasi kinerja selama tahun 2020-2024 yang cenderung menurun hal ini menjadi pencermatan untuk melanjutkan indikator ini di periode renstra selanjutnya. Selain itu untuk kemanfaatan kebijakan lebih relevan berada pada Sekretariat Utama pada biro hukum dan organisasi.

3.1.5 Capaian Sasaran Program 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan dan sistem

pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3) Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 25 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	Tahun 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100%	100%	Baik

IKSP.9 Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu

Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Secara tepat, leitch (2008) menegaskan *"Work can be divided between the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty"*. Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan

melalui kegiatan (1) audit; (2) reviu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.

Tabel 26 Capaian IKU Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	119,44%	122,22%	120,83%	100%	100%	100%	100	Baik	100%	100 Tercapai/Melampauai

Indikator "Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu" digunakan untuk mengukur pelaksanaan *core business* Inspektorat Utama seperti yang telah disebutkan di atas. **Pada tahun 2024** realisasi indikator ini sebesar 100%, mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sehingga nilai pencapaian indikatornya adalah 100%, dengan kategori pencapaian **"Baik".** Realisasi sebesar 100% tersebut berasal dari 66 (enam puluh enam) laporan yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I sejumlah 33 (tiga puluh tiga) laporan dan Inspektorat II sejumlah 33 (tiga puluh tiga laporan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi di tahun 2024 mencapai sebesar 100%. Sedangkan **apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2024** yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 100% laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama sesuai standar mutu maka realisasi pada tahun 2024 telah mencapai

target pada akhir tahun, atau akhir periode Renstra dengan kategori **"Tercapai/Melampaui"**. Di tahun 2024 Inspektorat Utama sudah sangat adaptif dengan perubahan metode audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan melalui media *video conference* serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan, serta koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, reviu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp2.757.795.708 atau 100% dari pagu sebesar Rp 2.757.805.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 27 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	2.757.805.000	2.757.795.708	100,00	100,00	1,00	1	0,00	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, dikarenakan capaian kinerja masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Efisiennya indikator ini adalah karena terdapatnya alokasi anggaran yang mampu mencapai target kinerja di tahun 2024. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya indikator ini adalah Audit berbasis risiko, audit operasional, bimbingan teknis manajemen pengawasan intern, penyusunan analisis pengawasan intern/tren analisis pemeriksaan, pelaksanaan audit internal/surveilan/tinjauan manajemen QMS ISO 9001:2015, dan telaah sejawat. **Upaya yang dilakukan dalam efisiensi anggaran** adalah pelaksanaan beberapa kegiatan pengawasan intern di satu kegiatan, pemanfaatan teknologi terhadap pelaksanaan kegiatan

audit mulai dari koordinasi *entry meeting, exit meeting* hingga *expose audit*, pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara *hybrid* sehingga menjangkau ke satuan/unit kerja dan seluruh unit pelaksana teknis.

Upaya yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain:

1. Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit;
2. Penganggaran yang memadai dan telah direviu sehingga dapat mengakomodasi ruang lingkup pengawasan yang ada;
3. Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik;
4. Peningkatan kompetensi auditor secara berkala sehingga mampu menjalankan praktik audit yang profesional dan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia maupun Standar Mutu ISO 9001:2015;
5. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
6. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI;
7. Pendampingan pemeriksaan BPK RI;
8. Reviu LK;
9. Pelaksanaan audit yang berbasis risiko.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran ini terdapat beberapa kendala, seperti:

1. Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuain pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
2. Berbagai kegiatan secara berulang kali melibatkan unit kerja yang sama, sehingga membutuhkan komunikasi yang intensif guna memastikan penyelenggaraan pengawasan tidak memberikan ekses pada tugas pokok dan fungsi unit kerja tersebut.

Terhadap kendala tersebut, dilakukan beberapa aktivitas untuk menjamin pencapaian tujuan, yakni:

1. Monitoring pencapaian realisasi anggaran dan PKPT sehingga audit dan kegiatan pengawasan intern lainnya tetap terlaksana sesuai

dengan target yang telah ditetapkan dan apabila diperlukan penyesuaian dapat segera ditindaklanjuti;

2. Koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, reviu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan/meningkatkan capaian indikator kinerja utama Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu, antara lain:

1. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Utama.
2. Menerapkan standar audit intern di lingkungan BPOM.
3. Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko.
4. Melaksanakan peningkatan/pengembangan kompetensi pegawai.
5. Melakukan intensifikasi koordinasi dengan Satuan Kerja/Unit terkait tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Utama.

Selanjutnya, untuk capaian dan realisasi Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28 Capaian Sasaran Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023	2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100%	100%	Baik
	Capaian Sasaran Program				100	

Sasaran Program 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien mencapai nilai 100 dengan kategori "Baik". Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sasaran program 5 memiliki capaian yang sama di angka

100. Capaian kinerja di Tahun 2024 sudah dapat mencapai target di akhir tahun 2024. Indikator pada Sasaran program 5 merupakan core business pada Inspektorat Utama sehingga sangat relevan untuk dilanjutkan pada renstra periode selanjutnya.

3.1.6 Capaian Sasaran Program 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif

Perubahan paradigma pengawasan intern melalui *assurance* dan *trusted advisor* agar Inspektorat Utama mampu memberikan nilai tambah bagi mitra pengawasan intern dalam akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan pengendalian intern tercermin dalam rekomendasi pengawasan intern yang disampaikan.

Tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan intern yang telah dilaksanakan. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti; (2) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu; dan (3) Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu. Target, dan realisasi kinerja sasaran indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 35 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96,06%	96%	90,75%	94,53%	Cukup
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Baik
	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	97,57%	100%	102,49%	Sangat Baik

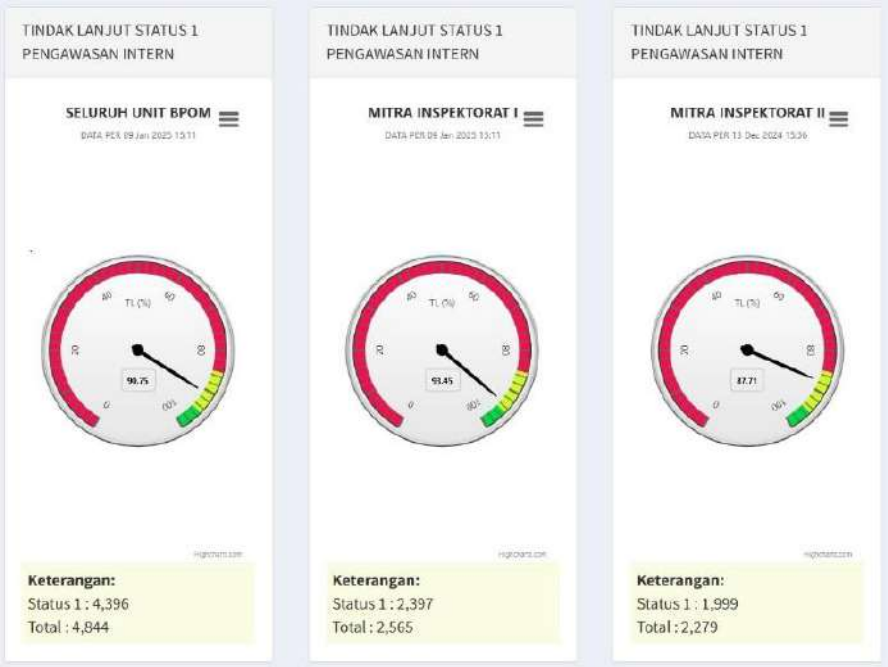
IKSP.10 Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang

difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

Tabel 29 Capaian IKU Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	92,98%	88,25%	95,71%	96,06%	96%	90,75%	94,53	Cukup	96%	94,53 (Akan Tercapai)



Gambar 4 Digitalisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPA APIP

Pada Tahun 2024, realisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti yaitu sebesar 90,75% belum dapat mencapai target dan masuk dalam Kategori "Cukup". **Jika dibandingkan dengan tahun 2023,** realisasi kinerja di tahun 2024 menurun sebesar 5,31 poin. **Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama** maka realisasi masuk pada kategori **"Akan Tercapai".**

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, capaian indikator Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 30 perbandingan capaian indikator Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti dengan K/L lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96%	90,75%	94,53%
Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP	75%	91,52%*[12]	122,03%
Inspektorat BPKP	Persentase Tindak Lanjut atas Saran/Rekomendasi Kepatuhan Hasil Assurance	70%	73,26%*[13]	104,65%

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Inspektorat BPKP jauh di atas capaian kinerja Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Luar Negeri dan Inspektorat Utama (Ittama) BPOM. Namun jika dilihat berdasarkan realisasi kinerja, Itjen KKP dan Ittama BPOM memiliki realisasi kinerja yang lebih tinggi dibandingkan Inspektorat BPKP. **Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja ini disebabkan karena:**

1. Kurangnya komitmen auditan dalam melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP.
2. Adanya penugasan pengawasan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
3. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Utama tidak dilakukan secara berkala.
4. Progress permintaan data hanya dilakukan satu kali saat penyampaian Laporan Hasil Audit tanpa ada komunikasi secara simultan karena penugasan auditor yang menumpuk.

Di tahun 2024, Inspektorat Utama melakukan **upaya-upaya dalam mencapai target sebagai berikut:**

1. Penegasan pada saat mengawali dan mengakhiri proses audit perihal waktu yang diatur dalam SOP untuk pemenuhan tindak lanjut. Penegasan berulang ini dilakukan untuk memberikan *awareness* kepada auditan perihal urgensi dari tindak lanjut hasil pengawasan;

[12] Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023
[13] Laporan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2023

2. Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk penegasan perihal status suatu tindak lanjut yang disampaikan oleh auditan yang berkaitan dengan kesesuaiannya pada rekomendasi yang diberikan;
3. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;
4. Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada *auditee* menjadi lebih akurat, yakni berupa rekomendasi yang jelas dan tidak multitafsir serta lebih sesuai dengan kebutuhan akan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi. Hal ini mendorong unit kerja untuk dapat lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap suatu rekomendasi; dan
5. Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi *auditee* untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.
6. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;
7. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan; dan
8. Meningkatkan kompetensi auditor sebagai melalui pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan pendampingan secara intensif bagi Auditor baru sehingga mampu memberikan rekomendasi yang memberikan daya ungkit dan nilai tambah kepada unit kerja auditan.

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029, Indikator ini merupakan indikator yang mengukur tindak lanjut hasil pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Utama. **Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama sebagai upaya perbaikan ke depan adalah:**

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil audit.
2. Melakukan plotting penjadwalan kegiatan pengawasan intern melalui audit dengan menghindari penjadwalan yang mendekati akhir tahun anggaran, sehingga tindak lanjut atas pengawasan masih dapat dilakukan dalam tahun anggaran yang sama.
3. Melakukan perencanaan kegiatan pengawasan intern berdasarkan PKPT yang berbasis manajemen risiko

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 187.722.552 atau 100% dari pagu sebesar Rp 187.724.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 31 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	187.724.000	187.722.552	100,00	94,53	0,95	1	-0,05	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya indikator ini adalah pemantauan dan evaluasi hasil tindak lanjut hasil pengawasan. **Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan adalah** dengan melakukan pemanfaatan teknologi dalam melakukan pembahasan layanan konsultansi pengawasan intern, pemantauan dan evaluasi hasil tindak

lanjut hasil pengawasan yang menggunakan SAPA APIP atau tidak lagi manual sehingga lebih efisien. Pelaksanaan sosialisasi peraturan dan kebijakan yang dilaksanakan secara *hybrid* sehingga semua unit/satuan kerja dan unit pelaksana teknis dapat mengikuti. Pemanfaatan teknologi juga dilakukan dengan sosialisasi peraturan dan kebijakan melalui sosial media resmi Inspektorat Utama di kanal Youtube, Instagram dan website. Untuk secara internal juga Inspektorat Utama berpartisipasi di IDEAS milik PPSDM dengan materi yang terkait pengawasan intern. Namun upaya tersebut masih belum dapat mencapai titik efisien dikarenakan target kinerja tidak tercapai.

IKSP.11 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Pengaduan terdiri atas:

- Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan
- Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Pengaduan disampaikan kepada Kepala Badan POM melalui Inspektorat Utama, dan pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Inspektorat Utama atau kepada organisasi penyelenggara pelayanan, berupa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.

Cara perhitungan capaian indikator adalah Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu dibagi jumlah total pengaduan dikali 100%.

Tabel 32 Capaian IKU Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	80%	93,75%	100%	100%	100%	100,00%	100,00	Baik	100%	100,00 Tercapai

Pada tahun 2024, realisasi kinerja indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu adalah 100% dengan capaian 100% dan termasuk dalam kategori **"Baik"**. Realisasi ini dicapai dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) pengaduan dan wbs sudah ditindaklanjuti dari total 23 (dua puluh tiga) pengaduan dan wbs. **Jika dibandingkan dengan tahun 2023,** realisasi kinerja di tahun 2024 menunjukkan realisasi kinerja yang sama. **Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2024,** realisasi kinerja berhasil mencapai target sampai akhir tahun 2024 atau akhir periode Renstra. **Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya,** capaian indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 33 Perbandingan capaian indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu dengan K/L lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%
Inspektorat BPKP	Persentase Pengaduan yang Telah Ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP No. 2/2016	100%	100%*[14]	100%%
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	72%	84,99*[15]	118,04%

Dari data di atas, realisasi kinerja Inspektorat Utama BPOM pada indikator "**Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu"** memiliki realisasi yang sama dengan Inspektorat BPKP. Dan jika dibandingkan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, secara realisasi kinerja Inspektorat Utama BPOM dan BPKP masih di atas Itjen Kementerian Keuangan. Namun tentunya jika dilihat lebih detail bahwa jumlah pengaduan yang ditangani oleh Ittama BPOM masih di bawah Inspektorat BPKP dan Itjen Kementerian Keuangan. Untuk di tahun 2023, jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat BPKP sebanyak 44 Pengaduan, dan Itjen Kementerian Keuangan sebanyak 818 pengaduan. Dalam perbandingan terhadap K/L lain, Inspektorat Utama masih menggunakan data kinerja tahun 2023, hal ini dikarenakan terbatas akses terhadap realisasi kinerja di tahun 2024.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 283,793,804 atau 100% dari pagu sebesar Rp 283,795,500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

[14] Laporan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2023
[15] Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2023

Tabel 34 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	193.348.000	193.347.043	100,00	100,00	1,00	1	0,00	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, hal ini dapat dilihat dengan capaian kinerja sama dengan capaian anggaran. Efisiennya indikator ini adalah karena terdapatnya alokasi anggaran yang mampu mencapai target kinerja di tahun 2024. **Upaya efisiensi yang telah dilakukan** adalah dengan pemanfaatan teknologi dalam menindaklanjuti pengaduan, APIP mengefisiensikan sumber daya yaitu dengan konfirmasi online, lalu dilakukan telaah lebih lanjut melalui daring, baru melakukan luring terhadap hal yang penting dan perlu konfirmasi fisik, sehingga lebih efisien secara waktu dan anggaran. Realisasi anggaran yang mendukung capaian kinerja indikator adalah Konsolidasi data tindak lanjut dan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kategori dan tepat waktu salah satunya adalah kurang lengkapnya informasi dan substansi pengaduan yang diberikan oleh Pelapor, sehingga menyulitkan Inspektorat Utama untuk melakukan konfirmasi dan pendalaman informasi.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 antara lain pelaksanaan audit berbasis risiko dan audit tujuan tertentu pada Unit Kerja yang terkait dalam Pengaduan. Serta adanya inovasi peluncuran aplikasi “sang integritas” yang mewadahi dalam pelaporan pengaduan, gratifikasi, dan

benturan kepentingan sehingga pencatatan laporan lebih cepat sehingga dapat langsung ditindaklanjuti oleh APIP.

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029, Indikator ini merupakan indikator yang mengukur pengaduan yang ditindaklanjuti sebagai hasil pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Utama. **Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu,** antara lain:

1. *Continuous improvement* sarana pengaduan agar lebih optimal;
2. Melakukan *public campaign* dan mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait;
3. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan
4. Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* pada media sosial.

IKSP.12 Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah

merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Pengawasan intern telah mengalami perubahan paradigma. Konsep *watchdog* yang semata-mata fokus pada upaya mencari kesalahan yang terjadi pada proses yang telah berjalan menjadi tidak relevan dalam memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi *Trusted Advisor*, serta menindaklanjuti hasil evaluasi atas Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2018, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi

yang kredibel, komprehensif, aman, *up to date* dan informatif yang mudah diakses oleh seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman https://solusi.pom.go.id.

Tabel 35 Capaian IKU Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	97,74%	97,43%	100%	97,57%	100,00%	102,49	Sangat Baik	97,57%	102,49 Tercapai/ Melampaui

Dari tabel di atas, pada tahun 2024 realisasi permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu yaitu sebesar 100,00%, dimana sudah mencapai target yang dijanjikan pada tahun 2024 yaitu sebesar 97,57%, dengan nilai pencapaian indikator 102,49% dan termasuk dalam kategori "Sangat Baik". **Jika dibandingkan dengan tahun 2023,** realisasi kinerja tahun 2024 masih sama. Hal ini menunjukan bahwa proses penelaahan atas pertanyaan pada SOLUSI sudah efektif. **Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2024,** realisasi kinerja masih sudah mampu mencapai target sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 102,49% dengan kategori **"Tercapai/Melampaui"**.

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya karena belum ada indikator yang relevan pada K/L lain.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1.563.900 atau 99,99% dari pagu sebesar Rp1.564.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 36 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	1.564.000	1.563.900	99,99	102,49	1,03	1	0,03	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja efisien. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. Efisiensi ini tercapai karena APIP mampu menyelesaikan pertanyaan yang diajukan mitra sesuai *timeline* atau tepat waktu. Anggaran yang terealisasi dalam indikator ini adalah dilaksanakannya kegiatan Pembahasan Layanan Konsultansi Pengawasan Intern. **Upaya efisiensi yang dilakukan adalah** dengan melakukan koordinasi secara *hybrid* dalam pembahasan layanan konsultansi pengawasan intern.

Keberhasilan pencapaian indikator ini, didukung oleh komitmen APIP dalam menjawab pertanyaan konsultansi yang masuk dengan tepat waktu. Proses menjawab pertanyaan melalui aplikasi SOLUSI dilakukan dengan review berjenjang yang melibatkan anggota, ketua tim, sampai dengan pengendali teknis. Dengan demikian, diharapkan setiap jawaban yang diberikan diharap sudah mampu memberikan kepuasan bagi mitra pengawasan yang mengajukan pertanyaan.

Kegiatan yang mendukung terealisasinya capaian indikator adalah:

1. Rapat koordinasi terkait aplikasi, untuk *continuous improvement.*
2. Pengembangan aplikasi sarana konsultasi.

3. Pemantauan dan monitoring terhadap pertanyaan konsultansi yang masuk.

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029, Indikator ini merupakan indikator yang mengukur peran consulting Inspektorat Utama. Sebagai upaya perbaikan ke depan, **rencana tindak lanjut yang dilakukan pada** indikator Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah. Selanjutnya dapat dilihat target dan realisasi kinerja sasaran program 6 dalam tabel berikut:

Tabel 42 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96,06%	96%	90,75%	94,53%	Cukup
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Baik
	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	97,57%	100%	102,49%	Sangat Baik
	Capaian Sasaran				99,01	Cukup

Sasaran Program 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif mencapai nilai 99,01 dengan kategori "Cukup", jika dibandingkan dengan tahun 2023 sasaran program 6 mengalami penurunan sebesar -3,49 poin. Nilai pencapaian sasaran program 6 di tahun 2023 adalah **102,50.** Penurunan capaian ini disebabkan adanya realisasi kinerja yang masih belum mencapai target terhadap target tahun 2024.

3.1.7 Capaian Sasaran Program 7 – Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, efektivitas organisasi Inspektorat Utama memegang peranan yang penting sebagai landasan pengelolaan dan penatausahaan segala aktivitas pengawasan intern, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporannya. Organisasi Inspektorat Utama yang efektif tercermin dari implementasi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama, serta akuntabilitas kinerja dan anggarannya. Selain itu, sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), organisasi Inspektorat Utama juga perlu senantiasa melakukan adaptasi dan pengembangan organisasinya, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis pengawasan intern.

Terdapat perubahan nomenklatur pada indikator kinerja, serta target kinerja pada sasaran program ini, yang terdapat justifikasi pada lampiran di penetapan kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024. Pencapaian sasaran program ke-7 ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks RB Inspektorat Utama; (2) Nilai AKIP Inspektorat Utama; (3) Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP; dan (4) Nilai Pengelolaan Kearsipan. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 43 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	85,31	86,70	86,39	99,64	Cukup
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,5	84,35	81,58	96,72	Cukup
	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,53	3,6	3,77	104,72	Sangat Baik
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	96,65	98,84	102,27	Sangat Baik

INSPEKTORAT UTAMA

IKSP.13 Indeks RB Inspektorat Utama

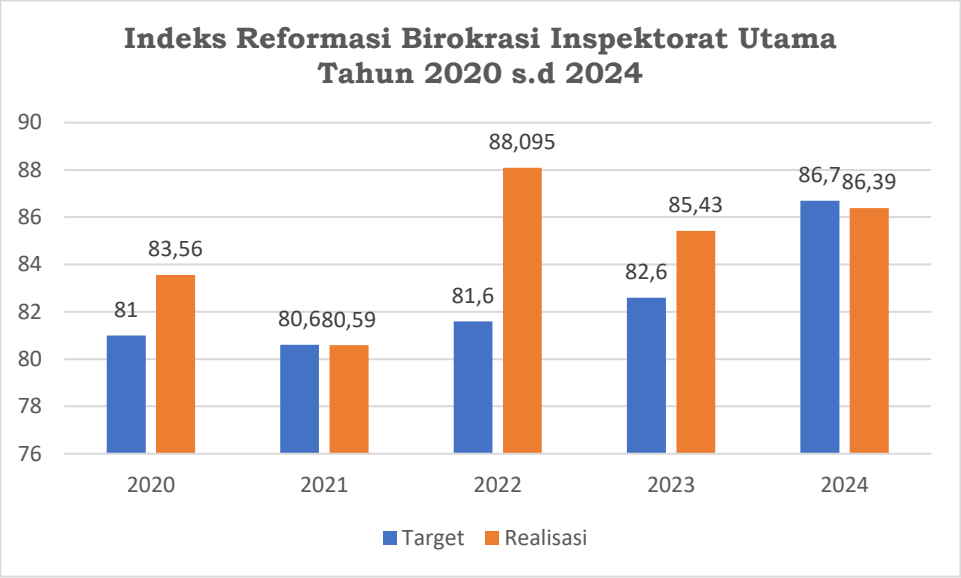
Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdiri atas pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 26 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas komponen pengungkit (proses) dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%. Dalam Rencana Strategis BPOM 2020-2024, Indeks RB BPOM menjadi salah satu IKU. Pada perkembangannya, terdapat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024. Dimana pada Indikator Indeks RB Inspektorat Utama adalah menggunakan nilai rata-rata hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas pada Inspektorat I dan Inspektorat II. Adapun capaian IKU **Indeks RB Inspektorat Utama tahun 2024** sebagai berikut:

Tabel 37 Capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	83,56	80,59	88,095	85,31	86,7	86,39	99,64	Cukup	86,7	99,64 Akan Tercapai

INSPEKTORAT UTAMA

Di tahun 2020 sd 2024 nilai indeks RB Inspektorat Utama dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 12 Grafik indeks reformasi birokrasi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024

Pada tabel dan gambar di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indeks RB Inspektorat Utama pada tahun 2024 memperoleh kategori **"Cukup". Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra** maka masuk dalam kategori **"Akan Tercapai"**. **Jika dibandingkan dengan tahun 2023,** realisasi kinerja di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,96 poin. Selama tahun 2020-2024, realisasi kinerja mengalami fluktuatif dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 yakni 88,095 dan terendah pada tahun 2021 yakni 80,59. Menurunnya realisasi kinerja indeks RB Inspektorat Utama di tahun 2024 adalah karena adanya penurunan hasil evaluasi ZI di Inspektorat II. **Penyebab turunnya** hasil evaluasi ZI di Inspektorat II berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 pada Inspektorat II adalah sebagai berikut:

1. Rencana kerja pembangunan ZI belum komprehensif yakni belum disertai dengan target prioritas, serta hanya sebatas pemenuhan atas pertanyaan pada LKE sehingga belum menggambarkan tujuan akhir dari pembangunan ZI;
2. Telah menetapkan pedoman pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI berupa Surat Keputusan kepala unit kerja yang memuat kriteria

pemilihan tim dan mendokumentasikan pembentukan tim tersebut dalam bentuk berita acara. Namun demikian belum terdapat kriteria khusus untuk pemilihan ketua tim, sekretaris, maupun anggota tim kelompok kerja;

3. Monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI belum sepenuhnya melibatkan pimpinan dan tidak ditindaklanjuti secara berkesinambungan;
4. Program kerja oleh agen perubahan belum diintegrasikan dalam sistem manajemen dan berdampak pada kinerja unit;
5. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan secara berkala namun tidak terlihat bukti tindak lanjut atas rencana aksi pada hasil monitoring dan evaluasi periode sebelumnya;
6. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi dan memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja;
7. Sudah dilakukan mutasi internal pegawai sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai, namun demikian belum dilakukan monitoring dan evaluasi kaitannya dengan perbaikan kinerja unit;
8. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan;
9. Keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja belum disertai dokumentasi yang memadai atas arahan yang disampaikan;
10. Belum terdapat mekanisme pemberian reward and punishment bagi setiap fungsi atau tim kerja yang diukur dari hasil kinerja setiap fungsi atau tim kerja;
11. Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan telah dilakukan namun tanpa melibatkan stakeholder;
12. Terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas pemberi layanan berdasarkan unsur peniliaian disiplin dan kinerja namun belum mempertimbangkan hasil penilaian pengguna layanan dan diterapkan secara rutin/berkelanjutan;

13. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan K/L lain, Indikator Indeks RB Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 38 Perbandingan indikator Indeks RB Inspektorat Utama Tahun 2024 dengan K/L Lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	86,7	86,39	99,64%
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks RB Itjen ESDM	90	86,89*[16]	96,54%

Dari data di atas, diketahui realisasi indeks RB Inspektorat Utama BPOM dan capaiannya berada di bawah Itjen KESDM. Hal ini menjadi catatan bagi Inspektorat Utama untuk dapat melihat apa yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Inspektorat Utama BPOM.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp1.235.501.369 atau 100% dari pagu sebesar Rp1.235.504.000sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 39 Tabel efisiensi indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	1.235.504.000	1.235.501.369	100,00	99,64	0,996	1	-0,004	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **tidak efisien**, hal ini dapat dilihat

[16] Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023

dengan capaian kinerja masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran. Anggaran terealisasi pada kegiatan yang memiliki kontribusi dalam indeks RB Inspektorat Utama yakni penyiapan dokumen RB Inspektorat Utama, Rapat Kerja Inspektorat Utama Tahun 2024, Pembangunan Zona Integritas, Surveillan SMAP ISO 37001:2016. Inspektorat Utama juga berupaya mengefisiensikan anggaran dengan pemanfaatan teknologi yang optimal dalam koordinasi internal, pelaksanaan SMAP ISO 37001:2016 secara *hybrid,* rapat persiapan dokumen RB yang dilakukan secara daring.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian IKU indeks RB Inspektorat utama tahun 2024 adalah:

a. Penataan Tatalaksana

1. Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penataan tata laksana di lingkup Inspektorat Utama tahun 2024;
2. Pelaksanaan tinjau ulang proses bisnis di lingkungan Inspektorat Utama;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi progress rencana aksi setiap triwulan

b. Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Pemberian tunjangan kinerja individu di lingkungan BPOM sudah berdasarkan penilaian prestasi kerja triwulanan;
2. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan SKP triwulan IV tahun 2023 dan TW III Tahun 2024 yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dan gap kinerja pegawai serta rekomendasi yang diberikan untuk memperbaikinya;
3. Telah dilakukan pelantikan pengisian jabatan struktural dan pelantikan pengangkatan jabatan fungsional;
4. Penyusunan laporan disiplin pegawai;
5. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan seperti e-skp, e-tukin, SISFO dan pelaporan SIAP
6. Pembahasan Standar Kompetensi Jabatan dan Nilai Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional

c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM pada Inspektorat Utama;
2. Mengikuti FGD Penyusunan Laporan Kinerja, untuk meningkatkan kemampuan staf terkait SAKIP dan menyusun Laporan kinerja unitnya;
3. Penyusunan Laporan evaluasi internal Inspektorat Utama, Inspektorat I dan Inspektorat II Triwulan IV Tahun 2023 s.d Triwulan IV Tahun 2024;
4. Penyusunan Lapkin Inspektorat Utama tahun 2024;
5. Penyusunan Laporan Kinerja interim Inspektorat Utama Triwulan I,II,III,IV Tahun 2023, dan Triwulan III 2024;
6. Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Inspektorat Utama ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB;
7. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Inspektorat I dan Inspektorat II s.d Triwulan IV Tahun 2024 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance);
8. Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Utama Tahun 2023;

d. Penguatan Pengawasan

1. Sosialisasi oleh masing masing unit kerja di Inspektorat Utama melalui bahan paparan atau sosial media mengenai larangan menerima/pemberian gratifikasi;
2. Seluruh Unit Kerja telah melakukan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko dengan penerapan *sistem three line of defense*;
3. Laporan Pengaduan masyarakat dan whistleblowing Triwulan III Tahun 2024;
4. Dokumen penandatanganan pakta integritas;
5. Pengisian Data SPIP Terintegrasi BPOM untuk Satker Inspektorat Utama;

e. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Digitalisasi pengawasan intern (Pemutakhiran dan pembaharuan aplikasi) SAPA APIP dan SOLUSI;

2. Pelaksanaan tindak lanjut terhadap seluruh pengaduan masyarakat dan WBS;
3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Mitra pengawasan intern terhadap pelayanan pengawasan;

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029, indikator ini merupakan indikator yang mendukung langsung Indeks RB di BPOM. Sehingga indikator ini relevan untuk dilanjutkan. **Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama sebagai upaya perbaikan indikator Indeks RB Inspektorat Utama**:

1. Menyusun rencana aksi hasil rekomendasi evaluasi ZI pada tahun 2024;
2. Mempertahankan kegiatan kegiatan penunjang Reformasi Birokrasi;
3. Mendorong pegawai untuk berinovasi;

IKSP.14 Nilai AKIP Inspektorat Utama

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja wajib menerapkan manajemen kinerja yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Implementasi dan evaluasi implementasi SAKIP di Lingkungan Badan POM tahun 2024 juga berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.
Evaluasi implementasi SAKIP meliputi: (1) Perencanaan kinerja (bobot 24); (2) Pengukuran kinerja (bobot 24); (3) Pelaporan kinerja (bobot 12); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 20); dan (5) Capaian Kinerja (bobot 20). Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini

berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di Inspektorat Utama oleh Tim Evaluator SAKIP BPOM.

Tabel 40 Capaian IKU Nilai AKIP Inspektorat Utama Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai AKIP Inspektorat Utama	79,75	82,21	81,96	81,5	84,35	81,58	96,72	Cukup 	84,35	96,72 Akan Tercapai 

Pada tahun 2024, capaian Nilai AKIP Inspektorat Utama belum mencapai target yang telah ditetapkan. Target indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama Tahun 2024 sebesar 84,35 dengan realisasi 81,58 dan capaian 96,72 dengan kategori **Cukup**. Meskipun demikian dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, terdapat peningkatan nilai pada tahun 2024 sebesar 0,08 poin. Realisasi kinerja jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra masuk pada kategori **''Akan Tercapai''**. Berdasarkan Renstra 2020-2024, selama 5 tahun periode Renstra target atas indikator nilai AKIP Inspektorat Utama tidak tercapai setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan dalam rangka perbaikan kinerja belum memberikan hasil yang maksimal dan diperlukan analisis/reviu atas penetapan target indikator pada periode Renstra 2025-2029 berdasarkan realisasi tahun 2020-2024.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga pemerintahan lain, Capaian indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 41 Perbandingan capaian Indikator Nilai AKIP Inspektorat BPOM dengan K/L lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Nilai AKIP Inspektorat Utama	87,3	81,5	93,36%
Inspektorat BPKP	Nilai SAKIP Inspektorat	82	86,3	105,24%
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai AKIP Inspektorat Jenderal	82	82,1	100,12%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator nilai AKIP Inspektorat Utama BPOM dibandingkan dengan Inspektorat BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, memiliki capaian kinerja sebesar 96,72% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Inspektorat BPKP sebesar 105,24% dan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sebesar 100,12% sehingga Inspektorat Utama BPOM harus terus meningkatkan capaian indikator kinerja.

Selanjutnya, Jika dibandingkan dengan Satuan Kerja di Lingkup BPOM, Nilai AKIP Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 42 Hasil Evaluasi AKIP Satuan Kerja BPOM Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Tahun 2024	
		Nilai	Kategori
1	Inspektorat Utama	81,58	A
2	Sekretariat Utama	82,81	A
3	Deputi I	81,08	A
4	Deputi II	80,66	A
5	Deputi III	78,39	BB
6	Deputi IV	75,86	BB
Rata-rata Nilai		**80,06**	

Dari tabel di atas, Inspektorat Utama berhasil meraih kategori A dengan nilai 81,58, menunjukkan kinerja memuaskan dan meningkat dibandingkan tahun 2023. Dengan rata-rata nilai keseluruhan sebesar 80,06, kontribusi dari Inspektorat Utama membantu pencapaian kinerja organisasi di lingkup Eselon I BPOM.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp5.798.500,00 atau 99,99% dari pagu sebesar Rp5.799.000,00 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 43 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai AKIP Inspektorat Utama	5.799.000	5.798.500	99,99	96,72	0,97	1	-0,03	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran. Kegiatan yang sudah terealisasi dalam mendukung capaian kinerja ini adalah rapat pembahasan tindaklanjut hasil evaluasi akip bersama dengan tim evaluator dan Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai pengampu SAKIP di BPOM. Inspektorat Utama mengupayakan adanya **efisiensi anggaran** dengan pemanfaatan teknologi dalam berkoordinasi secara internal di lingkungan BPOM. Namun kegiatan tersebut belum dapat mendukung secara optimal untuk dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga tidak terciptanya efisiensi.

Penyebab tidak tercapainya target di tahun 2024, berdasarkan Surat Inspektur Utama hal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 nomor B-PI.04.7.01.25.40 yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

a. Dokumen Evaluasi Paruh Waktu Renstra belum dipublikasikan pada subsite Inspektorat Utama; dan
b. Perbedaan penyajian target indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi (Inspektorat I dan Inspektorat II) pada RAPK, SKP dan Laporan Kinerja triwulan II 2024.

2. Pengukuran Kinerja
   a. Notulen rapat evaluasi internal triwulan I s.d III tahun 2024 belum dilengkapi dengan lampiran berupa daftar hadir rapat;
   b. Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja Laporan Kinerja 2023 dan Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV tahun 2023 tidak dapat ditelusur/berbeda dengan dokumen monev (sumber data), sebagai contoh indikator "Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu";
   c. Pengisian kendala dan Rencana Tindak Lanjut pada aplikasi SIMETRIS Tahun 2023 belum tertib; dan
   d. Perbedaan penyajian realisasi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi (Inspektorat I dan Inspektorat II) pada Sasaran Kinerja Pegawai Inspektur I dan Inspektur II, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja triwulan II tahun 2024.

3. Pelaporan Kinerja
   a. Laporan Kinerja triwulan I s.d III tahun 2024 (Bab II Perencanaan Kinerja) belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024, yaitu:
      - Nilai Pengelolaan Kearsipan
      - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
      - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
      - Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri
   b. Perbedaan penyajian realisasi indikator pada data sumber, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Tahun 2023 (sesuai poin 2.d)
   c. Perbedaan penyajian realisasi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi (Inspektorat I dan Inspektorat II) pada Sasaran

Kinerja Pegawai Inspektur I dan Inspektur II, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja triwulan II tahun 2024 (sesuai poin 2.e)

d. Laporan kinerja Triwulan II dan III tahun 2024 belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   a. Beberapa personil Tim Penyusun Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja belum mengikuti pelatihan terkait SAKIP
   b. Perbedaan Rencana Tindak Lanjut/ Rencana Aksi pada Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja triwulan III tahun 2024
   c. Laporan Evaluasi Internal triwulan I s.d III tahun 2024 belum menyajikan analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya
   d. Rencana Aksi pada Laporan Evaluasi Internal kurang spesifik dan relevan terhadap kendala yang telah diidentifikasi
   e. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan monitoring tindak lanjut atas seluruh rencana aksi periode sebelumnya

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian nilai AKIP Inspektorat Utama tahun 2024 antara lain:

1. Rapat koordinasi perencanaan kinerja Inspektorat Utama tahun 2024 dengan seluruh pegawai Inspektorat Utama;
2. Reviu atas target indikator kinerja tahun 2024;
3. Penyusunan SK Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Manual IKU;
4. Penyempurnaan SOP Mikro dalam rangka pengumpulan data kinerja;
5. Menyusun dokumentasi kertas kerja penghitungan capaian kinerja indikator yang mampu tertelusur dan valid;
6. Pemantauan dan pelaporan kinerja berkala, baik bulanan maupun triwulanan melalui berbagai aplikasi pelaporan, antara lain e monev Bappenas, dan e-performance;
7. Penyusunan laporan kinerja interim dan tahunan sesuai dengan Pedoman SAKIP di lingkungan BPOM;
8. Pelaksanaan evaluasi internal setiap triwulan dalam rangka perbaikan kinerja.

INSPEKTORAT UTAMA

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama, menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP Inspektorat Utama Tahun 2024 yaitu:

1. Perencanaan Kinerja:
    a. Melakukan publikasi dokumen evaluasi paruh waktu Renstra Inspektorat Utama pada subsite Inspektorat Utama
    b. Melakukan publikasi dokumen perencanaan Inspektorat Utama tahun 2025 pada subsite Inspektorat Utama. (PK, RAPK, RKT, Rencana Strategis, SK Manual IKU)
    c. Mengoptimalkan tim monev pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Utama, Inspektorat I dan Inspektorat II untuk melaksanakan tugas sesuai Kepka BPOM No 111 Tahun 2024 tentang Tim monev pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2024
    d. Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan penyajian target dan langkah mitigasi
2. Pengukuran Kinerja:
    a. Menyusun notulen rapat evaluasi internal TW I sd IV 2025 dilengkapi dengan lampiran daftar hadir rapat
    b. Mencantumkan dan melampirkan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada RHPK/kertas kerja laporan kinerja dan laporan evaluasi internal
    c. Memastikan data capaian kinerja dapat ditelusuri dan sesuai dengan dokumen monev (sumber data) pada RHPK
    d. Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib
    e. Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja per triwulan oleh tim Monev Inspektorat Utama yang dituangkan dalam kertas kerja
3. Pelaporan Kinerja:

a. Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan
b. Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada pada data sumber, laporan evaluasi internal, dan laporan kinerja
c. Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap Sasaran Kinerja Pegawai Inspektur I dan Inspektur II, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja interim
d. Menyusun Laporan Kinerja Interim Tahun 2025 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya

4. Evaluasi Kinerja Internal:
   a. Menjadwalkan pengembangan kompetensi SAKIP pada tim penyusun Laporan Kinerja di IDEAS
   b. Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim
   c. Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan analisis capaian target output beserta kendala dan rencana tindak lanjutnya
   d. Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya

Sebagai informasi, dalam evaluasi paruh waktu renstra Inspektorat Utama tahun 2020-2024 indikator nilai AKIP Inspektorat Utama memiliki rekomendasi untuk melakukan penyesuaian target. Hal ini dikarenakan selama 3 tahun berturut-turut nilai AKIP Inspektorat Utama tidak tercapai serta pemetaan target di tahun 2024 memiliki target yang sulit untuk dicapai. Inspektorat Utama telah melakukan koordinasi untuk pembahasan indikator utama secara internal dan eksternal Bersama Biro Perencanaan dan Keuangan. Penyesuaian target yang disepakati yaitu:

Tabel 48 Penyesuaian target Nilai AKIP Inspektorat Utama 2024

Indikator	Semula	Menjadi	
	Target 2024	Indikator	Target 2024

Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,62	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,35

IKSP.15 Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. Kapabilitas APIP menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam Internal Audit Capability Model (IA-CM), APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Indeks mengacu pada 6 elemen Kapabilitas APIP:

1. Peran dan layanan;
2. Pengelolaan SDM;
3. Praktik professional;
4. Akuntabilitas dan manajemen kinerja;
5. Budaya dan hubungan organisasi; dan
6. Struktur tata kelola

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 44 Capaian IKU Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3	3	3	3,53	3,6	3,77	104,72	Sangat Baik	3,6	104,72 Tercapai/Melampaui

Pada tahun 2024, realisasi indikator kinerja "Nilai evaluasi Kapabilitas APIP" masih belum dapat mencapai target dengan capaian **88,25%** dan masuk dalam kriteria **"Sangat Baik". Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023**, realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,24 poin. Realisasi kinerja di tahun 2024 merupakan realisasi tertinggi jika dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2020-2024. Selanjutnya **jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra**, realisasi di tahun 2024 berhasil mencapai target dengan dengan capaian **104,72%** dengan kategori **"Tercapai/Melampaui".**

Sebagai Informasi, Inspektorat Utama telah menetapkan Program Pengembangan Dan Penjaminan Kualitas Di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan dengan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.02.02.7.04.24.15 Tahun 2024 tentang Program Pengembangan Dan Penjaminan Kualitas Di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Pelaksanaan program penjaminan kualitas Inspektorat Utama dilakukan dengan melaksanakan penilaian telaah sejawat intern/*peer review* oleh mitra sejawat di unit Inspektorat Utama dengan hasil perlunya peningkatan sebagai berikut:

a. pelaksanaan reviu secara berkala dan revisi terhadap Piagam Audit;
b. pelaksanaan program telaah sejawat intern secara berkala;

c. pengelolaan Kegiatan Audit Intern;
d. Merencanakan dan melaksanakan audit kinerja;
e. Melakukan revisi Pedoman/SOP audit Inspektorat Utama BPOM dengan menambahkan ketentuan kewajiban auditor untuk mencantumkan kinerja auditi yang memuaskan;
f. Membuat mekanisme yang memicu auditor untuk menyelesaikan laporan hasil audit secara tepat waktu;
g. Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Pengawasan Intern.

Di tahun 2024, telah dilakukan penilaian terhadap level kapabilitas APIP BPOM oleh BPKP dengan surat dinas No PE.09.03/SP-142/D2/03/2024 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2024 dengan rincian nilai sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,720
2.	Praktik Profesional	3	0,630
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,240
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0.240
5.	Struktur Tata Kelola	3	0.440
Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*)			
6.	Peran dan Layanan	3	1.500
Simpulan Level		**3**	**3,770**

Gambar 13 Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP BPOM Tahun 2024

Dari data di atas, terdapat elemen yang sudah mendapatkan level 4 yakni Akuntabilitas & Manajemen kinerja, budaya dan organisasi, dan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sementara elemen lainnya masih berada di level 3. untuk menuju level 4 dan meningkatkan peran Inspektorat Utama BPOM yang lebih efektif dalam mendukung pencapaian tujuan BPOM, BPKP menyampaikan *areas of improvement* sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan profil risiko organisasi (ERM) secara menyeluruh untuk menyusun prioritas pengawasan yang lebih relevan dengan risiko strategis organisasi;
2. Meningkatkan pelaksanaan audit kinerja yang berkelanjutan dan strategis dengan fokus pada aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, serta melakukan evaluasi kebijakan pengawasan secara rutin untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.
3. APIP BPOM perlu menyusun prosedur untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital secara real-time atas aplikasi-aplikasi yang dikelola BPOM dalam pelaksanaan dan pelaporan pengawasan dalam konteks penguatan *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM).

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, level kapabilitas APIP dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 45 Perbandingan capaian indikator level kapabilitas APIP dengan K/L lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,6	3,77	104,72
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Level iternal audit capability model (IACM)	3	3 (3,94)*[17]	131,33%
Inspektorat BPKP	Skor Kapabilitas Inspektorat	4	4,07*[18]	101,75%
Informasi Tambahan				
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan	Kapabilitas APIP	-	3,71[19]	-

Dari tabel di atas, Inspektorat Utama memiliki nilai kapabilitas APIP cukup rendah jika dibandingkan dengan Itjen KESDM dan Inspektorat BPKP. Beberapa catatan dalam evaluasi kapabilitas APIP yang telah

[17] Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023
[18] Laporan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2023
[19] PKPT Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2023

disinggung di atas, sangat perlu dicermati oleh Inspektorat Utama BPOM untuk meningkatkan nilai Kapabilitas APIP BPOM. Inspektorat Utama BPOM telah mengirimkan rencana aksi dari rekomendasi yang diberikan oleh evaluator BPKP pada Surat Dinas Inspektur Utama No B-PI.06.08.7.02.25.94.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 940.044.732 atau 100% dari pagu sebesar Rp 940.047.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 46 Efisiensi capaian kinerja indikator Level Kapabilitas APIP Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	940.047.000	940.044.732	100,00	104,72	1,05	1	0,05	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. **Upaya efisiensi yang dilakukan** pada indikator ini adalah dengan pemanfataan teknologi dalam koordinasi dengan para tim internal dan tim telaah sejawat ekstern serta rapat koordinasi internal dalam pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama.

Sebagai informasi, di tahun 2024 indikator “Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP” telah dilakukan Penyesuaian nomenklatur dan target. penyesuaian nomenklatur dilakukan menggunakan nilai karena adanya Adanya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mencantumkan skor/nilai pada hasil evaluasi Kapabilitas APIP. Sehingga indikator dapat terukur dengan lebih jelas dengan menggunakan nilai/skor. Penentuan target dilakukan menggunakan baseline hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2023 dengan skor 3,53.

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029, indikator ini merupakan indikator yang sangat relevan untuk dilanjutkan. **Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama sebagai upaya perbaikan pada indikator kinerja utama tersebut, adalah** melakukan koordinasi secara intensif dengan evaluator dari BPKP serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya, menyusun PKPT 2025 sesuai kaidah IACM serta melaksanakan kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator seperti: implementasi IACM dan Maturitas SPIP, evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama, seminar nasional internal audit, penyusunan laporan evaluasi internal, laporan pengawasan, dan laporan tahunan.

IKSP.16 Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai pengelolaan kearsipan merupakan direktif penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian sesuai dengan Surat Kepala Biro Umum BPOM No B-KP.09.01.24.01.24.40. Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/Anggaran.

Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan dari hasil penilaian pengelolaan kearsipan oleh Biro Umum.

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 47 Capaian IKU Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	96,65	98,84	102,27	Sangat Baik	96,65	102,27 Tercapai/ Melampaui

Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan direktif penugasan yang diberikan Biro Umum dan masuk pada perjanjian kinerja. **Pada tahun 2024,** realisasi indikator kinerja "Nilai Pengelolaan Kearsipan" berhasil mencapai target dengan capaian **102,27%** dan masuk dalam kriteria **"Sangat Baik".** Indikator ini belum dapat **dibandingkan dengan realisasi di tahun sebelumnya** karena merupakan indikator baru di tahun 2024. Selanjutnya **jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra**, realisasi kinerja tahun 2024 masuk kategori **"Tercapai/Melampaui".** Realisasi kinerja 98,84 merupakan hasil dari rata-rata nilai pengelolaan kearsipan pada Inspektorat I (97,69) dan Inspektorat II (100).

Jika dibandingkan dengan Satuan Kerja di BPOM, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 48 Perbandingan nilai pengelolaan kearsipan dengan satuan kerja di BPOM

Unit Kerja	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Satuan Kerja	Nilai Pengelolaan Kearsipan
Inspektorat I	97,69	Inspektorat Utama	98,84
Inspektorat II	100		
Biro SDM	99,32	Sekretariat Utama	98,87
Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat	98,98		
Biro Hukum dan Organisasi	98,47		

INSPEKTORAT UTAMA

Unit Kerja	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Satuan Kerja	Nilai Pengelolaan Kearsipan
Biro Perencanaan dan Keuangan	98,46		
Biro Umum	99,15		
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (ONSP)	98,46	Deputi I	96,09
Direktorat Registrasi Obat	98,41		
Direktorat Pengawasan Produksi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (ONSP)	97,74		
Direktorat Strandarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, prekursor, dan zat adiktif	94,73		
Direktorat pengawasan keamanan, mutu, dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif	91,11		

Dari data di atas, nilai pengelolaan kearsipan Inspektorat Utama sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan Sekretariat Utama dan Deputi I.

Keberhasilan capaian target indikator ini didukung dengan:

1. Melakukan penciptaan arsip melalui aplikasi SRIKANDI dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan POM;
2. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi yang memuat klasifikasi keamanan akses berdasarkan Peraturan Badan POM

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Badan POM;

3. Melakukan penciptaan arsip melalui aplikasi SRIKANDI dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan POM;
4. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi yang memuat klasifikasi keamanan akses berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Badan POM;
5. Memberkaskan arsip aktif berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan POM serta melaporkan daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan ke Unit Kearsipan;
6. Memperbarui daftar arsip vital Inspektorat Utama setiap tahunnya;
7. Melakukan penyusutan arsip berupa pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan secara rutin (maksimal 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun) berdasarkan jadwal retensi arsip;
8. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kearsipan bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip;
9. Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan ketentuan.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp80.739.417 atau 100% dari pagu sebesar Rp 80.740.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 49 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Pengalolaan Kearsipan Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Pengelolaan Kearsipan	80.740.000	80.739.417	100,00	102,27	1,02	1	0,02	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan capaian anggaran. Realisasi anggaran yang mendukung indikator ini adalah Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya pada Inspektorat I dan Inspektorat II.

Pada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029, indikator ini cukup dimasukan pada SKP sebagai direktif penugasan dan tidak masuk dalam perjanjian kinerja. **Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama untuk mempertahankan Nilai Pengelolaan Kearsipan,** adalah:

1. Melakukan penciptaan arsip melalui aplikasi SRIKANDI dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan POM;
2. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi yang memuat klasifikasi keamanan akses berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Badan POM;
3. Memberkaskan arsip aktif berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan POM serta melaporkan daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan ke Unit Kearsipan;
4. Memperbarui daftar arsip vital Inspektorat Utama setiap tahunnya;

5. Melakukan penyusutan arsip berupa pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan secara rutin (maksimal 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun) berdasarkan jadwal retensi arsip;
6. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kearsipan bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip; dan
7. Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya adalah melihat Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7 dalam tabel berikut:

Tabel 50 Capaian Sasaran Program Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	85,31	86,70	86,39	99,64	Cukup
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,5	84,35	81,58	96,72	Cukup
	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,53	3,6	3,77	104,72	Sangat Baik
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Indikator Baru	96,65	98,84	102,27	Sangat Baik
	Capaian Sasaran				100,84	-

Capaian Sasaran Program 7 – Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang efektif adalah 100,84. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 (94,96) realisasi kinerja 2024 mengalami peningkatan sebesar **5,88 poin**. Hal ini dikarenakan terdapatnya peningkatan realisasi kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan mencapai target di beberapa indikator. Sasaran program 7 memiliki indikator-indikator yang sangat relevan dilanjutkan pada periode renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 terkecuali nilai pengelolaan kearsipan yang merupakan direktif penugasan.

3.1.8 Capaian Sasaran Program 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari: (1) penyusunan dan penetapan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) pola karir, pangkat, dan jabatan; (4) pengembangan karir, penilaian kinerja, dan disiplin; (5) promosi-mutasi; (6) penghargaan penggajian, dan tunjangan; (7) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua; sampai dengan (8) pemberhentian.

Keberhasilan Sasaran Program ini diukur dengan indikator kinerja "Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama". Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 55 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92,37	92,48	86,76	93,81%	Cukup

IKU: Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;

2. Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan
4. Disiplin, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada Surat Edaran Sekretaris Utama No. B-KP.17.2.24.07.23.510 hal Perubahan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dimana Terdapat penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN, sebagai berikut:

a. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki (terlampir);
b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
c. Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop/sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;
d. Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja (terlampir); dan
e. Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

Target indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama di tahun 2024 mengalami penyesuaian pada Triwulan III sampai dengan akhir tahun 2024. penyesuaian dilakukan berdasarkan reviu target di triwulan I dimana capaian kinerja di triwulan I sudah melebihi 120%. Penyesuaian target IP ASN tahun 2024 sudah disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 51 Penyesuaian Target Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama Tahun 2024

Indikator	Semula	Menjadi		Justifikasi
	Target 2024	Indikator	Target 2024	
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	89,67	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92,48	• Terdapatnya capaian kinerja di bulan maret 2024 lebih dari 120%. penentuan target digunakan berdasarkan rata-rata IP ASN di setiap bulan selama 2 tahun. • Penentuan target berdasarkan rata-rata nilai IP ASN seluruh pegawai Inspektorat Utama dari data Biro SDM

Tabel 52 Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan IV 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra	Kategori
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%	13
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,3	85,7	85,21	92,37	92,48	86,76	93,81%	Cukup	92,48	93,81%	Akan Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran, **indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama pada Tahun 2024** adalah sebesar 86,76[20] atau 93,81% dengan kategori "Cukup". **Jika dibandingkan dengan tahun 2023,** realisasi kinerja Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,61 poin. **Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra**, realisasi kinerja di tahun 2024 masuk dalam kategori **"Akan Tercapai". Ketidakberhasilan mencapai target** ini dikarenakan terdapat perubahan instrumen pengukuran IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga

[20] Surat Dinas Biro Sumber Daya Manusia No B-KP.17.24.01.25.52 Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2024

termasuk konversi hasil penilaian kinerja[21]. Capaian indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama di Tahun 2024 adalah karena sudah ada beberapa pegawai Inspektorat Utama yang belum melakukan diklat teknis dan fungsional di jabatan fungsional tertentu.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, capaian indikator indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 53 perbandingan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama dengan K/L lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92,48	86,76	93,81%
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks profesionalitas ASN Itjen	78	89,79*[22]	111,65%
Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Indeks profesionalitas ASN lingkup Itjen	83	90,61*[23]	109,17%

Dari data di atas, Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama memiliki indeks yang paling rendah dibandingkan dengan Itjen KESDM dan Itjen KKP. Namun perbandingan ini masih menggunakan data kinerja di tahun 2023 karena terbatasnya akses informasi ter*update* pada Itjen KESDM dan Itjen KKP. **Selanjutnya, jika dibandingkan dengan Satuan Kerja di BPOM,** capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

[21] Berdasarkan Nota dinas Biro Perencanaan dan Keuangan no KP.17.21.11.24.349 hal Tanggapan Atas Usulan Perubahan Target Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Tahun 2024
[22] Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023
[23] Laporan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Tabel 54 Perbandingan indikator Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama dengan Satker BPOM[24]

Rekapitulasi IP ASN Badan POM Tahun 2024

Unit Kerja	Capaian IP ASN 2024
BPOM	
BPOM	86,98
Unit Kerja Pusat	87,25
Balai Besar/Balai POM	87,10
Loka POM	86,56
IP ASN UNIT ESELON I	
Inspektorat Utama	86,76
Sekretariat Utama	86,58
Deputi Bidang Penindakan	87,23
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	87,35
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan. dan Kosmetik	87,82
Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat adiktif	88,49

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa Indeks Profesionalitas Inspektorat Utama memiliki capaian IP ASN Tertinggi di lingkup satuan kerja BPOM. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama masih lebih rendah terhadap indeks profesionalitas BPOM.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1.857.790.062 atau 100% dari pagu sebesar Rp 1.857.800.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 58 Efisiensi capaian kinerja indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	1.857.800.000	1.857.790.062	100,00	93,81	0,94	1	-0,06	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dikarenakan nilai realisasi kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran.

[24] Surat Dinas Biro Sumber Daya Manusia No B-KP.17.24.01.25.52 Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2024

Upaya efisiensi yang telah dilakukan pada indikator ini adalah dengan melakukan kegiatan pelatihan dan pendidikan secara daring seperti Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), mengikuti e-learning seperti IDEAS BPOM maupun memberdayakan sumber-sumber pelatihan dari instansi lain seperti MOOC BPKP dan LKPP, Kementerian Keuangan Learning Center, hingga Badan Standardisasi Nasional (BSN). Selanjutnya juga dilakukan dengan mengikuti PAKSI dan QIA secara daring.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada Tahun 2024 adalah kegiatan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN Inspektorat Utama. Setiap ASN Inspektorat Utama diwajibkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) setiap tahunnya sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 203. Dengan banyaknya webinar/seminar online/*e-Learning* yang diselenggarakan baik dari Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM) maupun penyelenggara pelatihan eksternal, baik yang berbayar maupun tidak berbayar, dapat menjadi salah satu kegiatan pengembangan kompetensi yang diharapkan dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Inspektorat Utama menyelenggarakan kegiatan *in house training* untuk pelatihan yang bersifat teknis maupun non teknis bagi pegawai internal Inspektorat Utama dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten, baik dari auditor Inspektorat Utama, maupun dari luar Inspektorat Utama. Adapun kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti/dilaksanakan antara lain:

- Diklat Fungsional Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik Diklat Pembentukan maupun Diklat Penjenjangan JFA
- Pelatihan/Sertifikasi *Certified Risk Management Officer* (CRMO)
- Pelatihan/Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
- Pelatihan/Sertifikasi *Certified Government Accounting Expert* (CGAE)

Meskipun berhasil mencapai target di tahun 2024, masih terdapat beberapa **hambatan** yang menyebabkan indeks profesionalitas ASN belum optimal, ini disebabkan karena masih adanya perubahan pimpinan satuan kerja yang

SKP nya masih belum dapat diperhitungkan dalam IP ASN BPOM, pegawai yang merupakan calon auditor namun belum melaksanakan diklat jabatan fungsional karena masih berstatus auditor kepegawaian.

Pada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama, indikator ini tidak dilanjutkan berdasarkan informasi dari Biro Sumber Daya Manusia. Meskipun tidak menjadi indikator, **rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama,** antara lain:

1. Monitoring dan update SKP Pimpinan Satker secara berkala;
2. Melakukan diklat/pelatihan manajerial atau kompetensi yang diperlukan bagi para pimpinan;
3. Menyusun pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat Utama pada tahun 2025;
4. Monitoring kedisiplinan pegawai Inspektorat Utama secara berkala;

Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 59 Capaian Sasaran Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92,37	92,48	86,76	93,81%	Cukup
	Capaian Sasaran				93,81	

Capaian Sasaran Program 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal memiliki nilai 93,81%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sasaran program 8 mengalami penurunan sebesar -14,67 poin. Nilai pencapaian sasaran program 8 di tahun 2023 adalah 108,48. Penurunan ini dikarenakan terdapat perubahan instrumen pengukuran IP ASN dari BKN.

3.1.9 Capaian Sasaran Program 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan intern yang efektif adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan intern yang pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas pengawasan intern. Pada periode Renstra 2015-2019, Inspektorat Utama telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Inspektorat Utama. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran program ini, indikator kinerja yang digunakan yaitu "Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal". Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 55 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	3	3,6	120%	Sangat Baik

*sumber data: Sakip Corner ittama

IKU: Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal

Pengukuran indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BPOM *Operation Center* (BOC), dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Data dan informasi yang dimaksud yaitu data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM;
b) Data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
c) Data dan informasi dalam sistem BOC harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data sesuai data kinerja masing-masing.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja, yang mencakup *corporate e-mail* dan *dashboard* BOC.

Tabel 56 Capaian IKU Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Inspektorat Utama Yang Optimal Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	0	1	3	3	3	3,6	120,00	Sangat Baik	3	120,00 Tercapai/Melampaui

Pada tahun 2024, realisasi kinerja Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal adalah 3,6 dengan capaian 120% atau kategori **"Sangat Baik". Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,** realisasi kinerja ini meningkat sebanyak 0,6 poin. Realisasi kinerja indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal selama tahun 2020-2024 memiliki kinerja yang selalu meningkat selama tiap tahunnya. **Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra,** realisasi kinerja tahun 2024 berhasil mencapai 120% atau masuk

dalam kategori **"Tercapai/Melampaui"**. Realisasi kinerja sebesar 3,6 merupakan nilai yang berasal dari konversi capaian indikator kinerja mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaran SAKIP di Lingkungan BPOM, hal ini dilakukan sesuai dengan nota dinas sekretariat utama no PR.09.03.2.01.25.42 hal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024. **Realisasi ini berbeda dengan realisasi yang ada di Berita Acara Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun 2024** (3), karena adanya nota dinas sekretariat utama no PR.09.03.2.01.25.42 hal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, capaian indikator Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Inspektorat Utama Yang Optimal belum dapat ditemukan di K/L lain. Namun jika dibandingkan dengan unit kerja di lingkup BPOM dapat dilihat sebagai berikut:

No	Nama Balai	Data dan Informasi Mutakhir	Jumlah	Pemanfaatan Sistem Informasi		Jumlah	Total Nilai i i = b + e / 2
		Dashboard BOC (a)	b = a	Email (c)	Dashboard BOC (d)	e = c + d / 2	
1	Inspektorat I	3	3	3	3	3	3
2	Inspektorat II	3	3	3	3	3	3
3	Biro Hukum Dan Organisasi	3	3	3	3	3	3
4	Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat	3	3	3	3	3	3
5	Biro Sumber Daya Manusia	3	3	3	3	3	3
6	Biro Umum	3	3	3	3	3	3
7	Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan	3	3	3	3	3	3
8	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat Dan Makanan	3	3	3	3	3	3
9	Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional	3	3	3	3	3	3
10	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3	3	3	3	3	3

Gambar 14 Perbandingan capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Lingkup Inspektorat Utama dengan Unit Kerja BPOM

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1,312,690,993 atau 99,97% dari pagu sebesar Rp 1,313,049,500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 57 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Inspektorat Utama Yang Optimal Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	329.880.000	329.878.778	100,00	120,00	1,20	1	0,20	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. Kegiatan yang terealisasi dalam mendukung capaian indikator ini adalah pengadaan alat pengolah data, pengembangan aplikasi, pengembangan TIK Inspektorat Utama. Inspektorat mengupayakan **efisiensi anggaran** dengan dilakukannya pengadaan alat pengolah data yang memiliki spesifikasi yang dibutuhkan dengan harga yang paling rendah, pelaksanaan koordinasi terkait pengembangan aplikasi yang dilakukan secara *daring* atau *hybrid,* pemanfaatan teknologi yang optimal terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut mampu mendukung indikator ini tercapai sampai melewati target yang ditetapkan sehingga terwujudnya efisiensi anggaran pada indikator ini.

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat Utama untuk mencapai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama dilakukan dengan hal berikut:

1. Penunjukkan *person in charge* (PIC) di masing-masing unit satuan kerja di lingkungan Inspektorat Utama untuk melakukan pemutakhiran data yang rutin per bulan, dan melakukan pemantauan bulanan;
2. Melakukan sosialisasi berkala tentang penggunaan e-mail corporate Badan BPOM di lingkungan Inspektorat Utama;
3. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak memanfaatkan *email corporate*

Pada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029, indikator ini tidak dilanjutkan berdasarkan informasi dari Pusat Data dan Informasi. **Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama terhadap** Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal**,** antara lain:

1. Monitoring pengisian pemutakhiran data oleh PIC secara berkala;
2. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan email corporate melalui Laporan penggunaan email;
3. Melakukan pemanfaatan sistem corporate dan verifikasi secara berkala setiap minggu;

Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 63 Capaian Sasaran Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target	2024		
				Realisasi	Capaian	Kategori
Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	3	3,6	120%	Sangat Baik
	Capaian Sasaran				**120**	

Sasaran Program 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama mencapai nilai 120. jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi sasaran program 9 di tahun 2024 berhasil mempertahankan realisasi di tahun 2023.

3.1.10 Capaian Sasaran Program 10 – Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama Secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Inspektorat dalam mengelola anggaran secara akuntabel adalah sasaran program 10, dengan

ukuran keberhasilannya yaitu: “Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama”, “Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa”, “Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara”, dan “Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri” .

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 64 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023	2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kritera
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	90,43	93,74	98,75	105,34%	Sangat Baik
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	82,17	100	121,70%	Tidak dapat disimpulkan
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	95	98,41	103,59%	Sangat Baik
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	60%	97,22%	162,03%	Tidak dapat disimpulkan

IKSP.19 Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan indikator yang mencerminkan kinerja penyerapan, konsistensi atas perencanaan, capaian, serta efisiensi dari penggunaan anggaran suatu instansi/satuan kerja. Sedangkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan

anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Namun di tahun 2024, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan No Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA): Aspek Kualitas perencanaan anggaran: (1) Revisi DIPA (10%); (2) Deviasi Hal III DIPA(15%); Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran: (3) Penyerapan Anggaran (20%); (4) Belanja kontraktual (10%); (5) Penyelesaian Tagihan (10%); (6) Pengelolaan UP dan TUP (10%); (7) Dispensasi SPM (menjadi pengurang nilai IKPA) Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran: ; (8) Capaian Output (25%);

Tabel 58 Indikator IKPA Tahun 2024

Indikator	Bobot
Revisi DIPA	10%
Deviasi Hal III DIPA	15%
Penyerapan Anggaran	20%
Belanja Kontraktual	10%
Penyelesaian Tagihan	10%
Pengelolaan UP dan TUP	10%
Dispensasi SPM	Menjadi pengurang nilai IKPA
Capaian Output	25%

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

merupakan instrumen yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Utama. Berdasarkan PMK 62 Tahun 2023 yang terdiri atas 2 indikator pada aspek implementasi, yaitu: Efektivitas dan Efisiensi.

Tabel 59 Indikator pada aspek implementasi

Indikator		Bobot
Efektivitas	Capaian RO (RVRO/TVRO)	75 %
Efisiensi	Efisiensi SBK	15 %
	Penggunaan SBK	10 %

capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama dapat dihitung dengan rumus berikut:

Nilai	Kinerja	=	(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)
Anggaran	(NKA)	=	(100 x 50%) + (97,50 x 50%)
Inspektorat Utama		=	(50) + (48,75)
		=	98,75

Pada triwulan II, terdapat penyesuaian target mulai dari Triwulan III sampai dengan triwulan IV bulan 11. Penyesuaian target pada indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA), dilakukan sesuai dengan arahan pada surat Sekretariat Utama No BPR.07.2.21.05.24.382 dengan menghapus target pada bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-11 dan tidak mengubah target pada akhir tahun. Secara lebih rinci, penyesuaian target NKA dapat dilihat sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 60 Penyesuaian target RAPK pada IKU Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2024

Indikator	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Bulan	Target	Bulan	Target	
Nilai Kinerja Anggaran	April	60	April	-	Komponen pembentuk NKA yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) baru akan diperoleh pada akhir tahun pelaksanaan anggaran
	Mei	65	Mei	-	
	Juni	70	Juni	-	
	Juli	75	Juli	-	
	Agustus	78	Agustus	-	
	September	80	September	-	
	Oktober	85	Oktober	-	
	November	90	November	-	
	Desember	93,74	Desember	93,74	

Tabel 61 Capaian IKU Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

IKU	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama					
T/R	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Y**	**Keterangan**
Target	55	-	-	-	93,74	Nilai IKPA Desember: 97,50 Nilai EKA Desember: 100
Realisasi	50	-	-	-	98,75	
Capaian	90,91%	-	-	-	105,34%	

Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama banding target Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 62 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10 banding target Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	97,32	93,86	93,04	90,43	93,74	98,75	105,34	Sangat Baik	93,74	105,34 Tercapai/Melampaui

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama tahun 2024 berhasil mencapai target dengan kategori **"Sangat Baik"**. **Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,** realisasi kinerja tahun 2024 meningkat sebesar 8,32 poin. Realisasi kinerja di tahun 2024 merupakan realisasi kinerja tertinggi selama tahun 2020-2024. **Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra,** realisasi kinerja tahun 2024 sudah mencapai 105,34% atau **"Tercapai/Melampaui"**. Dalam mencapai **NKA Inspektorat Utama, terdapat rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan** antara lain:

1. Satker melakukan reviu atas alokasi anggaran dalam DIPA. Apabila berdasarkan hasil reviu tersebut memerlukan pergeseran anggaran untuk menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai output DIPA, maka di awal tahun dilakukan revisi pergeseran anggaran pada DIPA dan revisi rencana penarikan dana halaman III DIPA sesuai dengan perkiraan penarikan/realisasi rencana kegiatannya;
2. Memperhitungkan pagu anggaran per jenis belanja, blokir, rencana kegiatan, belanja kontraktual, dan rencana pencairan dana;dan
3. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Revisi pergeseran anggaran pada DIPA dan revisi rencana penarikan dana pada halaman III DIPA;
2. Inspektorat Utama melakukan *Automatic Adjustment* sebesar sebesar Rp 999.793.000 berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.01.2.21.01.24.10 tentang Revisi *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024;
3. Inspektorat Utama melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp 816.301.000 berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor PR.05.03.2.11.24.34 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Badan POM TA 2024, serta Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Tanggal 7 November 2024 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024;
4. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L;
5. Melakukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA secara triwulanan sesuai dengan reviu kebutuhan pencairan anggaran Inspektorat Utama dan menjaga akurasi dan tetap menjaga konsistensi realisasi anggaran dengan RPD Halaman III DIPA dengan batas toleransi deviasi tidak lebih dari 5%;
6. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap triwulan sesuai dengan jenis belanja berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun;dan
7. Inspektorat Utama melakukan penambahan Rincian Output berupa Layanan BMN untuk menunjang indikator efisiensi berupa penggunaan dan efisiendsi Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 9.518.577.393 atau 100,00% dari pagu sebesar Rp 9.518.614.500 sehingga jika

dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 63 Analisis Efisiensi Terhadap Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	9.518.614.500	9.518.577.393	100,00%	105,34%	1,05	1	0,05	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien, hal ini dikarenakan capaian anggaran masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja. Anggaran yang terealisasi dalam mendukung indikator ini adalah dilakukannya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, koordinasi pengelolaan kinerja dan anggaran Inspektorat Utama. **Upaya yang dilakukan daam efisiensi anggaran** adalah dengan melakukan rapat pertemuan untuk koordinasi antar PPK dan pengelola kegiatan sehingga lebih efektif. Pelaksanaan rapat yang dilaksanakan *hybrid* atau bahkan *full daring* di beberapa kesempatan.

Sebagai informasi, di tahun 2024 indikator kinerja dilakukan penyesuaian target karena berdasarkan reviu target di tahun 2023 selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, mengalami penurunan baik di realisasi ataupun capaian terhadap target setiap tahunnya. Penyesuaian target di tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 64 Penyesuaian target indikator "Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama" tahun 2024

Semula		Menjadi	
Indikator	Target 2024	Indikator	Target 2024
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	96,9	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,74

IKSP.19 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

INSPEKTORAT UTAMA

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Sehingga terdapat Surat Sekretaris Utama No B-KP.09.01.24.01.24.40 hal Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian. Nilai pengelolan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 indikator:

a. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya ;
b. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa;
c. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing);
d. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE;
e. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE

Indikator dihitung dengan Total Nilai dari Persentase RUP (20%) + Persentase Penerapan E-Tendering (20%) + Persentase E-Purchasing (20%) + Persentase Non Tendering dan Non e-Purchasing (20%) + Persentase e-Kontrak (20%)

Tabel 65 Capaian IKU Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	82,17	100	121,70	Tidak dapat disimpulkan	82,17	121,70 Tercapai/Melampaui

Indikator Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa merupakan direktif penugasan yang diberikan Biro Umum dan masuk pada perjanjian

kinerja. **Pada tahun 2024,** realisasi indikator kinerja "Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa" berhasil mencapai target dengan capaian **121,70%** dan masuk dalam kriteria **"Tidak dapat disimpulkan".** Indikator ini belum dapat **dibandingkan dengan realisasi di tahun sebelumnya** karena merupakan indikator baru di tahun 2024. Selanjutnya **jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra**, realisasi kinerja tahun 2024 masuk kategori **"Tercapai/Melampaui".** Realisasi kinerja 100 berdasarkan surat dari Biro Umum No B-KP.09.01.25.01.25.37 hal Hasil Pengukuran Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.

Jika dibandingkan dengan Satuan Kerja di BPOM, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 66 Perbandingan Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa satuan kerja di BPOM

Satuan Kerja	Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Inspektorat Utama	100
Sekretariat Utama	90
Deputi I	90
Deputi II	95
Deputi III	95
Deputi IV	65

Dari data di atas, nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang/jasa memiliki realisasi kinerja tertinggi jika dibandingkan dengan Satuan kerja lainnya. **Keberhasilan capaian target indikator ini didukung dengan:**

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian kualitas PBJ
2. Penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing)
3. Mengumumkan RUP dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya

4. Penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa
5. penerapan proses non ETendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE
6. Melakukan E- Kontrak pada aplikasi SPSE

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029, indikator ini tidak dilanjutkan sebagai indikator kinerja karena masuk pada direktif penugasan, dan cukup hanya pada SKP.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp944.383.077 atau 100% dari pagu sebesar Rp944.386.500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 73 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	944.386.500	944.383.077	100,00	121,70	1,22	1	0,22	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. Kegiatan yang terealisasi dalam mendukung capaian indikator ini adalah pengadaan fasilitas perkantoran, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan, administrasi keuangan. Inspektorat mengupayakan **efisiensi anggaran** dengan dilakukannya pelaksanaan koordinasi terkait administrasi keuangan yang dilakukan secara *daring* atau *hybrid*, pemanfataan teknologi yang optimal terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

INSPEKTORAT UTAMA

IKSP.20 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Sehingga terdapat Surat Sekretaris Utama No B-KP.09.01.24.01.24.40 hal Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian. Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

Indikator dihitung dengan Penjumlahan nilai dari masing-masing aspek penilaian: Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) (20%), Persentase Penghapusan (20%), Persentase Pemusnahan (20%), Penatausahaan yang Baik (30%), Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (10%).

Tabel 67 Capaian IKU Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	95	98,41	103,59	Sangat Baik	95	103,59 Tercapai/Melampaui

Pada tahun 2024, realisasi kinerja mencapai 103,59% dengan kategori **"Sangat Baik"**. Indikator ini belum dapat **dibandingkan dengan realisasi di tahun sebelumnya** karena merupakan indikator baru di tahun 2024. Selanjutnya **jika dibandingkan dengan target akhir**

periode renstra, realisasi kinerja tahun 2024 masuk kategori **"Tercapai/Melampaui".** Realisasi kinerja 98,41 berdasarkan surat dari Biro Umum No B-PL.03.01.25.01.25.17 hal Perbaikan Penyampaian Hasil Evaluasi Atas Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM.

Jika dibandingkan dengan Satuan Kerja di BPOM, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 68 Perbandingan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara satuan kerja di BPOM

Satuan Kerja	Nilai Pengelolaan BMN
Inspektorat Utama	98,41
Sekretariat Utama	98,64
Deputi I	91,41
Deputi II	94,56
Deputi III	98,52
Deputi IV	93,10

Dari data di atas, nilai pengelolaan barang milik negara memiliki realisasi kinerja yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan Satuan kerja lainnya. **Keberhasilan capaian target indikator ini didukung dengan:**

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian pengelolaan BMN;
2. Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu;
3. Ketepatan waktu dalam penyampaian RKBMN;
4. Penetapan status penggunaan terhadap BMN oleh pengelola BMN;
5. Penghapusan dan pemusnahan BMN sesuai dengan (PMK 80/PMK.06/2016).

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp1.901.216.655 atau 100% dari pagu sebesar Rp1.901.222.500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 69 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	1.901.222.500	1.901.216.655	100,00	103,59	1,04	1	0,04	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. Kegiatan yang terealisasi dalam mendukung capaian indikator ini adalah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, pengelolaan penggunaan anggaran dan BMN. Inspektorat mengupayakan **efisiensi anggaran** dengan dilakukannya pelaksanaan koordinasi internal yang dilakukan secara *daring* atau *hybrid*, serta pemanfataan teknologi yang optimal terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029, indikator ini tidak dilanjutkan sebagai indikator kinerja karena masuk pada direktif penugasan, dan cukup hanya pada SKP. **Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama terhadap Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara,** antara lain:

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian pengelolaan BMN;
2. Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu;
3. Ketepatan waktu dalam penyampaian RKBMN;
4. Penetapan status penggunaan terhadap BMN oleh pengelola BMN;
5. Penghapusan dan pemusnahan BMN sesuai dengan (PMK 80/PMK.06/2016).

IKSP.22 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

INSPEKTORAT UTAMA

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Sehingga terdapat Surat Sekretaris Utama No B-KP.09.01.24.01.24.40 hal Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian. Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan;
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Indikator dihitung dengan Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%);
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%);
3. Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%.

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 70 Capaian IKU Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Tahun 2024				Target Akhir Periode Renstra	(%) Realisasi terhadap target akhir periode renstra
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Indikator Baru				60%	97,22%	162,03	Tidak dapat disimpulkan 	60%	162,03 Tercapai /Melampaui 

Pada tahun 2024, realisasi kinerja berhasil mencapai target dengan capaian 162,03% dengan kategori **"Tidak dapat disimpulkan.** Indikator ini belum dapat **dibandingkan dengan realisasi di tahun sebelumnya** karena merupakan indikator baru di tahun 2024. Selanjutnya **jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra**, realisasi kinerja tahun 2024 masuk kategori **"Tercapai/Melampaui".** Realisasi kinerja 97,22% berdasarkan surat dari Biro Umum No B- KP.09.01.25.01.25.37 hal Hasil Pengukuran Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.

Jika dibandingkan dengan Satuan Kerja di BPOM, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 71 Perbandingan Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri satuan kerja di BPOM

Satuan Kerja	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri
Inspektorat Utama	97,22
Sekretariat Utama	90,36
Deputi I	96,44
Deputi II	78,61
Deputi III	86,80
Deputi IV	78,41

Dari data di atas, nilai pengelolaan barang milik negara memiliki realisasi kinerja yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan Satuan kerja lainnya. **Keberhasilan capaian target indikator ini didukung dengan Melakukan pembelian barang dan jasa yang terdaftar produk dalam negeri (PDN).**

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp937.723.077 atau 100% dari pagu sebesar Rp937.726.500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 72 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan III tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	937.726.500	937.723.077	100,00	162,03	1,62	1	0,62	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. Kegiatan yang terealisasi dalam mendukung capaian indikator ini adalah evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. Inspektorat mengupayakan **efisiensi anggaran** dengan dilakukannya pelaksanaan koordinasi internal yang dilakukan secara *daring* atau *hybrid*, serta pemanfataan teknologi yang optimal terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri, antara lain Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang dalam penggunaan produk dalam negeri.

Tabel 73 Capaian Sasaran Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel Tahun 2024

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023	2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kritera
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	90,43	93,74	98,75	105,34%	Sangat Baik
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	82,17	100	121,70%	Tidak dapat disimpulkan
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	95	98,41	103,59%	Sangat Baik
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	60%	97,22%	162,03%	Tidak dapat disimpulkan
Sasaran Program 10					112,23	-

Sasaran Program 10 – Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama Secara Akuntabel memiliki realisasi 112,23 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan SP.10 di tahun 2023 (94,49) maka di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 17,74 poin. Hal ini dikarenakan adanya penambahan indikator dan seluruh indikator mencapai target 2024.

3.2 Evaluasi Tahun Ke-5 Inspektorat Utama

3.2.1 Evaluasi akhir pada Sasaran Program 1 (SP.1) **Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif**

Sasaran Program 1 (SP.1) Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif, didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja sasaran program (IKSP). Evaluasi akhir pada SP.1 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSP.1 Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas

Tabel 74 Kertas Kerja analisis tren IKSP.1 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	Indeks Kinerja Sasaran Program	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas										Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30%	56,45%	Indikator Baru	Belum dapat disimpulkan	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Indikator ini merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 yang diturunkan langsung kepada Inspektorat I dan Inspektorat II. Pada tahun 2024, realisasi kinerja mampu mencapai target dengan capaian >120%. Dikarenakan indikator baru muncul pada tahun 2024 sehingga hasil perkembangan kinerja belum dapat disimpulkan, karena perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan.

Tabel 75 Kertas Kerja analisis gap IKSP.1 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Persentase									30%	56,45%	188,2	Tercapai	Inspektorat Utama	Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024. Indikator ini berhasil mencapai target pada akhir periode renstra >120% dengan kategori "Tercapai".

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja "Persentase Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas" merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 yang diturunkan langsung kepada Inspektorat I dan Inspektorat II. Indikator ini merupakan indikator pengganti dari Indikator "Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan" yang sudah tidak relevan lagi dilanjutkan pada tahun 2024 karena adanya perubahan road map Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2024, realisasi kinerja pada indikator kinerja "Persentase Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas" mampu mencapai target dengan capaian >120%. beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai realisasi indikator ini adalah:

1. Terdapatnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja;
3. Monitoring Pengisian LKE Zona Integritas;
4. Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM;
5. *Forum Group Discussion* Penguatan Peran dan Mitigasi Risiko serta Akselerasi Zona Integritas;
6. Bimbingan Teknis Implementasi ZI pada Loka POM Pilotting;
7. Penyampaian Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju WBK WBBM Tahun 2024;
8. Penyampaian Laporan Progres Penilaian Unit Kerja WBK di Lingkungan BPOM secara Mandiri;

9. Pelaksanaan evaluasi zona integritas lingkup BPOM;
10. Monitoring PKPT 2024 pada kegiatan pembangunan zona integritas.

Hasil dari evaluasi pada indikator "Persentase Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **''belum dapat disimpulkan''** karena perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan dan masuk dalam kategori **''Tercapai''.**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan salah satu penilaian yang masuk pada Reformasi Birokrasi General, sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 masih sangat relevan untuk dilanjutkan dengan catatan perlunya dilakukan penentuan target dengan pertimbangan realisasi kinerja di tahun 2024. Selain itu, direkomendasikan agar dilakukan pembaharuan definisi operasional indikator pada periode renstra selanjutnya. Hal ini agar definisi operasional indikator lebih selaras dengan definisi operasional indikator pada penilaian RB general BPOM. Pada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029, menggunakan *logframe* sehingga di tahun 2025-2029 indikator ini berada pada level eselon II. Untuk di level eselon I akan menggunakan indikator baru yang mencakup indikator:

1. Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas
2. Nilai survei penilaian integritas
3. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM (Bagian dari SAKIP BPOM)
4. Nilai evaluasi SPIP BPOM
5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Indikator pada level eselon I pada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 adalah "Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama" penentuan target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2020-2024. target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel x target Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17,88	18,05	18,22	18,40	18,57

IKSP.2 Nilai Survei Penilaian Integritas

Tabel 76 Kertas Kerja analisis tren IKSP.2 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										Perkembangan Kinerja		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Survei Penilaian Integritas										83,48	83,98	Indikator Baru	Belum dapat disimpulkan	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Indikator ini merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 yang diturunkan langsung kepada Inspektorat I dan Inspektorat II. Pada tahun 2024, realisasi kinerja berhasuk mencapai target akhir periode renstra. Dikarenakan indikator baru muncul pada tahun 2024 sehingga hasil perkembangan kinerja belum dapat disimpulkan, karena perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan.

Tabel 77 Kertas Kerja analisis gap IKSP.2 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	2	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai									83,48	83,98	100,6	Tercapai	Inspektorat Utama	Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024. Indikator ini berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori "Tercapai".

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja "Nilai Survei Penilaian Integritas" merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 yang diturunkan langsung kepada Inspektorat I dan Inspektorat II. Indikator ini merupakan indikator pengganti dari Indikator "Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan" yang sudah tidak relevan lagi dilanjutkan pada tahun 2024 karena adanya perubahan road map Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2024, realisasi kinerja pada indikator kinerja "Nilai Survei Penilaian Integritas" mampu/berhasil mencapai target dengan capaian 100,60%. beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai realisasi indikator ini adalah:

1. Bimbingan Teknis aplikasi sang integritas;
2. Sosialisasi program anti korupsi;
3. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan;
4. Bimbingan teknis pelaksanaan SPI;
5. Audiensi kepada KPK mengenai Pencegahan korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan dan juga SPI;
6. Cafe Integritas;
7. Pengukuhan Pejabat Tinggi Madya sebagai pembina PAKSI dan API

Hasil dari evaluasi pada indikator “Nilai Survei Penilaian Integritas” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘’belum dapat disimpulkan’’** karena perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan dan masuk dalam kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan salah satu penilaian yang masuk pada Reformasi Birokrasi General, sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 masih sangat relevan untuk dilanjutkan dengan catatan perlunya dilakukan penentuan target dengan pertimbangan realisasi kinerja di tahun 2024. Selain itu, direkomendasikan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Nilai Survei Integritas BPOM. Pada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029, menggunakan *logframe* sehingga di tahun 2025-2029 indikator ini berada pada level eselon II. Untuk di level eselon I akan menggunakan indikator baru yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama” target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat pada rekomendasi IKSP.1 yang telah disinggung di atas.

IKSP.3 Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

Tabel 78 Kertas Kerja analisis tren IKSP.3 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										Perkembangan Kinerja		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,22	8,11	7,77	8,56	8,35	8,66	8,08	8,77	8,18 (atau 20,45)	20,8	20,69	70,08	Meningkat (Moderat)	Mendukung AKIP BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Indikator ini memiliki perkembangan kinerja yang meningkat (moderat) yakni perkembangan kinerja yang menunjukkan peningkatan

																			namun belum dapat mencapai target akhir periode renstra

Tabel 79 Kertas Kerja analisis gap IKSP.3 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	Nilai	8,11	7,77	8,56	8,35	8,66	8,08	8,77	8,18 (atau 20,45)	20,75	20,69	99,7	Tidak Tercapai	Inspektorat Utama	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif. Pada tahun2020-2021 realisasi kinerja meningkat, namun di tahun 2022 realisasi kinerja menurun. selanjutnya di tahun2023 sampai dengan akhir periode renstra menunjukkan peningkatan. Indikator ini belum berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori **"Tidak Tercapai"**.

Hasil Evaluasi

Pada Nilai SAKIP BPOM, Inspektorat Utama ditunjuk untuk mengambil peran pada salah satu komponen penilaian SAKIP yakni Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja. Capaian Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM pada tahun 2020 sampai dengan 2024 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan PANRB No B/673/AA.05/2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2024 karena **masih terdapat catatan** dalam pelaksanaan evaluasi internal di Lingkungan Badan POM yaitu monitoring dan evaluasi tindak lanjut evaluasi internal pada BPOM telah memanfaatkan aplikasi SAPA APIP, hanya saja masih ditemukan Sebagian kecil UPT yang belum memanfaatkan aplikasi tersebut dalam

menindaklanjuti rekomendasi saran perbaikan dari tim APIP. Upaya/kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target kinerja adalah:

1. Melakukan koordinasi lanjutan dengan tim pengembang aplikasi SAPA APIP dalam penyempurnaan modul SAKIP;
2. Menginformasikan kepada para unit kerja melalui surat Inspektorat Utama No PI.04.7.08.24.515 terkait Permohonan Tindak Lanjut atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023;
3. Pelaksanaan desk monitoring dan evaluasi tindak lanjut pada Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis;
4. Menyampaikan Surat Edaran Inspektur Utama terkait Penetapan Sub Kategori LKE AKIP Tahun 2024 ke seluruh Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis;
5. Koordinasi bersama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melakukan revisi Pedoman Penyelenggaraan SAKIP agar lebih memudahkan Satker dalam mengimplementasikan SAKIP

Sebagai informasi, pada tahun 2024 indikator ini dilakukan pengajuan perubahan target 2024 menjadi 20,75 dikarenakan adanya Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 dimana terdapat perubahan bobot (semula 10 menjadi 20) pada nilai evaluasi internal. Hasil dari evaluasi pada indikator “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Meningkat (Moderat)’’** yaitu perkembangan kinerja cenderung meningkat meskipun belum mencapai target tahun 2024 serta masuk dalam kategori **‘’Tidak Tercapai’’.**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan salah satu penilaian yang masuk pada Reformasi Birokrasi General yaitu (Nilai AKIP BPOM), sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 masih sangat relevan untuk dilanjutkan dengan catatan perlunya dilakukan penentuan target dengan pertimbangan realisasi kinerja di tahun 2020-2024. Selain itu, direkomendasikan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM dan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP BPOM tahun 2024 pada bagian evaluasi internal. Rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 menggunakan *logframe* sehingga di tahun 2025-2029 indikator ini berada pada

level eselon II. Untuk di level eselon I akan menggunakan indikator baru yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama" target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat pada rekomendasi IKSP.1 yang telah disinggung di atas.

IKSP.4 Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

Tabel 80 Kertas Kerja analisis tren IKSP.4 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun											Perkembangan Kinerja		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024								
				T	R	T	R	T	R	T	R	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,00	3,4	3	3	3	4	3,732	4	3,79	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,85	4,09	125,00	Meningkat (On The Track)	Mendukung Reformasi BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Indikator ini masuk pada kategori meningkat (on the track). Hal ini dapat dilihat dari realisasi kinerja yang selalu naik di tiap tahunnya. Indikator ini sangat perlu dipertahankan kinerja.

Tabel 81 Kertas Kerja analisis gap IKSP.4 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	Nilai	3,4	3	3	3	4	3,732	4	3,79	3,85	4,09	106,2	Tercapai	Inspektorat Utama	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang meningkat di tiap tahunnya dan berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori "Tercapai".

Hasil Evaluasi

Capaian nilai evaluasi SPIP-T BPOM pada tahun 2020 sampai dengan 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 dilakukan pengajuan perubahan target 2021 menjadi level 3 dikarenakan penilaian SPIP menggunakan level. Namun di tahun 2024, Inspektorat melakukan penyesuaian target menjadi Nilai evaluasi SPIP karena pada saat pelaporan LHE SPIP BPOM terdapat nilai/skor yang dilampirkan oleh tim evaluator SPIP BPOM dari BPKP sehingga perkembangan kinerja lebih dapat terukur/tergambar dengan jelas. Realisasi kinerja SPIP-T BPOM menunjukkan peningkatan yang pesat dengan mencapai level 4 di akhir periode renstra. Keberhasilan capaian nilai evaluasi SPIP-T BPOM merupakan bukti bahwa upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Utama efektif dalam mendukung implementasi SPIP di BPOM. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan indikator ini adalah:

1. Pengusulan manajemen risiko menjadi indikator strategis di BPOM melalui nota dinas Inspektur Utama No PI.06.07.7.06.24.125 hal Usulan Indikator Kinerja Nilai Maturitas Manajemen Risiko pada Renstra BPOM periode 2025-2029;
2. Pemenuhan data dukung penilaian Kapabilitas APIP dalam rangka Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Utama BPOM melalui peningkatan level kapabilitas APIP sebagai tindak lanjut evaluasi SPIP-T BPOM Tahun 2023;
3. Evaluasi penilaian mandiri SPIP-T;
4. Melakukan penjaminan kualitas SPIP-T BPOM tahun 2024
5. Pemantauan tindak lanjut terhadap rencana aksi hasil evaluasi SPIP-T Tahun 2023 melalui Surat Inspektur Utama No. B-PI.06.07.7.03.24.263 tentang Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Area of Improvement (AoI) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) BPOM Tahun 2023
6. Bersama dengan Biro Hukun dan Organisasi Menyusun Tanggapan atas Hasil Sementara Evaluasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPOM tahun 2024
7. Koordinasi dalam penyusunan Area of Improvement (AoI) dengan Biro Hukum dan Organisasi;
8. Perluasan bimbingan teknis manajemen risiko;

Hasil dari evaluasi pada indikator “Nilai evaluasi SPIP-T BPOM” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Meningkat (on the track)’’** yaitu perkembangan kinerja cenderung meningkat dan mencapai target tahun 2024 serta masuk dalam kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan salah satu penilaian yang masuk pada Reformasi Birokrasi General yaitu (Nilai AKIP BPOM), sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 masih sangat relevan untuk dilanjutkan dengan catatan perlunya dilakukan penentuan target dengan pertimbangan realisasi kinerja di tahun 2020-2024.

Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Mempertahankan kegiatan-kegiatan penunjang pada tahun 2024 dalam meningkatkan nilai SPIP BPOM
2. Melakukan penentuan target berdasarkan realisasi kinerja SPIP pada tahun 2020-2024
3. Koordinasi dengan tim SPIP BPOM dalam menindaklanjuti hasil evaluasi SPIP-T tahun 2024

Rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 menggunakan *logframe* sehingga di tahun 2025-2029 indikator ini berada pada level eselon II. Untuk di level eselon I akan menggunakan indikator baru yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama” target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat pada rekomendasi IKSP.1 yang telah disinggung di atas.

3.2.2 Evaluasi akhir pada Sasaran Program 2 (SP.2) Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel

Sasaran Program 2 (SP.2) Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel, didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja sasaran program (IKSP). Evaluasi akhir pada SP.2 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSP.5 Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan

Tabel 82 Kertas Kerja analisis tren IKSP.5 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										Perkembangan Kinerja		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	-	<1%	0,06%	0,99%	0,03%	99,01%	99,93%	99,01%	99,97%	99,01%	99,98%	4,29	Stagnan	Mendukung OPINI WTP atas Laporan Keuangan BPOM	Ir 1 Ir 2	Ittama	Indikator ini masuk pada kategori stagnan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja cenderung sedikit meningkat dari tahun pertama terhadap kondisi akhir periode renstra.

Tabel 83 Kertas Kerja analisis gap IKSP.5 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	5	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	Persen	<1%	0,06%	0,99%	0,03%	99,01%	99,93%	99,01%	99,97%	99,01%	99,98%	101,0	Tercapai	Inspektorat Utama	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif di tiap tahunnya namun selalu mencapai target dan berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori “Tercapai”.

Hasil Evaluasi

Inspektorat Utama komitmen melakukan pengawasan dan pengawalan di lingkup BPOM khususnya pada pelaksanaan pemeriksaan Laporan keuangan maupun kinerja BPOM. Pada periode rencana strategis tahun 2020-2024, BPOM memiliki kesalahan material dalam laporan keuangan <1% dan 10 kali berturut-turut mempertahankan OPINI WTP. Capaian Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 dilakukan pengajuan perubahan target 2021 menjadi 0,99% karena agara lebih terukur jelas angka yang digunakan sebagai target. Selanjutnya di tahun 2022 dilakukan penyesuaian target menjadi IKU dengan pengukuran polarisasi positif semula 0,99 menjadi 99,01%. Target selama tahun 2022 sampai dengan 2024 stagnan karena mengikuti batas material dalam laporan keuangan yakni <1%. Kegiatan atau upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan indikator ini adalah:

1. Terus dilakukan intensifikasi koordinasi yang simultan dan terpadu dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK RI, terutama terkait Laporan Keuangan dan pelaksanaan reviu;
2. Perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti;
3. Melakukan reviu yang dilakukan atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini;
4. Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BPOM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja;
6. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan *Plan of Action* (PoA) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;

7. Kontribusi Auditor dalam Forum Group Discussion (FGD) PIPK; dan
8. Pelaksanaan asistensi pengelolaan anggaran.

Hasil dari evaluasi pada indikator "Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **'Stagnan''** yaitu Perkembangan kinerja cenderung sedikit meningkat dari tahun pertama terhadap kondisi terkini serta masuk dalam kategori **''Tercapai''.**

Rekomendasi

Pada rencana strategis periode tahun 2025-2029, indikator ini masuk sudah tergambar pada indikator kinerja di Sekretariat Utama dalam peroleh OPINI WTP, sehingga di rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 sudah tidak lagi dilanjutkan. Namun terhadap kegiatan pengawalan/pendampingan BPK tetap dilakukan demi mempertahankan opini WTP di BPOM.

IKSP.6 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

Tabel 84 Kertas Kerja analisis tren IKSP.6 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94,24%	88,00%	93,47%	92,50%	94,24%	93%	93%	94%	93,82%	94%	96,15%	-788,65	Menurun	Mendukung Reformasi BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Indikator ini masuk pada kategori menurun. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja cenderung fluktuatif bahkan menurun dari tahun pertama terhadap kondisi akhir periode renstra.

Tabel 85 Kertas Kerja analisis gap IKSP.6 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Persen	88,00%	93,47%	92,50%	94,24%	93%	93%	94%	93,82%	94%	96,15%	102,3	Tercapai	Inspektorat Utama	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif di tiap tahunnya namun berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori "Tercapai".

Hasil Evaluasi

Capaian Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM pada tahun 2020 sampai dengan 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 dilakukan pengajuan perubahan target menjadi 94% karena pada tahun 2023 tidak mencapai target dan Tingkat kendali IKU sangat rendah karena TL BPK dilakukan oleh unit kerja dan dalam 1 rekomendasi terdapat beberapa unit kerja yang terkait sehingga lebih sulit dalam ditindaklanjuti. Realisai kinerja indikator selama tahun 2020-2021 mengalami peningkatan, namun di tahun 2022 realisasi kinerja mengalami penurunan. Selanjutnya untuk di tahun 2023 realisasi kinerja meningkat dari tahun sebelumnya, namun belum berhasil mencapai target. Selanjutnya di akhir periode renstra, realisasi kinerja berhasil mencapai target. Kegiatan atau upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan indikator ini adalah:

1. Melakukan pendampingan dalam pemeriksaan BPK pada Unit kerja;

2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam integrasi data pengawasan intern, melalui aplikasi berbasis web "SAPA APIP" sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan oleh auditee;
3. Meningkatkan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal terkait penyelesaian rekomendasi serta melakukan intensitifikasi koordinasi dengan auditan terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Utama sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS);
4. Koordinasi langsung dengan level Pimpinan di tingkat Satuan Kerja terkait dengan temuan spesifik pada Satuan Kerja tersebut sehingga diperoleh komitmen yang tinggi untuk penyelesaiannya;
5. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait antara lain dengan BPK RI serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang daerah (KPKNL) setempat untuk tindak lanjut yang memerlukan bantuan dari pihak bersangkutan;
6. Penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek-aspek terkait pemeriksaan oleh BPK pada risiko yang harus dikelola baik pada level Instansi maupun pada Unit Kerja.

Hasil dari evaluasi pada indikator " Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **'Menurun"** yaitu Perkembangan kinerja cenderung fluktuatif dan menurun dari tahun pertama terhadap kondisi akhir periode renstra, namun meskipun menurun indikator ini berhasil mencapai target akhir periode renstra dan masuk dalam kategori **''Tercapai".**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan salah satu penilaian yang masuk pada Reformasi Birokrasi General), sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 masih sangat relevan untuk dilanjutkan dengan catatan perlunya dilakukan penentuan target dengan pertimbangan realisasi kinerja di tahun 2020-2024.

Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Mempertahankan kegiatan-kegiatan penunjang pada tahun 2024 dalam meningkatkan persentase TL BPK
2. Melakukan penentuan target berdasarkan realisasi kinerja TL BPK pada tahun 2020-2024

Rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 menggunakan *logframe* sehingga di tahun 2025-2029 indikator ini berada pada level eselon II. Untuk di level eselon I akan menggunakan indikator baru yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama" target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat pada rekomendasi IKSP.1 yang telah disinggung di atas.

3.2.3 Evaluasi akhir pada Sasaran Program 3 (SP.3) Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas

Sasaran Program 3 (SP.3) Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas, didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran program (IKSP). Evaluasi akhir pada SP.3 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSP.7 Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Tabel 86 Kertas Kerja analisis tren IKSP.7 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	81,42	82	85,84	85,5	88,54	85,7	86,12	85,9	87,08	86	88,25	147,57	Meningkat (On The Track)	Mendukung Reformasi BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Indikator ini masuk pada kategori meningkat (on the track). Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja cenderung meningkat dan berhasil mencapai target akhir periode renstra.

Tabel 87 Kertas Kerja analisis gap IKSP.7 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	8	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Indeks	82	85,84	85,5	88,54	85,7	86,12	85,9	87,08	86	88,25	102,6	Tercapai	Inspektorat Utama	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif di tiap tahunnya namun berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori "Tercapai".

Hasil Evaluasi

Capaian Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern pada tahun 2020 sampai dengan 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 dilakukan pengajuan perubahan target menjadi 85,5 karena pada tahun 2020 realisasi kinerja sudah mencapai target akhir periode renstra. Namun di tahun 2023 tidak dilakukan penyesuaian target karena Tingkat kendali IKU sangatlah rendah. Realisasi kinerja selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif ditunjukkan dengan adanya peningkatan di tahun 2021 namun mengalami penurunan di tahun 2022, selanjutnya meningkat di tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya di akhir periode renstra, realisasi kinerja berhasil mencapai target. Kegiatan atau upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan indikator ini adalah:

1. Peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi antar auditor dengan unit kerja yang diawasi;
2. Melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan kompetensi serta menyamakan pemahaman dan persepsi antar Auditor;
3. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui:
   a) Peningkatan layanan konsultasi yang difasilitasi dengan pengembangan aplikasi untuk konsultasi online (SOLUSI);

b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi dengan menggunakan aplikasi sistem informasi monitoring secara elektronik dan dashboard evaluasi kinerja (SAPA APIP) untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil audit BPK, tindak lanjut Inspektorat Utama, evaluasi manajemen risiko dan evaluasi SAKIP.
c) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan intern melalui pembangunan aplikasi *Inspiring Audit*.
d) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan pengaduan, gratifikasi dan benturan kepentingan melalui pembangunan aplikasi Sang Integritas.

4. Peningkatan sosialisasi hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja pada beberapa kesempatan, antara lain pada Rapat Kerja Nasional tahun 2024, agar suatu temuan pada satu auditan tidak menjadi temuan maupun masalah pada auditan lainnya;
5. Pembahasan hasil audit melalui mekanisme ekspose hasil audit dengan Inspektur Utama BPOM;
6. Peningkatan manajemen waktu audit (pelaksanaan audit hanya pada hari dan jam kerja);
7. Peningkatan keterbukaan informasi hasil pengawasan intern yang dilakukan, misalnya hasil evaluasi SAKIP dan RB, dengan tujuan untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat sasaran; dan
8. Pembaharuan aplikasi pengawasan intern seperti SAPA APIP, SOLUSI, Sang Integritas.

Hasil dari evaluasi pada indikator ”Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Meningkat (On the track)’’** yaitu Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Inspektorat Utama menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan pengawasan intern yang bertujuan perbaikan organisasi. Digitalisasi pengawasan menjadi salah satu tindak lanjut Inspektorat Utama untuk mengimplementasikan pengawasan yang efektif dan efisien. Selain itu, indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan indikator yang relevan untuk dilanjutkan pada Rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 menggambarkan umpan balik dari para mitra kerja Inspektorat Utama dan tentunya banyak memberikan masukan serta saran untuk Inspektorat Utama berkinerja lebih baik.

Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Mempertahankan kegiatan-kegiatan penunjang pada tahun 2024 dalam meningkatkan kepuasan mitra pengawasan intern
2. Melakukan penentuan target berdasarkan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Pada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029, penentuan target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2020-2024. target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 88 target indikator "Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama" pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama	88,28	88,31	88,34	88,37	88,40

3.2.4 Evaluasi akhir pada Sasaran Program 4 (SP.4) Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko

Sasaran Program 4 (SP.4) Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko, didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran program (IKSP). Evaluasi akhir pada SP.4 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSP.8 Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Tabel 89 Kertas Kerja analisis tren IKSP.8 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										Perkembangan Kinerja		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern	-	80	86,91	86,5	85.745	87	86,82	87,5	85,71	86,3	84,74	-240,77	Menurun	Mendukung Reformasi BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Indikator ini masuk pada kategori menurun). Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja cenderung menurun dan tidak berhasil mencapai target akhir periode renstra.

Tabel 90 Kertas Kerja analisis gap IKSP.8 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	8	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern	Indeks	80	86,91	86,5	85.745	87	86,82	87,5	85,71	86,3	84,74	98,2	Tidak Tercapai	Inspektorat Utama	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif di tiap tahunnya bahkan cenderung menurun serta tidak berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori "Tidak Tercapai".

Hasil Evaluasi

Capaian Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mesih belum berhasil melebihi target yang ditetapkan. Sebagai informasi, pada tahun 2021 dilakukan pengajuan perubahan target menjadi 86,5 karena pada tahun 2020 realisasi kinerja sudah mencapai target akhir periode renstra. Selanjutnya dilakukan Kembali penyesuaian target di tahun 2024 (menjadi 86,3) karena dua tahun berturut-turut (2022 dan 2023) tidak mencapai target dan melihat realisasi kinerja di tahun 2022 dan 2023 yang memang sulit untuk mencapai target 2024 (88). Realisasi kinerja selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif ditunjukkan dengan adanya penurunan di tahun 2021 namun mengalami peningkatan kembali di tahun 2022, selanjutnya di tahun 2023 dan 2024 realisasi kinerja Kembali mengalami penurunan dan belum berhasil mencapai target akhir periode renstra. **Ketidakberhasilan dalam mencapai target ini adalah** masih banyaknya upaya-upaya perbaikan yang diharapkan oleh para stakeholder dalam pedoman penanganan benturan kepentingan. Masukan-masukan yang ada pada survei kemanfaaan kebijakan akan menjadi input yang sangat berarti bagi Inspektorat Utama untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Meskipun belum berhasil mencapai target, **Upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam mendukung** capaian kinerja indikator adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan pengawasan intern pada lingkungan Badan POM;
2. Membuka wadah pertanyaan/konsultasi pada aplikasi SOLUSI terkait pengawasan intern termasuk kebijakannya.

Hasil dari evaluasi pada indikator ”Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Menurun’’** yaitu Perkembangan kinerja cenderung menurun dan tidak berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **‘’Tidak Tercapai’’.**

Rekomendasi

Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern diukur melalui pelaksanaan survei terkait kebijakan-kebijakan yang berada dalam tugas dan fungsi Inspektorat Utama. realisasi kinerja indikator ini mengalami flutktuasi dari tahun 2020-2024. Pelaksanaan survei kemanfaatan kebijakan ini dilakukan dengan tema yang berbeda di setiap tahunnya. sehingga di setiap tahunnya terdapat perspektif bahwa indikator tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya, karena survei yang dilakukan memiliki tema yang berbeda atau tidak dapat menggambarkan progress kemajuan atas saran di

tema kebijakan yang sebelumnya. sehingga pada rancangan rencana strategis Inspetkorat Utama Tahun 2025-2029 indikator Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern tidak dilanjutkan.

3.2.5 Evaluasi akhir pada Sasaran Program 5 (SP.5) Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sasaran Program 5 (SP.5) Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien, didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran program (IKSP). Evaluasi akhir pada SP.5 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSP.9 Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu

Tabel 91 Kertas Kerja analisis tren IKSP.9 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	46 Laporan atau capaian 100%	100	119,44	100	122,22	100	120,83	100	100	100	100	0,00	Stagnan	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Indikator ini masuk pada kategori stagnan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja cenderung sedikit meningkat namun berhasil mencapai target akhir periode renstra.

Tabel 92 Kertas Kerja analisis gap IKSP.9 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	9	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	Persen	100%	119,44%	100%	122,22%	100%	120,83%	100%	100%	100%	100%	100,0	Tercapai	Inspektorat Utama	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif di tiap tahunnya namun berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori "Tercapai".

Hasil Evaluasi

Capaian persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 sudah berhasil melebihi target yang ditetapkan. **keberhasilan dalam mencapai target ini** didukung dengan:

1. Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit;
2. Penganggaran yang memadai dan telah direviu sehingga dapat mengakomodasi ruang lingkup pengawasan yang ada;
3. Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik;
4. Peningkatan kompetensi auditor secara berkala sehingga mampu menjalankan praktik audit yang profesional dan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia maupun Standar Mutu ISO 9001:2015;
5. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Hasil dari evaluasi pada indikator "persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **'Stagnan''** yaitu Perkembangan kinerja cenderung sedikit meningkat dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Namun indikator ini berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **''Tercapai''.**

Rekomendasi

Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu merupakan indikator yang mengukur tugas dan fungsi pengawasan intern Inspektorat Utama. Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya. Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024, sehingga target pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 93 target Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.6 Evaluasi akhir pada Sasaran Program 6 (SP.6) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif

Sasaran Program 6 (SP.6) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif, didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja sasaran program (IKSP). Evaluasi akhir pada SP.6 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSP.10 Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Tabel 94 Kertas Kerja analisis tren IKSP.10 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	87,91%	90%	92,98%	93%	88,25%	94%	95,71%	95%	96,06%	96%	90,75%	35,91	Meningkat (Moderat)	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Indikator ini masuk pada kategori stagnan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja cenderung sedikit meningkat namun berhasil mencapai target akhir periode renstra.

Tabel 95 Kertas Kerja analisis gap IKSP.10 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan konsultansi yang efektif	10	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Persentase	90%	92,98%	93%	88,25%	94%	95,71%	95%	96,06%	96%	90,75%	94,5	Tidak Tercapai	Inspektorat Utama	Realisasi kinerja selama 2020-2024 mengalami fluktuatif, dan belum berhasil mencapai target akhir periode renstra dengan kategori "Tidak Tercapai"

Hasil Evaluasi

Capaian Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami realisasi kinerja yang fluktuatif. Pada tahun 2021 realisasi kinerja sudah mengalami penurunan dan belum berhasil mencapai target. Selanjutnya di tahun 2022 dan 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan, namun di akhir periode renstra, realisasi kinerja mengalami penurunan dan belum berhasil target yang ditetapkan. **ketidakberhasilan dalam mencapai target ini** disebabkan karena:

1. Kurangnya komitmen auditan dalam melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP.
2. Adanya penugasan pengawasan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Hasil dari evaluasi pada indikator " Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **'Meningkat (Moderat)''** yaitu Perkembangan kinerja cenderung meningkat namun belum berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **''Tidak Tercapai''.**

Rekomendasi

Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti merupakan indikator yang mengukur tindak lanjut hasil pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Utama. Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya dengan catatan dalam penentuan target agar dipertimbangkan realisasi kinerja tahun 2020-2024. Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil audit.
2. Melakukan plotting penjadwalan kegiatan pengawasan intern melalui audit dengan menghindari penjadwalan yang mendekati akhir tahun anggaran, sehingga tindak lanjut atas pengawasan masih dapat dilakukan dalam tahun anggaran yang sama.
3. Melakukan perencanaan kegiatan pengawasan intern berdasarkan PKPT yang berbasis manajemen risiko.

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024, sehingga target pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 96 target Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92,69%	92,77%	92,85%	92,93%	93,02%

IKSP.11 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu

Tabel 97 Kertas Kerja analisis tren IKSP.11 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan konsultansi yang efektif	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu		80%	80%	100%	93,75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Meningkat (On The Track)	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas memiliki kategori meningkat atau on the track dalam perkembangan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi dalam melakukan telaah dan penelusuran menjadi salah satu penunjang dalam

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
																			menyelesaikan pengaduan.

Tabel 98 Kertas Kerja analisis gap IKSP.11 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan konsultansi yang efektif	11	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Persentase	80%	80%	100%	93,75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0	Tercapai	Inspektorat Utama	Realisasi kinerja selama 2020-2024 mengalami peningkatan dan berhasil mencapai target akhir periode renstra dengan kategori "Tercapai"

Hasil Evaluasi

Capaian Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 sudah berhasil melebihi target yang ditetapkan. **keberhasilan dalam mencapai target ini** didukung dengan:

1. Pelaksanaan audit berbasis risiko dan audit tujuan tertentu pada Unit Kerja yang terkait dalam Pengaduan
2. Peluncuran aplikasi “sang integritas” yang mewadahi dalam pelaporan pengaduan, gratifikasi, dan benturan kepentingan sehingga pencatatan laporan lebih cepat sehingga dapat langsung ditindaklanjuti oleh APIP.
3. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan
4. Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* pada media sosial.

Hasil dari evaluasi pada indikator ”Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Meningkat on the track’’** yaitu Perkembangan kinerja cenderung meningkat dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Indikator ini berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu merupakan indikator yang mengukur core teknis atau tugas dan fungsi pengawasan intern Inspektorat Utama. Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya. Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. *Continuous improvement* sarana pengaduan agar lebih optimal;
2. Melakukan *public campaign* dan mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait;
3. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan
4. Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* pada media sosial.

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024, sehingga target pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 99 target indikator “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu” pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

IKSP.12 Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Tabel 100 Kertas Kerja analisis tren IKSP.12 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan konsultansi yang efektif	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu				92%	100%	93%	97,43%	94%	100%	97,57%	100,00%	0,00	Stagnan	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Indikator ini memiliki perkembangan kinerja kategori stagnan. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan kinerja yang cenderung sedikit meningkat dari tahun pertama hingga akhir periode. Pemanfaatan teknologi dalam melakukan telaah dan penelusuran menjadi salah satu penunjang dalam menyelesaikan konsultasi.

Tabel 101 Kertas Kerja analisis gap IKSP.12 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan konsultansi yang efektif	12	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase			92%	100%	93%	97,43%	94%	100%	97,57%	100%	102,5	Tercapai	Inspektorat Utama	Realisasi kinerja selama tahun pertama hingga akhir periode renstra selalu mencapai target dan mencapai kategori "Tercapai"

Hasil Evaluasi

Capaian Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 sudah berhasil melebihi target yang ditetapkan. **keberhasilan dalam mencapai target ini** didukung oleh komitmen APIP dalam menjawab pertanyaan konsultansi yang masuk dengan tepat waktu. Proses menjawab pertanyaan melalui aplikasi SOLUSI dilakukan dengan review berjenjang yang melibatkan anggota, ketua tim, sampai dengan pengendali teknis. Dengan demikian, diharapkan setiap jawaban yang diberikan diharap sudah mampu memberikan kepuasan bagi mitra pengawasan yang mengajukan pertanyaan. Kegiatan yang mendukung dalam mencapai target adalah:

1. Rapat koordinasi terkait aplikasi, untuk *continuous improvement.*
2. Pengembangan aplikasi sarana konsultasi.
3. Pemantauan dan monitoring terhadap pertanyaan konsultansi yang masuk.

Sebagai informasi, pada indikator ini telah dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 karena realisasi kinerja di tahun sebelumnya sudah mencapai target akhir periode renstra. Hasil dari evaluasi pada indikator ”Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Stagnan’’** yaitu Perkembangan kinerja cenderung sedikit meningkat dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Indikator ini berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu merupakan indikator yang mengukur core teknis atau fungsi consultance Inspektorat Utama. Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya. Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat rekomendasi terhadap indikator yaitu melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah. Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2021-2024, sehingga target pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 102 target indikator "Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu" pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.7 Evaluasi akhir pada Sasaran Program 7 (SP.7) Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif

Sasaran Program 7 (SP.7) Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif, didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja sasaran program (IKSP). Evaluasi akhir pada SP.7 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSP.13 Indeks RB Inspektorat Utama

Tabel 103 Kertas Kerja analisis tren IKSP.13 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama		91	83,56	80,6	80,59	81,6	88,095	82,6	85,31	86,7	86,39	90,25	Meningkat (Moderat)	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Indikator ini memiliki perkembangan kinerja kategori meningkat (moderat). Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan kinerja yang cenderung meningkat namun belum berhasil mencapai target di akhir periode renstra

Tabel 104 Kertas Kerja analisis gap IKSP.13 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	13	Indeks RB Inspektorat Utama	Indeks	91	83,56	80,6	80,59	81,6	88,095	82,6	85,31	86,7	86,39	99,6	Tidak Tercapai	Inspektorat Utama	Realisasi kinerja selama tahun pertama hingga akhir periode renstra mengalami fluktuatif namun di akhir periode renstra belum berhasil mencapai target dan masuk pada kategori **"Tidak Tercapai"**

Hasil Evaluasi

Capaian Indeks RB Inspektorat Utama pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami realisasi kinerja yang fluktuatif dan belum berhasil melebihi target yang ditetapkan pada akhir periode renstra. Hal ini dikarenakan menurunnya nilai RB pada Inspektorat II yang memerlukan banyak perbaikan terhadap komponen yang belum optimal.

Sebagai informasi, pada indikator ini telah dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 karena realisasi kinerja di tahun sebelumnya sudah mencapai target akhir periode renstra. Hasil dari evaluasi pada indikator "Indeks RB Inspektorat Utama" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **'Meningkat (Moderat)''** yaitu Perkembangan kinerja cenderung meningkat namun belum berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **''Tidak Tercapai''.**

Rekomendasi

Indeks RB Inspektorat Utama merupakan indikator wajib yang mendukung langsung reformasi birokrasi di lingkup BPOM, Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya. Memperhatikan tidak tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat rekomendasi terhadap indikator yaitu

menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ZI pada tahun 2024 serta menyusun target pada periode selanjutnya berdasarkan realisasi kinerja pada tahun 2020-2024. Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 indeks RB Inspektorat Utama dilakukan penyesuaian nomenklatur menjadi "Nilai Pembangunan Zona Integritas di lingkup Inspektorat Utama" serta menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024, sehingga target pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 105 target indikator "Nilai Pembangunan Zona Integritas di lingkup Inspektorat Utama" pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Pembangunan Zona Integritas di lingkup Inspektorat Utama	87,60	87,71	87,82	87,93	88,04

IKSP.14 Nilai AKIP Inspektorat Utama

Tabel 106 Kertas Kerja analisis tren IKSP.14 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										Perkembangan Kinerja		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					UKE II	UKE I	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori				
SP.7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai AKIP Inspektorat Utama	78,21	81	79,75	82,3	82,21	84,8	81,96	87,3	81,5	84,35	81,58	55,63	Meningkat (Moderat)	Mendukung AKIP BPOM	-	Inspektorat Utama	Indikator "Nilai AKIP Inspektorat Utama" memiliki perkembangan kinerja dengan kategori meningkat moderat. Peningkatan realisasi kinerja ini dilakukan dengan pemenuhan data dukung dan perbaikan kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil

INSPEKTORAT UTAMA

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										Perkembangan Kinerja		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
																			evaluasi SAKIP di tahun sebelumnya.

Tabel 107 Kertas Kerja analisis gap IKSP.14 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	14	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Nilai	81	79,75	82,3	82,21	84,8	81,96	87,3	81,5	84,35	81,58	96,7	Tidak Tercapai	Inspektorat Utama	Realisasi kinerja selama tahun pertama hingga akhir periode renstra mengalami fluktuatif namun di akhir periode renstra belum berhasil mencapai target dan masuk pada kategori "Tidak Tercapai"

Hasil Evaluasi

Capaian Nilai AKIP Inspektorat Utama pada tahun 2020 sampai dengan 2024 masih belum berhasil melebihi target yang ditetapkan sampai pada akhir periode renstra. **ketidakberhasilan dalam mencapai target ini** disebabkan karena masih belum optimalnya pada setiap komponen penilaian yang sudah dijelaskan lebih detail pada bab akuntabilitas kinerja pada bagian IKU Nilai AKIP Inspektorat Utama.

Sebagai informasi, pada indikator ini telah dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 karena realisasi kinerja di tahun 2020-2023 sangat sulit mencapai target atau tidak achievable. Hasil dari evaluasi pada indikator "Nilai AKIP Inspektorat Utama" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **''Meningkat Moderat''** yaitu

Perkembangan kinerja cenderung meningkat namun indikator ini tidak berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **''Tidak Tercapai''.**

Rekomendasi

Nilai AKIP Inspektorat Utama merupakan indikator yang mendukung langsung AKIP BPOM, indikator ini merupakan indikator wajib dari Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya. Memperhatikan tidak tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat rekomendasi terhadap indikator yaitu:

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP;
2. Membentuk tim penyusun laporan kinerja Inspektorat Utama;
3. Meningkatkan kompetensi tim penyusun terhadap pedoman penilaian SAKIP
4. Menyusun target indikator berdasarkan realisasi kinerja di tahun 2020-2024

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2021-2024, sehingga target pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 108 target indikator "Nilai AKIP Inspektorat Utama" pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,58	83,16	83,95	84,74	85,52

IKSP.15 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP

Tabel 109 Kertas Kerja analisis tren IKSP.15 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										Perkembangan Kinerja		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,00	3,4	3	3	3	4	3	4	3,53	3,6	3,77	125,89	Meningkat (On The Track)	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Indikator ini memiliki perkembangan kinerja dengan kategori meningkat on the track. Hal ini terlihat dari perkembangan kinerja yang cenderung meningkat dan berhasil mencapai target sampai pada akhir periode renstra.

Tabel 110 Kertas Kerja analisis gap IKSP.15 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	15	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Nilai	3,4	3	3	3	4	3	4	3,53	3,6	3,77	104,7	Tercapai	Inspektorat Utama	Realisasi kinerja selama tahun pertama hingga akhir periode renstra menunjukkan peningkatan dan pada akhir periode renstra mencapai target dengan kategori "Tercapai"

Hasil Evaluasi

Nilai evaluasi kapabilitas APIP pada tahun 2020 sampai dengan 2024 memiliki realisasi kinerja yang cenderung meningkat dan berhasil melebihi target yang ditetapkan. **keberhasilan dalam mencapai target ini** didukung dengan:

1. Perbaikan di setiap elemen dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi di tahun 2023
2. Menetapkan Program Pengembangan Dan Penjaminan Kualitas Di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan dengan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.02.02.7.04.24.15 Tahun 2024 tentang Program Pengembangan Dan Penjaminan Kualitas Di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Sebagai informasi, di tahun 2024 indikator “Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP” telah dilakukan Penyesuaian nomenklatur dan target. penyesuaian nomenklatur dilakukan menggunakan nilai karena adanya Adanya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mencantumkan skor/nilai pada hasil evaluasi Kapabilitas APIP. Sehingga indikator dapat terukur dengan lebih jelas dengan menggunakan nilai/skor. Penentuan target dilakukan menggunakan baseline hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2023 dengan skor 3,53. Penyesuaian target dilakukan semula 4 menjadi 3,6.

Hasil dari evaluasi pada indikator ”Nilai evaluasi kapabilitas APIP” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Meningkat on the track’’** yaitu Perkembangan kinerja cenderung meningkat dari tahun pertama sampai tahun terakhir serta Indikator ini berhasil mencapai target akhir periode renstra dan memperoleh kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP merupakan indikator yang menggambarkan langsung kapabilitas APIP di BPOM Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya. Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Memonitoring rencana tindak lanjut hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2024
2. *Continuous improvement* elemen kapabilitas APIP yang bisa ditingkatkan ke level 4
3. Meningkatkan pengembangan kompetensi APIP.

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024, sehingga target pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 111 target indikator "Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP" pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,90	4,00	4,20	4,30	4,50

IKSP.16 Nilai Pengelolaan Kearsipan

Tabel 112 Kertas Kerja analisis tren IKSP.16 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										Perkembangan Kinerja		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai Pengelolaan Kearsipan										96,65	98,84	Indikator Baru	Belum dapat disimpulkan	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Indikator merupakan indicator baru di tahun 2024 sehingga belum dapat disimpulkan karena tidak ditemukan pola kecenderungan.

Tabel 113 Kertas Kerja analisis gap IKSP.16 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	16	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai									96,65	98,84	102,3	Tercapai	Inspektorat Utama	Indikator baru di tahun 2024 dan indikator berhasil mencapai target pada tahun 2024 dengan kategori "Tercapai"

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja “Nilai Pengelolaan Kearsipan” merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 yang merupakan direktif penugasan dari Biro Umum. Pada tahun 2024, realisasi kinerja berhasil mencapai target. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai realisasi indikator ini adalah:

1. Melakukan penciptaan arsip melalui aplikasi SRIKANDI dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan POM;
2. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi yang memuat klasifikasi keamanan akses berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Badan POM;
3. Memberkaskan arsip aktif berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan POM serta melaporkan daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan ke Unit Kearsipan;
4. Memperbarui daftar arsip vital Inspektorat Utama setiap tahunnya;

5. Melakukan penyusutan arsip berupa pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan secara rutin (maksimal 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun) berdasarkan jadwal retensi arsip;
6. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kearsipan bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip;
7. Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan ketentuan

Hasil dari evaluasi pada indikator "Nilai pengelolaan kearsipan" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **''belum dapat disimpulkan''** karena perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan dan masuk dalam kategori **''Tercapai''.**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan direktif penugasan dari Biro Umum dalam mencapai RB tematik, sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 kurang relevan untuk dilanjutkan dengan catatan direktif penugasan cukup dimasukkan pada penilaian SKP. Untuk mencapai target dari penugasan direktif tersebut dapat dilakukan kegiatan yang dilakukan di atas.

3.2.8 Evaluasi akhir pada Sasaran Program 8 (SP.8) Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal

Sasaran Program 8 (SP.8) Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal, didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran program (IKSP). Evaluasi akhir pada SP.8 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSP.17 Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama

Tabel 114 Kertas Kerja analisis tren IKSP.17 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										Perkembangan Kinerja		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama		85	85,30	84,28	85,70	84,72	85,21	85,15	92,37	92,48	86,76	20,83	Meningkat (Moderat)	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Indikator memiliki perkembangan kinerja **Meningkat Moderat** yakni perkembangan kinerja cenderung meningkat namun belum berhasil mencapai target pada akhir periode renstra

Tabel 115 Kertas Kerja analisis gap IKSP.17 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	17	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	Indeks	85	85,30	84,28	85,70	84,72	85,21	85,15	92,37	92,48	86,76	93,8	Tidak Tercapai	Inspektorat Utama	Realisasi kinerja indikator mengalami fluktuatif dan pada akhir periode renstra tidak berhasil mencapai target dengan kategori "Tidak Tercapai"

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja "indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama" memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif. Di tahun 2024 indikator ini mengalami penyesuaian target yang diberikan oleh Biro SDM. Sebagai informasi, indikator ini mengalamu perubahan tools penilaian pada tahun berjalan 2024, sehingga realisasi kinerja belum dapat mencapai target. Meskipun belum berhasil mencapai target, upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator ini yaitu kegiatan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN Inspektorat Utama.

Hasil dari evaluasi pada indikator "indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **'Meningkat (Moderat)** karena perkembangan kinerja cenderung meningkat namun belum berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dan masuk dalam kategori **''Tidak Tercapai''.**

Rekomendasi

pada perubahan road map Reformasi Birokrasi, pengukuran dalam bidang SDM digantikan dengan Sistem Merit - Manajemen Talenta (Talent Scouting), sehingga pada rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029, IP ASN indikator ini sudah tidak relevan untuk dilanjutkan. Meskipun sudah tidak relevan, namun kegiatan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN Inspektorat Utama tetaplah menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

3.2.9 Evaluasi akhir pada Sasaran Program 9 (SP.9) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama

Sasaran Program 9 (SP.9) Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal, didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran program (IKSP). Evaluasi akhir pada SP.9 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSP.18 Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal

Tabel 116 Kertas Kerja analisis tren IKSP.18 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										Perkembangan Kinerja		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal		1,51	0	2	1	2,25	3	2,5	3	3	3,6	120,43	Meningkat (On The Track)	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Indikator "Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal" memiliki perkembangan kinerja yang meningkat atau on the track. hal ini dilihat dari perkembangan kinerja yang cenderung meningkat dan mampu mencapai target akhir periode renstra.

Tabel 117 Kertas Kerja analisis gap IKSP.18 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	18	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	Indeks	1,51	0	2	1	2,25	3	2,5	3	3	3,6	120,0	Tercapai	Inspektorat Utama	Realisasi kinerja indikator mengalami peningkatan sampai pada akhir periode renstra dan berhasil mencapai target dengan kategori "Tercapai"

Hasil evaluasi

Indikator "Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal" memiliki perkembangan kinerja yang meningkat atau on the track. Realisasi kinerja ini mengalami peningkatan dari tahun pertama hingga akhir periode renstra. Peningkatan ini dilakukan dengan upaya:

1. Penunjukkan *person in charge* (PIC) di masing-masing unit satuan kerja di lingkungan Inspektorat Utama untuk melakukan pemutakhiran data yang rutin per bulan, dan melakukan pemantauan bulanan;
2. Melakukan sosialisasi berkala tentang penggunaan e-mail corporate Badan BPOM di lingkungan Inspektorat Utama;
3. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak memanfaatkan *email corporate*

Rekomendasi

Berdasarkan informasi dari tim Pusat data dan informasi, bahwa indikator "Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal" tidak dilanjutkan pada periode renstra selanjutnya. Sehingga pada rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029, indikator ini tidak dilanjutkan.

3.2.10 Evaluasi akhir pada Sasaran Program 10 (SP.10) Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama Secara Akuntabel

Sasaran Program 10 (SP.10) Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama Secara Akuntabel, didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja sasaran program (IKSP). Evaluasi akhir pada SP.10 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSP.19 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama

Tabel 118 Kertas Kerja analisis tren IKSP.19 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										Perkembangan Kinerja		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama		93	97,32	93,9	93,86	94,5	93	95,7	90,43	93,74	98,75	-36,99	Menurun	Mendukung Nilai Kinerja Anggaran BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Indikator mengalami perkembangan kinerja menurun, karena perkembangan kinerja cenderung menurun. Namun meskipun menurun indikator berhasil mencapai target akhir periode renstra.

Tabel 119 Kertas Kerja analisis gap IKSP.19 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Nilai	93	97,32	93,9	93,86	94,5	93	95,7	90,43	93,74	98,75	105,3	Tercapai	Inspektorat Utama	Realisasi kinerja indikator mengalami fluktuatif sampai pada akhir periode renstra dan berhasil mencapai target dengan kategori "Tercapai"

Hasil evaluasi

Indikator "Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama" memiliki perkembangan kinerja yang meningkat atau on the track. Sebagai informasi, indikator ini telah mengalami penyesuaian target pada tahun 2024 karena adanya perubahan tools penilaian baik pada

IKPA maupun EKA. Realisasi kinerja indikator ini sepanjang tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif karena terdampak penyesuaian tools yang selalu berubah di tiap tahunnya. Namun Inspektorat Utama tetap berkomitmen mewujudkan terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel dengan mencapai target pada akhir periode renstra.Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai realisasi indikator ini adalah:

8. Revisi pergeseran anggaran pada DIPA dan revisi rencana penarikan dana pada halaman III DIPA;
9. Inspektorat Utama melakukan *Automatic Adjustment* sebesar sebesar Rp 999.793.000 berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.01.2.21.01.24.10 tentang Revisi *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024;dan
10. Inspektorat Utama melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp 816.301.000 berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor PR.05.03.2.11.24.34 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Badan POM TA 2024, serta Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Tanggal 7 November 2024 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024.

Hasil dari evaluasi pada indikator “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **”Menurun”** karena perkembangan kinerja cenderung menurun, namun meskipun menurun realisasi kinerja di tahun 2024 berhasil mencapai target akhir tahun dan masuk dalam kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama meruppakan indikator yang masuk dalam penilaian RB General BPOM, Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya dengan catatan dalam penentuan target agar dipertimbangkan realisasi kinerja tahun 2020-2024. Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L;
2. Melakukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA secara triwulanan sesuai dengan reviu kebutuhan pencairan anggaran Inspektorat Utama dan menjaga akurasi dan tetap menjaga konsistensi realisasi anggaran dengan RPD Halaman III DIPA dengan batas toleransi deviasi tidak lebih dari 5%;

3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap triwulan sesuai dengan jenis belanja berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun;dan
4. Inspektorat Utama melakukan penambahan Rincian Output berupa Layanan BMN untuk menunjang indikator efisiensi berupa penggunaan dan efisiendsi Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024, sehingga target pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 120 target Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	98,83	98,92	99,00	99,09	99,17

IKSP.20 Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa

Tabel 121 Kertas Kerja analisis tren IKSP.20 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										Perkembangan Kinerja		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					UKE II	UKE I	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori				
SP.10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa										82,17	100	Indikator baru	Belum dapat disimpulkan	Mendukung Reformasi birokrasi BPOM		Inspektorat Utama	Indikator baru di tahun 2024 sehingga perkembangan kinerja masuk dalam kategori belum dapat disimpulkan karena perkembangan kinerja belum dapat menemukan pola kecenderungan

Tabel 122 Kertas Kerja analisis gap IKSP.20 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	20	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa										82,17	100	121,7	Tercapai	Inspektorat Utama	Indikator baru di tahun 2024 dan berhasil mencapai target akhir periode renstra dengan kategori Tercapai

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja "Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa" merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 yang merupakan direktif penugasan dari Biro Umum. Pada tahun 2024, realisasi kinerja berhasil mencapai target. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai realisasi indikator ini adalah:

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian kualitas PBJ
2. Penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing)
3. Mengumumkan RUP dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya
4. Penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE
5. Melakukan E- Kontrak pada aplikasi SPSE

Hasil dari evaluasi pada indikator "Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **"belum dapat disimpulkan"** karena perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan dan masuk dalam kategori **"Tercapai".**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan direktif penugasan dari Biro Umum dalam mencapai RB tematik, sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 kurang relevan untuk dilanjutkan dengan catatan direktif penugasan cukup dimasukkan pada penilaian SKP. Untuk mencapai target dari penugasan direktif tersebut dapat dilakukan kegiatan yang dilakukan di atas.

IKSP.21 Nilai pengelolaan barang milik negara (BMN)

Tabel 123 Kertas Kerja analisis tren IKSP.21 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										Perkembangan Kinerja		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					UKE II	UKE I	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori				
SP.10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara										95	98,41	Indikator baru	Belum dapat disimpulkan	Mendukung Reformasi birokrasi BPOM		Inspektorat Utama	Indikator baru di tahun 2024 sehingga perkembangan kinerja masuk dalam kategori belum dapat disimpulkan karena perkembangan kinerja belum dapat menemukan pola kecenderungan

Tabel 124 Kertas Kerja analisis gap IKSP.21 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	21	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai									95	98,41	103,6	Tercapai	Inspektorat Utama	Indikator baru di tahun 2024 dan berhasil mencapai target akhir periode renstra dengan kategori Tercapai

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja "Nilai pengelolaan barang milik negara" merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 yang merupakan direktif penugasan dari Biro Umum. Pada tahun 2024, realisasi kinerja berhasil mencapai target. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai realisasi indikator ini adalah:

6. Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian pengelolaan BMN;
7. Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu;
8. Ketepatan waktu dalam penyampaian RKBMN;
9. Penetapan status penggunaan terhadap BMN oleh pengelola BMN;
10. Penghapusan dan pemusnahan BMN sesuai dengan (PMK 80/PMK.06/2016)

Hasil dari evaluasi pada indikator "Nilai pengelolaan barang milik negara" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **''belum dapat disimpulkan''** karena perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan dan masuk dalam kategori **''Tercapai''.**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan direktif penugasan dari Biro Umum dalam mencapai RB tematik, sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 kurang relevan untuk dilanjutkan dengan catatan direktif penugasan cukup dimasukkan pada penilaian SKP. Untuk mencapai target dari penugasan direktif tersebut dapat dilakukan kegiatan yang dilakukan di atas.

IKSP.22 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tabel 125 Kertas Kerja analisis tren IKSP.22 Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										Perkembangan Kinerja		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
SP.10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri										60%	97,22%	Indikator baru	Belum dapat disimpulkan	Mendukung Reformasi birokrasi BPOM		Inspektorat Utama	Indikator baru di tahun 2024 sehingga perkembangan kinerja masuk dalam kategori belum dapat disimpulkan karena perkembangan kinerja belum dapat menemukan pola kecenderungan

Tabel 126 Kertas Kerja analisis gap IKSP.22 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	22	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase									60%	97,22%	162,0	Tercapai	Inspektorat Utama	Indikator baru di tahun 2024 dan berhasil mencapai target akhir periode renstra dengan kategori Tercapai

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja "Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri" merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 yang merupakan direktif penugasan dari Biro Umum. Pada tahun 2024, realisasi kinerja berhasil mencapai target. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai realisasi indikator ini adalah Melakukan pembelian barang dan jasa yang terdaftar produk dalam negeri (PDN).

Hasil dari evaluasi pada indikator "Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **''belum dapat disimpulkan''** karena perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan dan masuk dalam kategori **''Tercapai''.**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan direktif penugasan dari Biro Umum dalam mencapai RB tematik, sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 kurang relevan untuk dilanjutkan dengan catatan direktif penugasan cukup dimasukkan pada penilaian SKP. Untuk mencapai target dari penugasan direktif tersebut dapat dilakukan kegiatan yang dilakukan di atas.

Evaluasi Indikator yang sudah tidak relevan sampai akhir periode renstra 2020-2024

IKSP Nilai peer review atas pengawasan intern

1. Analisis Tren

Tabel 127 Kertas Kerja analisis tren IKSK Nilai peer review atas pengawasan intern Tahun 2020-2024

No Kode	SP	IKSP	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Nilai peer review atas pengawasan intern		75	74,99	75	74,99	IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun		IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun		Di Tahun 2024 sudah dilaksanakan TSE oleh Itjen Kemen ATR BPN dengan nilai 82,73		Indikator tidak relevan	Belum dapat disimpulkan		Indikator tidak dilaksanakan di tahun 2024

2. Analisis Gap

Tabel 128 Kertas Kerja analisis gap IKSK Nilai peer review atas pengawasan intern Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SP.5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	11	Nilai peer review atas pengawasan intern		75	74,99	75	74,99	IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun		IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun		Di Tahun 2024 sudah dilaksanakan TSE oleh Itjen Kemen ATR BPN dengan nilai 82,73		-	-	Inspektorat I	Indikator sudah dimasukkan pada inisiatif strategis

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja “Nilai peer review atas pengawasan intern” diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun.

Di Tahun 2024 sudah dilaksanakan Telaah Sejawat Ekstern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ATR BPN dengan nilai 82,73

IKSP Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan

Analisis Tren

Tabel 129 Kertas kerja analisis tren nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										Perkembangan Kinerja		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024							
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	9,24	6,43	6,35	5,98	5,98	6,02	5,67	6,06	Tidak dapat dihitung karena adanya perubahan road map RB menjadi RB General dan tematik	Digantikan dengan indikator baru yang relevan, yakni "Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas" dan "Nilai Survei Penilaian Integritas"		Tidak relevan pada akhir periode renstra	Belum dapat disimpulkan	Mendukung Reformasi BPOM	Inspektorat I Inspektorat II	Inspektorat Utama	Indikator tidak dilaksanakan di tahun 2024

Analisis Gap

Tabel 130 Kertas kerja analisis gap nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	1	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	Nilai	6,43	6,35	5,98	5,98	6,02	5,67	6,06	Tidak dapat dihitung karena adanya perubahan road map RB menjadi RB General dan tematik	Digantikan dengan indikator baru yang relevan, yakni "Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas" dan "Nilai Survei Penilaian Integritas"		***	Belum dapat disimpulkan	Inspektorat Utama	Indikator sudah tidak relevan, sehingga digantikan dengan indikator baru yang relevan, yakni "Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas" dan "Nilai Survei Penilaian Integritas"

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja “nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan” sudah tidak relevan karena adanya perubahan road map RB tahun 2020-2024 dari PANRB. Sehingga perkembangan kinerja belum dapat disimpulkan karena tidak ada pola kecenderungan yang muncul.

IKSP Tingkat Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama

Analisis Tren

Tabel 131 Kertas kerja analisis tren tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	*Baseline* (2019)	Tahun										Perkembangan Kinerja		Keselarasan RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					UKE II	UKE I	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori				
SP.10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ittama		Efisien (88%)	75%	89	75	IKU ini dimasukkan hanya kepada Eselon II sesuai dengan Arahan dari Biro Perencanaan dan keuangan		IKU ini dimasukkan hanya kepada Eselon II sesuai dengan Arahan dari Biro Perencanaan dan keuangan		IKU ini dimasukkan hanya kepada Eselon II sesuai dengan Arahan dari Biro Perencanaan dan keuangan		Indikator tidak dilaksanakan di tahun 2024	Belum dapat disimpulkan			Inspektorat Utama	Indikator tidak dilaksanakan mulai dari tahun 2022-2024 di tingkat eselon I. Indikator ini tercascade ke eselon II yang merupakan cascade dari Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama sesuai arahan dari Biro Perencanaan

Analisis Gap

Tabel 132 Kertas kerja analisis gap tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SP.10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	-	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama	Persen	Efisien (88%)	75%	89	75	IKU ini dimasukkan hanya kepada Eselon II sesuai dengan Arahan dari Biro Perencanaan dan keuangan						***	Belum dapat disimpulkan	Inspektorat Utama	Indikator sudah tidak dilaksanakan pada level Eselon I. IKU ini dimasukkan hanya kepada Eselon II sesuai dengan Arahan dari Biro Perencanaan dan keuangan

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja “tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama” sudah tidak relevan pada akhir periode renstra, karena indikator hanya muncul pada level eselon II sesuai dengan arahan Biro Perencanaan dan Keuangan. Sehingga perkembangan kinerja belum dapat disimpulkan karena tidak ada pola kecenderungan yang muncul.

3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Inspektorat Utama memiliki 2 (dua) tujuan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, Inspektorat Utama melakukan reviu terhadap indikator tujuan rencana strategis pada Keputusan Inspektur Utama BPOM NO HK.02.02.7.08.24.19 Tahun 2024 tentang Reviu Manual Indikator Tujuan Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai ketercapaian setiap tujuan berdasarkan capaian indikator tujuan:

Tabel 133 Kertas Kerja Ketercapaian tujuan rencana strategis tahun 2020-2024

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Keterangan	2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Notifikasi Ketercapaian Tujuan
				Target	Realisasi	Capaian			
Tujuan 1. Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (Governance), Manajemen Risiko (Risk) dan Pengendalian Intern (Control) yang handal	Indeks pengelolaan Tata Kelola (Governance), Manajemen Risiko (Risk) dan Pengendalian Intern (Control) yang handal di Badan POM	Capaian tahun 2024	Adanya reviu terhadap 3 (tiga) indikator tujuan, dapat disimpulkan bahwa 2 indikator sudah tidak relevan yakni Indikator "Indeks Integritas Organisasi" dan "Survei Integritas Jabatan dengan Kategori A" yang dilakukan penyesuaian dengan indikator "Nilai Survei Penilaian Integritas" dimana nilai SPI tersebut menjadi indikator kinerja utama pada perjanjian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024. Selanjutnya, untuk indikator "Survei Pengendalian Efektivitas Korupsi" terdapat penyesuaian nomenklatur berdasarkan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021. Dengan tidak relevannya 2 indikator di atas, maka dilakukan penyesuaian indikator tujuan yang memuat GRC yakni dengan bobot nilai SPIP (20%), IEPK (20%), MRI (30%), dan SAKIP (30%).	3,98	4,13	103,77	103,77	103,77	Tujuan sudah tercapai/on the track
Tujuan 2. Terwujudnya keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan sumber daya Badan POM telah sesuai dengan peraturan, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan kinerja Badan POM									

Hasil Evaluasi

Berdasarkan tabel di atas, kedua tujuan Inspektorat Utama telah tercapai dan masuk pada kategori tujuan sudah tercapai atau *on track*. Keberhasilan capaian ini didukung dengan adanya komitmen pimpinan di BPOM serta para pegawai BPOM. Kontribusi Inspektorat Utama dalam keberhasilan ini adalah melakukan pengawalan dalam evaluasi SPIP-T, melakukan pendampingan atau bimbingan teknis dalam implementasi manajemen risiko. Selain itu masifnya sosialisasi anti korupsi pada BPOM turut serta meguatkan integritas pegawai BPOM untuk meningkatkan nilai IEPK BPOM. Pendampingan pembangunan zona integritas selalu menjadi prioritas kegiatan Inspektorat Utama dalam menjaga dan menguatkan integritas pegawai BPOM. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada unit kerja BPOM dilakukan secara rutin dengan memberikan rekomendasi dengan tujuan implementasi akuntabilitas yang lebih baik.

Rekomendasi

Memperhatikan keberhasilan capaian dalam tujuan renstra 2020-2024, terdapat beberapa rekomendasi ke depannya yakni:

1. Mempertahankan kegiatan yang mendukung peningkatan penilaian pada 4 penilaian yang menjadi bobot penilaian;
2. Melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap keberhasilan kinerja organisasi baik secara mandatory maupun yang mendukung prioritas presiden maupun nasional;
3. Meningkatkan kesadaran pegawai untuk melestarikan budaya integritas.

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

3.4.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
Perencanaan Kinerja								
Memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja;	Menyampaikan informasi perencanaan kinerja pada Laporan kinerja tahunan Inspektorat Utama	Triwulan I 2024	Menyampaikan informasi perencanaan kinerja pada Laporan kinerja tahunan Inspektorat Utama	Menyampaikan informasi perencanaan kinerja pada Laporan kinerja tahunan/interim Inspektorat Utama	Menyampaikan informasi perencanaan kinerja pada Laporan kinerja tahunan/interim Inspektorat Utama	Menyampaikan informasi perencanaan kinerja pada Laporan kinerja tahunan/interim Inspektorat Utama	Belum terdapat pelaporan kinerja tahun 2023 pada esr menpan di tahun 2024	Terdapat laporan kinerja tahun 2023 di link esr menpan sesuai dateline pengumpulan maksimal di 29 Februari 2024
Menyusun kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja dengan berdasarkan basis data yang memadai termasuk mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya;	Menyusun PK dan RAPK berdasarkan basis data yang jelas termasuk mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya (matriks justifikasi penyesuaian/perubahan) dan melampirkan matriks justifikasi penyesuaian/perubahan) pada PK dan RAPK	Triwulan I dan Triwulan IV 2024	Menyusun PK dan RAPK berdasarkan basis data yang jelas termasuk mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya (matriks justifikasi penyesuaian/perubahan) dan melampirkan matriks justifikasi penyesuaian/perubahan) pada PK dan RAPK		Menyusun PK dan RAPK dengan penyesuaian pimpinan yang baru	Menyusun PK dan RAPK tahun 2025	Dokumen PK RAPK sudah berbasis data yang mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya namun belum melampirkan matriks justifikasi penyesuaian/perubahan	Dokumen PK RAPK sudah berbasis data yang mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya dan sudah melampirkan matriks justifikasi penyesuaian/perubahan

INSPEKTORAT UTAMA

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
Menyusun analisis SMART untuk indikator kinerja tujuan;	Menyusun analisis SMART untuk indikator kinerja tujuan;	Triwulan I 2024	-	-	Terdapat Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan No HK.02.02.7.08.24.19 Tahun 2024 Tentang Reviu Manual Indikator Tujuan Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 yang memuat SMART indikator Tujuan Renstra dan Reviu nya	-	Belum ada analisis SMART untuk indikator kinerja tujuan;	Terdapat Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan No HK.02.02.7.08.24.19 Tahun 2024 Tentang Reviu Manual Indikator Tujuan Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 yang memuat SMART indikator Tujuan Renstra dan Reviu nya
Melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja dan revisinya pada subsite satuan kerja dan esr.menpan.go.id.	Melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja dan revisinya pada subsite Inspektorat Utama, link bit.ly/sakipcorner, dan esr.menpan.go.id.	Triwulan I dan Triwulan IV 2024	Melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja dan revisinya pada subsite Inspektorat Utama, link bit.ly/sakipcorner, dan esr.menpan.go.id, dan Biro Perencanaan dan Keuangan				Belum terdapat publikasi dokumen perencanaan revisi serta pelaporan kinerja triwulan 2023	Melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja dan revisi (Laporan kinerja tahun 2022 Inspektorat

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
								Utama penyesuaian, Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023, Laporan Kinerja Interim Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2023, PK, RAPK, RKT, SK IKU tahun 2024), Laporan Kinerja Interim Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2024, pada subsite Inspektorat Utama, link bit.ly/sakipcorner, dan esr.menpan.go.id
Pengukuran Kinerja								

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan kriteria kemudahan menelusuri sumber data yang valid dan kemudahan mengakses data bagi pihak yang berkepentingan serta mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data;	Melakukan revisi SOP Pengumpulan data kinerja dengan menambahkan kriteria kemudahan menelusuri sumber data yang valid dan kemudahan mengakses data bagi pihak yang berkepentingan serta mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data	Triwulan IV 2024	-	-	Terdapat SOP No POM-16.01/CFM.01/SOP.01/IK.07.07 hal Penyusunan Data Kinerja	-	Pada SOP Pengumpulan data kinerja belum terdapat kriteria kemudahan menelusuri sumber data yang valid dan kemudahan mengakses data bagi pihak yang berkepentingan serta mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data	
Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik dan dapat diandalkan sehingga terdapat keselarasan data antara laporan evaluasi internal, laporan kinerja interim, dan laporan kinerja tahunan.	Menambahkan keterangan jika terdapat perbedaan data antara dokumen kinerja Laporan Kinerja interim, Laporan Evaluasi triwulanan dan Laporan Kinerja tahunan.	Triwulan I - Triwulan IV 2024	Menambahkan keterangan jika terdapat perbedaan data antara dokumen kinerja Laporan Kinerja interim, Laporan Evaluasi triwulanan dan Laporan Kinerja tahunan. Sudah dilakukan pada laporan kinerja tahun 2023 dan 2024 Inspektorat Utama				Belum menambahkan keterangan jika terdapat perbedaan data antara dokumen kinerja Laporan Kinerja interim, Laporan Evaluasi triwulanan dan Laporan Kinerja tahunan.	Sudah menambahkan keterangan jika terdapat perbedaan data antara dokumen kinerja Laporan Kinerja interim, Laporan Evaluasi triwulanan dan Laporan Kinerja

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
								tahunan. Sudah dilakukan pada laporan kinerja tahun 2023 dan 2024 Inspektorat Utama
Mendokumentasikan peran aktif pimpinan dalam rapat monitoring dan evaluasi kinerja khususnya terkait kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja, tidak hanya berfokus pada capaian kegiatan dan realisasi anggaran.	Melengkapi absensi dan rekaman rapat, serta disposisi pimpinan sebagai data dukung peran pimpinan dalam dokumen kinerja baik bulanan, triwulanan, maupun tahunan.	Triwulan I - Triwulan IV 2024	Melengkapi absensi dan rekaman rapat, serta disposisi pimpinan sebagai data dukung peran pimpinan dalam dokumen kinerja	Melengkapi absensi dan rekaman rapat, serta disposisi pimpinan sebagai data dukung peran pimpinan dalam dokumen kinerja	Melengkapi absensi dan rekaman rapat, serta disposisi pimpinan sebagai data dukung peran pimpinan dalam dokumen kinerja	Melengkapi absensi dan rekaman rapat, serta disposisi pimpinan sebagai data dukung peran pimpinan dalam dokumen kinerja	Belum melengkapi absensi dan rekaman rapat, serta disposisi pimpinan sebagai data dukung peran pimpinan dalam dokumen kinerja Berita acara evaluasi internal	Sudah melengkapi absensi dan rekaman rapat, serta disposisi pimpinan sebagai data dukung peran pimpinan dalam dokumen kinerja Berita acara evaluasi internal
Pelaporan Kinerja								
Penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait	Menambahkan penjelasan pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan	Triwulan I 2024	Menambahkan penjelasan pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja pada Laporan kinerja AKIP Tahunan yakni Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023, Laporan Kinerja Interim Inspektorat Utama Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, dan Laporan Kinerja Tahun 2024				Belum menambahkan penjelasan pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka	Sudah menambahkan penjelasan pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya refocusing anggaran, perubahan definisi operasional, indikator, target dan kegiatan;	pencapaian kinerja pada Laporan kinerja AKIP Tahunan.						memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja pada Laporan kinerja AKIP Tahunan	memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja pada Laporan kinerja AKIP Tahunan yakni Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023, Laporan Kinerja Interim Inspektorat Utama Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, dan Laporan Kinerja Tahun 2024
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran	Menambahkan penjelasan terkait upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber	Triwulan I 2024	Menambahkan penjelasan terkait upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan kinerja AKIP Tahunan. Yakni pada laporan kinerja Inspektorat Utama Tahun				Belum Menambahkan penjelasan terkait upaya yang telah	Sudah Menambahkan penjelasan terkait upaya yang telah

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
strategis, indikator kinerja dan kegiatan serta menjelaskan upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.	daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan kinerja AKIP Tahunan.		2023, Laporan Kinerja Interim Inspektorat Utama Triwulan I sampai dengan Triwulan II Tahun 2024				dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan kinerja AKIP Tahunan.	dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan kinerja AKIP Tahunan. Yakni pada laporan kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023, Laporan Kinerja Interim Inspektorat Utama Triwulan I sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
Evaluasi Internal								
Menyusun rencana aksi/rekomendasi yang memadai dan berkesinambungan terutama apabila rencana aksi periode sebelumnya belum dapat meningkatkan capaian kinerja;	Melakukan evaluasi, menyusun, dan memonitor rencana aksi/rekomendasi hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya pada Laporan berikutnya.	Triwulan I - Triwulan IV 2024	Menyajikan rekomendasi, rencana aksi serta realisasi dari rencana aksi hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya pada laporan kinerja sehingga rencana tindak lanjut dapat termonitoring dan terus berkesinambungan dilengkapi dengan kondisi sebelum dan kondisi sesudah agar proses dapat tergambar dengan jelas.				Menyajikan rekomendasi, rencana aksi serta realisasi dari rencana aksi hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya pada laporan kinerja sehingga rencana tindak lanjut dapat termonitoring dan terus berkesinambungan namun belum dilengkapi dengan kondisi sebelum dan kondisi sesudah agar proses dapat tergambar dengan jelas.	Menyajikan rekomendasi, rencana aksi serta realisasi dari rencana aksi hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya pada laporan kinerja sehingga rencana tindak lanjut dapat termonitoring dan terus berkesinambungan dilengkapi dengan kondisi sebelum dan kondisi sesudah agar proses dapat tergambar dengan jelas.
Melengkapi rekomendasi/rencana aksi dengan output dan timeline per triwulan agar kemajuan/progres pelaksanaan setiap triwulan dapat terlihat	Melengkapi rekomendasi/rencana aksi dengan output dan timeline per triwulan							
Menyajikan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya secara berkesinambungan.	Menyajikan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya secara berkesinambungan.							
Capaian Kinerja								

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai *early warning system* dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.	Memanfaatkan hasil evaluasi internal sebagai *early warning system* dalam rangka pencapaian kinerja.	Triwulan I - Triwulan IV 2024	Melakukan reviu target dan penyesuaian target terhadap indikator kinerja yang secara beberapa tahun belum mencapai target, serta mereviu target yang sudah melebihi periode akhir renstra 2020-2024 dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rancangan renstra 2025-2029				Masih terdapat target yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun sebelumnya, serta belum disertai dengan justfikasi yang terlampir	Melakukan reviu target dan penyesuaian target terhadap indikator kinerja yang secara beberapa tahun belum mencapai target, serta mereviu target yang sudah melebihi periode akhir renstra 2020-2024. Justifikasi penyesuaian target dilampirkan pada penetapan kinerja tahun 2024. Capaian kinerja di tahun 2024 menjadi pertimbangan dalam penyusunan

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
								rancangan renstra tahun 2025-2029

3.4.2 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi dari laporan kinerja Inspektorat Utama TW III Tahun 204 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Indikator merupakan indikator yang mendukung pelaksanaan RB General di BPOM dan baru muncul di tahun 2024. Indikator dilakukan pengukuran pada akhir tahun. Sampai triwulan III belum ada realisasi yang tergambar karena masih pada proses evaluasi WBK WBBM	Mengawal dan mendampingi pemenuhan indikator WBK dan WBBM di Unit	TW IV	1. Pembahasan hasil wawancara dan evaluasi lapangan serta persiapan verifikasi survei dan pleno dalam rangka evaluasi pembangunan ZI Tahun 2024 2. Koordinasi Pelaksanaan Validasi Survei dalam rangka Penetapan WBK Mandiri dan Intensifikasi Reviu Dokumen Penilaian Mandiri Pembangunan ZI 2024 3. Pencanangan ZI Menuju WBK dan WBBM Balai POM di Surakarta 4. Pengawalan penganugrahan WBBM dari PANRB (unit WBBM di tahun 2024 adalah Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Makassar, Balai POM di Gorontalo)	-	-	Realisasi kinerja indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan jumlah akumulasi keberhasilan ZI (WBK/WBBM) di setiap wilayah pengawasan yang sudah melaksanakan pembangunan ZI: Inspektorat I: 15/30=50% Inspektorat II: 20/32=62,50% Inspektorat Utama: 35/62=56,45%
			Mempertahankan pelaporan LHKPN dan LHKASN secara tepat waktu	TW IV	Pengawalan pelaporan LHKPN dan LHKASN secara tepat waktu (kepada pimpinan baru)	-	-	
			Pelaksanaan evaluasi pembangunan zona integritas di unit kerja BPOM	TW IV	Nota Dinas No PI.06.06.72.11.24.371 hal Permohonan Persetujuan dan Penyampaian Nilai Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Unit Kerja BPOM Tahun 2024	-	-	
2	Nilai Survei Penilaian Integritas	Indikator merupakan indikator yang mendukung pelaksanaan RB General di BPOM dan baru muncul di tahun 2024. Indikator dilakukan pengukuran pada akhir tahun. Sampai triwulan III belum ada realisasi yang tergambar	Perluasan bimbingan teknis pelaksanaan SPI dan aplikasi sang integritas	TW IV	Melakukan bimbingan teknis Survei Penilaian Integritas, aplikasi sang integritas, anti korupsi pada Balai POM di Manokwari,pada Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai POM di Bengkulu, Loka POM di Toba	-	-	Indikator kinerja tercapai. Berdasarkan Nilai Survei Penialaian Integritas Tahun 2024 hasil resmi KPK nilai SPI BPOM tahun 2024 meningkat menjadi 83,98 (Terjaga)
			Public Campaign Anti Korupsi	TW IV	Public Campaign Anti Korupsi dengan melaksanakan Café integritas seri 2 dan 3	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		karena nilai indikator berasal dari survei eksternal. di tahun 2023 nilai SPI BPOM sebesar 83,48						
3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	Indikator merupakan indikator yang muncul dari awal periode renstra tahun 2020-2024. Indikator dilakukan pengukuran pada akhir tahun. Sampai triwulan III belum ada realisasi yang tergambar karena nilai indikator berasal dari eksternal (PANRB). di tahun 2023 nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja sebesar 20,45	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dalam aplikasi SAPA APIP	TW IV	Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2023 dengan memanfaatkan aplikasi SAPA APIP	-	-	Indikator kinerja masih belum tercapai. Berdasarkan Hasil dari PANRB No B/673/AA.05/2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2024 nilai evaluasi internal meningkat menjadi 20,69
			Koordinasi bersama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melakukan revisi Pedoman Penyelenggaraan SAKIP agar lebih memudahkan Satker dalam mengimplementasikan SAKIP	TW IV	Koordinasi bersama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melakukan revisi Pedoman Penyelenggaraan SAKIP agar lebih memudahkan Satker dalam mengimplementasikan SAKIP. Terdapat pedoman SAKIP di lingkup BPOM yakni Keputusan Kepala Badan POM No 83 Tahun 2025 hal Pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkup BPOM	-	-	
			Melakukan desk evaluasi AKIP Tahun 2024Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Satker/UPT	TW IV	Melakukan desk evaluasi AKIP Tahun 2024 Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Satker/UPT pada bulan November dan Desember dengan memanfaatkan aplikasi SAPA APIP	-	-	
4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	Nilai SPIP-T tahun 2023 sebesar 3,79. belum ditemukan kendala yang berarti dalam pelaksanaan penilaian SPIP-T 2024. peran Inspektorat Utama adalah sebagai penjamin kualitas SPIP-T BPOM	Mempertahankan pembentukan unit percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPOM	TW IV	Mempertahankan pembentukan unit percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPOM	-	-	Nilai SPIP-T BPOM tahun 2024 meningkat ke level 4. SPIP: 4,094 IEPK: 4,000 MRI: 4,283
			Melakukan penyusunan kebijakan penilaian maturitas manajemen risiko	TW IV	1. Audiensi kepada BPKP terkait petunjuk pelaksanaan manajemen risiko 2. Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro SDM terkait kebijakan keterkaitan manrisk dan manajemen kinerja 3. Rapat Koordinasi bersama Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro Sumber Daya Manusia terkait draft petunjuk pelaksanaan manajemen risiko	-	-	
			Pelaksanaan desk manajemen risiko	TW IV	Penilaian Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			Sosialisasi berkelanjutan terkait Manajemen Risiko secara berkelanjutan	TW IV	Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro SDM terkait kebijakan keterkaitan manrisk dan manajemen kinerja	-	-	
			Koordinasi dan pengawalan berkelanjutan terhadap hasil sementara Evaluasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPOM tahun 2024	TW IV	Koordinasi dengan tim BPKP terkait hasil akhir SPIPT BPOM Tahun 2024	-	-	
5	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan		Melakukan reviu yang dilakukan atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini	TW IV	Pelaksanaan desk RKAKL, RKBMN	-	-	Realisasi indikator sebesar 99,98% dan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. OPINI WTP BPOM terus lestari 10x berturut-turut
			Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BPOM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	TW IV	1. Pendampingan pemeriksaan BPK 2. Pembahasan konsep temuan pengawasan	-	-	
			Penguatan peran consulting APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja	TW IV	Pelaksanaan penjawaban konsultasi dengan tema pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan Plan of Action (PoA) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	TW IV	Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan Plan of Action (PoA) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	-	-	
			Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	TW IV	Berpartisipasi pengawalan PIPK 2024 berkolaborasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan pada bimbingan teknis penilaian PIPK tahun 2024			
			[redacted]		kegiatan Lokakarya dengan BPK dengan Tema "Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia"	-	-	
6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Kendala utama pada TL Rekomendasi BPK adalah pada 1 rekomendasi BPK melibatkan beberapa unit sehingga harus seluruh unit menindaklanjuti baru rekomendasi tersebut selesai. Perlunya pendampingan dan komitmen dari seluruh elemen di BPOM untuk menindaklanjuti rekomendasi	Koordinasi lanjutan dengan tim BPK terkait hasil rekomendasi pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti per Semester I Tahun 2024	TW IV	Koordinasi dengan tim BPK terkait hasil rekomendasi pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti per Semester I Tahun 2024	-	-	Realisasi kinerja sampai per akhir tahun sebesar 96,15%. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
			Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja dengan Satuan Kerja terkait	TW IV	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja dengan Satuan Kerja terkait	-	-	
			Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas Komentar Instansi dan Rencana Aksi (Action Plan) atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP)	TW IV	Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan Plan of Action (PoA) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			Pengawalan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja pada Badan POM	TW IV	Pendampingan pemeriksaan BPK	-	-	
			Pelaksanaan kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM	TW IV	kegiatan Lokakarya dengan BPK dengan Tema "Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia"	-	-	
			Pemantauan Rencana Aksi (Action Plan) dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	TW IV	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap rekomendasi hasil BPK yang belum ditindaklanjuti (Surat Dinas Inspektur Utama No T-PI.05.7.12.24.809 hal Permintaan Tindak Lanjut Atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Utama Periode Semester II Tahun 2024 atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan dan Kinerja Tahun 2012 – 2023)	-	-	
7	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Realisasi kinerja baru diukur pada TW IV. Belum ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan survei	Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan	TW IV	Pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai Inspektorat Utama sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi tahun 2024 (Certified Risk Professional in Public Sector (CRPP), penjenjangan Auditor Ahli Muda, Workshop Business Data Analytics for Today and Future Improvement, Certified Risk Governance Professional (CRGP), Fraud Auditing 2, Certified Risk Managemet Officer (CRMO), Manajemen Pengawasan, Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 2. Melakukan pembaharuan sistem aplikasi pengawasan intern (SAPA APIP, SOLUSI, Inspiring Audit, E-Monev RB, Sang Integritas) secara berkala	-	-	Realisasi kinerja di tahun 2024 sebesar 88,25 . Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
			Melakukan persiapan pelaksanaan survei kepuasan mitra tahun 2024	TW IV	Melakukan pelaksanaan survei dan melaporkan hasil survei kepuasan mitra melalui Nota dinas No PI.06.73.12.24.275 Laporan Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2024	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
8	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	Realisasi kinerja baru diukur pada TW IV. Tema survei kebijakan tahun 2024 adalah tentang pedoman penanganan benturan kepentingan	Menyusun rencana aksi terhadap masukan survei dan upaya perbaikan dalam kebijakan	TW IV	Menyusun rencana aksi terhadap masukan survei dan upaya perbaikan dalam kebijakan	-	-	realisasi kinerja menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masukan dan saran untuk perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan
			Meningkatkan implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan kebijakan	TW IV	Meningkatkan implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan kebijakan	-	-	
9	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	realisasi kinerja sampai per TW III 100% dan tidak ditemukan kendala yang berarti	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Utama	TW IV	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Utama pada SAPA APIP	-	-	realisasi kinerja 100% dan tidak ditemukan kendala yang berarti
			Menerapkan standar audit intern di lingkungan BPOM	TW IV	Menerapkan standar audit intern di lingkungan BPOM	-	-	
			Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko	TW IV	Melaksanakan kegiatan berdasarkan PKPT 2024	-	-	
			Melaksanakan peningkatan/pengembangan kompetensi pegawai	TW IV	Melaksanakan pendidikan dan latihan oleh pegawai Inspektorat Utama	-	-	
			Melakukan intensifikasi Koordinasi dengan Satuan Kerja/Unit terkait tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Utama	TW IV	Melakukan koordinasi dan monev berkelanjutan terhadap unit terkait	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
10	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Realisasi indikator sampai per TW III di angka 96,80% Inspektorat Utama: 96,80% (4328/4471)	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil audit	TW IV	1. Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada seluruh satker dan unit kerja 2. Melakukan koordinasi dan monev berkelanjutan terhadap unit terkait	-	-	Realisasi indikator pada akhir tahun sebesar 90,75% Inspektorat Utama: 90,75% (4396/4844) hal ini menurun dibanding realisasi TW III. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah rekomendasi pengawasan yang diinput pada akhir tahun sedangka aplikasi masih belum dapat mengakomodir pencatatan realisasi status 1 per tanggal
11	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Realisasi indikator sampai per TW III di angka 81,82% masih terdapat 4 dari 22 pengaduan yang belum ditindaklanjuti sesuai kriteria	*Continuous improvement* sarana pengaduan agar lebih optimal	TW IV	Pemeliharaan aplikasi sang integritas	-	-	Realisasi indikator pada akhir tahun mencapai 100% dan seluruh pengaduan sudah ditindaklanjuti sesuai kriteria
			Melakukan public campaign dan mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait	TW IV	1. Melaksanakan café integritas dengan tema anti korupsi dan pengaduan 2. Melaksanakan klarifikasi dan telaah terhadap pengaduan yang masuk	-	-	
12	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Realisasi indikator sampai per TW III selalu 100%	-	-	Mempertahankan kegiatan yang dilakukan dalam menjawab pertanyaan di SOLUSI secara tepat waktu	-	-	Realisasi indikator di akhir tahun 2024 100%
13	Indeks RB Inspektorat Utama	Realisasi indikator diukur pada akhir tahun. Inspektorat sudah mengupayakan dan pemenuhan data dukung	Menyusun rencana aksi hasil rekomendasi evaluasi ZI pada tahun 2023	TW IV	Menyusun rencana aksi hasil rekomendasi evaluasi ZI pada tahun 2023	-	-	Realisasi indikator di akhir tahun 2024 100%
			Mempertahankan kegiatan kegiatan penunjang Reformasi Birokrasi	TW IV	Mempertahankan kegiatan kegiatan penunjang Reformasi Birokrasi (Baik pengungkit maupun reform)	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		dalam penilaian RB unit kerja	Mendorong pegawai untuk berinovasi	TW IV	Pemanfaatan optimal kegiatan AOC Inspektorat Utama	-	-	
14	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Realisasi indikator baru diukur pada akhir tahun. Kendala dalam meningkatkan AKIP Inspektorat Utama adalah adanya perbedaan persepsi terhadap TL Hasil rekomendasi AKIP tahun 2023	1. Mempertahankan kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun 2023 2. Menindaklanjuti rencana aksi pada hasil evaluasi AKIP Inspektorat Utama Tahun 2023	TW IV	1. Melakukan penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal dengan tepat waktu 2.Menindaklanjuti rencana aksi pada hasil evaluasi AKIP Inspektorat Utama (secara detail tertera pada bab 3 pada analisis akuntabilitas)	-	-	Nilai AKIP tahun 2024 meningkat sebesar 0,8 poin yakni menjadi 81,58
15	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP tahun 2023 sebesar 3,53 baru 2 elemen yang memperoleh level 4	1. Implementasi IACM dan Maturitas SPIP 2.evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama, 3.seminar nasional internal audit 4.penyusunan laporan evaluasi internal, laporan pengawasan, dan laporan tahunan	TW IV	• Melakukan implementasi IACM dan SPIP • Pelaksanaan evaluasi pemenuhan elemen Kapabilitas APIP • Mengikuti seminar nasional internal audit • Menyusun laporan evaluasi internal, laporan pengawasan, dan laporan tahunan	-	-	Nilai Kapabilitas APIP tahun 2024 sebesar 3,77 diikuti dengan 3 elemen yang sudah mencapai level 4 yakni akuntabilitas, sumber daya manajemen, dan budaya & organisasi
16	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Indikator merupakan indikator yang baru muncul di tahun 2024, pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun 2024, belum ditemukan kendala yang berarti pada pelaksanaanya, sehingga melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan	Melakukan penciptaan arsip melalui aplikasi SRIKANDI dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan POM	TW IV	Melakukan penciptaan arsip melalui aplikasi SRIKANDI dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan POM	-	-	Realisasi indikator mencapai target baik di unit kerja lingkup Inspektorat Utama maupun di tingkat Satker. Berdasarkan surat dari Biro Umum No B-KA.03.207.24.563 hal Penyampaian Nilai Final Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 Inspektorat I: 97,69 Inspektorat II: 100 Inspektorat Utama: 98,84
			Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi yang memuat klasifikasi keamanan akses berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Badan POM	TW IV	Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi yang memuat klasifikasi keamanan akses berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Badan POM	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			Memberkaskan arsip aktif berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan POM serta melaporkan daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan ke Unit Kearsipan	TW IV	Memberkaskan arsip aktif berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan POM serta melaporkan daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan ke Unit Kearsipan	-	-	
			Memperbarui daftar arsip vital Inspektorat Utama setiap tahunnya	TW IV	Memperbarui daftar arsip vital Inspektorat Utama setiap tahunnya	-	-	
			Melakukan penyusutan arsip berupa pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan secara rutin (maksimal 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun) berdasarkan jadwal retensi arsip	TW IV	Melakukan penyusutan arsip berupa pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan secara rutin (maksimal 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun) berdasarkan jadwal retensi arsip	-	-	
			Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kearsipan bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip	TW IV	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kearsipan bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip	-	-	
			Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan ketentuan	TW IV	Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan ketentuan	-	-	
17	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	Terdapat perubahan instrumen pengukuran IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot	Monitoring dan update SKP Pimpinan Satker pada triwulan III di triwulan selanjutnya	TW IV	Monitoring dan update SKP Pimpinan Satker pada triwulan III serta TW IV dan tahunan	-	-	Realisasi kinerja tidak mencapai target karena adanya perubahan tools dalam IP ASN
			Melakukan diklat/pelatihan manajerial atau kompetensi yang diperlukan bagi para pimpinan	TW IV	Melakukan diklat/pelatihan manajerial atau kompetensi yang diperlukan bagi para pimpinan	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja. Namun tidak terdapat penyesuaian target, sehingga melakukan kegiatan yang dapat menunjang nilai IP ASN Inspektorat Utama	Menjadwalkan Diklat Teknis bagi pegawai yang belum melaksanakan diklat pada triwulan III	TW IV	Melaksanakan pengembangan kompetensi dan pendidikan pelatihan bagi pegawai Inspektorat Utama	-	-	
			Monitoring kedisiplinan pegawai Inspektorat Utama secara berkala	TW IV	Monitoring kedisiplinan pegawai Inspektorat Utama secara berkala	-	-	
18	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	Tidak terdapat kendala berarti dan sudah mencapai nilai optimal	Monitoring pengisian pemutakhiran data oleh PIC secara berkala	TW IV	Monitoring pengisian pemutakhiran data oleh PIC secara berkala	-	-	Nilai PDI sudah optimal dan mampu masuk pada kategori konversi sesuai arahan dari Sestama pada nota dinas sekretariat utama no PR.09.03.2.01.25.42 hal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024.
			Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan email corporate melalui Laporan penggunaan email	TW IV	Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan email corporate melalui Laporan penggunaan email	-	-	
			Melakukan pemanfaatan sistem corporate dan verifikasi secara berkala setiap minggu	TW IV	Melakukan pemanfaatan sistem corporate dan verifikasi secara berkala setiap minggu	-	-	
19	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	terdapat penyesuaian tools pada NKA yakni pada EKA dan IKPA sehingga NKA baru dapat diukur pada akhir tahun. Kendala dalam mencapai target adalah hal III DIPA yang belum optimal	Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L	TW IV	1. Melakukan Revisi DIPA TW IV Tahun 2024 tepat waktu 2. Melakukan revisi POK secara berkala 3. Menginput capaian output tepat waktu 4. Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan Rencana Penarikan Dana secara berkala	-	-	Nilai NKA Inspektorat Utama mencapai target yang diperjanjikan yakni 98,75. meskipun hal III DIPA belum optimal tetapi lebih baik dari periode sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			Melakukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA secara triwulanan sesuai dengan reviu kebutuhan pencairan anggaran Inspektorat Utama dan menjaga akurasi dan tetap menjaga konsistensi realisasi anggaran dengan RPD Halaman III DIPA dengan batas toleransi deviasi tidak lebih dari 5%	TW IV	Melakukan pemutakhiran RPD pada saat pelaksanaan revisi DIPA	-	-	
			Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap triwulan sesuai dengan jenis belanja berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun	TW IV	Melakukan penyerapan anggaran dengan optimal baik di belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang	-	-	
20	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Indikator merupakan indikator yang baru muncul di tahun 2024, pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun 2024, belum ditemukan kendala yang berarti pada pelaksanaanya, sehingga melaksanakan kegiatan yang menunjang kualitas PBJ	Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian kualitas PBJ	TW IV	Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian kualitas PBJ	-	-	Indikator memiliki realisasi kinerja optimal yakni 100 berdasarkan Nota Dinas Biro Umum N-KP.09.01.25.01.25.37 hal Hasil Pengukuran Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
			Penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing)	TW IV	Penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing)	-	-	
			Mengumumkan RUP dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya	TW IV	Mengumumkan RUP dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya	-	-	
			Penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (jika ada)	TW IV	Penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (jika ada)	-	-	
			Penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE	TW IV	Penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE	-	-	
			Melakukan E- Kontrak pada aplikasi SPSE	TW IV	Melakukan E- Kontrak pada aplikasi SPSE	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
21	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Indikator merupakan indikator yang baru muncul di tahun 2024, pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun 2024, belum ditemukan kendala yang berarti pada pelaksanaanya, sehingga melaksanakan kegiatan yang menunjang pengelolaan BMN	Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian pengelolaan BMN	TW IV	Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian pengelolaan BMN	-	-	Indikator memiliki realisasi kinerja yang mencapai target yakni 98,41 Berdasarkan surat dari Biro Umum No B-PL.03.01.25.01.25.12 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Atas Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM.
			Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu	TW IV	Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu	-	-	
			Ketepatan waktu dalam penyampaian RKBMN	TW IV	Penyampaian RKBMN tepat waktu	-	-	
			Penetapan status penggunaan terhadap BMN oleh pengelola BMN	TW IV	Penetapan status penggunaan terhadap BMN oleh pengelola BMN	-	-	
			Penghapusan dan pemusnahan BMN sesuai dengan (PMK 80/PMK.06/2016)	TW IV	Penghapusan dan pemusnahan BMN sesuai dengan (PMK 80/PMK.06/2016)	-	-	
22	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Indikator merupakan indikator yang baru muncul di tahun 2024, pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun 2024, belum ditemukan kendala yang berarti pada pelaksanaanya, sehingga melaksanakan kegiatan realisasi penggunaan PDN	Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang dalam penggunaan produk dalam negeri	TW IV	Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang dalam penggunaan produk dalam negeri: Melakukan belanja dengan pertimbangan prioritas PDN	-	-	Indikator memiliki realisasi kinerja yang mencapai target yakni 97,22% Berdasarkan Nota Dinas Biro Umum N-KP.09.01.25.01.25.37 hal Hasil Pengukuran Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Utama dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terhadap program/kegiatan tentang kinerja Inspektorat Utama untuk perbaikan kedepannya. Laporan kinerja juga dimanfaatkan dalam penyesuaian perencanaan dan penetapan kinerja di tahun 2024 bahkan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis di periode selanjutnya.

Indikator Kinerja Inspektorat Utama yang sudah dibahas pada Bab 3.1 Analisis akuntabilitas kinerja, memiliki beberapa indikator yang dilakukan penyesuaian dalam penetapan kinerja di tahun 2024 karena memanfaatkan laporan kinerja tahun 2023. Indikator yang dilakukan penyesuaian dalam penetapan kinerja di tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 134 Matriks Pemanfaatan informasi laporan kinerja terhadap penyesuaian target di penetapan kinerja

No	Semula			Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
1.	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	Terdapat perubahan road map RB sehingga penguatan pengawasan sudah tidak relevan lagi	6,10	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30%	Merupakan indikator pengganti dari indikator “Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan” karena adanya perubahan road map reformasi birokrasi. Penetapan indikator dan target “Persentase tingkat keberhasilan Pembangunan zona integritas”, sesuai dengan Surat Edaran Kemenpan RB nomor 04 Tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi zona integritas 2023 huruf E angka 3 huruf a angka 1) minimal 30% dari seluruh populasi unit/satuan kerja pada instansi pemerintah sudah mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM dari kementerian PAN dan RB (kumulatif). Indikator ”Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas” dihitung berdasarkan Jumlah seluruh unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM (secara kumulatif) / Jumlah seluruh unit/satuan kerja BPOM yang melakukan pelayanan publik yang telah melakukan Pembangunan Zona Integritas.

No	Semula			Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
2.	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	Terdapat perubahan road map RB sehingga penguatan pengawasan sudah tidak relevan lagi	6,10	Nilai Survei Penilaian Integritas	83,48	Merupakan indikator pengganti dari indikator "Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan" karena adanya perubahan road map reformasi birokrasi. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan dalam kebijakan evaluasi reformasi birokrasi menjadi reformasi birokrasi berdampak yang dalam penilaiannya terdiri dari reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik. Perubahan tersebut tidak menghitung 8 area secara spesifik seperti dalam Peraturan Menteri PANRB No 26 Tahun 2020. Penilaian pada bagian reformasi birokrasi general terdiri dari: a) capaian strategis; b) capaian pelaksanaan kebijakan RB;dan c) capaian strategi pelaksanaan RB general. Selanjutnya, untuk reformasi birokrasi tematik terdiri dari: a) *implementing agency*; dan b) Non-*implementing agency*. Sehingga area "penguatan pengawasan" yang menjadi indikator kinerja "Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan" di Inspektorat Utama sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan sampai akhir periode renstra 2024. Sehingga, diperlukan indikator pengganti yang relevan terhadap reformasi birokrasi yang berlaku yakni dengan adanya indikator "Nilai Survei Penilaian Integritas". Survei Penilaian Integritas merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan instansi. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing instansi serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. SPI hadir untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber yakni pegawai di lembaga tersebut(internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga(eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut. Adapun penilaian SPI meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas,pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan Sumber Daya Manuisa(SDM), trading in influence (intervensi eksternal untuk pemberianizin/rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi. Selain itu, Inspektorat Utama merupakan koordinator Reformasi Birokrasi General dalam bagian survei penilaiaan integritas

No	Semula			Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
						berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024. Penentuan target dilakukan berdasarkan dari realisasi di tahun 2023. Hal ini dikarenakan, survei penilaian integritas tidak selalu dilakukan setiap tahun, serta misalkan dilakukan survei, BPOM belum tentu dimasukkan dalam survei tersebut. Sehingga terdapat kemungkinan nilainya kosong karena tidak dimasukkan dalam survei penilaian integritas. Dengan adanya kemungkinan tersebut, maka jika tidak ada nilai SPI maka indikator nilai Survei Penilaian Integritas tidak diperhitungkan pada Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Inspektorat Utama. Selain itu terdapatnya target tahun 2024 yang sama dengan realisasi di tahun 2023 adalah dengan mempertimbangkan adanya isu kegiatan politik yang saat ini sedang terjadi. Selanjutnya, sebagai informasi Inspektorat Utama memiliki intervensi dalam survei penilaian integritas yakni melakukan monitoring tindak lanjut terkait hasil dari SPI BPOM.
3.	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8,18	8,88	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	20,75	Adanya Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 yang memiliki perubahan bobot pada nilai evaluasi internal, maka perlu dilakukannya penyesuaian target terhadap perubahan peraturan Menteri PAN dan RB RI No 88 Tahun 2021 dengan melakukan konversi pada target yang sudah ditetapkan dengan bobot maksimal 10 menjadi bobot maksimal 25. Selama 3 tahun berturu-turut indikator ini tidak mencapai target yang ditentukan sehingga diperlukan penyesuaian target di tahun 2024. Penyesuaian target di tahun 2024, dihitung berdasarkan bobot evaluasi internal akuntabilitas kinerja terhadap target AKIP BPOM tahun 2024 (83) sehingga 25% dari 83 adalah **20,75**.

No	Semula			Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
4.	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,79	4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,85	Sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sesuai pasal 3 peraturan dimaksud mekanisme penilaian SPIP-T secara internal terdiri dari penilaian mandiri oleh manajemen lembaga dan penilaian penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Lembaga. Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM menyampaikan pernyataan telah dilakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lembaga. Namun, untuk peletakkan indikator nilai evaluasi SPIP-T BPOM di level 0 BPOM tidak bisa dilakukan setelah koordinasi internal dan eksternal yakni Biro Perencanaan dan Keuangan serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional karena tidak dapat dilakukan di tahun berjalan dan hanya bisa dari awal rencana strategis, sehingga penilaian mandiri SPIP-T yang sudah dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP akan diambil menjadi indikator kinerja di sekretariat utama dan untuk nilai evaluasi SPIP-T BPOM berada di Inspektorat Utama. Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM merupakan nilai evaluasi SPIP-T BPOM yang telah dievaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penentuan target berdasarkan gap dari realisasi tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 sebesar 0,06 poin.
5.	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99,97%	99,01%	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99,01%	Tetap (Indikator ini merupakan Tingkat kendali IKU yang sangat rendah karena sangat dipengaruhi oleh eksternal)
6.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93,82%	95%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	• Terdapatnya perluasan organisasi BPOM; • Rekomendasi di dua tahun terakhir terkait penyusunan atau revisi terhadap kebijakan/pedoman/SOP, implementasi dan koordinasi dengan lintas sektor yang membutuhkan waktu untuk memenuhi rekomendasi tersebut. Atau sifatnya bukan rekomendasi administrasi; • Penentuan target telah mempertimbangkan analisis tren dan perhitungan rata-rata

INSPEKTORAT UTAMA

No	Semula			Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
7.	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	87,08	86	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	86	Tetap (Indikator ini merupakan Tingkat kendali IKU yang sangat rendah karena sangat dipengaruhi oleh eksternal)
8.	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	85,71	88	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,3	• Terdapatnya fluktuatif tehadap nilai indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 • Penentuan target mempertimbangkan perhitungan rata-rata • Realisasi kinerja dipengaruhi oleh pihak eksternal • Jenis kebijakan yang di survei setiap tahun adalah berbeda-beda
9.	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	Tetap (terdapat catatan untuk memperbaharui definisi operasional di manual IKU terkait standar mutu)
10.	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96,06%	96%	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96%	Tetap
11.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu	100%	100%	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu	100%	Tetap
12.	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	95%	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,57%	Penyesuaian dilakukan karena realisasi dari 2021-2023 sudah melewati target akhir rencana strategis Inspektorat Utama. Target yang baru dihitung berdasarkan gap dari realisasi kinerja tahun 2023 (100%) terhadap realisasi di 2022 (97,43%), kemudian ditambahkan dengan target semula sebesar 95%, sehingga target yang disesuaikan menjadi 97,57%
13.	Indeks reformasi birokrasi Inspektorat Utama	85,31	83,6	Indeks reformasi birokrasi Inspektorat Utama	86,7	Capaian Indeks RB Ittama selama dua tahun berturut-turut capaian indeks RB Inspektorat Utama sudah melebihi target akhir tahun rencana strategis 2020-2024, maka dilakukan penyesuaian dengan rata-rata realisasi Indeks RB Inspektorat Utama pada tahun 2022 dan 2023 dengan jumlah 86,70.
14.	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,5	89,8	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,35	Penyesuaian target dilakukan berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Utama No PI.04.7.72.12.23.247 tentang Penyampaian Hasil Reviu Target Indikator Nilai SAKIP Tahun 2024.
15.	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,53	4	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,6	Adanya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mencantumkan skor/nilai pada hasil evaluasi Kapabilitas APIP. Sehingga indikator dapat terukur dengan lebih jelas dengan menggunakan nilai/skor.

No	Semula			Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
						Penentuan target berdasarkan hasil evaluasi pada rata-rata hasil SPIP-T (3,7) dan Manajemen Risiko (3,6). Penilaian evaluasi kapabilitas APIP sebelum tahun 2023, dilakukan di tahun 2018. Sehingga terdapat gap yang sangat jauh dalam pelaksanaan evaluasi kembali.
16.	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92,37	89,67	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92,48	• Terdapatnya capaian kinerja di bulan maret 2024 lebih dari 120%. • penentuan target digunakan berdasarkan rata-rata IP ASN di setiap bulan selama 2 tahun. • Penentuan target berdasarkan rata-rata nilai IP ASN seluruh pegawai Inspektorat Utama dari data Biro SDM
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	3	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	Tetap
18.	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	90,44	96,90	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,74	Penyesuaian target dilakukan berdasarkan matriks reviu target Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 dari Biro Perencanaan dan Keuangan.

☐ : Penyesuaian target dilakukan pada Triwulan III tahun 2024 sesuai persetujuan Biro Perencanaan dan Keuangan

Selain penyesuaian target, laporan kinerja juga dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan target dan indikator pada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029. Indikator dan target yang masih berlanjut pada periode renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 135 Matriks indikator dan target kinerja tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator	Tahun 2024				Perkembangan Kinerja	Keterangan	Rancangan Renstra Ittama 2025-2029						
		Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			Indikator	Target					Keterangan
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10									
Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30%	56,45%	188,17	Tidak dapat disimpulkan	Belum dapat disimpulkan	Masuk pada penilaian RB General BPOM, Relevan dilanjutkan	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17,88	18,05	18,22	18,4	18,57	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup Inspektorat Utama adalah gambaran tingkat kemajuan BPOM dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas sesuai lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Utama. Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama merupakan indikator baru di tahun 2025 yang terdiri dari indikator-indikator pendukung pada Reformasi Birokrasi General BPOM dalam lingkup Inspektorat Utama sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024. Penilaian yang dikoordinatori oleh Inspektorat Utama pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map
Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Nilai Survei Penilaian Integritas	83,48	83,98	100,60	Sangat Baik	Belum dapat disimpulkan	Masuk pada penilaian RB General BPOM, Relevan dilanjutkan							
Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75	20,69	99,71	Cukup	Meningkat (Moderat)	Masuk pada penilaian RB General BPOM, Relevan dilanjutkan							
Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,85	4,09	106,23	Sangat Baik	Meningkat (On The Track)	Masuk pada penilaian RB General BPOM, Relevan dilanjutkan							

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran	Indikator	Tahun 2024				Perkembangan Kinerja	Keterangan	Rancangan Renstra Ittama 2025-2029						
		Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			Indikator	Target					Keterangan
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10									
Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	99,98%	100,98	Sangat Baik	Stagnan	Indikator sudah tergambar pada indikator Sekretariat Utama terkait OPINI WTP BPOM, sehingga tidak relevan dilanjutkan							Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 adalah: 1. Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas Unit Kerja BPOM 2. Nilai survei penilaian integritas BPOM 3. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM (Bagian dari hasil SAKIP BPOM yang dinilai PANRB) 4. Nilai evaluasi SPIP BPOM 5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK BPOM
Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	96,15%	102,29	Sangat Baik	Menurun	Masuk pada penilaian RB General BPOM, Relevan dilanjutkan							
Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	86	88,25	102,62	Sangat Baik	Meningkat (On The Track)	Relevan dilanjutkan untuk mengukur kualitas pelayanan pengawasan intern	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28	88,31	88,34	88,37	88,40	Penentuan target berdasarkan realisasi kinerja indikator pada tahun sebelumnya
Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	86,3	84,74	98,19	Cukup	Menurun	Indikator cenderung sulit dibandingkan per tahun karena tema kebijakan yang berbeda setiap tahunnya. Indikator juga lebih relevan pada Biro							

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran	Indikator	Tahun 2024				Perkembangan Kinerja	Keterangan	Rancangan Renstra Ittama 2025-2029					
		Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			Indikator	Target				Keterangan
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10									
							Hukum dan Organisasi							
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100%	100,00%	100,00	Baik	Stagnan	Relevan dilanjutkan, merupakan indikator yang mengukur core bisnis tupoksi Inspektorat Utama dalam melakukan pengawasan intern	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%	Penentuan target berdasarkan realisasi kinerja indikator pada tahun sebelumnya
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	96%	90,75%	94,53	Cukup	Meningkat (Moderat)	Relevan dilanjutkan, merupakan indikator yang sangat relevan untuk mengukur pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Utama	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92,69%	92,77%	92,85%	92,93%	93,02%	Penentuan target berdasarkan realisasi kinerja indikator pada tahun sebelumnya
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	100%	100,00%	100,00	Baik	Meningkat (On The Track)	Relevan dilanjutkan, merupakan indikator yang sangat relevan untuk mengukur pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Utama	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Penentuan target berdasarkan realisasi kinerja indikator pada tahun sebelumnya

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran	Indikator	Tahun 2024				Perkembangan Kinerja	Keterangan	Rancangan Renstra Ittama 2025-2029						
		Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			Indikator	Target					Keterangan
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10									
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,57%	100,00%	102,49	Sangat Baik	Stagnan	Relevan dilanjutkan, merupakan indikator yang sangat relevan untuk mengukur peran consulting Inspektorat Utama	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Penentuan target berdasarkan realisasi kinerja indikator pada tahun sebelumnya
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	86,7	86,39	99,64	Cukup	Meningkat (Moderat)	Masuk pada penilaian RB General BPOM, Relevan dilanjutkan	Nilai Pembangunan Zona Integritas di lingkup Inspektorat Utama	87,60	87,71	87,82	87,93	88,04	Penentuan target berdasarkan realisasi kinerja indikator pada tahun sebelumnya
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	84,35	81,58	96,72	Cukup	Meningkat (Moderat)	Masuk pada penilaian RB General BPOM, Relevan dilanjutkan	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,58	83,16	83,95	84,74	85,52	Penentuan target berdasarkan unit pengampu
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,6	3,77	104,72	Sangat Baik	Meningkat (On The Track)	Relevan dilanjutkan, merupakan indikator yang sangat relevan untuk mengukur kapabilitas APIP Inspektorat Utama	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,90	4,00	4,20	4,30	4,50	Penentuan target berdasarkan realisasi kinerja indikator pada tahun sebelumnya

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran	Indikator	Tahun 2024				Perkembangan Kinerja	Keterangan	Rancangan Renstra Ittama 2025-2029					
		Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			Indikator	Target				Keterangan
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10									
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,65	98,84	102,27	Sangat Baik	Belum dapat disimpulkan	Indikator merupakan direktif penugasan dari Biro Umum, pada tahun 2025-2029 cukup sampai pada SKP						
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92,48	86,76	93,81	Cukup	Meningkat (Moderat)	Berdasarkan informasi dari unit pengampu, indikator tidak dilanjutkan pada tahun 2025-2029						
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	3	3,6	120,00	Sangat Baik	Meningkat (On The Track)	Berdasarkan informasi dari unit pengampu, indikator tidak dilanjutkan pada tahun 2025-2029						
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,74	98,75	105,34	Sangat Baik	Menurun	Masuk pada penilaian RB General BPOM, Relevan dilanjutkan	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Penentuan target berdasarkan unit pengampu
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	82,17	100	121,70	Tidak dapat disimpulkan	Belum dapat disimpulkan	Indikator merupakan direktif penugasan dari Biro Umum, pada tahun 2025-2029						

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran	Indikator	Tahun 2024				Perkembangan Kinerja	Keterangan	Rancangan Renstra Ittama 2025-2029						
		Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			Indikator	Target					Keterangan
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10									
							cukup sampai pada SKP							
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	95	98,41	103,59	Sangat Baik	Belum dapat disimpulkan	Indikator merupakan direktif penugasan dari Biro Umum, pada tahun 2025-2029 cukup sampai pada SKP							
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60%	97,22%	162,03	Tidak dapat disimpulkan	Belum dapat disimpulkan	Indikator merupakan direktif penugasan dari Biro Umum, pada tahun 2025-2029 cukup sampai pada SKP							
							Adanya penambahan indikator manajemen risiko pada tingkat satker dan unit kerja	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,4	3,7	4	4,2	4,3	Penentuan target berdasarkan realisasi kinerja indikator pada tahun sebelumnya

3.6 Realisasi Anggaran

3.6.1 Realisasi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat. Inspektorat Utama memiliki pagu awal tahun 2024 sebesar Rp 32.161.297.000,-, pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.01.2.21.01.24.10 tentang Revisi *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 , Inspektorat melakukan Automatic Adjustment sebesar Rp 999.793.000,-. Kemudian pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor T-KU.02.03.2.21.05.24.390 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Pilot Project Pembayaran Tunjangan Kinerja Terpusat Badan POM TA 2024, Inspektorat Utama melakukan revisi pergeseran anggaran antar-satker sebesar Rp4.468.066.000,-, sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2024 menjadi Rp 27.693.231.000,-. Inspektorat Utama melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp 816.301.000 berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor PR.05.03.2.11.24.34 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Badan POM TA 2024, serta Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Tanggal 7 November 2024 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan IV tahun 2024 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar Rp 25.908.284.126,- atau 93,55% dari jumlah keseluruhan pagu Rp 27.693.231.000,-, untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I (Inspektorat I) dan (2) Pengawasan

dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II (Inspektorat II) dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 136 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2024

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 19.857.121.000	Rp 18.544.620.677	93,39%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 7.836.110.000	Rp 7.363.663.449	93,97%
TOTAL		**Rp 27.693.231.000**	**Rp 25.908.284.126**	**93,55%**

*Berdasarkan data OMSPAN per 31 Desember 2024

Selanjutnya untuk realisasi anggaran secara detail jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di setiap indikator, realisasi anggaran per Sasaran Program, dapat dilihat sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 137 **Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama 2024**

ID	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12	B10	B11	B12	(Dalam ribuan rupiah)	B10	B11	B12	B10	B11	B12
SP1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas			30%			56,45%			188,17	1.026.445	837.642	1.025.839	1.026.299	81,61%	99,94%	99,99%
		Nilai Survei Penilaian Integritas			83,48			83,98			100,60	597.976	404.992	470.496	597.972	67,73%	78,68%	100%
		Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM			20,75			20,69			99,71	200.642	155.526	197.466	200.639	77,51%	98,42%	100%
		Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM			3,85			4,09			106,23	723.222	682.326	723.216	723.216	94,35%	100,00%	100%
SP2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan			99,01%			99,98%			100,98	980.295	832.902	927.228	980.289	84,96%	94,59%	100%

INSPEKTORAT UTAMA

ID	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12	B10	B11	B12	(Dalam ribuan rupiah)	B10	B11	B12	B10	B11	B12
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM			94%			96,15%			102,29	1.376.628	285.064	761.080	1.376.620	20,71%	55,29%	100%
SP3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern			86			88,25			102,62	108.707	95.207	95.207	108.707	87,58%	87,58%	100%
SP4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern			86,3			84,74			98,19	21.847	21.847	21.847	21.847	100,00%	100,00%	100%
SP5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	2.757.805	2.564.223	2.706.124	2.757.796	92,98%	98,13%	100%

INSPEKTORAT UTAMA

ID	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12	B10	B11	B12	(Dalam ribuan rupiah)	B10	B11	B12	B10	B11	B12
SP6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96%	96%	96%	96,05%	94,64%	90,75%	100,05	98,58	94,53	187.724	148.834	148.834	187.723	79,28%	79,28%	100%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	85,00%	90,00%	100%	82,61%	91,30%	100,00%	97,19	101,44	100,00	193.348	144.466	151.623	193.347	74,72%	78,42%	100%
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97%	97%	97,57%	100,00%	100,00%	100,00%	103,09	103,09	102,49	1.564	1.564	1.564	1.564	99,99%	99,99%	99,99%
SP7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama			86,7			86,39			99,64	1.235.504	1.232.104	1.235.501	1.235.501	99,72%	100%	100%
		Nilai AKIP Inspektorat Utama			84,35			81,58			96,72	5.799	5.359	5.799	5.799	92,40%	99,99%	99,99%

INSPEKTORAT UTAMA

ID	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12	B10	B11	B12	(Dalam ribuan rupiah)	B10	B11	B12	B10	B11	B12
		Level Kapabilitas APIP			3,6			3,77			104,72	940.047	859.205	935.545	940.045	91,40%	99,52%	100%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan			96,65			98,84			102,27	80.740	80.739	80.739	80.739	100%	100%	100%
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	82,93	82,93	92,48	86,08	86,08	86,76	103,80	103,80	93,81	1.857.800	1.263.770	1.400.770	1.857.790	68,03%	75,40%	100%
SP9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	3	3	3	3	3,6	100	100	120	329.880	329.879	329.879	329.879	100%	100%	100%
SP10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama			93,74			98,75			105,34	9.518.615	8.840.454	9.288.779	9.518.577	92,88%	97,59%	100%

INSPEKTORAT UTAMA

ID	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12	B10	B11	B12	(Dalam ribuan rupiah)	B10	B11	B12	B10	B11	B12
	Utama secara akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa			82,17			100			121,70	944.387	729.401	787.715	944.383	77,24%	83,41%	100%
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara			95			98,41			103,59	1.901.223	1.502.915	1.650.654	1.901.217	79,05%	86,82%	100%
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri			60%			97,22%			162,03	937.727	724.951	783.265	937.723	77,31%	83,53%	100%
											TOTAL	**25.927.923**	**21.743.371**	**23.729.169**	**25.927.673**	**83,86%**	**91,52%**	**100,00%**

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 138 Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat I 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)
1	Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif	Presentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	548.200.000	548.196.870	100%
		Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	119.880.000	119.878.426	100%
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	35.222.000	35.221.056	100%
		Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	300.583.000	300.579.860	100%
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	697.207.000	697.201.427	100%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	945.934.000	945.927.628	100%
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja inspektorat I	108.707.000	108.706.985	100%
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	21.847.000	21.847.000	100%
5	Implementasi Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	1.873.486.000	1.873.477.968	100%
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan	Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	762.000	762.000	100%

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)
	layanan konsultansi yang efektif	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	171.829.000	171.828.663	100%
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	1.564.000	1.563.900	100%
7	Terwujudnya Organisasi Inspektorat I yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat I	588.491.000	588.488.638	100%
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	5.799.000	5.798.500	100%
		Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	242.147.000	242.144.903	100%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	80.740.000	80.739.417	100%
8	Terwujudnya SDM Inspektorat I yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	989.990.000	989.982.493	100%
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Inspektorat I	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat I yang optimal	329.880.000	329.878.778	100%
10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat I secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	11.501.832.000	11.501.784.938	100%
Total			**18.564.100.000**	**18.564.009.450**	**100%**

Tabel 139 Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat II 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)
1	Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif	Presentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	478.105.000	478.102.584	100%
		Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	478.096.000	478.093.905	100%
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	165.420.000	165.418.134	100%
		Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	422.639.000	422.636.401	100%
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	283.088.000	283.087.922	100%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	430.694.000	430.692.440	100%
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	-	-	-
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	-	-	-
5	Implementasi Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	884.319.000	884.317.740	100%

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	186.962.000	186.960.552	100%
		Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	21.519.000	21.518.380	100%
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	-
7	Terwujudnya Organisasi Inspektorat II yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II	647.013.000	647.012.731	100%
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	-	-	-
		Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	697.900.000	697.899.829	100%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-
8	Terwujudnya SDM Inspektorat II yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat II	867.810.000	867.807.569	100%
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Inspektorat II	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat II yang optimal	-	-	-
10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat II secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	1.800.118.000	1.800.115.262	100%
Total			**7.363.683.000**	**7.363.663.449**	**100%**

INSPEKTORAT UTAMA

3.6.2 Analisis Realisasi Anggaran tahun 2024

Inspektorat Utama telah memperoleh komitmen penganggaran untuk mencapai target Sasaran Program yang telah diperjanjikan pada Perencanaan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 sejumlah Rp 27.693.231.000. Realisasi anggaran selama Triwulan IV tahun 2024 sejumlah Rp 25.908.284.126. Dalam 2 tahun terakhir, Inspektorat Utama selalu dapat merealisasikan anggaran di atas 99%, dan selama 3 (tiga) tahun terakhir anggaran Inspektorat Utama selalu dapat direalisasikan secara efisien karena dalam penyerapannya yang lebih kecil dari alokasi anggaran dan target kinerja dapat dicapai. Di tahun 2023 realisasi anggaran Inspektorat Utama meningkat sebesar Informasi realisasi anggaran disajikan pada tabel realisasi anggaran per MAK Periode Tahun 2023 sd 2024 Inspektorat Utama sebagai berikut:

Tabel 140 Realisasi Anggaran per MAK Periode Tahun 2023 sd 2024

Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu 2023	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	11.217.351.000	1.955.618.626	5.876.564.849	8.607.418.170	11.857.517.687	99,99%
52	16.422.315.000	2.419.205.195	6.957.945.712	11.498.112.030	16.422.063.672	100,0%
53	533.084.000	52.900.000	477.600.000	532.810.750	532.810.750	99,95%
Jumlah	28.172.750.000	4.427.723.821	13.312.110.561	20.638.340.950	28.812.392.109	100,0%

Sumber data: Data Omspan Triwulan IV tahun 2023

INSPEKTORAT UTAMA

Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Rencana Penarikan Dana (RPD)	Target Penyerapan TW III *Kemenkeu	Pagu	Sampai Dengan TW IV 2024		Capaian thd RPD	Gap dengan Target Penyerapan Kemkeu
					Realisasi	% Anggaran		
433005	**Inspektorat Utama**	**27,693,231,000**		**27,693,231,000**	**25,908,284,126**	**93,55%**	**93,55%**	
51	Belanja Pegawai	8,191,750,000	95%	8,191,750,000	8,177,024,409	99,82%	99,82%	4,82%
52	Belanja Barang	18,929,481,000	90%	18,929,481,000	17,159,261,211	90,65%	90,65%	0,65%
53	Belanja Modal	572,000,000	90%	572,000,000	571,998,506	100%	100%	-

Tabel 95 Realisasi anggaran TW III 2024 dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) Anggaran TW IV 2024 per jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu 2024	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	8.191.750.000	2.581.091.663	5.635.511.762	6.894.640.374	8.177.024.409	99,82%
52	18.929.481.000	2.193.342.894	6.412.272.384	11.262.274.078	17.159.261.211	90,65%
53	572.000.000	315.265.000	355.215.000	551.107.506	571.998.506	100%
Jumlah	**27.693.231.000**	**6.140.748.226**	**12.402.999.146**	**18.708.021.958**	**25.908.284.126**	**93,55%**

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sudah melebihi target penyerapan dari Kementerian Keuangan di triwulan IV Tahun 2024. Realisasi anggaran Inspektorat Utama tidak mencapai 100% dikarenakan adanya *Automatic Adjustment* pada Belanja Barang sebesar Rp 999.793.000 dan efisiensi Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp 816.301.000 yang tidak dapat direalisasikan anggarannya.

3.6.3 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE $\geq$ SE, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka sasaran/egiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 141 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Utama tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per sasaran	Nilai Kinerja per sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	100%	188,17%	100%	123,68%	1,24	1	0,24	Efisien
		Nilai Survei Penilaian Integritas	100%	100,60%						
		Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	100%	99,71%						
		Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	100%	106,23%						
2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100,98%	100%	101,64%	1,02	1	0,02	Efisien

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per sasaran	Nilai Kinerja per sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	100%	102,29%						
3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	100%	102,62%	100,00%	102,62%	1,03	1	0,03	Efisien
4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	100%	98,19%	100,00%	98,19%	0,98	1	-0,02	Tidak Efisien
5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100%	100,00%	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	100%	94,53%	100,00%	99,01%	0,99	1	-0,01	Tidak Efisien

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per sasaran	Nilai Kinerja per sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	100%	100,00%						
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	99,99%	102,49%						
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	100%	99,64%	100%	100,84%	1,01	1	0,01	Efisien
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	99,99%	96,72%						
		Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	100%	104,72%						
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	100%	102,27%						
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	100%	93,81%	100,00%	93,81%	0,94	1	-0,06	Tidak Efisien

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per sasaran	Nilai Kinerja per sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	100%	120,00%	100,00%	120,00%	1,20	1	0,20	Efisien
10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	100%	105,34%	100,00%	123,17%	1,23	1	0,23	Efisien
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	100%	121,70%						
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	100%	103,59%						
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	162,03%						

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) sasaran diselenggarakan dengan efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang lebih besar dari 1. Sedangkan pencapaian 3 (tiga) sasaran diselenggarakan dengan tidak efisien dengan nilai IE sebesar -1, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Program (4) "Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko" dengan indikator kinerja "Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern" dinyatakan tidak efisien hal ini dikarenakan realisasi kinerja tidak mampu mencapai target di tahun 2024;

2. Sasaran Program (6) "Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif" dengan indikator kinerja "Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti", "Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu", dan "Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu" dinyatakan tidak efisien, hal ini dikarenakan capaian kinerja pada indikator "Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti" tidak mampu mencapai target yang telah diperjanjikan di tahun 2024;

3. Sasaran Program (8) "Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal" dengan indikator kinerja "Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama" dinyatakan tidak efisien, hal ini dikarenakan realisasi kinerja tidak mampu mencapai target di tahun 2024;

Tidak mampunya indikator-indikator yang disebutkan dalam mencapai target di tahun 2024, dapat dilihat lebih rinci pada **bab 3.1 capaian kinerja organisasi**

HASIL EVALUASI TAHUN KE-5 PADA INSPEKTORAT I



4.1 Target Kinerja Jangka Menengah
4.2 Analisis Capaian Kinerja

BAB 04

4.1 Target Kinerja Jangka Menengah

Rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024, fokus utama Inspektorat I adalah mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berkontribusi terhadap tujuan organisasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi antar unit kerja di lingkup Inspektorat Utama, sehingga dapat memperkuat hasil kinerja secara keseluruhan. Pengukuran implementasi ini dapat tergambar dengan pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan selama tahun 2020-2024. Target kinerja jangka menengah Inspektorat I tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 142 Target kinerja jangka menengah Inspektorat I tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Kegiatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,43	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,98	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,02	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,06	Digantikan dengan indikator baru yang relevan, yakni "Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas" dan "Nilai Survei Penilaian Integritas"	
		[redacted]								Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30%

No Kode	Sasaran Kegiatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
										Nilai Survei Penilaian Integritas	83,48
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,11	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,56	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,77	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi mitra kerja Inspektorat I	3,4	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi mitra kerja Inspektorat I	3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi mitra kerja Inspektorat I	4	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM	4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,85
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	<1%	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	0,99%	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99,01	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99,01%	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99,01%

No Kode	Sasaran Kegiatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88,00%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	92,50%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat I	82	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat I	85,5	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat I	85,7	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat I	85,9	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat I	86
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern	80	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern	86,5	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern	87	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern	87,5	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern	86,3
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat I	100	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat I	100	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat I	100%	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat I	100%	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat I	100%

No Kode	Sasaran Kegiatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
		yang Sesuai Standar Mutu		yang Sesuai Standar Mutu		yang Sesuai Standar Mutu		yang Sesuai Standar Mutu		yang Sesuai Standar Mutu	
		Nilai peer review atas pengawasan intern**	75	Nilai peer review atas pengawasan intern	75	Nilai peer review atas pengawasan intern	IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun	Nilai peer review atas pengawasan intern**	IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun	Nilai peer review atas pengawasan intern**	Di Tahun 2024 sudah dilaksanakan TSE oleh Itjen Kemen ATR BPN dengan nilai 82,73
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti	90%	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti	93%	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti	94%	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti	95%	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti	96%
		Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria	80%	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria	100%	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria	100%	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria	100%	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria	100%

No Kode	Sasaran Kegiatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
		dan tepat waktu		dan tepat waktu		dan tepat waktu		dan tepat waktu		dan tepat waktu	
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Tidak ada indikator	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	92%	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,57%
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I	-	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I	-	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I	75%	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I	79%		
		Persentase rekomendasi SurveiKepuasan Masyarakat (SKM)yang ditindaklanjuti	75%	Persentase rekomendasi SurveiKepuasan Masyarakat (SKM)yang ditindaklanjuti	80%	Persentase rekomendasi SurveiKepuasan Masyarakat (SKM)yang ditindaklanjuti	85%	Persentase rekomendasi SurveiKepuasan Masyarakat (SKM)yang ditindaklanjuti	82%		

INSPEKTORAT UTAMA

No Kode	Sasaran Kegiatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat I	Tidak ada indikator	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat I	Tidak ada indikator	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat I	81%	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat I	90%		
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat I yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat I	81	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat I	77	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat I	78	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat I	79	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat I	86,7
		Level kapabilitas APIP	3,4	Level kapabilitas APIP	3	Level kapabilitas APIP	4	Level kapabilitas APIP	4	Nilai Evaluasi kapabilitas APIP	3,6
										Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,5
8	Terwujudnya SDM Inspektorat I yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I	85	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I	84,28	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I	87,15	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I	87,2	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I	91,25

INSPEKTORAT UTAMA

No Kode	Sasaran Kegiatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat I	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	1,51	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2,25	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2,5	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	3
10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat I secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	88%	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	89%	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	90%	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	91%	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	92%

4.2 Analisis Capaian Kinerja

Inspektorat I dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja selama tahun 2020-2024. Rincian realisasi kinerja dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

4.2.1 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 1 (SK.1) Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif

Sasaran Kegiatan 1 (SK.1) Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif pada Inspektorat I, didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.1 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.1 Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas

1. Analisis Tren

Tabel 143 Kertas Kerja analisis tren IKSK.1 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas										30%	50%	Indikator Baru	Belum dapat disimpulkan	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator ini merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 yang diturunkan langsung kepada Inspektorat I dan Inspektorat II. Pada tahun 2024, realisasi kinerja mampu mencapai target dengan capaian >120%. Dikarenakan indikator baru muncul pada tahun 2024 sehingga hasil perkembangan kinerja belum dapat disimpulkan, karena perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan.

2. Analisis Gap

Tabel 144 Kertas Kerja analisis gap IKSK.1 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Persentase									30%	50%	166,7	Tercapai	Inspektorat I	Indikator baru di tahun 2024 sehingga baru dapat dilakukan penilaian hanya pada akhir periode renstra. Indikator mampu mencapai target dengan kategori Tercapai

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja "Persentase Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas" merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 yang diturunkan langsung kepada Inspektorat I. Indikator ini merupakan indikator pengganti dari Indikator "Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan" yang sudah tidak relevan lagi dilanjutkan pada tahun 2024 karena adanya perubahan road map Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2024, realisasi kinerja pada indikator kinerja "Persentase Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas" mampu mencapai target dengan capaian >120%. beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai realisasi indikator ini adalah:

1. Terdapatnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja;
3. Monitoring Pengisian LKE Zona Integritas;
4. Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM;
5. *Forum Group Discussion* Penguatan Peran dan Mitigasi Risiko serta Akselerasi Zona Integritas;
6. Bimbingan Teknis Implementasi ZI pada Loka POM Pilotting;

7. Penyampaian Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju WBK WBBM Tahun 2024;
8. Penyampaian Laporan Progres Penilaian Unit Kerja WBK di Lingkungan BPOM secara Mandiri;
9. Pelaksanaan evaluasi zona integritas lingkup BPOM;
10. Monitoring PKPT 2024 pada kegiatan pembangunan zona integritas.

Hasil dari evaluasi pada indikator "Persentase Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **''belum dapat disimpulkan''** karena perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan dan masuk dalam kategori **''Tercapai''.**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan salah satu penilaian yang masuk pada Reformasi Birokrasi General, sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 masih sangat relevan untuk dilanjutkan dengan catatan perlunya dilakukan penentuan target dengan pertimbangan realisasi kinerja di tahun 2024. Selain itu, direkomendasikan agar dilakukan pembaharuan definisi operasional indikator pada periode renstra selanjutnya. Hal ini agar definisi operasional indikator lebih selaras dengan definisi operasional indikator pada penilaian RB general BPOM. Pada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029, penentuan target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2024. target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 145 target indikator "Persentase Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas" pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	73,7%	74,6%	75,5%	76,4%	77,4%

IKSK.2 Nilai Survei Penilaian Integritas

1. Analisis Tren

Tabel 146 Kertas Kerja analisis tren IKSK.2 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Survei Penilaian Integritas										83,48	83,98	Indikator Baru	Belum dapat disimpulkan	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator ini merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 yang diturunkan langsung kepada Inspektorat I. Indikator ini merupakan salah satu penilaian yang masuk pada Reformasi Birokrasi General, sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 masih sangat relevan untuk dilanjutkan.

2. Analisis Gap

Tabel 147 Kertas Kerja analisis gap IKSK.2 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	2	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai									83,48	83,98	100,6	Tercapai	Inspektorat I	Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024. Indikator ini berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori "Tercapai".

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja "Nilai Survei Penilaian Integritas" merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 yang diturunkan langsung kepada Inspektorat I. Indikator ini merupakan indikator pengganti dari Indikator "Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan" yang sudah tidak relevan lagi dilanjutkan pada tahun 2024 karena adanya perubahan road map Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2024, realisasi kinerja pada indikator kinerja "Nilai Survei Penilaian Integritas" mampu/berhasil mencapai target dengan capaian 100,60%. beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai realisasi indikator ini adalah:

1. Bimbingan Teknis aplikasi sang integritas;
2. Sosialisasi program anti korupsi;
3. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan;
4. Bimbingan teknis pelaksanaan SPI;
5. Audiensi kepada KPK mengenai Pencegahan korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan dan juga SPI;
6. Cafe Integritas;
7. Pengukuhan Pejabat Tinggi Madya sebagai pembina PAKSI dan API

Hasil dari evaluasi pada indikator “Nilai Survei Penilaian Integritas” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘’belum dapat disimpulkan’’** karena perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan dan masuk dalam kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan salah satu penilaian yang masuk pada Reformasi Birokrasi General, sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 masih sangat relevan untuk dilanjutkan dengan catatan perlunya dilakukan penentuan target dengan pertimbangan realisasi kinerja di tahun 2024. Selain itu, direkomendasikan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Nilai Survei Integritas BPOM. Pada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029, menggunakan *logframe* sehingga di tahun 2025-2029 indikator ini berada pada level eselon II. Untuk di level eselon I akan menggunakan indikator baru yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama”. Target indikator Nilai Survei Penilaian Integritas pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 148 target indikator “ Nilai Survei Penilaian Integritas ” pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Survei Penilaian Integritas	84,6	85,16	85,72	86,28	86,84

IKSK.3 Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

1. Analisis Tren

Tabel 149 Kertas Kerja analisis tren IKSK.3 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	8,11	7,77	8,56	8,35	8,66	8,47	8,77	8,18	20,75	20,69	70,08	Meningkat (Moderat)	Mendukung AKIP BPOM	Indikator ini memiliki perkembangan kinerja yang meningkat (moderat) yakni perkembangan kinerja yang menunjukkan peningkatan namun belum dapat mencapai target akhir periode renstra

2. Analisis Gap

Tabel 150 Kertas Kerja analisis gap IKSK.3 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	Nilai	8,11	7,77	8,56	8,35	8,66	8,47	8,77	8,18	20,75	20,69	99,71%	Tidak Tercapai	Inspektorat I	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif. Pada tahun2020-2021 realisasi kinerja meningkat, namun di tahun 2022 realisasi kinerja menurun. Selanjutnya di tahun 2023 sampai dengan akhir periode renstra

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
																		menunjukkan peningkatan. Indikator ini belum berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori **"Tidak Tercapai"**.

Hasil Evaluasi

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM tahun 2024 belum dapat mencapai target atau masuk dalam kategori "Cukup" dan jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra maka masuk dalam kategori "Akan Tercapai". Berdasarkan PANRB No B/673/AA.05/2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2024 karena **masih terdapat catatan** dalam pelaksanaan evaluasi internal di Lingkungan Badan POM yaitu monitoring dan evaluasi tindak lanjut evaluasi internal pada BPOM telah memanfaatkan aplikasi SAPA APIP, hanya saja masih ditemukan Sebagian kecil UPT yang belum memanfaatkan aplikasi tersebut dalam menindaklanjuti rekomendasi saran perbaikan dari tim APIP. Upaya/kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target kinerja adalah:

1. Melakukan koordinasi lanjutan dengan tim pengembang aplikasi SAPA APIP dalam penyempurnaan modul SAKIP;
2. Menginformasikan kepada para unit kerja melalui surat Inspektorat Utama No PI.04.7.08.24.515 terkait Permohonan Tindak Lanjut atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023;
3. Pelaksanaan desk monitoring dan evaluasi tindak lanjut pada Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis;
4. Menyampaikan Surat Edaran Inspektur Utama terkait Penetapan Sub Kategori LKE AKIP Tahun 2024 ke seluruh Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis;

5. Koordinasi bersama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melakukan revisi Pedoman Penyelenggaraan SAKIP agar lebih memudahkan Satker dalam mengimplementasikan SAKIP

Sebagai informasi, pada tahun 2024 indikator ini dilakukan pengajuan perubahan target 2024 menjadi 20,75 dikarenakan adanya Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 dimana terdapat perubahan bobot (semula 10 menjadi 20) pada nilai evaluasi internal.

Rekomendasi

Indikator ini merupakan salah satu penilaian yang masuk pada Reformasi Birokrasi General yaitu (Nilai AKIP BPOM), sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 masih sangat relevan untuk dilanjutkan dengan catatan perlunya dilakukan penentuan target dengan pertimbangan realisasi kinerja di tahun 2020-2024. Selain itu, direkomendasikan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM dan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP BPOM tahun 2024 pada bagian evaluasi internal seperti :

1. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dalam aplikasi SAPA APIP;
2. Melakukan desk evaluasi AKIP Tahun 2025 Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Satker/UPT;
3. Melakukan bimbingan teknis terhadap pedoman evaluasi SAKIP tahun 2025 serta meningkatkan awareness dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi APIP terhadap evaluasi SAKIP.

Target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 151 target indikator " Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM " pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,73	20,86	21,00	21,14	21,28

IKSK.4 Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM

1. Analisis Tren

Tabel 152 Kertas Kerja analisis tren IKSK.4 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	-	3,4	3	3	3	4	3	4	3,729	3,85	4,09	117,64	Meningkat (On The Track)	Indikator ini mendukung indeks RB BPOM	Indikator ini masuk pada kategori **meningkat (on the track)**. Hal ini dapat dilihat dari realisasi kinerja yang selalu naik di tiap tahunnya. Indikator ini sangat perlu dipertahankan kinerja.

2. Analisis Gap

Tabel 153 Kertas Kerja analisis gap IKSK.4 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	Nilai	3,4	3	3	3	4	3	4	3,729	3,85	4,09	106,23%	Tercapai	Inspektorat I	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang meningkat di tiap tahunnya dan berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori **"Tercapai".**

Hasil Evaluasi

Capaian nilai evaluasi SPIP-T BPOM pada tahun 2020 sampai dengan 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 dilakukan pengajuan perubahan target 2021 menjadi level 3 dikarenakan penilaian SPIP menggunakan level. Namun di tahun 2024, Inspektorat melakukan penyesuaian target menjadi Nilai evaluasi SPIP karena pada saat pelaporan LHE SPIP BPOM terdapat nilai/skor yang dilampirkan oleh tim evaluator SPIP BPOM dari BPKP sehingga perkembangan kinerja lebih dapat terukur/tergambar dengan jelas. Keberhasilan capaian nilai evaluasi SPIP-T BPOM merupakan bukti bahwa upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mendukung implementasi SPIP di BPOM. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan indikator ini adalah:

a. Pengusulan manajemen risiko menjadi indikator strategis di BPOM melalui nota dinas Inspektur Utama No PI.06.07.7.06.24.125 hal Usulan Indikator Kinerja Nilai Maturitas Manajemen Risiko pada Renstra BPOM periode 2025-2029;
b. Pemenuhan data dukung penilaian Kapabilitas APIP dalam rangka Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Utama BPOM melalui peningkatan level kapabilitas APIP sebagai tindak lanjut evaluasi SPIP-T BPOM Tahun 2023;
c. Evaluasi penilaian mandiri SPIP-T;
d. Melakukan penjaminan kualitas SPIP-T BPOM tahun 2024
e. Pemantauan tindak lanjut terhadap rencana aksi hasil evaluasi SPIP-T Tahun 2023 melalui Surat Inspektur Utama No. B-PI.06.07.7.03.24.263 tentang Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Area of Improvement (AoI) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) BPOM Tahun 2023
f. Bersama dengan Biro Hukun dan Organisasi Menyusun Tanggapan atas Hasil Sementara Evaluasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPOM tahun 2024
g. Koordinasi dalam penyusunan Area of Improvement (AoI) dengan Biro Hukum dan Organisasi;
h. Perluasan bimbingan teknis manajemen risiko;

Hasil dari evaluasi pada indikator "Nilai evaluasi SPIP-T BPOM" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **'Meningkat (on the track)''** yaitu perkembangan kinerja cenderung meningkat dan mencapai target tahun 2024 serta masuk dalam kategori **''Tercapai''.**

Rekomendasi

Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Mempertahankan kegiatan-kegiatan penunjang pada tahun 2024 dalam meningkatkan nilai SPIP BPOM
2. Melakukan penentuan target berdasarkan realisasi kinerja SPIP pada tahun 2020-2024
3. Koordinasi dengan tim SPIP BPOM dalam menindaklanjuti hasil evaluasi SPIP-T tahun 2024

Pada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029, penentuan target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2020-2024. target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 154 target indikator "Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM" pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,20	4,31	4,42	4,53	4,64

4.2.2 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 2 (SK.2) Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel

Sasaran Kegiatan 2 (SK.2) Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel pada Inspektorat I, didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.2 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.6 Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan

1. Analisis Tren

Tabel 155 Kertas Kerja analisis tren IKSK.6 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan		<1%	0,06	0,99%	0,03%	99,01	99,91%	99,01%	99,97%	99,01%	99,,97%	4,29	Stagnan	Mendukung OPINI WTP atas Laporan Keuangan BPOM	Indikator ini masuk pada kategori stagnan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja cenderung sedikit meningkat dari tahun pertama terhadap kondisi akhir periode renstra.

2. Analisis Gap

Tabel 156 Kertas Kerja analisis gap IKSK.6 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	6	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	Persentase	<1%	0,06	0,99%	0,03%	99,01	99,91%	99,01%	99,97%	99,01%	99,,97%	100,97	Tercapai	Inspektorat I	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif di tiap tahunnya namun selalu mencapai target dan berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori “Tercapai”.

Hasil Evaluasi

Inspektorat I berkomitmen melakukan pengawasan dan pengawalan di lingkup BPOM khususnya pada pelaksanaan pemeriksaan Laporan keuangan maupun kinerja BPOM. Pada periode rencana strategis tahun 2020-2024, BPOM memiliki kesalahan material dalam laporan keuangan <1% dan 10 kali berturut-turut mempertahankan OPINI WTP. Capaian Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 dilakukan pengajuan perubahan target 2021 menjadi 0,99% karena agar lebih terukur jelas angka yang digunakan sebagai target. Selanjutnya di tahun 2022 dilakukan penyesuaian target menjadi IKU dengan pengukuran polarisasi positif semula 0,99 menjadi 99,01%. Target selama tahun 2022 sampai dengan 2024 stagnan karena mengikuti batas material dalam laporan keuangan yakni <1%. Kegiatan atau upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan indikator ini adalah:

1. Terus dilakukan intensifikasi koordinasi yang simultan dan terpadu dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK RI, terutama terkait Laporan Keuangan dan pelaksanaan reviu;

2. Perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti;
3. Melakukan reviu yang dilakukan atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini;
4. Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BPOM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja;
6. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan *Plan of Action* (PoA) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
7. Kontribusi Auditor dalam Forum Group Discussion (FGD) PIPK; dan
8. Pelaksanaan asistensi pengelolaan anggaran.

Hasil dari evaluasi pada indikator "Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **'Stagnan''** yaitu Perkembangan kinerja cenderung sedikit meningkat dari tahun pertama terhadap kondisi terkini serta masuk dalam kategori **''Tercapai''.**

Rekomendasi

Pada rencana strategis periode tahun 2025-2029, indikator ini masuk sudah tergambar pada indikator kinerja di Sekretariat Utama dalam peroleh OPINI WTP, sehingga di rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 sudah tidak lagi dilanjutkan. Namun terhadap kegiatan pengawalan/pendampingan BPK tetap dilakukan demi mempertahankan opini WTP di BPOM.

IKSK.7 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

1. Analisis Tren

Tabel 157 Kertas Kerja analisis tren IKSK.7 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	94,24%	88,00%	93,47%	92,50%	94,24%	93%	93%	94%	93,82%	94%	96,15%	-788,65	Menurun	Mendukung opini WTP BPOM	Indikator ini masuk pada kategori menurun. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja cenderung fluktuatif bahkan menurun dari tahun pertama terhadap kondisi akhir periode renstra.

2. Analisis Gap

Tabel 158 Kertas Kerja analisis gap IKSK.7 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.2	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	7	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persen	88,00%	93,47%	92,50%	94,24%	93%	93%	94%	93,82%	94%	96,15%	102,29	Tercapai	Inspektorat I	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif di tiap tahunnya namun berhasil mencapai target pada akhir

																	periode renstra dengan kategori "Tercapai".

Hasil Evaluasi

Capaian Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM pada tahun 2020 sampai dengan 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 dilakukan pengajuan perubahan target menjadi 94% karena pada tahun 2023 tidak mencapai target dan Tingkat kendali IKU sangat rendah karena TL BPK dilakukan oleh unit kerja dan dalam 1 rekomendasi terdapat beberapa unit kerja yang terkait sehingga lebih sulit dalam ditindaklanjuti. Realisai kinerja indikator selama tahun 2020-2021 mengalami peningkatan, namun di tahun 2022 realisasi kinerja mengalami penurunan. Selanjutnya untuk di tahun 2023 realisasi kinerja meningkat dari tahun sebelumnya, namun belum berhasil mencapai target. Selanjutnya di akhir periode renstra, realisasi kinerja berhasil mencapai target. Kegiatan atau upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan indikator ini adalah:

1. Melakukan pendampingan dalam pemeriksaan BPK pada Unit kerja;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam integrasi data pengawasan intern, melalui aplikasi berbasis web "SAPA APIP" sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan oleh auditee;
3. Meningkatkan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal terkait penyelesaian rekomendasi serta melakukan intensitifikasi koordinasi dengan auditan terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Utama sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS);
4. Koordinasi langsung dengan level Pimpinan di tingkat Satuan Kerja terkait dengan temuan spesifik pada Satuan Kerja tersebut sehingga diperoleh komitmen yang tinggi untuk penyelesaiannya;
5. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait antara lain dengan BPK RI serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang daerah (KPKNL) setempat untuk tindak lanjut yang memerlukan bantuan dari pihak bersangkutan;

6. Penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek-aspek terkait pemeriksaan oleh BPK pada risiko yang harus dikelola baik pada level Instansi maupun pada Unit Kerja.

Hasil dari evaluasi pada indikator "Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **'menurun"** yaitu Perkembangan kinerja cenderung menurun, namun berhasil mencapai target akhir periode renstra dan masuk dalam kategori **'"Tercapai".**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan salah satu penilaian yang masuk pada Reformasi Birokrasi General), sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 masih sangat relevan untuk dilanjutkan dengan catatan perlunya dilakukan penentuan target dengan pertimbangan realisasi kinerja di tahun 2020-2024.

Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Mempertahankan kegiatan-kegiatan penunjang pada tahun 2024 dalam meningkatkan persentase TL BPK
2. Melakukan penentuan target berdasarkan realisasi kinerja TL BPK pada tahun 2020-2024

Rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 menggunakan *logframe* sehingga di tahun 2025-2029 indikator ini berada pada level eselon II.

Target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 159 target indikator "Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM" pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	96,18%	96,22%	96,25%	96,28%	96,31%

4.2.3 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 3 (SK.3) Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas

Sasaran Kegiatan 3 (SK.3) Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas pada Inspektorat I, didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.3 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.8 Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat I

1. Analisis Tren

Tabel 160 Kertas Kerja analisis tren IKSK.8 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat I		82	86,43	85,5	89,12	85,7	84,89	85,9	87,21	86	88,43	147,57	Meningkat (On The Track)	Mendukung Reformasi BPOM	Indikator ini masuk pada kategori meningkat (on the track). Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja cenderung meningkat dan berhasil mencapai target akhir periode renstra.

2. Analisis Gap

Tabel 161 Kertas Kerja analisis gap IKSK.8 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	8	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat I	Indeks	82	86,43	85,5	89,12	85,7	84,89	85,9	87,21	86	88,43	102,83	Tercapai	Inspektorat I	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif di tiap tahunnya namun berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori "Tercapai".

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja "Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat I" pada tahun 2020 sampai dengan 2024 memiliki capaian telah melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 dilakukan pengajuan perubahan target menjadi 85,5 karena pada tahun 2020 realisasi kinerja sudah mencapai target akhir periode renstra. Namun di tahun 2023 tidak dilakukan penyesuaian target karena Tingkat kendali IKU sangatlah rendah. Realisasi kinerja selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif ditunjukkan dengan adanya peningkatan di tahun 2021 namun mengalami penurunan di tahun 2022, selanjutnya meningkat di tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya di akhir periode renstra, realisasi kinerja berhasil mencapai target. Kegiatan atau upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan indikator ini adalah:

1. Peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi antar auditor dengan unit kerja yang diawasi;
2. Melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan kompetensi serta menyamakan pemahaman dan persepsi antar Auditor;
3. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui:
   e) Peningkatan layanan konsultasi yang difasilitasi dengan pengembangan aplikasi untuk konsultasi online (SOLUSI);

f) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi dengan menggunakan aplikasi sistem informasi monitoring secara elektronik dan dashboard evaluasi kinerja (SAPA APIP) untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil audit BPK, tindak lanjut Inspektorat Utama, evaluasi manajemen risiko dan evaluasi SAKIP.
g) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan intern melalui pembangunan aplikasi *Inspiring Audit*.
h) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan pengaduan, gratifikasi dan benturan kepentingan melalui pembangunan aplikasi Sang Integritas.

4. Peningkatan sosialisasi hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja pada beberapa kesempatan, antara lain pada Rapat Kerja Nasional tahun 2024, agar suatu temuan pada satu auditan tidak menjadi temuan maupun masalah pada auditan lainnya;
5. Pembahasan hasil audit melalui mekanisme ekspose hasil audit dengan Inspektur Utama BPOM;
6. Peningkatan manajemen waktu audit (pelaksanaan audit hanya pada hari dan jam kerja);
7. Peningkatan keterbukaan informasi hasil pengawasan intern yang dilakukan, misalnya hasil evaluasi SAKIP dan RB, dengan tujuan untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat sasaran; dan
8. Pembaharuan aplikasi pengawasan intern seperti SAPA APIP, SOLUSI, Sang Integritas.

Hasil dari evaluasi pada indikator ”Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Meningkat (On the track)’’** yaitu Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan salah satu penilaian yang masuk pada Reformasi Birokrasi General, sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 masih sangat relevan untuk dilanjutkan dengan catatan perlunya dilakukan penentuan target dengan pertimbangan realisasi kinerja di tahun 2024. Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Mempertahankan kegiatan-kegiatan penunjang pada tahun 2024 dalam meningkatkan kepuasan mitra pengawasan intern

2. Melakukan penentuan target berdasarkan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Pada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029, penentuan target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2020-2024. target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 162 target indikator " Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat I " pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat I	88,48	88,52	88,57	88,62	88,67

4.2.4 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 4 (SK.4) Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko

Sasaran Kegiatan 3 (SK.3) Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko pada Inspektorat I, didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.3 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.9 Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern mitra kerja Inspektorat I

1. Analisis Tren

Tabel 163 Kertas Kerja analisis tren IKSK.9 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern		80	86,91	86,5	85,75	87	86,381	87,5	85,47	86,3	85,25	-240,77	Menurun	Mendukung Reformasi BPOM	Indikator ini masuk pada kategori menurun). Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja cenderung menurun dan tidak berhasil mencapai target akhir periode renstra.

2. Analisis Gap

Tabel 164 Kertas Kerja analisis gap IKSK.9 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.4	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	9	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern	Indeks	80	86,91	86,5	85,75	87	86,381	87,5	85,47	86,3	85,25	98,78	Tidak Tercapai	Inspektorat I	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif di tiap tahunnya bahkan cenderung menurun serta tidak berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori "Tidak Tercapai".

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja "Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern" pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mesih belum berhasil melebihi target yang ditetapkan. **Ketidakberhasilan dalam mencapai target ini adalah** masih banyaknya upaya-upaya perbaikan yang diharapkan oleh para stakeholder dalam pedoman penanganan benturan kepentingan. Masukan-masukan yang ada pada survei kemanfaaan kebijakan akan menjadi input yang sangat berarti bagi Inspektorat Utama untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Meskipun belum berhasil mencapai target, **Upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam mendukung** capaian kinerja indikator adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan pengawasan intern pada lingkungan Badan POM;
2. Membuka wadah pertanyaan/konsultasi pada aplikasi SOLUSI terkait pengawasan intern termasuk kebijakannya.

Hasil dari evaluasi pada indikator ”Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Menurun’’** yaitu Perkembangan kinerja cenderung menurun dan tidak berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **‘’Tidak Tercapai’’.**

Rekomendasi

Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern diukur melalui pelaksanaan survei terkait kebijakan-kebijakan yang berada dalam tugas dan fungsi Inspektorat Utama. realisasi kinerja indikator ini mengalami flutktuasi dari tahun 2020-2024. Pelaksanaan survei kemanfaatan kebijakan ini dilakukan dengan tema yang berbeda di setiap tahunnya. sehingga di setiap tahunnya terdapat perspektif bahwa indikator tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya, karena survei yang dilakukan memiliki tema yang berbeda atau tidak dapat menggambarkan progress kemajuan atas saran di tema kebijakan yang sebelumnya. sehingga pada rancangan rencana strategis Inspetkorat Utama Tahun 2025-2029 indikator Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern tidak dilanjutkan.

4.2.5 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 5 (SK.5) Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien

Sasaran Kegiatan 5 (SK.5) Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien pada Inspektorat I, didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.5 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.10 Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat I yang Sesuai Standar Mutu

1. Analisis Tren

Tabel 165 Kertas Kerja analisis tren IKSK.10 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat I yang Sesuai Standar Mutu		100	119,44	100	122,22	100%	1,21	100%	100%	100%	100%	0,00	Stagnan	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Kategori stagnan pada indikator ini merupakan potret baik dan konsisten terhadap realisasi kinerja dari tahun 2020-2024 yang mencapai 100%.

2. Analisis Gap

Tabel 166 Kertas Kerja analisis gap IKSK.10 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	10	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat I yang Sesuai Standar Mutu	Persen	100	119,44	100	122,22	100%	1,21	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai	Inspektorat I	Realisasi kinerja sudah mencapai target akhir periode renstra atau tahun 2024 dengan kategori "Tercapai".

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja "Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat I yang Sesuai Standar Mutu" sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan. **keberhasilan dalam mencapai target ini** didukung dengan:

1. Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit;
2. Penganggaran yang memadai dan telah direviu sehingga dapat mengakomodasi ruang lingkup pengawasan yang ada;
3. Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik;
4. Peningkatan kompetensi auditor secara berkala sehingga mampu menjalankan praktik audit yang profesional dan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia maupun Standar Mutu ISO 9001:2015;
5. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Hasil dari evaluasi pada indikator "persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **'Stagnan"** serta indikator ini berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **''Tercapai".**

Rekomendasi

Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu merupakan indikator yang mengukur tugas dan fungsi pengawasan intern Inspektorat Utama. Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya. Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024. target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 167 target indikator " Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat I yang Sesuai Standar Mutu " pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat I yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100%	100%	100%

IKSK.11 Nilai peer review atas pengawasan intern

1. Analisis Tren

Tabel 168 Kertas Kerja analisis tren IKSK.11 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Nilai peer review atas pengawasan intern		75	74,99	75	74,99	IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun		IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun		Di Tahun 2024 sudah dilaksanakan TSE oleh Itjen Kemen ATR BPN dengan nilai 82,73		Indikator tidak relevan	Belum dapat disimpulkan		Indikator tidak dilaksanakan di tahun 2024

2. Analisis Gap

Tabel 169 Kertas Kerja analisis gap IKSK.11 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	11	Nilai peer review atas pengawasan intern		75	74,99	75	74,99	IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun		IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun		Di Tahun 2024 sudah dilaksanakan TSE oleh Itjen Kemen ATR BPN dengan nilai 82,73		-	-	Inspektorat I	Indikator sudah dimasukkan pada inisiatif strategis

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja "Nilai peer review atas pengawasan intern" diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun.

Di Tahun 2024 sudah dilaksanakan Telaah Sejawat Ekstern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ATR BPN dengan nilai 82,73

4.2.6 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 6 (SK.6) Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif

Sasaran Kegiatan 6 (SK.6) Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif pada Inspektorat I, didukung oleh 6 (Enam) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.6 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.12 Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti

1. Analisis Tren

Tabel 170 Kertas Kerja analisis tren IKSK.12 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti		90%	93,94%	93%	84,95%	94%	94,10%	95%	96,01%	96%	93,45%	35,91	Meningkat (Moderat)	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator ini masuk pada kategori stagnan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja cenderung sedikit meningkat namun berhasil mencapai target akhir periode renstra.

2. Analisis Gap

Tabel 171 Kertas Kerja analisis gap IKSK.12 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	12	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti	Persen	90%	93,94%	93%	84,95%	94%	94,10%	95%	96,01%	96%	93,45%	97,34	Tidak Tercapai	Inspektorat I	Realisasi kinerja selama 2020-2024 mengalami fluktuatif, dan belum berhasil mencapai target akhir periode renstra dengan kategori "Tidak Tercapai"

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti” mengalami realisasi kinerja yang fluktuatif. Pada tahun 2021 realisasi kinerja sudah mengalami penurunan dan belum berhasil mencapai target. Selanjutnya di tahun 2022 dan 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan, namun di akhir periode renstra, realisasi kinerja mengalami penurunan dan belum berhasil target yang ditetapkan. **ketidakberhasilan dalam mencapai target ini** disebabkan karena:

1. Kurangnya komitmen auditan dalam melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP.
2. Adanya penugasan pengawasan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Hasil dari evaluasi pada indikator ” Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Meningkat (Moderat)’’** yaitu Perkembangan kinerja cenderung meningkat namun belum berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **‘’Tidak Tercapai’’.**

Rekomendasi

indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya dengan catatan dalam penentuan target agar dipertimbangkan realisasi kinerja tahun 2020-2024. Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil audit.
2. Melakukan plotting penjadwalan kegiatan pengawasan intern melalui audit dengan menghindari penjadwalan yang mendekati akhir tahun anggaran, sehingga tindak lanjut atas pengawasan masih dapat dilakukan dalam tahun anggaran yang sama.
3. Melakukan perencanaan kegiatan pengawasan intern berdasarkan PKPT yang berbasis manajemen risiko.

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024. target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 172 target indikator "Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti " pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti	92,13%	92,25%	92,36%	92,48%	92,59%

IKSK.13 Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

1. Analisis Tren

Tabel 173 Kertas Kerja analisis tren IKSK.13 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu		80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	134,10	**Meningkat (On The Track)**	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas memiliki kategori meningkat atau on the track dalam perkembangan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi dalam melakukan telaah dan penelusuran menjadi salah satu penunjang dalam menyelesaikan pengaduan.

2. Analisis Gap

Tabel 174 Kertas Kerja analisis gap IKSK.13 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	13	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Persen	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Inspektorat I	Realisasi kinerja selama 2020-2024 mengalami peningkatan dan berhasil mencapai target akhir periode renstra dengan kategori "Tercapai"

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti” sudah berhasil melebihi target yang ditetapkan. **keberhasilan dalam mencapai target ini** didukung dengan:

1. Pelaksanaan audit berbasis risiko dan audit tujuan tertentu pada Unit Kerja yang terkait dalam Pengaduan
2. Peluncuran aplikasi “sang integritas” yang mewadahi dalam pelaporan pengaduan, gratifikasi, dan benturan kepentingan sehingga pencatatan laporan lebih cepat sehingga dapat langsung ditindaklanjuti oleh APIP.
3. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan
4. Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* pada media sosial.

Hasil dari evaluasi pada indikator ”Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Meningkat on the track’’** yaitu Perkembangan kinerja cenderung meningkat dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Indikator ini berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu merupakan indikator yang mengukur core teknis atau tugas dan fungsi pengawasan intern Inspektorat Utama. Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat I selanjutnya. Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. *Continuous improvement* sarana pengaduan agar lebih optimal;
2. Melakukan *public campaign* dan mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait;
3. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan
4. Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* pada media sosial.

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024. target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 175 target indikator "Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti " pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

IKSK.14 Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu

1. Analisis Tren

Tabel 176 Kertas Kerja analisis tren IKSK.14 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu		-	-	92%	100%	93%	98,88%	94%	100,00%	97,57%	100,00%	0,00	Stagnan	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator ini memiliki perkembangan kinerja kategori stagnan. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan kinerja yang cenderung sedikit meningkat dari tahun pertama hingga akhir periode. Pemanfaatan teknologi dalam melakukan telaah dan penelusuran menjadi salah satu penunjang dalam menyelesaikan konsultasi.

2. Analisis Gap

Tabel 177 Kertas Kerja analisis gap IKSK.14 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	14	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persen			92%	100%	93%	98,88%	94%	100,00%	97,57%	100,00%	102,49	Tercapai	Inspektorat I	Realisasi kinerja selama tahun pertama hingga akhir periode renstra selalu mencapai target dan mencapai kategori "Tercapai"

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja “Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu” sudah berhasil melebihi target yang ditetapkan. **keberhasilan dalam mencapai target ini** didukung oleh komitmen APIP dalam menjawab pertanyaan konsultansi yang masuk dengan tepat waktu. Proses menjawab pertanyaan melalui aplikasi SOLUSI dilakukan dengan review berjenjang yang melibatkan anggota, ketua tim, sampai dengan pengendali teknis. Dengan demikian, diharapkan setiap jawaban yang diberikan diharap sudah mampu memberikan kepuasan bagi mitra pengawasan yang mengajukan pertanyaan. Kegiatan yang mendukung dalam mencapai target adalah:

1. Rapat koordinasi terkait aplikasi, untuk *continuous improvement.*
2. Pengembangan aplikasi sarana konsultasi.
3. Pemantauan dan monitoring terhadap pertanyaan konsultansi yang masuk.

Sebagai informasi, pada indikator ini telah dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 karena realisasi kinerja di tahun sebelumnya sudah mencapai target akhir periode renstra. Hasil dari evaluasi pada indikator ”Persentase permintaan layanan

konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **'Stagnan''** yaitu Perkembangan kinerja cenderung sedikit meningkat dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Indikator ini berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **''Tercapai''.**

Rekomendasi

Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu merupakan indikator yang mengukur core teknis atau fungsi consultance Inspektorat I. Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat I selanjutnya. Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat rekomendasi terhadap indikator yaitu melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah. Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2021-2024. target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 178 target indikator "Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu " pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

IKSK.15 Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I

1. Analisis Tren

Tabel 179 Kertas Kerja analisis tren IKSK.15 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I		-	-	-	-	75%	88,12%	79%	88,12%	-	-	Tidak relevan dilanjutkan	Belum dapat disimpulkan	-	Tidak dilanjutkan sampai akhir periode renstra karena sudah tidak relevan terhadap perubahan road map RB BPOM

2. Analisis Gap

Tabel 180 Kertas Kerja analisis gap IKSK.15 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan	15	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	-	-	75%	88,12%	79%	88,12%	-	-	-	Tidak Dapat disimpulkan	Inspektorat I	Indikator sudah tidak relevan seiring dengan perubahan road map Reformasi Birokrasi

	konsultansi yang efektif		pada mitra kerja Inspektorat I														

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja "Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I" sudah tidak relevan seiring dengan perubahan road map Reformasi Birokrasi sehingga tidak dilanjutkan sampai akhir periode renstra.

IKSK.16 Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti

1. Analisis Tren

Tabel 181 Kertas Kerja analisis tren IKSK.16 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti		75%	87%	80%	90%	85%	90,12%	82%	84,04%	-	-	-	-	-	Indikator dipindahkan kepada Biro Hukum dan Organisasi

2. Analisis Gap

Tabel 182 Kertas Kerja analisis gap IKSK.16 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	16	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	Persen	75%	87%	80%	90%	85%	90,12%	82%	84,04%				Tidak Dapat disimpulkan	Inspektorat I	Indikator sudah dipindahkan ke Biro Hukum dan Organisasi

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja “Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti” pada tahun 2024 Indikator dipindahkan kepada Biro Hukum dan Organisasi sehingga tidak dimasukkan kembali sebagai indicator Inspektorat I

IKSK.17 Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat I

1. Analisis Tren

Tabel 183 Kertas Kerja analisis tren IKSK.17 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasirencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat I		-	-	-	-	81%	79,03%	90%	100,00%	-	-	-	-	-	Tidak dilanjutkan sampai akhir periode renstra karena sudah tidak relevan terhadap perubahan road map RB BPOM

2. Analisis Gap

Tabel 184 Kertas Kerja analisis gap IKSK.17 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan	17	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasirencana aksi RB BPOM yang	Persen	-	-	-	-	81%	79,03%	90%	100,00%	-	-	-	Tidak Dapat disimpulkan	Inspektorat I	Indikator sudah tidak relevan seiring dengan perubahan road map Reformasi Birokrasi

	konsultansi yang efektif		ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat I														

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja “Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasirencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat I” sudah tidak relevan seiring dengan perubahan road map Reformasi Birokrasi sehingga tidal dilanjutkan di tahun 2024.

4.2.7 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 7 (SK.7) Terwujudnya organisasi Inspektorat I yang efektif

Sasaran Kegiatan 7 (SK.7) Terwujudnya organisasi Inspektorat I yang efektif, didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.7 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.18 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat I

1. Analisis Tren

Tabel 185 Kertas Kerja analisis tren IKSK.18 Tahun 2020-2024

e	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat I yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat I		81	83,56	77	77,04	78	84,42	79	86,38	86,7	88,99	120,08	Meningkat (On The Track)	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator ini memiliki perkembangan kinerja kategori meningkat (On The Track). Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan kinerja yang cenderung meningkat dan berhasil mencapai target di akhir periode renstra

2. Analisis Gap

Tabel 186 Kertas Kerja analisis gap IKSK.18 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.7	Terwujudnya organisasi Inspektorat I yang efektif	18	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat I	Nilai	81	83,56	77	77,04	78	84,42	79	86,38	86,7	88,99	102,64	Tercapai	Inspektorat I	Realisasi kinerja selama tahun pertama hingga akhir periode renstra berhasil mencapai target dan masuk pada kategori "**Tercapai**"

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja “Indeks RB Inspektorat I” mengalami realisasi kinerja berhasil melebihi target yang ditetapkan pada akhir periode renstra. Sebagai informasi, pada indikator ini telah dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 karena realisasi kinerja di tahun sebelumnya sudah mencapai target akhir periode renstra. Hasil dari evaluasi pada indikator "Indeks RB Inspektorat I” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Meningkat (on the track)’’** yaitu perkembangan kinerja cenderung meningkat dan mencapai target tahun 2024 serta masuk dalam kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Indeks RB Inspektorat I merupakan indikator wajib yang mendukung langsung reformasi birokrasi di lingkup BPOM, Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat I selanjutnya. Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 indeks RB Inspektorat I dilakukan penyesuaian nomenklatur menjadi "Nilai Pembangunan Zona Integritas di lingkup Inspektorat I” serta menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024. target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 187 target indikator "Nilai Pembangunan Zona Integritas di lingkup Inspektorat I" pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Pembangunan Zona Integritas di lingkup Inspektorat I	89,12	89,26	89,39	89,53	89,66

IKSK.19 Nilai Evaluasi kapabilitas APIP

1. Analisis Tren

Tabel 188 Kertas Kerja analisis tren IKSK.19 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat I yang efektif	Nilai Evaluasi kapabilitas APIP		3,4	3	3	3	4	3	4	3,53	3,6	3,77	125,89	Meningkat (On The Track)	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator ini memiliki perkembangan kinerja dengan kategori meningkat on the track. Hal ini terlihat dari perkembangan kinerja yang cenderung meningkat dan berhasil mencapai target sampai pada akhir periode renstra.

2. Analisis Gap

Tabel 189 Kertas Kerja analisis gap IKSK.19 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.7	Terwujudnya organisasi Inspektorat I yang efektif	19	Nilai Evaluasi kapabilitas APIP	Nilai	3,4	3	3	3	4	3	4	3,53	3,6	3,77	104,72	Tercapai	Inspektorat I	Realisasi kinerja selama tahun pertama hingga akhir periode renstra menunjukkan peningkatan dan pada akhir periode renstra mencapai target dengan kategori "Tercapai"

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja “Nilai Evaluasi kapabilitas APIP” memiliki realisasi kinerja yang cenderung meningkat dan berhasil melebihi target yang ditetapkan. **keberhasilan dalam mencapai target ini** didukung dengan:

1. Perbaikan di setiap elemen dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi di tahun 2023
2. Menetapkan Program Pengembangan Dan Penjaminan Kualitas Di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan dengan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.02.02.7.04.24.15 Tahun 2024 tentang Program Pengembangan Dan Penjaminan Kualitas Di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Sebagai informasi, di tahun 2024 indikator “Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP” telah dilakukan Penyesuaian nomenklatur dan target. penyesuaian nomenklatur dilakukan menggunakan nilai karena adanya Adanya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mencantumkan skor/nilai pada hasil evaluasi Kapabilitas APIP. Sehingga

indikator dapat terukur dengan lebih jelas dengan menggunakan nilai/skor. Penentuan target dilakukan menggunakan baseline hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2023 dengan skor 3,53. Penyesuaian target dilakukan semula 4 menjadi 3,6.

Hasil dari evaluasi pada indikator ”Nilai evaluasi kapabilitas APIP” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Meningkat on the track’’** yaitu Perkembangan kinerja cenderung meningkat dari tahun pertama sampai tahun terakhir serta Indikator ini berhasil mencapai target akhir periode renstra dan memperoleh kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP merupakan indikator yang menggambarkan langsung kapabilitas APIP di BPOM Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya. Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Memonitoring rencana tindak lanjut hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2024
2. *Continuous improvement* elemen kapabilitas APIP yang bisa ditingkatkan ke level 4
3. Meningkatkan pengembangan kompetensi APIP.

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024 target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 190 target indikator “Nilai Evaluasi kapabilitas APIP” pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Evaluasi kapabilitas APIP	3,90	4,00	4,20	4,30	4,50

IKSK.20 Nilai Pengelolaan Kearsipan

1. Analisis Tren

Tabel 191 Kertas Kerja analisis tren IKSK.20 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat I yang efektif	Nilai Pengelolaan Kearsipan		-	-	-	-	-	-	-	-	97,5	97,69	Indikator Baru	Belum dapat disimpulkan	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator merupakan indicator baru di tahun 2024 sehingga belum dapat disimpulkan karena tidak ditemukan pola kecenderungan.

2. Analisis Gap

Tabel 192 Kertas Kerja analisis gap IKSK.20 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.7	Terwujudnya organisasi Inspektorat I yang efektif	20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	97,5	97,69	100,19	Tercapai	Inspektorat I	Indikator baru di tahun 2024 dan indikator berhasil mencapai target pada tahun 2024 dengan kategori "Tercapai"

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja "Nilai Pengelolaan Kearsipan" merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat I di tahun 2024 yang merupakan direktif penugasan dari Biro Umum. Pada tahun 2024, realisasi kinerja berhasil mencapai target. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai realisasi indikator ini adalah:

1. Melakukan penciptaan arsip melalui aplikasi SRIKANDI dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan POM;
2. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi yang memuat klasifikasi keamanan akses berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Badan POM;
3. Memberkaskan arsip aktif berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan POM serta melaporkan daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan ke Unit Kearsipan;
4. Memperbarui daftar arsip vital Inspektorat Utama setiap tahunnya;
5. Melakukan penyusutan arsip berupa pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan secara rutin (maksimal 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun) berdasarkan jadwal retensi arsip;
6. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kearsipan bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip;
7. Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan ketentuan

Hasil dari evaluasi pada indikator "Nilai pengelolaan kearsipan" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **''belum dapat disimpulkan''** karena perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan dan masuk dalam kategori **''Tercapai''.**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan direktif penugasan dari Biro Umum dalam mencapai RB tematik, sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 kurang relevan untuk dilanjutkan dengan catatan direktif penugasan cukup dimasukkan pada penilaian SKP. Untuk mencapai target dari penugasan direktif tersebut dapat dilakukan kegiatan yang dilakukan di atas.

4.2.8 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 8 (SK.8) Terwujudnya SDM Inspektorat I yang berkinerja optimal

Sasaran Kegiatan 8 (SK.8) Terwujudnya SDM Inspektorat I yang berkinerja optimal, didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.7 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.21 Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I

1. Analisis Tren

Tabel 193 Kertas Kerja analisis tren IKSK.21 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
8	Terwujudnya SDM Inspektorat I yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I		85	85,30	84,28	86,54	87,15	85,86	87,2	89,83	91,25	86,09	102,34	Meningkat (Moderat)	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator memiliki perkembangan kinerja **Meningkat Moderat** yakni perkembangan kinerja cenderung meningkat namun belum berhasil mencapai target pada akhir periode renstra

2. Analisis Gap

Tabel 194 Kertas Kerja analisis gap IKSK.21 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.8	Terwujudnya SDM Inspektorat I yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I	Nilai	85	85,30	84,28	86,54	87,15	85,86	87,2	89,83	91,25	86,09	94,35	Tidak Tercapai	Inspektorat I	Realisasi kinerja indikator mengalami fluktuatif dan pada akhir periode renstra tidak berhasil mencapai target dengan kategori "Tidak Tercapai"

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja “Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I” memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif. Di tahun 2024 indikator ini mengalami penyesuaian target yang diberikan oleh Biro SDM. Sebagai informasi, indikator ini mengalamu perubahan tools penilaian pada tahun berjalan 2024, sehingga realisasi kinerja belum dapat mencapai target. Meskipun belum berhasil mencapai target, upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator ini yaitu kegiatan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN Inspektorat I.

Hasil dari evaluasi pada indikator “indeks profesionalitas ASN Inspektorat I” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Meningkat (Moderat)** karena perkembangan kinerja cenderung meningkat namun belum berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dan masuk dalam kategori **‘’Tidak Tercapai’’.**

Rekomendasi

Pada perubahan road map Reformasi Birokrasi, pengukuran dalam bidang SDM digantikan dengan Sistem Merit - Manajemen Talenta (Talent Scouting), sehingga pada rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029, IP ASN indikator ini sudah tidak relevan untuk dilanjutkan. Meskipun sudah tidak relevan, namun kegiatan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN Inspektorat Utama tetaplah menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

4.2.9 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 9 (SK.9) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat I

Sasaran Kegiatan 9 (SK.9) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat I, didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.9 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.22 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal

1. Analisis Tren

Tabel 195 Kertas Kerja analisis tren IKSK.22 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat I	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal		1,51	0	2	1	2,25	3	2,5	3	3	3,6	120,43	Meningkat (On The Track)	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator "Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat I yang optimal" memiliki perkembangan kinerja yang meningkat atau on the track. hal ini dilihat dari perkembangan

																		kinerja yang cenderung meningkat dan mampu mencapai target akhir periode renstra.

2. Analisis Gap

Tabel 196 Kertas Kerja analisis gap IKSK.22 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat I	22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	Indeks	1,51	0	2	1	2,25	3	2,5	3	3	3,6	120	Tercapai	Inspektorat I	Realisasi kinerja indikator mengalami peningkatan sampai pada akhir periode renstra dan berhasil mencapai target dengan kategori "Tercapai"

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal” memiliki perkembangan kinerja yang meningkat atau on the track. Realisasi kinerja ini mengalami peningkatan dari tahun pertama hingga akhir periode renstra. Peningkatan ini dilakukan dengan upaya:

1. Penunjukkan *person in charge* (PIC) di masing-masing unit satuan kerja di lingkungan Inspektorat Utama untuk melakukan pemutakhiran data yang rutin per bulan, dan melakukan pemantauan bulanan;
2. Melakukan sosialisasi berkala tentang penggunaan e-mail corporate Badan BPOM di lingkungan Inspektorat Utama;
3. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak memanfaatkan *email corporate*

Berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **'Meningkat on the track''** yaitu Perkembangan kinerja cenderung meningkat dari tahun pertama sampai tahun terakhir serta Indikator ini berhasil mencapai target akhir periode renstra dan memperoleh kategori **''Tercapai''**

Rekomendasi

Berdasarkan informasi dari tim Pusat data dan informasi, bahwa indikator "Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal" tidak dilanjutkan pada periode renstra selanjutnya. Sehingga pada rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029, indikator ini tidak dilanjutkan.

4.2.10 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 10 (SK.10) Terkelolanya Keuangan Inspektorat I secara Akuntabel

Sasaran Kegiatan 10 (SK.10) Terkelolanya Keuangan Inspektorat I secara Akuntabel, didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.10 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.23 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I

1. Analisis Tren

Tabel 197 Kertas Kerja analisis tren IKSK.23 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat I secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I		88%	75%	89%	75%	90%	75%	91%	100%	92%	100%	192,06	Meningkat (On The Track)	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator ini memiliki perkembangan kinerja yang meningkat atau on the track. hal ini dilihat dari perkembangan kinerja yang cenderung meningkat dan mampu mencapai target akhir periode renstra.

2. Analisis Gap

Tabel 198 Kertas Kerja analisis gap IKSK.23 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat I secara Akuntabel	23	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	Indeks	88%	75%	89%	75%	90%	75%	91%	100%	92%	100%	108,70	Tercapai	Inspektorat I	Realisasi kinerja indikator mengalami peningkatan sampai pada akhir periode renstra dan berhasil mencapai target dengan kategori "Tercapai"

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I” memiliki perkembangan kinerja yang meningkat atau on the track. Sebagai informasi, indikator ini telah mengalami penyesuaian target pada tahun 2024 karena adanya perubahan tools penilaian baik pada IKPA maupun EKA. Realisasi kinerja indikator ini sepanjang tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif karena terdampak penyesuaian tools yang selalu berubah di tiap tahunnya. Namun Inspektorat I tetap berkomitmen mewujudkan terkelolanya keuangan Inspektorat I secara akuntabel dengan mencapai target pada akhir periode renstra. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai realisasi indikator ini adalah:

1. Revisi pergeseran anggaran pada DIPA dan revisi rencana penarikan dana pada halaman III DIPA;
2. Inspektorat Utama melakukan *Automatic Adjustment* sebesar sebesar Rp 999.793.000 berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.01.2.21.01.24.10 tentang Revisi *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024;dan

3. Inspektorat Utama melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp 816.301.000 berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor PR.05.03.2.11.24.34 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Badan POM TA 2024, serta Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Tanggal 7 November 2024 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024.
4. Mengoptimalkan anggaran agar mencapai titik efisien.

Hasil dari evaluasi pada indikator " Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **'Meningkat on the track''** yaitu Perkembangan kinerja cenderung meningkat dari tahun pertama sampai tahun terakhir serta Indikator ini berhasil mencapai target akhir periode renstra dan memperoleh kategori **''Tercapai''.**

Rekomendasi

Indikator kinerja "Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I" merupakan indikator yang masuk dalam penilaian RB General BPOM, Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat I selanjutnya dengan catatan dalam penentuan target agar dipertimbangkan realisasi kinerja tahun 2020-2024. Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L;
2. Melakukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA secara triwulanan sesuai dengan reviu kebutuhan pencairan anggaran Inspektorat Utama dan menjaga akurasi dan tetap menjaga konsistensi realisasi anggaran dengan RPD Halaman III DIPA dengan batas toleransi deviasi tidak lebih dari 5%;
3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap triwulan sesuai dengan jenis belanja berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

Pada rancangan renstra Inspektorat I Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024, target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 199 target indikator "Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I" pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	100%	100%	100%	100%	100%

Evaluasi Indikator Inspektorat I yang sudah tidak relevan sampai akhir periode Tahun 2020-2024

Analisis Tren

Tabel 200 Kertas kerja Analisis tren terhadap indikator Inspektorat I yang sudah tidak relevan periode tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024				
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori	
SK.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan		6,43	6,35	5,98	5,98	6,02	5,67	6,06	Tidak dapat dihitung karena adanya perubahan road map RB menjadi RB General dan tematik	Digantikan dengan indikator baru yang relevan, yakni "Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas" dan "Nilai Survei Penilaian Integritas"			**Belum dapat disimpulkan**	Indikator sudah tidak relevan, sehingga perkembangan kinerja belum dapat disimpulkan karena belum muncul pola kecenderungan
SK.5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Nilai peer review atas pengawasan intern**		75	74,99	75	74,99	IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun		IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun		Di Tahun 2024 sudah dilaksanakan TSE oleh Itjen Kemen ATR BPN dengan nilai 82,73			**Belum dapat disimpulkan**	Indikator sudah tidak relevan, sehingga perkembangan kinerja belum dapat disimpulkan karena belum muncul pola kecenderungan

INSPEKTORAT UTAMA

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024				
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori	
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I		-		-		75%	88,12%	79%	88,12%				**Belum dapat disimpulkan**	Tidak dilanjutkan sampai akhir periode renstra karena sudah tidak relevan terhadap perubahan road map RB BPOM
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti		75%	87%	80%	90%	85%	90,12%	82%	84,04%				**Belum dapat disimpulkan**	Indikator dipindahkan kepada Biro Hukum dan Organisasi
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat I						81%	79,03%	90%	100,00%				**Belum dapat disimpulkan**	Tidak dilanjutkan sampai akhir periode renstra karena sudah tidak relevan terhadap perubahan road map RB BPOM

Analisis Gap

Tabel 201 Kertas kerja Analisis gap terhadap indikator Inspektorat I yang sudah tidak relevan periode tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SK.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	Nilai	6,43	6,35	5,98	5,98	6,02	5,67	6,06	Tidak dapat dihitung karena adanya perubahan road map RB menjadi RB General dan tematik	Digantikan dengan indikator baru yang relevan, yakni "Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas" dan "Nilai Survei Penilaian Integritas"		***	Belum dapat disimpulkan	Inspektorat I	Indikator sudah tidak relevan, sehingga digantikan dengan indikator baru yang relevan, yakni "Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas" dan "Nilai Survei Penilaian Integritas"
SK.5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Nilai peer review atas pengawasan intern**		75	74,99	75	74,99	IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun		IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun		Di Tahun 2024 sudah dilaksanakan TSE oleh Itjen Kemen ATR BPN dengan nilai 82,73		***	Belum dapat disimpulkan	Inspektorat I	Indikator sudah dimasukkan pada inisiatif strategis
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I	Persen	-		-		75%	88,12%	79%	88,12%			***	Belum dapat disimpulkan	Inspektorat I	Indikator sudah tidak relevan seiring dengan perubahan road map Reformasi Birokrasi

INSPEKTORAT UTAMA

No. Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	Persen	75%	87%	80%	90%	85%	90,12%	82%	84,04%			***	Belum dapat disimpulkan	Inspektorat I	Indikator sudah dipindahkan ke Biro Hukum dan Organisasi
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat I	Persen	Tidak ada indikator		Tidak ada indikator		81%	79,03%	90%	100,00%			***	Belum dapat disimpulkan	Inspektorat I	Indikator sudah tidak relevan seiring dengan perubahan road map Reformasi Birokrasi

Hasil Evaluasi dan Rekomendasi

No. Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
SK.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 membuat RB Penguatan Pengawasan sudah tidak relevan untuk dilanjutkan sampai ke akhir periode renstra	Fokus pada indikator pengganti yang lebih relevan menunjang RB BPOM pada lingkup Ittama
SK.5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Nilai peer review atas pengawasan intern**	Pelaksanaan peer review atau telaah sejawat dilakukan tidak setiap tahun sehingga lebih relevan untuk dimasukan pada inisiatif strategis	Tetap dilakukan penilaian telaah sejawat meskipun bukan menjadi indikator kinerja utama
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I	Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 membuat RB Penguatan Pengawasan sudah tidak relevan untuk dilanjutkan sampai ke akhir periode renstra	Fokus pada indikator pengganti yang lebih relevan menunjang RB BPOM pada lingkup Ittama
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	Sehubungan dengan telah terbentuknya Kelompok Substansi Pengembangan Pelayanan Publik pada Biro Hukum dan Organisasi, maka pelaksanaan pengukuran IKM di lingkungan BPOM secara langsung terkait dengan tugas dan fungsi Kelompok Substansi Pengembangan Pelayanan Publik.	Fokus pada indikator pengganti yang lebih relevan menunjang RB BPOM pada lingkup Ittama

No. Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat I	Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 membuat RB Penguatan Pengawasan sudah tidak relevan untuk dilanjutkan sampai ke akhir periode renstra	Fokus pada indikator pengganti yang lebih relevan menunjang RB BPOM pada lingkup Ittama

HASIL EVALUASI TAHUN KE-5 PADA INSPEKTORAT II



5.1 Target Kinerja Jangka Menengah
5.2 Analisis Capaian Kinerja

BAB 05

5.1 Target Kinerja Jangka Menengah

Rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024, fokus utama Inspektorat II adalah mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berkontribusi terhadap tujuan organisasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi antar unit kerja di lingkup Inspektorat Utama, sehingga dapat memperkuat hasil kinerja secara keseluruhan. Pengukuran implementasi ini dapat tergambar dengan pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan selama tahun 2020-2024. Target kinerja jangka menengah Inspektorat II tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 202 Target kinerja jangka menengah Inspektorat II tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Kegiatan		Tahun							
			2020	2021		2022		2023		2024	
		Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,43	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,98	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,02	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,06	Digantikan dengan indikator baru yang relevan, yakni "Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas" dan "Nilai Survei Penilaian Integritas"	
		[redacted]								Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30%

No Kode	Sasaran Kegiatan		Tahun							
			2020	2021		2022		2023		2024	
		Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
										Nilai Survei Penilaian Integritas	83,48
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,11	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,56	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,77	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi mitra kerja Inspektorat II	3,4	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi mitra kerja Inspektorat II	3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi mitra kerja Inspektorat II	4	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM	4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,85
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi Mitra Kerja	<1%	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	0,99%	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99,01	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99,01%	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99,01%

No Kode	Sasaran Kegiatan		Tahun							
			2020	2021		2022		2023		2024	
		Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
		Inspektorat II									
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti Badan POM	88,00%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	92,50%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat II	82	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat II	85,5	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat II	85,7	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat II	85,9	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat II	86
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern di Wilayah mitra Inspektorat II	80	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern	86,5	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern	87	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern	87,5	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern	86,3
5	Implementasi pengawasan intern yang	Persentase Laporan Pengawasan	100	Persentase Laporan Pengawasan	100	Persentase Laporan Pengawasan	100%	Persentase Laporan Pengawasan	100%	Persentase Laporan Pengawasan	100%

No Kode	Sasaran Kegiatan		Tahun							
			2020	2021		2022		2023		2024	
		Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
	efektif dan efisien	Intern pada Mitra Kerja Inspektorat II yang Sesuai Standar Mutu		Intern pada Mitra Kerja Inspektorat II yang Sesuai Standar Mutu		Intern pada Mitra Kerja Inspektorat II yang Sesuai Standar Mutu		Intern pada Mitra Kerja Inspektorat II yang Sesuai Standar Mutu		Intern pada Mitra Kerja Inspektorat II yang Sesuai Standar Mutu	
		Nilai peer review atas pengawasan intern	75	Nilai peer review atas pengawasan intern	75	Nilai peer review atas pengawasan intern	IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun	Nilai peer review atas pengawasan intern	IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun	Nilai peer review atas pengawasan intern	Di Tahun 2024 sudah dilaksanakan TSE oleh Itjen Kemen ATR BPN dengan nilai 82,73
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang Ditindaklanjuti	90%	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang Ditindaklanjuti	93%	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang Ditindaklanjuti	94%	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang Ditindaklanjuti	95%	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang Ditindaklanjuti	96%
		Persentase Pengaduan Lingkup Inspektorat II yang	80%	Persentase Pengaduan Lingkup Inspektorat II yang	100%	Persentase Pengaduan Lingkup Inspektorat II yang	100%	Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang	100%	Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang	100%

No Kode	Sasaran Kegiatan		Tahun							
			2020	2021		2022		2023		2024	
		Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
		Ditindaklanjuti secara Tuntas		Ditindaklanjuti secara Tuntas		Ditindaklanjuti secara Tuntaswaktu		ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu		ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	
		[redacted]		Persentase permintaan layanan konsultansi Mitra Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	92%	Persentase permintaan layanan konsultansi Mitra Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%	Persentase permintaan layanan konsultansi Mitra Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,57%
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II	100	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II	100	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II	96,89	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II	79	[redacted]	

No Kode	Sasaran Kegiatan		Tahun							
			2020	2021		2022		2023		2024	
		Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	100,00	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	100,00	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	75%	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	82%		
						Persentase rekomendasi SurveiKepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	85%	Persentase rekomendasi SurveiKepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	90%		
		Persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti (Persen)	100,00								
		Persentase rekomendasi survei integritas organisasi dan jabatan yang	88,00								

No Kode	Sasaran Kegiatan		Tahun							
			2020	2021		2022		2023		2024	
		Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
		ditindaklanjuti unit kerja									
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II	91,00	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II	84,10	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II	85,10	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II	86,10	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II	86,70
		Level kapabilitas APIP	3,4	Level kapabilitas APIP	3	Level kapabilitas APIP	4	Level kapabilitas APIP	4	Nilai Evaluasi kapabilitas APIP	3,6
										Nilai Pengelolaan Kearsipan	95,79
8	Terwujudnya SDM Inspektorat II yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	85	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	84,28	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	86,00	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	86,25	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	94,84

No Kode	Sasaran Kegiatan		Tahun							
			2020	2021		2022		2023		2024	
		Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat II	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	1,51	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2,25	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2,5	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	3
10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat II secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	88%	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	89%	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	90%	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	91%	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	92%

5.2 Analisis Capaian Kinerja

Inspektorat II dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja selama tahun 2020-2024. Rincian realisasi kinerja dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

5.2.1 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 1 (SK.1) Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif

Sasaran Kegiatan 1 (SK.1) Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif pada Inspektorat II, didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.1 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.1 Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas

1. Analisis Tren

Tabel 203 Kertas Kerja analisis tren IKSK.1 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas										30%	62,50%	Indikator Baru	Belum dapat disimpulkan	Indikator mendukung pada Indeks RB BPOM	Indikator ini merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 yang diturunkan langsung kepada Inspektorat II. Pada tahun 2024, realisasi kinerja mampu mencapai target dengan capaian >120%. indikator masih belum dapat disimpulkan perkembangan kinerjanya karena belum menemukan pola kecenderungan

2. Analisis Gap

Tabel 2 Kertas Kerja analisis gap IKSK.1 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Persentase									30%	62,50%	208,33	Tercapai	Inspektorat II	Indikator baru di tahun 2024 sehingga baru dapat dilakukan penilaian hanya pada akhir periode renstra. Indikator masuk dalam kategori tercapai

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja "Persentase Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas" merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 yang diturunkan langsung kepada Inspektorat II. Indikator ini merupakan indikator pengganti dari Indikator "Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan" yang sudah tidak relevan lagi dilanjutkan pada tahun 2024 karena adanya perubahan road map Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2024, realisasi kinerja pada indikator kinerja "Persentase Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas" mampu mencapai target dengan capaian >120%. beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai realisasi indikator ini adalah:

1. Terdapatnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja;
3. Monitoring Pengisian LKE Zona Integritas;
4. Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM;
5. *Forum Group Discussion* Penguatan Peran dan Mitigasi Risiko serta Akselerasi Zona Integritas;
6. Bimbingan Teknis Implementasi ZI pada Loka POM Pilotting;
7. Penyampaian Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju WBK WBBM Tahun 2024;
8. Penyampaian Laporan Progres Penilaian Unit Kerja WBK di Lingkungan BPOM secara Mandiri;
9. Pelaksanaan evaluasi zona integritas lingkup BPOM;
10. Monitoring PKPT 2024 pada kegiatan pembangunan zona integritas.

Hasil dari evaluasi pada indikator "Persentase Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **''belum dapat disimpulkan''** karena perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan, namun indikator berhasil mencapai target akhir periode renstra dan masuk dalam kategori **''Tercapai''.**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan salah satu penilaian yang masuk pada Reformasi Birokrasi General, sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 masih sangat relevan untuk dilanjutkan dengan catatan perlunya dilakukan penentuan target dengan pertimbangan realisasi kinerja di tahun 2024. Selain itu, direkomendasikan agar dilakukan pembaharuan definisi operasional indikator pada periode renstra selanjutnya. Hal ini agar definisi operasional indikator lebih selaras dengan definisi operasional indikator pada penilaian RB general BPOM. Pada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029, penentuan target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2024. target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 204 target indikator "Persentase Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas" pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	73,7%	74,6%	75,5%	76,4%	77,4%

IKSK.2 Nilai Survei Penilaian Integritas

1. Analisis Tren

Tabel 205 Kertas Kerja analisis tren IKSK.1 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Survei Penilaian Integritas										83,48	83,98	Indikator Baru	Belum dapat disimpulkan	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator ini merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 yang diturunkan langsung kepada Inspektorat I. Indikator ini merupakan salah satu penilaian yang masuk pada Reformasi Birokrasi General, sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 masih sangat relevan untuk dilanjutkan.

2) Analisis Gap

Tabel 206 Kertas Kerja analisis gap IKSK.1 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	2	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai									83,48	83,98	100,60	Tercapai	Inspektorat II	Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024. Indikator ini berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori "Tercapai".

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja "Nilai Survei Penilaian Integritas" merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 yang diturunkan langsung kepada Inspektorat II. Realisasi kinerja pada indikator kinerja "Nilai Survei Penilaian Integritas" mampu mencapai target dengan capaian >100%. beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai realisasi indikator ini adalah:

1. Bimbingan Teknis aplikasi sang integritas;
2. Sosialisasi program anti korupsi;
3. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan;
4. Bimbingan teknis pelaksanaan SPI;
5. Audiensi kepada KPK mengenai Pencegahan korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan dan juga SPI;
6. Cafe Integritas;
7. Pengukuhan Pejabat Tinggi Madya sebagai pembina PAKSI dan API

Di tahun 2024, Inspektorat Utama memiliki program unggulan yang mewadahi sosialisasi program anti korupsi yaitu cafe integritas. Di tahun 2024, cafe integritas dilaksanakan sampai dengan seri 3. seri pertama dimulai dengan tema ”Mengukir Kejujuran dan Melestarikan Budaya Integritas”, selanjutnya di seri kedua dengan tema ”Cegah Kebocoran dan Bangun Keberlanjutan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Bermanfaat” dan di series ketiga dibarengi dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) dengan tema “Penguatan Peran Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) di BPOM dalam Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”.

Hasil dari evaluasi pada indikator “Nilai Survei Penilaian Integritas” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘’belum dapat disimpulkan’’** karena perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan dan masuk dalam kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan salah satu penilaian yang masuk pada Reformasi Birokrasi General, sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 masih sangat relevan untuk dilanjutkan dengan catatan perlunya dilakukan penentuan target dengan pertimbangan realisasi kinerja di tahun 2024. Selain itu, direkomendasikan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Nilai Survei Integritas BPOM. Pada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029, menggunakan logframe sehingga di tahun 2025-2029 indikator ini berada pada level eselon II. Untuk di level eselon I akan menggunakan indikator baru yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama” target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat pada rekomendasi IKSP.1 yang telah disinggung di atas.Target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 207 target indikator “Survei Penilaian Integritas” pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Survei Penilaian Integritas	84,6	85,16	85,72	86,28	86,84

IKSK.3 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPOM

1. Analisis Tren

Tabel 208 Kertas Kerja analisis tren IKSK.3 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPOM		8,11	7,77	8,56	8,35	8,66	8,47	8,77	8,18	20,75	20,69	70,08	Meningkat (Moderat)	Mendukung AKIP BPOM	Indikator ini memiliki perkembangan kinerja yang meningkat (moderat) yakni perkembangan kinerja yang menunjukkan peningkatan namun belum dapat mencapai target akhir periode renstra

2. Analisis Gap

Tabel 209 Kertas Kerja analisis gap IKSK.3 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPOM	Nilai	8,11	7,77	8,56	8,35	8,66	8,47	8,77	8,18	20,75	20,69	99,71	Tidak Tercapai	Inspektorat II	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif. Pada tahun2020-2021 realisasi kinerja meningkat, namun di tahun 2022 realisasi kinerja menurun. Selanjutnya di tahun 2023 sampai dengan akhir periode renstra menunjukkan

																	peningkatan. Indikator ini belum berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori **"Tidak Tercapai"**.

Hasil Evaluasi

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM tahun 2024 belum dapat mencapai target atau masuk dalam kategori "Cukup" dan jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra maka masuk dalam kategori "Akan Tercapai". Realisasi kinerja diperoleh dari surat PANRB No B/673/AA.05/2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2024 yang baru diterima pada akhir bulan Januari 2025, sehingga realisasi kinerja akan berbeda dengan laporan evaluasi internal Inspektorat Utama triwulan IV tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,24 poin.

Penyebab tidak tercapainya mencapai target di tahun 2024, berdasarkan Hasil dari PANRB No B/673/AA.05/2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2024 karena masih terdapat catatan dalam pelaksanaan evaluasi internal di Lingkungan Badan POM yaitu monitoring dan evaluasi tindak lanjut evaluasi internal pada BPOM telah memanfaatkan aplikasi SAPA APIP, hanya saja masih ditemukan Sebagian kecil UPT yang belum memanfaatkan aplikasi tersebut dalam menindaklanjuti rekomendasi saran perbaikan dari tim APIP.

Upaya yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mendukung implementasi SAKIP BPOM di tahun 2024 adalah:

1. Melakukan koordinasi lanjutan dengan tim pengembang aplikasi SAPA APIP dalam penyempurnaan modul SAKIP;
2. Menginformasikan kepada para unit kerja melalui surat Inspektorat Utama No PI.04.7.08.24.515 terkait Permohonan Tindak Lanjut atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023;
3. Pelaksanaan desk monitoring dan evaluasi tindak lanjut pada Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis;
4. Menyampaikan Surat Edaran Inspektur Utama terkait Penetapan Sub Kategori LKE AKIP Tahun 2024 ke seluruh Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis;

5. Koordinasi bersama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melakukan revisi Pedoman Penyelenggaraan SAKIP agar lebih memudahkan Satker dalam mengimplementasikan SAKIP;

Dalam indikator "Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM" belum ditemukan indikator yang serupa dengan K/L lain sehingga belum dapat dilakukan perbandingan Indikator Kinerja "Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM" dengan K/L lainnya.

Rekomendasi

Sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan/rencana tindak lanjut, sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi AKIP BPOM oleh Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Utama berkomitmen meningkatkan kualitas evaluasi internal untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP di masing-masing Satker/UPT dengan:

1. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dalam aplikasi SAPA APIP;
2. Melakukan desk evaluasi AKIP Tahun 2025 Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Satker/UPT;
3. Melakukan bimbingan teknis terhadap pedoman evaluasi SAKIP tahun 2025 serta meningkatkan awareness dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi APIP terhadap evaluasi SAKIP. Target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 210 target indikator "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPOM" pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,73	20,86	21,00	21,14	21,28

IKSK.4 Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM

1. Analisis Tren

Tabel 211 Kertas Kerja analisis tren IKSK.4 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM		3,4	3	3	3	4	3	4	3,729	3,85	4,09	117,64	Meningkat (On The Track)	Indikator ini mendukung indeks RB BPOM	Indikator ini masuk pada kategori **meningkat (on the track)**. Hal ini dapat dilihat dari realisasi kinerja yang selalu naik di tiap tahunnya. Indikator ini sangat perlu dipertahankan kinerja.

2. Analisis Gap

Tabel 212 Kertas Kerja analisis gap IKSK.4 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	Nilai	3,4	3	3	3	4	3	4	3,729	3,85	4,09	106,23%	Tercapai	Inspektorat II	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang meningkat di tiap tahunnya dan berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori "Tercapai".

Hasil Evaluasi

Capaian nilai evaluasi SPIP BPOM pada tahun 2020 sampai dengan 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 dilakukan pengajuan perubahan target 2021 menjadi level 3 dikarenakan penilaian SPIP menggunakan level. Namun di tahun 2024, Inspektorat melakukan penyesuaian target menjadi Nilai evaluasi SPIP karena pada saat pelaporan LHE SPIP BPOM terdapat nilai/skor yang dilampirkan oleh tim evaluator SPIP BPOM dari BPKP sehingga perkembangan kinerja lebih dapat terukur/tergambar dengan jelas. Realisasi kinerja SPIP BPOM menunjukkan peningkatan yang pesat dengan mencapai level 4 di akhir periode renstra. Keberhasilan capaian nilai evaluasi SPIP BPOM merupakan bukti bahwa upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Utama efektif dalam mendukung implementasi SPIP di BPOM. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan indikator ini adalah:

1. Pengusulan manajemen risiko menjadi indikator strategis di BPOM melalui nota dinas Inspektur Utama No PI.06.07.7.06.24.125 hal Usulan Indikator Kinerja Nilai Maturitas Manajemen Risiko pada Renstra BPOM periode 2025-2029;
2. Pemenuhan data dukung penilaian Kapabilitas APIP dalam rangka Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Utama BPOM melalui peningkatan level kapabilitas APIP sebagai tindak lanjut evaluasi SPIP BPOM Tahun 2023;
3. Evaluasi penilaian mandiri SPIP;
4. Melakukan penjaminan kualitas SPIP BPOM tahun 2024
5. Pemantauan tindak lanjut terhadap rencana aksi hasil evaluasi SPIP Tahun 2023 melalui Surat Inspektur Utama No. B-PI.06.07.7.03.24.263 tentang Hasil Pemantauan Tindak Lanjut *Area of Improvement* (AoI) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM Tahun 2023
6. Bersama dengan Biro Hukun dan Organisasi Menyusun Tanggapan atas Hasil Sementara Evaluasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPOM tahun 2024
7. Koordinasi dalam penyusunan Area of Improvement (AoI) dengan Biro Hukum dan Organisasi;
8. Perluasan bimbingan teknis manajemen risiko;

Hasil dari evaluasi pada indikator “Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Meningkat (on the track)”** yaitu perkembangan kinerja cenderung meningkat dan mencapai target tahun 2024 serta masuk dalam kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan salah satu penilaian yang masuk pada Reformasi Birokrasi General, sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 masih sangat relevan untuk dilanjutkan dengan catatan perlunya dilakukan penentuan target dengan pertimbangan realisasi kinerja di tahun 2020-2024.

Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Mempertahankan kegiatan-kegiatan penunjang pada tahun 2024 dalam meningkatkan nilai SPIP BPOM
2. Melakukan penentuan target berdasarkan realisasi kinerja SPIP pada tahun 2020-2024
3. Koordinasi dengan tim SPIP BPOM dalam menindaklanjuti hasil evaluasi SPIP-T tahun 2024

Rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 menggunakan logframe sehingga di tahun 2025-2029 indikator ini berada pada level eselon II. Untuk di level eselon I akan menggunakan indikator baru yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama” target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat pada rekomendasi IKSP.1 yang telah disinggung di atas. Target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 213 target indikator “Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM” pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,20	4,31	4,42	4,53	4,64

5.2.2 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 2 (SK.2) Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel

Sasaran Kegiatan 2 (SK.2) Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel, didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.2 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.5 Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan

1. Analisis Tren

Tabel 214 Kertas Kerja analisis tren IKSK.5 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan		<1%	0,44	0,99%	0,02	99,01	99,96%	99,01%	99,95%	99,01%	99,99%	4,29	Stagnan	Mendukung OPINI WTP atas Laporan Keuangan BPOM	Indikator ini masuk pada kategori stagnan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja cenderung sedikit meningkat dari tahun pertama terhadap kondisi akhir periode renstra.

2. Analisis Gap

Tabel 2 Kertas Kerja analisis gap IKSK.5 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	1	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	Persentase	<1%	0,44	0,99%	0,02	99,01	99,96%	99,01%	99,95%	99,01%	99,99%	100,99	Tercapai	Inspektorat II	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif di tiap tahunnya namun selalu mencapai target dan berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori "Tercapai".

Hasil Evaluasi

Inspektorat Utama komitmen melakukan pengawasan dan pengawalan di lingkup BPOM khususnya pada pelaksanaan pemeriksaan Laporan keuangan maupun kinerja BPOM. Pada periode rencana strategis tahun 2020-2024, BPOM memiliki kesalahan material dalam laporan keuangan <1% dan 10 kali berturut-turut mempertahankan OPINI WTP. Capaian Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 dilakukan pengajuan perubahan target 2021 menjadi 0,99% karena agara lebih terukur jelas angka yang digunakan sebagai target. Selanjutnya di tahun 2022 dilakukan penyesuaian target menjadi IKU dengan pengukuran polarisasi positif semula 0,99 menjadi 99,01%. Target selama tahun 2022 sampai dengan 2024 stagnan karena mengikuti batas material dalam laporan keuangan yakni <1%. Kegiatan atau upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan indikator ini adalah:

1. Terus dilakukan intensifikasi koordinasi yang simultan dan terpadu dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK RI, terutama terkait Laporan Keuangan dan pelaksanaan reviu;

2. Perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti;
3. Melakukan reviu yang dilakukan atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini;
4. Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BPOM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Penguatan peran consulting APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja;
6. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan Plan of Action (PoA) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
7. Kontribusi Auditor dalam Forum Group Discussion (FGD) PIPK; dan
8. Pelaksanaan asistensi pengelolaan anggaran.

Hasil dari evaluasi pada indikator “Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **“Stagnan”** yaitu Perkembangan kinerja cenderung sedikit meningkat dari tahun pertama terhadap kondisi terkini serta masuk dalam kategori **‘’Tercapai’’**.

Rekomendasi

Pada rencana strategis periode tahun 2025-2029, indikator ini masuk sudah tergambar pada indikator kinerja di Sekretariat Utama dalam peroleh OPINI WTP, sehingga di rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 sudah tidak lagi dilanjutkan. Namun terhadap kegiatan pengawalan/pendampingan BPK tetap dilakukan demi mempertahankan opini WTP di BPOM.

IKSK.5 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti Badan POM

Analisis Tren

Tabel 215 Kertas Kerja analisis tren IKSK.6 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	94,24%	88,00%	93,47%	92,50%	94,24%	93%	93%	94%	93,82%	94%	96,15%	-788,65	Menurun	Mendukung OPINI WTP BPOM	Indikator ini masuk pada kategori menurun. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja cenderung fluktuatif bahkan menurun dari tahun pertama terhadap kondisi akhir periode renstra.

Analisis Gap

Tabel 216 Kertas Kerja analisis gap IKSK.6 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	2	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti Badan POM	Persentase	88,00%	93,47%	92,50%	94,24%	93%	93%	94%	93,82%	94,00%	96,15%	102,29	Tercapai	Inspektorat II	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif di tiap tahunnya namun berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori "Tercapai".

Hasil Evaluasi

Capaian Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM pada tahun 2020 sampai dengan 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 dilakukan pengajuan perubahan target menjadi 94% karena pada tahun 2023 tidak mencapai target dan Tingkat kendali IKU sangat rendah karena TL BPK dilakukan oleh unit kerja dan dalam 1 rekomendasi terdapat beberapa unit kerja yang terkait sehingga lebih sulit dalam ditindaklanjuti. Realisai kinerja indikator selama tahun 2020-2021 mengalami peningkatan, namun di tahun 2022 realisasi kinerja mengalami penurunan. Selanjutnya untuk di tahun 2023 realisasi kinerja meningkat dari tahun sebelumnya, namun belum berhasil mencapai target. Selanjutnya di akhir periode renstra, realisasi kinerja berhasil mencapai target. Kegiatan atau upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan indikator ini adalah:

1. Melakukan pendampingan dalam pemeriksaan BPK pada Unit kerja;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam integrasi data pengawasan intern, melalui aplikasi berbasis web “SAPA APIP” sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan oleh auditee;
3. Meningkatkan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal terkait penyelesaian rekomendasi serta melakukan intensitifikasi koordinasi dengan auditan terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Utama sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS);
4. Koordinasi langsung dengan level Pimpinan di tingkat Satuan Kerja terkait dengan temuan spesifik pada Satuan Kerja tersebut sehingga diperoleh komitmen yang tinggi untuk penyelesaiannya;
5. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait antara lain dengan BPK RI serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang daerah (KPKNL) setempat untuk tindak lanjut yang memerlukan bantuan dari pihak bersangkutan;
6. Penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek-aspek terkait pemeriksaan oleh BPK pada risiko yang harus dikelola baik pada level Instansi maupun pada Unit Kerja.

Hasil dari evaluasi pada indikator " Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **'Menurun''** yaitu Perkembangan kinerja cenderung fluktuatif dan menurun dari tahun pertama terhadap kondisi akhir periode renstra, namun meskipun menurun indikator ini berhasil mencapai target akhir periode renstra dan masuk dalam kategori **''Tercapai''.**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan salah satu penilaian yang masuk pada Reformasi Birokrasi General, sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 masih sangat relevan untuk dilanjutkan dengan catatan perlunya dilakukan penentuan target dengan pertimbangan realisasi kinerja di tahun 2020-2024.

Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Mempertahankan kegiatan-kegiatan penunjang pada tahun 2024 dalam meningkatkan persentase TL BPK
2. Melakukan penentuan target berdasarkan realisasi kinerja TL BPK pada tahun 2020-2024

Rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 menggunakan *logframe* sehingga di tahun 2025-2029 indikator ini berada pada level eselon II. Untuk di level eselon I akan menggunakan indikator baru yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat II" target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat pada rekomendasi IKSP.1 yang telah disinggung di atas. Target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 217 target indikator "Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM" pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96,18%	96,22%	96,25%	96,28%	96,31%

5.2.3 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 3 (SK.3) Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas

Sasaran Kegiatan 3 (SK.3) Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas, didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.3 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.8 Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat II

Analisis Tren

Tabel 218 Kertas Kerja analisis tren IKSK.8 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat II		82	85,26	85,5	87,94	85,7	87,56	85,9	86,94	86	88,3	301,71	Meningkat (On the track)	Mendukung Reformasi BPOM	Indikator ini masuk pada kategori meningkat (on the track). Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja cenderung meningkat dan berhasil mencapai target akhir periode renstra

Analisis Gap

Tabel 219 Kertas Kerja analisis gap IKSK.8 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	1	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat II	Nilai	82	85,26	85,5	87,94	85,7	87,56	85,9	86,94	86	88,3	102,67	Tercapai	Inspektorat II	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif di tiap tahunnya namun berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori "Tercapai".

Hasil Evaluasi

Capaian Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern pada tahun 2020 sampai dengan 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 dilakukan pengajuan perubahan target menjadi 85,5 karena pada tahun 2020 realisasi kinerja sudah mencapai target akhir periode renstra. Namun di tahun 2023 tidak dilakukan penyesuaian target karena Tingkat kendali IKU sangatlah rendah. Realisasi kinerja selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif ditunjukkan dengan adanya peningkatan di tahun 2021 namun mengalami penurunan di tahun 2022, selanjutnya meningkat di tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya di akhir periode renstra, realisasi kinerja berhasil mencapai target. Kegiatan atau upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan indikator ini adalah:

1. Peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi antar auditor dengan unit kerja yang diawasi;
2. Melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan kompetensi serta menyamakan pemahaman dan persepsi antar Auditor;
3. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui:
   a) Peningkatan layanan konsultasi yang difasilitasi dengan pengembangan aplikasi untuk konsultasi online (SOLUSI);

b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi dengan menggunakan aplikasi sistem informasi monitoring secara elektronik dan dashboard evaluasi kinerja (SAPA APIP) untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil audit BPK, tindak lanjut Inspektorat Utama, evaluasi manajemen risiko dan evaluasi SAKIP.

c) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan intern melalui pembangunan aplikasi *Inspiring Audit*.

d) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan pengaduan, gratifikasi dan benturan kepentingan melalui pembangunan aplikasi Sang Integritas.

4. Peningkatan sosialisasi hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja pada beberapa kesempatan, antara lain pada Rapat Kerja Nasional tahun 2024, agar suatu temuan pada satu auditan tidak menjadi temuan maupun masalah pada auditan lainnya;
5. Pembahasan hasil audit melalui mekanisme ekspose hasil audit dengan Inspektur Utama BPOM;
6. Peningkatan manajemen waktu audit (pelaksanaan audit hanya pada hari dan jam kerja);
7. Peningkatan keterbukaan informasi hasil pengawasan intern yang dilakukan, misalnya hasil evaluasi SAKIP dan RB, dengan tujuan untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat sasaran; dan
8. Pembaharuan aplikasi pengawasan intern seperti SAPA APIP, SOLUSI, Sang Integritas.

Hasil dari evaluasi pada indikator ”Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Meningkat (On the track)’’** yaitu Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Inspektorat Utama menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan pengawasan intern yang bertujuan perbaikan organisasi. Digitalisasi pengawasan menjadi salah satu tindak lanjut Inspektorat Utama untuk mengimplementasikan pengawasan yang efektif dan efisien. Selain itu, indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan indikator yang relevan untuk dilanjutkan pada Rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029

menggambarkan umpan balik dari para mitra kerja Inspektorat Utama dan tentunya banyak memberikan masukan serta saran untuk Inspektorat Utama berkinerja lebih baik.

Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Mempertahankan kegiatan-kegiatan penunjang pada tahun 2024 dalam meningkatkan kepuasan mitra pengawasan intern
2. Melakukan penentuan target berdasarkan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Pada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029, penentuan target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2020-2024. Target indikator pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 220 target indikator "Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat II" pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern mitra kerja Inspektorat II	88,33	88,38	88,43	88,48	88,52

5.2.4 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 4 (SK.4) Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern di Wilayah mitra Inspektorat II

Sasaran Kegiatan 4 (SK.4) Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas, didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.4 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.9 Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Analisis Tren

Tabel 221 Kertas Kerja analisis tren IKSK.9 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	-	80	86,59	86,5	84,91	87	87,19	87,5	85,94	86,3	84,26	-240,77	Menurun	Mendukung Reformasi BPOM	Indikator ini masuk pada kategori menurun). Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja cenderung menurun dan tidak berhasil mencapai target akhir periode renstra.

Analisis Gap

Tabel 222 Kertas Kerja analisis gap IKSK.9 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		

SK.4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	1	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	Nilai	80	86,59	86,5	84,91	87	87,19	87,5	85,94	86,3	84,26	96,74	Tidak Tercapai	Inspektorat II	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif di tiap tahunnya bahkan cenderung menurun serta tidak berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori "Tidak Tercapai".

Hasil Evaluasi

Capaian Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mesih belum berhasil melebihi target yang ditetapkan. Sebagai informasi, pada tahun 2021 dilakukan pengajuan perubahan target menjadi 86,5 karena pada tahun 2020 realisasi kinerja sudah mencapai target akhir periode renstra. Selanjutnya dilakukan Kembali penyesuaian target di tahun 2024 (menjadi 86,3) karena dua tahun berturut-turut (2022 dan 2023) tidak mencapai target dan melihat realisasi kinerja di tahun 2022 dan 2023 yang memang sulit untuk mencapai target 2024 (88). Realisasi kinerja selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif ditunjukkan dengan adanya penurunan di tahun 2021 namun mengalami peningkatan kembali di tahun 2022, selanjutnya di tahun 2023 dan 2024 realisasi kinerja Kembali mengalami penurunan dan belum berhasil mencapai target akhir periode renstra. **Ketidakberhasilan dalam mencapai target ini adalah** masih banyaknya upaya-upaya perbaikan yang diharapkan oleh para stakeholder dalam pedoman penanganan benturan kepentingan. Masukan-masukan yang ada pada survei kemanfaaan kebijakan akan menjadi input yang sangat berarti bagi Inspektorat Utama untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Meskipun belum berhasil mencapai target, **Upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam mendukung** capaian kinerja indikator adalah sebagai berikut:

4. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan pengawasan intern pada lingkungan Badan POM;
5. Membuka wadah pertanyaan/konsultasi pada aplikasi SOLUSI terkait pengawasan intern termasuk kebijakannya.

Hasil dari evaluasi pada indikator ”Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Menurun’’** yaitu Perkembangan kinerja cenderung menurun dan tidak berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **‘’Tidak Tercapai’’.**

Rekomendasi

Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern diukur melalui pelaksanaan survei terkait kebijakan-kebijakan yang berada dalam tugas dan fungsi Inspektorat Utama. realisasi kinerja indikator ini mengalami flutktuasi dari tahun 2020-2024. Pelaksanaan survei kemanfaatan kebijakan ini dilakukan dengan tema yang berbeda di setiap tahunnya. sehingga di setiap tahunnya terdapat perspektif bahwa indikator tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya, karena survei yang dilakukan memiliki tema yang berbeda atau tidak dapat menggambarkan progress kemajuan atas saran di tema kebijakan yang sebelumnya. sehingga pada rancangan rencana strategis Inspetkorat Utama Tahun 2025-2029 indikator Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern tidak dilanjutkan.

5.2.5 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 5 (SK.5) Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien

Sasaran Kegiatan 5 (SK.5) Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas, didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.5 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.10 Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat II yang Sesuai Standar Mutu

Analisis Tren

Tabel 223 Kertas Kerja analisis tren IKSK.10 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat II yang Sesuai Standar Mutu		100,00	100,00	100,00	122	100	121	100	100	100%	100%	0,00	Stagnan	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator ini masuk pada kategori stagnan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja cenderung sedikit meningkat namun berhasil mencapai target akhir periode renstra.

Analisis Gap

Tabel 224 Kertas Kerja analisis gap IKSK.10 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	1	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat II yang Sesuai Standar Mutu	Persentase	100,00	100,00	100,00	122	100	121	100	100	100%	100%	100,00	Tercapai	Inspektorat II	Indikator ini memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif di tiap tahunnya namun berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori "Tercapai".

Hasil Evaluasi

Capaian persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 sudah berhasil melebihi target yang ditetapkan. **keberhasilan dalam mencapai target ini** didukung dengan:

1. Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit;
2. Penganggaran yang memadai dan telah direviu sehingga dapat mengakomodasi ruang lingkup pengawasan yang ada;
3. Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik;
4. Peningkatan kompetensi auditor secara berkala sehingga mampu menjalankan praktik audit yang profesional dan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia maupun Standar Mutu ISO 9001:2015;
5. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Hasil dari evaluasi pada indikator persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **'Stagnan"** yaitu Perkembangan kinerja cenderung sedikit meningkat dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Namun indikator ini berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **''Tercapai''.**

Rekomendasi

Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu merupakan indikator yang mengukur tugas dan fungsi pengawasan intern Inspektorat Utama. Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya. Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024, sehingga target pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 225 target Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang dilaksanakan sesuai standar mutu Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%

5.2.6 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 6 (SK.6) Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien

Sasaran Kegiatan 6 (SK.6) Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas, didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.6 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.11 Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang Ditindaklanjuti

Analisis Tren

Tabel 226 Kertas Kerja analisis tren IKSK.11 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang Ditindaklanjuti		90,00	92,00	93	91,55	94,00	97,65	95%	96,13%	96%	87,71%	-110,94	Menurun	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator ini masuk pada kategori menurun. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja cenderung menurun dan tidak berhasil mencapai target akhir periode renstra.

Analisis Gap

Tabel 227 Kertas Kerja analisis gap IKSK.11 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.6	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	1	Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	Persentase	90,00	92,00	93	91,55	94,00	97,65	95%	96,13%	96%	87,71%	91,36	Tidak Tercapai	Inspektorat II	Realisasi kinerja selama 2020-2024 mengalami fluktuatif, dan belum berhasil mencapai target akhir periode renstra dengan kategori "Tidak Tercapai"

Hasil Evaluasi

Capaian Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang Ditindaklanjuti pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami realisasi kinerja yang fluktuatif. Pada tahun 2021 realisasi kinerja sudah mengalami penurunan dan belum berhasil mencapai target. Selanjutnya di tahun 2022 dan 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan, namun di akhir periode renstra, realisasi kinerja mengalami penurunan dan belum berhasil target yang ditetapkan. **ketidakberhasilan dalam mencapai target ini** disebabkan karena:

1. Kurangnya komitmen auditan dalam melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP.
2. Adanya penugasan pengawasan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Hasil dari evaluasi pada indikator ”Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Menurun’’** yaitu Perkembangan kinerja cenderung **menurun dan belum berhasil** mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **‘’Tidak Tercapai’’.**

Rekomendasi

Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti merupakan indikator yang mengukur tindak lanjut hasil pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Utama. Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya dengan catatan dalam penentuan target agar dipertimbangkan realisasi kinerja tahun 2020-2024. Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil audit.
2. Melakukan plotting penjadwalan kegiatan pengawasan intern melalui audit dengan menghindari penjadwalan yang mendekati akhir tahun anggaran, sehingga tindak lanjut atas pengawasan masih dapat dilakukan dalam tahun anggaran yang sama.
3. Melakukan perencanaan kegiatan pengawasan intern berdasarkan PKPT yang berbasis manajemen risiko.

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024, sehingga target pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 228 target Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang Ditindaklanjuti	93,26%	93,36%	93,46%	93,57%	93,67%

IKSK.12 Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Analisis Tren

Tabel 229 Kertas Kerja analisis tren IKSK.12 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu		80,00	100,00	100	83%	100,00	100,00	100%	100%	100%	100%	0,00	Stagnan	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas memiliki kategori stagnant atau dalam perkembangan kinerjanya mengalami sedikit peningkatan.

2. Analisis Gap

Tabel 230 Kertas Kerja analisis gap IKSK.12 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.6	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	2	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Persentase	80,00	100,00	100	83%	100,00	100,00	100%	100%	100%	100%	100,00	Tercapai	Inspektorat II	Realisasi kinerja selama 2020-2024 mengalami fluktuatif, dan berhasil mencapai target akhir periode renstra dengan kategori “Tercapai"

Hasil Evaluasi

Capaian Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 sudah berhasil melebihi target yang ditetapkan. keberhasilan dalam mencapai target ini didukung dengan:

1. Pelaksanaan audit berbasis risiko dan audit tujuan tertentu pada Unit Kerja yang terkait dalam Pengaduan
2. Peluncuran aplikasi “sang integritas” yang mewadahi dalam pelaporan pengaduan, gratifikasi, dan benturan kepentingan sehingga pencatatan laporan lebih cepat sehingga dapat langsung ditindaklanjuti oleh APIP.
3. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan
4. Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan whistleblowing system pada media sosial.

Hasil dari evaluasi pada indikator ”Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Stagnan’’** yaitu Perkembangan kinerja cenderung sedikit meningkat dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Indikator ini berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu merupakan indikator yang mengukur core teknis atau tugas dan fungsi pengawasan intern Inspektorat Utama. Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya. Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. *Continuous improvement* sarana pengaduan agar lebih optimal;
2. Melakukan *public campaign* dan mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait;
3. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan
4. Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* pada media sosial.

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024, sehingga target pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 231 target indikator "Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu" pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

IKSK.13 Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Analisis Tren

Tabel 232 Kertas Kerja analisis tren IKSK.13 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu		-	-	92%	87,91%	93%	95,93%	94%	100%	97,57%	100%	0,00	Stagnan	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator ini memiliki perkembangan kinerja kategori stagnan. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan kinerja yang cenderung sedikit meningkat dari tahun pertama hingga akhir periode. Pemanfaatan teknologi dalam melakukan telaah dan penelusuran menjadi salah satu penunjang dalam menyelesaikan konsultasi.

Analisis Gap

Tabel 233 Kertas Kerja analisis gap IKSK.13 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.6	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	3	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase	-	-	92%	87,91%	93%	95,93%	94%	100%	97,57%	100%	102,49	Tercapai	Inspektorat II	Realisasi kinerja selama tahun pertama hingga akhir periode renstra selalu mencapai target dan mencapai kategori "Tercapai"

Hasil Evaluasi

Capaian Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 sudah berhasil melebihi target yang ditetapkan. **keberhasilan dalam mencapai target ini** didukung oleh komitmen APIP dalam menjawab pertanyaan konsultansi yang masuk dengan tepat waktu. Proses menjawab pertanyaan melalui aplikasi SOLUSI dilakukan dengan review berjenjang yang melibatkan anggota, ketua tim, sampai dengan pengendali teknis. Dengan demikian, diharapkan setiap jawaban yang diberikan diharap sudah mampu memberikan kepuasan bagi mitra pengawasan yang mengajukan pertanyaan. Kegiatan yang mendukung dalam mencapai target adalah:

1. Rapat koordinasi terkait aplikasi, untuk *continuous improvement.*
2. Pengembangan aplikasi sarana konsultasi.
3. Pemantauan dan monitoring terhadap pertanyaan konsultansi yang masuk.

Sebagai informasi, pada indikator ini telah dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 karena realisasi kinerja di tahun sebelumnya sudah mencapai target akhir periode renstra. Hasil dari evaluasi pada indikator ”Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024

masuk dalam kategori **‘Stagnan’’** yaitu Perkembangan kinerja cenderung sedikit meningkat dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Indikator ini berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu merupakan indikator yang mengukur core teknis atau fungsi consultance Inspektorat Utama. Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya. Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat rekomendasi terhadap indikator yaitu melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah. Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2021-2024, sehingga target pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 234 target indikator “Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu” pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

5.2.7 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 7 (SK.7) Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif

Sasaran Kegiatan 7 (SK.7) Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif, didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.7 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.14 Indeks RB Inspektorat II

Analisis Tren

Tabel 235 Kertas Kerja analisis tren IKSK.14 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II		91,00	86,16	84,10	84,14	85,10	91,77	86,1	84,25	86,7	83,80	-476,25	Menurun	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator ini memiliki perkembangan kinerja kategori Menurun. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan kinerja yang cenderung menurun dan belum berhasil mencapai target di akhir periode renstra

Analisis Gap

Tabel 236 Kertas Kerja analisis gap IKSK.14 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.7	Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif	1	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II	Nilai	91,00	86,16	84,10	84,14	85,10	91,77	86,1	84,25	86,7	83,80	96,66	Tidak Tercapai	Inspektorat II	Realisasi kinerja selama tahun pertama hingga akhir periode renstra mengalami fluktuatif namun di akhir periode renstra belum berhasil mencapai target dan masuk pada kategori "Tidak Tercapai"

Hasil Evaluasi

Capaian Indeks RB Inspektorat II pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami realisasi kinerja yang fluktuatif dan belum berhasil melebihi target yang ditetapkan pada akhir periode renstra. Sebagai informasi, pada indikator ini telah dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 karena realisasi kinerja di tahun sebelumnya sudah mencapai target akhir periode renstra. Hasil dari evaluasi pada indikator "Indeks RB Inspektorat II" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori 'Menurun' yaitu Perkembangan kinerja cenderung menurun dan belum berhasil mencapai target akhir periode renstra serta masuk dalam kategori "Tidak Tercapai".

Rekomendasi

Indeks RB Inspektorat II merupakan indikator wajib yang mendukung langsung reformasi birokrasi di lingkup BPOM, Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya. Memperhatikan tidak tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat rekomendasi terhadap indikator yaitu menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ZI pada tahun 2024 serta menyusun target pada periode selanjutnya berdasarkan realisasi kinerja pada tahun 2020-2024. Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 indeks

RB Inspektorat II dilakukan penyesuaian nomenklatur menjadi "Nilai Pembangunan Zona Integritas di lingkup Inspektorat II serta menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024, sehingga target pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 237 target indikator "Nilai Pembangunan Zona Integritas di lingkup Inspektorat II" pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Pembangunan Zona Integritas di lingkup Inspektorat II	86,08	86,16	86,25	86,34	86,42

IKSK.15 Level kapabilitas APIP

Analisis Tren

Tabel 238 Kertas Kerja analisis tren IKSK.15 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif	Nilai Evaluasi kapabilitas APIP		3,4	3	3	3	4	3	4	3,53	3,6	3,77	125,89	Meingkat (On the Track)	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator ini memiliki perkembangan kinerja dengan kategori meningkat on the track. Hal ini terlihat dari perkembangan kinerja yang cenderung meningkat dan berhasil mencapai target sampai pada akhir periode renstra.

Analisis Gap

Tabel 239 Kertas Kerja analisis gap IKSK.15 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.7	Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif	2	Nilai Evaluasi kapabilitas APIP	Nilai	3,4	3	3	3	4	3	4	3,53	3,6	3,77	104,72	Tercapai	Inspektorat II	Realisasi kinerja selama tahun pertama hingga akhir periode renstra menunjukkan peningkatan dan pada akhir periode renstra mencapai target dengan kategori "Tercapai"

Hasil Evaluasi

Level kapabilitas APIP pada tahun 2020 sampai dengan 2024 memiliki realisasi kinerja yang cenderung meningkat dan berhasil melebihi target yang ditetapkan. **keberhasilan dalam mencapai target ini** didukung dengan:

1. Perbaikan di setiap elemen dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi di tahun 2023
2. Menetapkan Program Pengembangan Dan Penjaminan Kualitas Di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan dengan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.02.02.7.04.24.15 Tahun 2024 tentang Program Pengembangan Dan Penjaminan Kualitas Di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Sebagai informasi, di tahun 2024 indikator “Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP” telah dilakukan Penyesuaian nomenklatur dan target. penyesuaian nomenklatur dilakukan menggunakan nilai karena adanya Adanya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mencantumkan skor/nilai pada hasil evaluasi

Kapabilitas APIP. Sehingga indikator dapat terukur dengan lebih jelas dengan menggunakan nilai/skor. Penentuan target dilakukan menggunakan baseline hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2023 dengan skor 3,53. Penyesuaian target dilakukan semula 4 menjadi 3,6.

Hasil dari evaluasi pada indikator ”Nilai evaluasi kapabilitas APIP” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘Meningkat on the track’’** yaitu Perkembangan kinerja cenderung meningkat dari tahun pertama sampai tahun terakhir serta Indikator ini berhasil mencapai target akhir periode renstra dan memperoleh kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP merupakan indikator yang menggambarkan langsung kapabilitas APIP di BPOM Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya. Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Memonitoring rencana tindak lanjut hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2024
2. *Continuous improvement* elemen kapabilitas APIP yang bisa ditingkatkan ke level 4
3. Meningkatkan pengembangan kompetensi APIP.

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024, sehingga target pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 240 target indikator “Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP” pada tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,90	4,00	4,20	4,30	4,50

IKSK.16 Nilai Pengelolaan Kearsipan

Analisis Tren

Tabel 241 Kertas Kerja analisis tren IKSK.16 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif	Nilai Pengelolaan Kearsipan		-	-	-	-	-	-	-	-	97,69	100	Indikator Baru	Belum dapat disimpulkan	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator baru di tahun 2024 dan perkembangan kinerja belum dapat disimpulkan karena belum ditemukan pola kecenderungan

Analisis Gap

Tabel 242 Kertas Kerja analisis gap IKSK.16 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.7	Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif	3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	97,69	100	104,40	Tercapai	Inspektorat II	Indikator baru pada tahun 2024, dan berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dengan kategori "Tercapai"

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja “Nilai Pengelolaan Kearsipan” merupakan indikator baru pada lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 yang merupakan direktif penugasan dari Biro Umum. Pada tahun 2024, realisasi kinerja berhasil mencapai target. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai realisasi indikator ini adalah:

1. Melakukan penciptaan arsip melalui aplikasi SRIKANDI dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan POM;
2. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi yang memuat klasifikasi keamanan akses berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Badan POM;
3. Memberkaskan arsip aktif berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan POM serta melaporkan daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan ke Unit Kearsipan;
4. Memperbarui daftar arsip vital Inspektorat Utama setiap tahunnya;
5. Melakukan penyusutan arsip berupa pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan secara rutin (maksimal 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun) berdasarkan jadwal retensi arsip;
6. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kearsipan bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip;
7. Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan ketentuan

Hasil dari evaluasi pada indikator “Nilai pengelolaan kearsipan” berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **‘’belum dapat disimpulkan’’** karena perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan dan masuk dalam kategori **‘’Tercapai’’.**

Rekomendasi

Indikator ini merupakan direktif penugasan dari Biro Umum dalam mencapai RB tematik, sehingga di Rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 kurang relevan untuk dilanjutkan dengan catatan direktif penugasan cukup dimasukkan pada penilaian SKP. Untuk mencapai target dari penugasan direktif tersebut dapat dilakukan kegiatan yang dilakukan di atas.

5.2.8 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 8 (SK.8) Terwujudnya SDM Inspektorat II yang berkinerja optimal

Sasaran Kegiatan 8 (SK.8) Terwujudnya SDM Inspektorat II yang berkinerja optimal, didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.8 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.17 Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat II

Analisis Tren

Tabel 243 Kertas Kerja analisis tren IKSK.17 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Terwujudnya SDM Inspektorat II yang berkinerja	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat II		85,00	85,60	84,28	85,74	86,00	85,67	86,25	94,18	94,84	87,94	26,06	Meningkat (Moderat)	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator memiliki perkembangan kinerja **Meningkat Moderat** yakni perkembangan kinerja cenderung meningkat namun belum berhasil mencapai target pada akhir periode renstra

Analisis Gap

Tabel 2 Kertas Kerja analisis gap IKSK.17 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.8	Terwujudnya SDM Inspektorat II yang berkinerja	1	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat II	Nilai	85,00	85,60	84,28	85,74	86,00	85,67	86,25	94,18	94,84	87,94	92,62	Tidak Tercapai	Inspektorat II	Realisasi kinerja selama tahun pertama hingga akhir periode renstra mengalami fluktuatif namun di akhir periode renstra belum berhasil mencapai target dan masuk pada kategori "Tidak Tercapai"

Hasil Evaluasi

Indikator kinerja "indeks profesionalitas ASN Inspektorat II" memiliki realisasi kinerja yang fluktuatif. Di tahun 2024 indikator ini mengalami penyesuaian target yang diberikan oleh Biro SDM. Sebagai informasi, indikator ini mengalamu perubahan tools penilaian pada tahun berjalan 2024, sehingga realisasi kinerja belum dapat mencapai target. Meskipun belum berhasil mencapai target, upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator ini yaitu kegiatan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN Inspektorat Utama.

Hasil dari evaluasi pada indikator "indeks profesionalitas ASN Inspektorat II" berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **'Meningkat (Moderat)** karena perkembangan kinerja cenderung meningkat namun belum berhasil mencapai target pada akhir periode renstra dan masuk dalam kategori **''Tidak Tercapai''.**

Rekomendasi

Pada perubahan road map Reformasi Birokrasi, pengukuran dalam bidang SDM digantikan dengan Sistem Merit - Manajemen Talenta (Talent Scouting), sehingga pada rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029, IP ASN indikator ini sudah tidak relevan untuk dilanjutkan. Meskipun sudah tidak relevan, namun kegiatan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN Inspektorat II tetaplah menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

5.2.9 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 9 (SK.9) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat II

optimal

Sasaran Kegiatan 9 (SK.9) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat II, didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.9 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.18 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal

Analisis Tren

Tabel 244 Kertas Kerja analisis tren IKSK.19 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat II	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal		1,51	0,00	2	1	2,25	3	2,5	3	3	3	165,53	Meningkat (On The Track)	Mendukung Reformasi Birokrasi BPOM	Indikator "Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal" memiliki perkembangan kinerja yang meningkat atau on the track. hal ini dilihat dari perkembangan kinerja yang cenderung meningkat dan mampu mencapai target akhir periode renstra.

Analisis Gap

Tabel 245 Kertas Kerja analisis gap IKSK.18 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat II	1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	Nilai	1,51	0,00	2	1	2,25	3	2,5	3	3	3	100	Tercapai	Inspektorat II	Realisasi kinerja indikator mengalami peningkatan sampai pada akhir periode renstra dan berhasil mencapai target dengan kategori "Tercapai"

Hasil Evaluasi

Indikator "Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat II yang optimal" memiliki perkembangan kinerja yang meningkat atau on the track. Realisasi kinerja ini mengalami peningkatan dari tahun pertama hingga akhir periode renstra. Peningkatan ini dilakukan dengan upaya:

1. Penunjukkan *person in charge* (PIC) di masing-masing unit satuan kerja di lingkungan Inspektorat Utama untuk melakukan pemutakhiran data yang rutin per bulan, dan melakukan pemantauan bulanan;
2. Melakukan sosialisasi berkala tentang penggunaan e-mail corporate Badan BPOM di lingkungan Inspektorat Utama;
3. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak memanfaatkan *email corporate*

Rekomendasi

Berdasarkan informasi dari tim Pusat data dan informasi, bahwa indikator "Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal" tidak dilanjutkan pada periode renstra selanjutnya. Sehingga pada rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029, indikator ini tidak dilanjutkan.

5.2.10 Evaluasi akhir pada Sasaran Kegiatan 10 (SK.10) Terkelolanya Keuangan Inspektorat II secara Akuntabel

Sasaran Kegiatan 10 (SK.10) Terkelolanya Keuangan Inspektorat II secara Akuntabel, didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Evaluasi akhir pada SK.10 dapat dilihat sebagai berikut:

IKSK.19 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II

Analisis Tren

Tabel 246 Kertas Kerja analisis tren IKSK.19 Tahun 2020-2024

No Kode	SK	IKSK	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keselarasan RPJMN	Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
1	Terkelolanya Keuangan Inspektorat II secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II		88,00%	75,00%	89%	75%	90,00%	100,00%	91%	100%	92%	100%	192,06	Meningkat (On The Track)	Mendukung Nilai Kinerja Anggaran BPOM	Indikator "Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal" memiliki perkembangan kinerja yang meningkat atau on the track. hal ini dilihat dari perkembangan kinerja yang cenderung meningkat dan mampu mencapai target akhir periode renstra.

Analisis Gap

Tabel 2 Kertas Kerja analisis gap IKSK.19 Tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat II secara Akuntabel	1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	Persentase	88,00%	75,00%	89%	75%	90,00%	100,00%	91%	100%	92%	100%	108,70	Tercapai	Inspektorat II	Realisasi kinerja indikator mengalami peningkatan sampai pada akhir periode renstra dan berhasil mencapai target dengan kategori "Tercapai"

Hasil Evaluasi

Indikator " Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II " memiliki perkembangan kinerja yang meningkat atau on the track. Sebagai informasi, indikator ini telah mengalami penyesuaian target pada tahun 2024 karena adanya perubahan tools penilaian baik pada IKPA maupun EKA. Realisasi kinerja indikator ini sepanjang tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif karena terdampak penyesuaian tools yang selalu berubah di tiap tahunnya. Namun Inspektorat II tetap berkomitmen mewujudkan terkelolanya keuangan Inspektorat II secara akuntabel dengan mencapai target pada akhir periode renstra.Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai realisasi indikator ini adalah:

1. Revisi pergeseran anggaran pada DIPA dan revisi rencana penarikan dana pada halaman III DIPA;
2. Inspektorat Utama melakukan *Automatic Adjustment* sebesar sebesar Rp 999.793.000 berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.01.2.21.01.24.10 tentang Revisi *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024;dan
3. Inspektorat Utama melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp 816.301.000 berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor PR.05.03.2.11.24.34 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Badan POM TA 2024, serta Menindaklanjuti Surat

Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Tanggal 7 November 2024 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024.

Hasil dari evaluasi pada indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II berdasarkan analisis tren dan analisis gap di akhir periode renstra 2020-2024 masuk dalam kategori **"Meningkat (On The Track)"** karena perkembangan kinerja cenderung menurun, namun meskipun menurun realisasi kinerja di tahun 2024 berhasil mencapai target akhir tahun dan masuk dalam kategori **''Tercapai''.**

Rekomendasi

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II meruppakan indikator yang masuk dalam penilaian RB General BPOM, Sehingga indikator ini masih sangat relevan untuk dilanjutkan pada periode rencana strategis Inspektorat Utama selanjutnya dengan catatan dalam penentuan target agar dipertimbangkan realisasi kinerja tahun 2020-2024. Memperhatikan tercapainya target pada akhir periode renstra, terdapat beberapa rekomendasi terhadap indikator:

1. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L;
2. Melakukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA secara triwulanan sesuai dengan reviu kebutuhan pencairan anggaran Inspektorat Utama dan menjaga akurasi dan tetap menjaga konsistensi realisasi anggaran dengan RPD Halaman III DIPA dengan batas toleransi deviasi tidak lebih dari 5%;
3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap triwulan sesuai dengan jenis belanja berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun;dan
4. Inspektorat II melakukan penambahan Rincian Output berupa Layanan BMN untuk menunjang indikator efisiensi berupa penggunaan dan efisiendsi Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;

Pada rancangan renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 menyusun target berdasarkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2024, sehingga target pada tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 247 target Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II 2025-2029

Indikator Kinerja	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100	100	100	100	100

Evaluasi Indikator Inspektorat II yang sudah tidak relevan sampai akhir periode Tahun 2020-2024

Analisis Tren

Tabel 248 Kertas kerja Analisis tren terhadap indikator Inspektorat II yang sudah tidak relevan periode tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024				
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori	
SK.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan		6,43	6,35	5,98	5,98	6,02	5,67	6,06	Tidak dapat dihitung karena adanya perubahan road map RB menjadi RB General dan tematik	Digantikan dengan indikator baru yang relevan, yakni "Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas" dan "Nilai Survei Penilaian Integritas"			Belum dapat disimpulkan	Indikator sudah tidak relevan, sehingga perkembangan kinerja belum dapat disimpulkan karena belum muncul pola kecenderungan
SK.5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Nilai Peer Review terhadap Pengawasan Intern		75,00	74,99	75,00	74,99	IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun		IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun		Di Tahun 2024 sudah dilaksanakan TSE oleh Itjen Kemen ATR BPN dengan nilai 82,73			Belum dapat disimpulkan	Indikator sudah tidak relevan, sehingga perkembangan kinerja belum dapat disimpulkan karena belum muncul pola kecenderungan

INSPEKTORAT UTAMA

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024				
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori	
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II		100,00	100,00	100,00	71,50	96,89	93,98	79%	80,89%				Belum dapat disimpulkan	Tidak dilanjutkan sampai akhir periode renstra karena sudah tidak relevan terhadap perubahan road map RB BPOM
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti		100,00	26,67	100,00	100	75%	24,27%	82%	84,24%				Belum dapat disimpulkan	Tidak dilanjutkan sampai akhir periode renstra karena sudah tidak relevan terhadap perubahan road map RB BPOM
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti						85%	95,65%	90%	100%				Belum dapat disimpulkan	Indikator dipindahkan kepada Biro Hukum dan Organisasi

INSPEKTORAT UTAMA

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA		Keterangan
				2020		2021		2022		2023		2024				
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori	
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti (Persen)		100,00	100,00										Belum dapat disimpulkan	Tidak dilanjutkan sampai akhir periode renstra karena sudah tidak relevan
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi survei integritas organisasi dan jabatan yang ditindaklanjuti unit kerja		88,00	80,87										Belum dapat disimpulkan	Tidak dilanjutkan sampai akhir periode renstra karena sudah tidak relevan

Analisis Gap

Tabel 249 Kertas kerja Analisis gap terhadap indikator Inspektorat II yang sudah tidak relevan periode tahun 2020-2024

No. Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SK.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	Nilai	6,43	6,35	5,98	5,98	6,02	5,67	6,06	Tidak dapat dihitung karena adanya perubahan road map RB menjadi RB General dan tematik	Digantikan dengan indikator baru yang relevan, yakni "Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas" dan "Nilai Survei Penilaian Integritas"		***	Belum dapat disimpulkan	Inspektorat II	Indikator sudah tidak relevan, sehingga digantikan dengan indikator baru yang relevan, yakni "Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas" dan "Nilai Survei Penilaian Integritas"
SK.5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Nilai Peer Review terhadap Pengawasan Intern	Nilai	75,00	74,99	75,00	74,99	IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun		IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun		Di Tahun 2024 sudah dilaksanakan TSE oleh Itjen Kemen ATR BPN dengan nilai 82,73		***	Belum dapat disimpulkan	Inspektorat II	Indikator sudah dimasukkan pada inisiatif strategis

INSPEKTORAT UTAMA

No. Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II	Persentase	100,00	100,00	100,00	71,50	96,89	93,98	79%	80,89%			***	Belum dapat disimpulkan	Inspektorat II	Indikator sudah tidak relevan seiring dengan perubahan road map Reformasi Birokrasi
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	26,67	100,00	100	75%	24,27%	82%	84,24%			***	Belum dapat disimpulkan	Inspektorat II	Indikator sudah tidak relevan seiring dengan perubahan road map Reformasi Birokrasi
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	Persentase					85%	95,65%	90%	100%			***	Belum dapat disimpulkan	Inspektorat II	Indikator sudah dipindahkan ke Biro Hukum dan Organisasi

INSPEKTORAT UTAMA

No. Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Nilai	Kategori		
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti (Persen)	Persentase	100,00	100,00									***	Belum dapat disimpulkan	Inspektorat II	Indikator sudah tidak relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode renstra
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi survei integritas organisasi dan jabatan yang ditindaklanjuti unit kerja	Persentase	88,00	80,87									***	Belum dapat disimpulkan	Inspektorat II	Indikator sudah tidak relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode renstra

Hasil Evaluasi dan Rekomendasi

No. Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
SK.1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 membuat RB Penguatan Pengawasan sudah tidak relevan untuk dilanjutkan sampai ke akhir periode renstra	Fokus pada indikator pengganti yang lebih relevan menunjang RB BPOM pada lingkup Ittama
SK.5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Nilai Peer Review terhadap Pengawasan Intern	Pelaksanaan peer review atau telaah sejawat dilakukan tidak setiap tahun sehingga lebih relevan untuk dimasukan pada inisiatif strategis	Tetap dilakukan penilaian telaah sejawat meskipun bukan menjadi indikator kinerja utama
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II	Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 membuat RB Penguatan Pengawasan sudah tidak relevan untuk dilanjutkan sampai ke akhir periode renstra	Fokus pada indikator pengganti yang lebih relevan menunjang RB BPOM pada lingkup Ittama

No. Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 membuat RB Penguatan Pengawasan sudah tidak relevan untuk dilanjutkan sampai ke akhir periode renstra	Fokus pada indikator pengganti yang lebih relevan menunjang RB BPOM pada lingkup Ittama
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	Sehubungan dengan telah terbentuknya Kelompok Substansi Pengembangan Pelayanan Publik pada Biro Hukum dan Organisasi, maka pelaksanaan pengukuran IKM di lingkungan BPOM secara langsung terkait dengan tugas dan fungsi Kelompok Substansi Pengembangan Pelayanan Publik.	Fokus pada indikator pengganti yang lebih relevan menunjang RB BPOM pada lingkup Ittama
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti (Persen)	Indikator sudah tidak dilakukan dan lebih fokus pada TL hasil pengawasan intern APIP dan BPK	Fokus pada indikator TL BPK dan APIP
SK.6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi survei integritas organisasi dan jabatan yang ditindaklanjuti unit kerja	Indikator sudah tidak dapat diukur karena tools penilaian sudah berubah	Fokus pada indikator pengganti yang lebih relevan menunjang RB BPOM pada lingkup Ittama

BRANDING PENGAWASAN



6.1 INOVASI PENGAWASAN (APLIKASI)
6.2 *SHARING KNOWLEDGE*
6.3 WEBINAR
6.4 SEMINAR
6.5 PENGHARGAAN
6.6 LAIN-LAIN

BAB 06

6.1 INOVASI PENGAWASAN (APLIKASI)

Inspektorat Utama BPOM memiliki aplikasi demi menunjang sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Aplikasi tersebut diantaranya:

1. **SAPA APIP (Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)**

   Peran Inspektorat Utama sebagai pengawasan intern semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Inspektorat Utama diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menciptakan nilai tambah pada layanan instansi pemerintah dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Pengawasan intern menghadapi tantangan berupa peningkatan pengawasan obat dan makanan dan pelayanan publik Badan POM secara daring untuk memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

   Perkembangan pengawasan Badan POM berbasis digital menuntut cara untuk melaksanakan pengawasan intern turut berubah. Penerapkan *e-governance* dalam pengawasan intern merupakan keniscayaan. Disisi lain, penambahan jumlah Satuan Kerja Badan POM yang menjadi mitra kerja pengawasan Inspektorat Utama tidak diimbangi dengan penambahan jumlah auditor Inspektorat Utama.

   Sebagai salah satu upaya transformasi Inspektorat Utama menjadi *Trusted Advisor* peran Inspektorat Utama dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan pengawasan Intern. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui pengembangan SAPA APIP (https://sapaapip.pom.go.id/admin/login) dan integrasinya dengan Badan POM *Operation Center* akan menghasilkan pengawasan intern yang lebih mudah, lebih efisien dan lebih efektif dan penyediaan data/informasi kinerja dan integritas aparatur secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel (*real time*).

2. **SOLUSI (Saluran *Online* Layanan untuk Konsultasi)**

   SOLUSI (https://solusi.pom.go.id/) atau Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi merupakan media layanan konsultasi yang dikembangkan

dalam rangka pemenuhan peran Inspektorat Utama sebagai "*Trusted Advisor*".

SOLUSI merupakan salah satu bentuk pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada aspek pengawasan lainnya berupa layanan konsultasi secara *daring*.

Melalui Pengembangan SOLUSI diharapkan Inspektorat Utama menyediakan kanal informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan POM.

Manfaat dari aplikasi SOLUSI yaitu:

a. Menyediakan kanal / saluran komunikasi yang kredible, komprehensif, aman, up to date dan informatif yang mudah diakses oleh Aparatur Sipil Negara Badan POM;
b. Kanal sharing knowledge di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, pengendalian intern dan pelaksanaan anggaran belanja negara.

3. *INSPIRING AUDIT* (Inspektorat *Managing and Monitoring Audit System*)

Inspektorat Utama BPOM telah meluncurkan aplikasi *Inspiring Audit* yang merupakan resensi dari modul PKPT dan modul Diklat Pegawai Inspektorat Utama BPOM.

Pada modul PKPT terdapat menu program pengawasan tahunan dimulai dari PKPT hingga pelaporan, sedangkan pada modul Diklat Pegawai, pegawai Inspektorat Utama BPOM dapat melihat serta mendownload rekap diklat yang telah diikuti.

Terdapat pengembangan pada aplikasi *Inspiring Audit,* diantaranya:

a. Dashboard Inspiring Audit

Pada pengembangan *dashboard* terdapat penambahan *chart* yang menampilkan data pegawai sebagai Visualisasi Data. *Chart* yang ditampilkan yaitu Gender Pegawai, Generasi Pegawai, Agama Pegawai, Pendidikan Pegawai, Golongan Pegawai, dan Jabatan Pegawai.

b. Penambahan sub-Modul "Peta Pembelajaran JFA melalui Pelatihan" pada Modul Diklat Pegawai

   Pada modul Diklat Pegawai terdapat penambahan sub-Modul "Peta Pembelajaran JFA melalui Pelatihan" berupa acuan terkait peta pembelajaran untuk pegawai meningkatkan kompetensi. Pada penambahan ini disediakan 2 (dua) tampilan beserta batasan aksesnya untuk admin dan non-admin. Terdapat tampilan (*User Interface*) untuk akun admin dan akun non-admin, dimana pada akun admin dapat mengatur, mnghapus, dan mengedit *template* Peta Pembelajaran JFA tersebut.

c. Hasil Fitur *Export* Excel pada "Peta Pembelajaran JFA Melalui Pelatihan"

   Pada sub-Modul "Peta Pembelajaran JFA melalui Pelatihan" terdapat fitur "*Export* Excel" yang berfungsi untuk mencetak *template* yang telah dibuat oleh admin dalam format excel (.xlsx).

   Selain itu, *user* dapat memilih data apa yang ingin di export ke dalam format excel. Pilihan tersebut yaitu Pegawai Unit yang dipilih atau semua pegawai dan Role Pegawai yang dipilih atau tanpa role pegawai. File excel dari fitur export excel sesuai *query* yang diinginkan oleh pengguna pada sub-modul Peta Pembelajaran JFA. Hasil excel menunjukkan beberapa sheet yang berisi nama-nama dan data pegawai yang dipilih (Unit kerja Semua Pegawai dengan Role Pengendali Teknis).

d. Hasil Fitur *Export* PDF pada "Peta Pembelajaran JFA Melalui Pelatihan"

   Pada sub-Modul "Peta Pembelajaran JFA melalui Pelatihan" terdapat fitur "*Export* PDF" yang berfungsi untuk mencetak *template* yang telah dibuat oleh admin dalam format *Portable Document Format* (.PDF).

e. Perbaikan Desain Hasil Fitur *Export* PDF Pada Halaman *Dynamic* Diklat

   Pada sub-Modul "Peta Pembelajaran JFA melalui Pelatihan" terdapat fitur "*Export* PDF" yang berfungsi untuk mencetak *template* yang telah dibuat oleh admin dalam format *Portable Document Format* (.PDF).

Pada pengembangan per Juni 2024 hasil *export* Pdf di desain ulang untuk warna tabelnya.

Dan pada sub-Modul "Diklat Pegawai per Klasifikasi Diklat" terdapat fitur "*Export* Excel" yang berfungsi untuk mencetak arsip Diklat Pegawai sesuai klasifikasi yang telah diinput oleh admin dalam format excel (.xlsx). Pada pengembangan per Juni 2024 ini hasil *export* Excel di desain ulang untuk warna tabelnya.

f. Perbaikan Desain Hasil Fitur *Export* PDF Pada Halaman Filter Diklat Perorangan

   Pada sub-Modul "Filter Diklat Perorangan" terdapat fitur "*Export* PDF" yang berfungsi untuk mencetak arsip Diklat Pegawai sesuai data diklat pegawai yang di inginkan yang telah diinput oleh admin dalam format *Portable Document Format* (.PDF). Pada pengembangan per Juni 2024 hasil *export* Pdf di desain ulang untuk warna tabelnya.

g. Perbaikan *Bug*/Temuan pada ketika Data *Query* Unit dan *Role* yang di pilih pengguna untuk *export* excel sub-modul peta pembelajaran JFA Perorangan Kosong

   Bug tersebut muncul karena belum terdapat kondisi/*logic* pada *hardcode*. Kemudian setelah diberikan kondisi/*logic* untuk penanganan *bug*/temuan tersebut maka menampilkan sub-modul Peta Pembelajaran JFA Perorangan

h. Membuat Alert pada Sub-Modul *Add/Edit* Data Diklat

   Alert yang akan muncul ketika pengguna berhasil menambahkan data diklat, berhasil mengedit, dan berhasil menghapus data diklat.

i. Fitur *Edit Pop Up* Pada Sub-Modul Peta Pembelajaran JFA

   Merupakan *fitur edit* pada sub-modul Peta Pembelajaran JFA. *Fitur edit* tersebut berbentuk *pop up* dan akan tampil ketika *icon* pensil di klik. Adapun data yang dapat di edit yaitu Judul Pengembangan Kompetensi (*text*), Keterangan (*free text*), Klasifikasi Diklat Untuk Keterangan "Sudah" (*dropdown selection* klasifikasi diklat), Sub Klasifikasi Diklat Untuk Keterangan "Sudah" (*dropdown selection* sub klasifikasi diklat), Klasifikasi Diklat Untuk Keterangan "Sudah Mengikuti, tetapi Belum Lulus" (*dropdown selection* klasifikasi diklat),

dan Sub Klasifikasi Diklat Untuk Keterangan "Sudah Mengikuti, tetapi Belum Lulus" (*dropdown selection* sub klasifikasi diklat).

j. Alert Untuk *Filter Export Excel* dan PDF Jika Data yang Ingin Di-*Export* Terlalu Besar Pada Sub-Modul *Filter* Diklat Perorangan
Merupakan alert yang akan muncul ketika data yang ingin di-*export* ke format .pdf terlalu besar dengan pesan alert "Data yang dimuat terlalu besar. Mohon masukkan filter unit/role/tahun. Apabila membutuhkan seluruh data mohon menggunakan *export excel*".

4. SANG INTEGRITAS

Sang Integritas atau Sistem Informasi Benturan Kepentingan, *Whistleblowing System* dan Gratifikasi (https://sangintegritas.pom.go.id/) merupakan aplikasi berbasis *web* hasil pembaharuan atas aspek kemudahan *tracking* dan pelaporan dari layanan sebelumnya (rb.pom.go.id) dan sistem layanan ini mengakomodir 3 (tiga) fitur pelaporan yaitu Pelaporan WBS, Benturan Kepentingan, dan Gratifikasi.

5. ATRAKSI BMN

Atraksi BMN merupakan salah satu inovasi dengan dasar atas isu-isu yang ada pada Inspektorat Utama BPOM yaitu: belum diketahui identitas (jenis/type, tahun/nilai perolehan, letak barang maupun kondisi) BMN; belum terinformasi kepada publik atau pihak manapun yang membutuhkan daftar inventaris barang yang termutakhir; risiko pencatatan BMN yang fisiknya telah rusak berat namun masih tercatat dalam kondisi baik; belum terkelolanya pengendalian dalam pengawasan BMN yang sudah diregister di satker Inspektorat Utama; belum efektifnya pergantian dokumen dalam pembaharuan data dukung hasil pemindai barang. Dari isu-isu tersebut, Inspektorat Utama BPOM membuat inovasi Digitalisasi dengan Atrakasi (*Asset Tracking System* Inspektorat Utama) dengan beberapa *tools* seperti *google drive*; QR Code; dan Aplikasi QR Code berbasis Apps Android maupun Apps IOS di Smartphone.

6.2 *SHARING KNOWLEDGE*

Pada tahun 2024, Inspektorat Utama tercatat telah menerima kunjungan dari berbagai K/L diantaranya:

a. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Inspektorat LAN berkunjung ke Inspektorat Utama BPOM dalam rangka Studi Banding Sistem Aplikasi Pengawasan Intern di Inspektorat Utama BPOM.

Disambut oleh Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, Bapak Ali Yudhi menyampaikan peranan Inspektorat Utama sebagai trusted advisor, yaitu menjadi mitra pengawasan bagi unit-unit di dalam organisasi. Bapak Ali Yudhi juga menjelaskan berbagai jenis digitalisasi pengawasan intern yang ada pada Inspektorat Utama BPOM, fungsi, serta manfaatnya.

Harapannya studi banding dari Inspektorat LAN dapat menjadi salah satu bentuk kerjasama antara Badan POM dengan LAN, dan akan ada banyak lagi bentuk kerjasama lainnya



Gambar 15 Dokumentasi Kunjungan Lembaga Administrasi Negara (LAN)

b. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Inspektorat Badan Narkotika Nasional (BNN) berkunjung ke Inspektorat Utama BPOM dalam rangka Knowledge Sharing pelaksanaan Audit SPBE di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pada paparan Bapak Inspektur I menyampaikan bahwa BPOM memperoleh Indeks SPBE sebesar 4,08 (Predikat Sangat Baik) meningkat 0,96 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 3,12 (Predikat Baik) serta BPOM telah melaksanakan audit internal Infrastruktur dan Aplikasi SPBE pada Tahun 2023 sesuai tools/kriteria terbaru dari webaudit BRIN.

Upaya-upaya yang dilakukan BPOM dalam meningkatkan indeks SPBE khususnya terkait pelaksanaan audit internal SPBE dengan peningkatan kompetensi auditor melalui diklat TIK, pelatihan audit infrastruktur dan aplikasi SPBE yang diselenggarakan oleh BRIN dan mengundang BRIN dan BSSN untuk memperoleh informasi yang memadai sehingga dapat melaksanakan kegiatan Audit SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diakhir, Bapak Inspektur I berharap sharing knowledge ini dapat memberikan dampak yang positif bagi penerapan dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



Gambar 16 Dokumentasi Kunjungan BNN

c. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkunjung ke Inspektorat

Utama BPOM dalam rangka Studi Banding Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Manajemen Risiko di Lingkungan Inspektorat BPOM.

Pada paparan Bapak Inspektur I menyampaikan bahwa dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko, Inspektorat Utama melakukan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Unit Kerja terkait untuk memperoleh gambaran mengenai progres, hambatan atau kendala terhadap pemenuhan data tindak lanjut, serta menjaga agar target kinerja penyelesaian tindak lanjut dapat tetap tercapai. Untuk itu, kami terus berupaya rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan efektif dan efisien.

Adapun data capaian kinerja monev tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang telah sesuai rekomendasi per semester II Tahun 2023 adalah 94,65%. Sedangkan data capaian kinerja monev tindak lanjut hasil pengawasan intern Inspektorat Utama per tanggal 06 Agustus 2024 adalah 96,39%.

Diakhir, Bapak Inspektur I berharap kegiatan studi banding ini dapat berjalan lancar dan produktif serta memberi manfaat nyata dalam peningkatan integritas dan independensi pengawasan intern.



Gambar 17 Dokumentasi Kunjungan LKPP

d. Kementerian Ketenagakerjaan

Pada hari Senin, 7 Oktober 2024, Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan kunjungan ke Inspektorat Utama dalam rangka Benchmarking terkait peran Inspektorat Utama dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPOM. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bapak Ayi Nasrudin, S.Sos., M.M, Bapak Fanina Nur Widianto, S.T., M.Sc, Ibu Heru Utami, S.Pd., M.M, dan tim dari PPSDM Kementerian Ketenagkerjaan, Inspektur Utama memaparkan terkait berbagai upaya pembenahan dan perbaikan berkelanjutan dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPOM. Pada kesempatan ini juga turut diundang Unit Kerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan sebagai contoh praktik baik dalam membangun ZI hingga mendapatkan predikat WBBM.



Gambar 18 Dokumentasi Kunjungan Kementerian Ketenagakerjaan

e. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Pada tanggal 17 Desember 2024, Inspektorat Utama BPOM menerima studi banding dari Inspektorat Badan Informasi Geospasial (BIG). Kegiatan ini dibuka oleh Inspektur II BPOM - Bapak Yudianto, ST., MT., MPP dan dihadiri oleh Plt. Kabag TU serta Auditor di lingkungan Inspektorat Utama. Dalam kegiatan studi banding ini disampaikan terkait Kapabilitas APIP, implementasi SPIPT, penyusunan PKPT berbasis risiko, pedoman pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP, kebijakan manajemen risiko, dan kebijakan anti korupsi.

Diharapkan kegiatan studi banding ini membuka hubungan kerja sama yang baik antara BPOM dan BIG terutama dalam hal pengawasan intern.



Gambar 19 Dokumentasi Kunjungan Badan Informasi Geospasial (BIG)

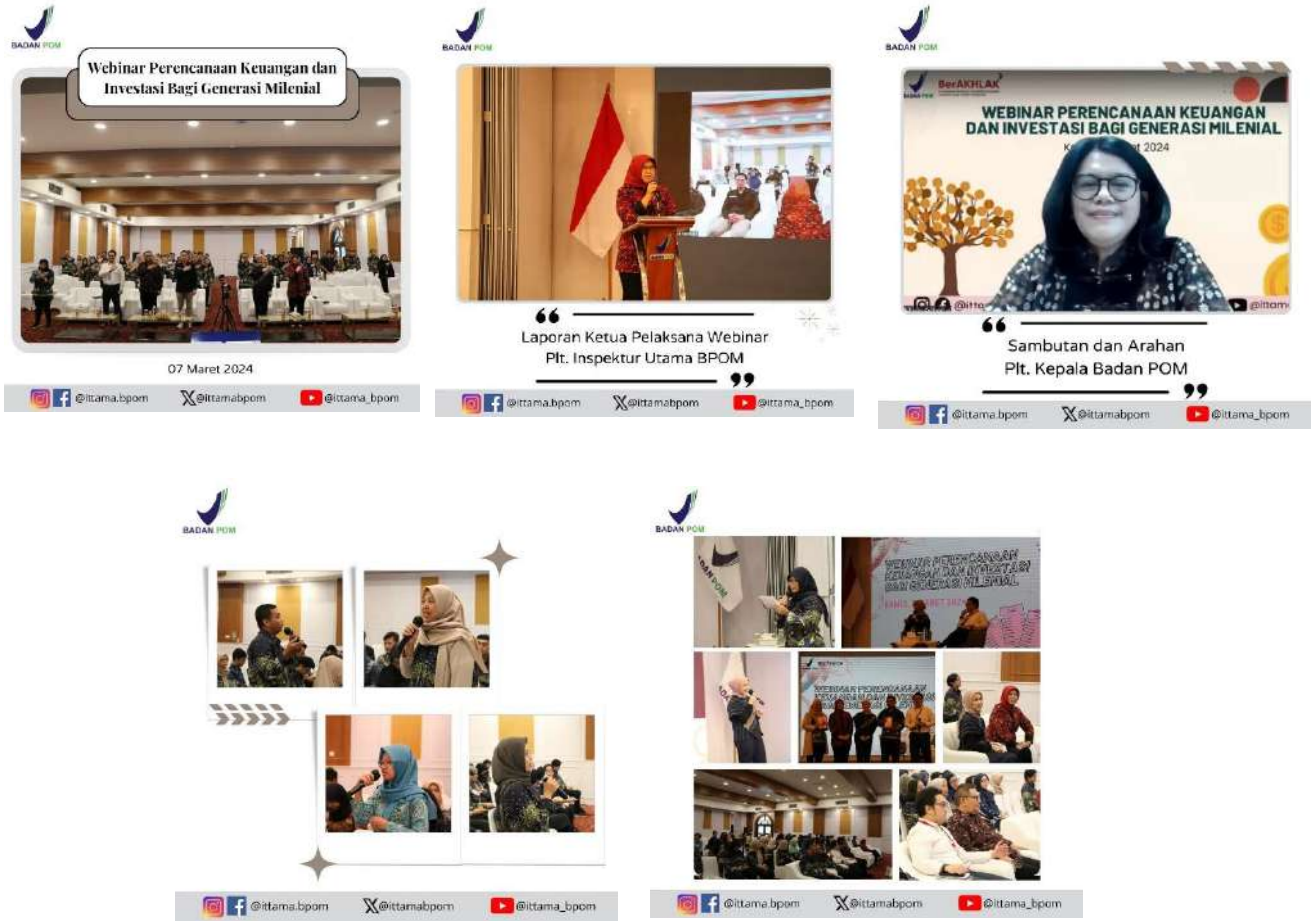
6.3 WEBINAR

Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Inspektorat Utama Badan POM menyelenggarakan Webinar Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Investasi bagi Generasi Milenial. Webinar ini mengundang Narasumber Ibu Prita Hapsari Gozie yang merupakan CEO ZAP Finance dan dibuka langsung oleh Ibu Plt. Kepala BPOM.

Tema pengelolaan keuangan kali ini sedikit berbeda, karena biasanya pengelolaan keuangan yang diangkat adalah pengelolaan keuangan negara. Namun kali ini, tema webinar yang akan disampaikan adalah pengelolaan keuangan pribadi dan keuangan keluarga. Hal ini dikerenakan menurut suatu penelitian, terdapat fakta bahwa 1 dari 5 karyawan mengalami stres di tempat kerja, bukan karena workload atau beban kerja, tetapi dikarenakan masalah keuangan yang mereka alami, yang kemudian akan memengaruhi kinerja pegawai. Oleh karena itu, kami menganggap pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga ini penting dan perlu adanya edukasi dalam pengelolaan keuangan dan pentingnya investasi bagi seorang ASN atau pegawai pemerintah

Tujuan dari webinar ini untuk mengedukasi pegawai BPOM khususnya dan generasi milenial pada umumnya dalam praktik pengelolaan sumber daya keuangan keluarga agar mencapai tujuan keuangan bersama.

Diakhir, Ibu Prita mengutip kalimat yang sangat baik yaitu:
“Setiap orang ada masanya,
Setiap masa ada orangnya,
Maka pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk berbakti kepada keluarga dan mempersiapkan yang terbaik untuk masa depan”



Gambar 20 Dokumentasi Webinar Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Investasi bagi Generasi Milenial

6.4 SEMINAR

Dalam rangkaian acara Rapat Kerja Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di lingkungan BPOM, juga dilaksanakan kegiatan seminar bertema "Transformasi Peran Auditor Internal di Masa Depan".

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 31 Mei 2024 dengan mengundang seorang Ahli dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Bapak Maliki Heru Santosa selaku Anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN).

Dalam mewujudkan *good governance*, terdapat tantangan perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI). Untuk mengatasinya tidak dapat dilakukan hanya oleh APIP saja namun menjadi tanggung jawab manajemen dan seluruh anggota organisasi.









Gambar 21 Rapat Kerja Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di lingkungan BPOM

6.5 PENGHARGAAN

Inspektorat Utama BPOM mendapatkan penghargaan yang luar biasa selama tahun 2024, yaitu:

1. **Lomba Inovasi Pengawasan BPKP Tahun 2024**
   Dalam rangka menyambut HUT BPKP RI Tahun 2024, BPKP menyelenggarakan Lomba Inovasi Pengawasan BPKP tahun 2024 untuk dapat diikuti APIP Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024.

   Inspektorat Utama BPOM berpartisipasi dalam lomba Inovasi pengawasan intern dan mengikutsertakan inovasi dengan judul Survei Digital Pelayanan Publik: Senjata Ampuh Melawan Korupsi dan Mewujudkan Pelayanan Publik Prima.

   Kami laporkan, Survei Digital Pelayanan Publik dimaksudkan untuk pemantauan kualitas pelayanan publik BPOM yang dilaksanakan melalui aplikasi SAPA APIP, dan memiliki keunggulan:
   a. Integrasi beberapa *tools* survei pelayanan publik (Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK);
   b. Sinkronisasi dengan aplikasi pelayanan publik BPOM;
   c. Pelaksanaan secara digital melalui aplikasi SAPA APIP;
   d. Pemnatauan kualitas pelayanan unit kerja *real time;*
   e. Kolaborasi antara Inspektorat Utama dan Biro Hukum dan Organisasi BPOM; serta
   f. Pemanfaatan oleh seluruh Unit Kerja di lingkungan BPOM Pusat dan Daerah.

   Survei Digital Pelayanan Publik tersebut mendukung berbagai penghargaan Pelayanan Publik yang telah diterima BPOM dari Kementerian PAN dan RB antara lain :
   a. 6 (enam) Unit Kerja BPOM dengan Pelayanan Prima;
   b. BPOM menjadi Top 3 Penyelenggara Pelayanan Publik tingkat K/L (Peringkat 2);
   c. 5 (lima) unit kerja dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
   d. 35 (tiga puluh lima) Unit Kerja sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).



Gambar 22 Lomba Inovasi Pengawasan BPKP tahun 2024

2. Predikat Unit Kerja Pusat Pengelola BMN Terbaik

Pada tanggal 13 Juni 2024 Inspektorat Utama mendapatkan predikat unit kerja pusat pengelola BMN terbaik dan mendapatkan penghargaan piala bergilir pengelola BMN terbaik di BPOM.

Terdapat 5 (lima) indikator penilaian satuan kerja dalam mengelola BMN yang baik, yaitu:

a. Penatausahaan BMN (Pelaporan BMN) (maksimal 30 poin)
b. Ketepatan Waktu Penyampaian RKBMN (maksimal 10 poin)
c. Penggunaan (PSP) BMN (maksimal 20 poin)
d. Penghapusan BMN Rusak Berat (maksilmal 20 poin)
e. Pemusnahan Persediaan Rusak/Usang (maksimal 20 poin)



Gambar 23 Predikat Unit Kerja Pusat Pengelola BMN Terbaik

6.6 LAIN-LAIN

1. **Rapat Evaluasi Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024**
   Inspektorat Utama BPOM telah melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dengan tema Audit Berkelanjutan: Membangun Budaya Pengawasan Intern yang Dinamis dan Responsif yang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 9 Agustus 2024.

   Pada acara ini kami mengundang Bapak Drs. Mulyono M.Si selaku Inspektur Daerah Kota Malang, Bapak Nurcahyo, SH., M.Hum selaku Inspektur Daerah Kab. Malang, Bapak Dr. Alexander Zulkarnain, Ak., M.M., CA, CIA, CCSA, CSOX selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Elbert Marangkup Hademahan ST., MT selaku Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A selaku Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Ibu Lady Martha Boturan Hasian Napitupulu S.E., M.A selaku Auditor Ahli Madya Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP.

   Acara Rapat Evaluasi Kinerja dibuka oleh Ibu Plt. Inspektur Utama, beliau mengemukakan audit berkelanjutan bukanlah sekadar serangkaian kegiatan rutin, melainkan sebuah komitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengawasan internal. Juga, pengawasan internal yang responsif menjadi kunci untuk mengantisipasi berbagai risiko dan tantangan yang mungkin muncul.
   Diakhir, Ibu Plt. Inspektur Utama berpesan seluruh jajaran Inspektorat Utama Badan POM agar selalu menjaga integritas, meningkatkan kompetensi di atas auditee dan menjaga keharmonisan serta adaptif sebagai implementasi sikap ASN BerAKHLAK.

   Dan tak lupa Inspektorat Utama Badan POM mengucapkan terima kasih kepada para Narasumber karena telah bersedia sharing ilmu dan kunci keberhasilan implementasi CACM di lingkungannya, dan mohon dukungan secara terus menerus pada Inspektorat Utama dalam membangun CACM di lingkungan Badan POM.



Gambar 24 Rapat Evaluasi Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024

2. **Rapat Tinjauan Manajemen dan Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan III Tahun 2024**

   Senin, 14 Oktober 2024, Inspektorat Utama melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dan Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan III Tahun 2024. Dalam rapat tersebut Inspektur I dan Inspektur II masing-masing memaparkan terkait capaian kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan III 2024, rencana aksi tindak lanjut, serta risiko Unit Kerja Inspektorat Utama yang kemudian ditanggapi oleh Inspektur Utama dan pegaawai inspektorat.

   Rapat dilanjutkan dengan pemaparan oleh Plt. Kabag TU Inspektorat Utama terkait Status tindak lanjut dari Tinjauan Manajemen Inspektorat Utama, isu internal dan eksternal, Status tindak lanjut dari Tinjauan Manajemen Inspektorat Utama, hingga Efektivitas Tindakan yang Diambil untuk Menangani Risiko dan Peluang.
   Diakhir rapat, Inspektur Utama memberikan arahan terkait poin-poin yang perlu ditingkatkan, dijadikan perhatian, dan hal yang segera ditindaklanjuti.

   Dalam rapat tinjau manajemen ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama.



Gambar 25 Rapat Tinjauan Manajemen dan Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan III Tahun 2024

3. Cafe Integritas

a. Seri 1

Serial Cafe Integritas ini bertujuan mendorong mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan aparat pemerintah yang bersih (clean government) bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dengan memegang prinsip nilai budaya organisasi.

Dalam acara yang dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala UPT, dan seluruh pegawai di lingkungan BPOM, Bapak Kepala BPOM memaparkan bahwa "Integritas adalah kata yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah dijalankan, Integritas artinya ucapan, hati, dan tindakan".

Atas pentingnya Integritas, semoga dengan adanya syiar melalui Cafe Integritas setiap pegawai BPOM melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.

Tidak kalah pentingnya, agar suasana menjadi rileks dan nyaman, Cafe Integritas disisipi dengan penampilan musikalisasi oleh Ittama Band.



Gambar 26 Café Integritas Seri 1

b. Seri 2

Inspektorat Utama menyelenggarakan Cafe Integritas Seri 2 dengan topik Langkah-Langkah Akhir Tahun dan Serah Terima Pengadaan Konstruksi yang dibawakan oleh Influencer Moh Nur Herman Syah, S.Farm, Apt, (M.Ak) selaku Auditor Ahli Madya Inspektorat II.

Serial Cafe Integritas Seri 2 ini bertujuan mengingatkan kembali bahwa proses serah terima barang/jasa bukan hanya sekadar administratif, tetapi juga menjadi titik akhir yang menentukan apakah pengadaan berhasil diselesaikan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Oleh karena itu, serah terima harus dilakukan dengan sangat hati-hati, memperhatikan semua aspek, serta dokumentasi yang lengkap, agar tidak ada masalah di kemudian hari.

Dalam acara yang dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala UPT, dan seluruh pegawai di lingkungan BPOM. Bapak Inspektur Utama BPOM memaparkan bahwa melalui pengadaan barang/jasa yang berkualitas, pemerintah dapat menciptakan infrastruktur yang mendukung pembangunan dan memberikan manfaat jangka panjang. Kualitas dalam pengadaan adalah pondasi untuk mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa bermanfaat.

Tidak kalah pentingnya, agar suasana menjadi rileks dan nyaman, Cafe Integritas Seri 2 disisipi dengan musikalisasi.



Gambar 27 Café Integritas Seri 3

c. **Seri 3 (Pengukuhkan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API))**

30 Desember 2024, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengukuhkan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) di acara Cafe Integritas.

Taruna Ikrar berharap PAKSI dan API dapat memperkuat pemahaman dan peran aktif seluruh pegawai BPOM dalam mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam pemberantasan korupsi.





Gambar 28 Seri 3 (Pengukuhkan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API))

4. **Audiensi terkait Kebijakan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM**
   Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Inspektorat Utama melalukan Audiensi terkait Kebijakan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM yang dihadiri oleh Bapak Iwan Taufiq Purwanto selaku Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Bapak Sidi Purnomo selaku Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP, Ibu Lady Martha Boturan Hasian Napitupulu selaku Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana 1, serta Tim dari BPKP.

   Acara dibuka oleh Bapak Inspektur Utama BPOM, Beliau memaparkan dalam rangka continuous improvement, Inspektorat Utama sedang melaksanakan reviu terhadap kebijakan penerapan manajemen risiko dan tools penilaian maturitas manajemen risiko. Sebelumnya Inspektorat Utama BPOM telah mengundang Tim Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP dalam acara Forum Diskusi Revisi Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko. Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terhadap draft kebijakan penerapan manajemen risiko BPOM serta tanggapan terhadap tools penilaian maturitas manajemen risiko yang digunakan BPOM.

   Diakhir, Bapak Inspektur Utama BPOM berharap tim Inspektorat Utama dapat memanfaatkan momen ini untuk memperkaya inputan dalam reviu kebijakan serta menggali praktik baik BPKP dalam penerapan manajemen risiko yang dapat kita contoh dan diimplementasikan di lingkungan BPOM. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan

penerapan manajemen risiko di lingkungan BPOM dan dapat membantu pencapaian tujuan serta meningkatkan kinerja BPOM.



Gambar 29 Audiensi terkait Kebijakan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM

5. **Pertemuan Internal Inspektorat Utama**

   Inspektorat Utama menyelenggarakan pertemuan internal Inspektorat Utama yang dihadiri oleh Bapak Inspektur I, Bapak Inspektur II, dan Bapak Plt. Kepala Bagian Tata Usaha serta seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Utama.

   Bapak Inspektur Utama kembali menekankan bahwa positioning pengawasan intern telah bergeser dari semula sekedar watchdog berubah menjadi value driver. Transformasi pendekatan pengawasan urgent dilakukan agar APIP memiliki kapabilitas dalam memenuhi ekspektasi stakeholders.

   Diakhir, Bapak Inspektur Utama akan lebih meningkatkan koordinasi dengan para Inspektur dan Auditor Madya secara berkala, untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan juga terus menjalin kerja sama yang solid, saling mendukung, dan menjadikan Inspektorat Utama sebagai organisasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.



Gambar 30 Pertemuan Internal Inspektorat Utama

PENUTUP



7.1 KESIMPULAN
7.2 PERMASALAHAN
7.3 SARAN

BAB 07

7.1 Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM tahun 2023 merujuk kepada Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.06.22.22 Tahun 2022 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM tahun 2020-2024 pada *Baseline* 2021 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2023.

Beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh mitra kerja Inspektorat Utama tahun 2024, antara lain:

1. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2023, yang merupakan perolehan Opini WTP yang ke-10 secara berturut-turut;
2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK per Semester I Tahun 2024 sebesar 96,15%. Badan POM selalu mendapatkan persentase tindak lanjut tertinggi di Auditorat Keuangan Negara VI;

3. Mengawal nilai SPIP-T BPOM tahun 2024 yang mencapai level 4 dengan skor 4,094 (Level 4) dan termasuk Kementerian/Lembaga dengan nilai SPIPT tertinggi di Lingkup Kedeputian Politik Hukum, Pengembangan Manusia dan Kebudayaan;
4. Mencapai Manajemen Risiko pada level 4 (terkelola dan terukur) skor 4,286 dengan karakteristik Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi;
5. Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
6. Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM tahun 2024 mencapai 8 Besar di antara seluruh Kementerian/Lembaga, dengan skor 83,98;
7. Mengawal keberhasilan pembangunan ZI di tahun 2024 dengan 5 unit kerja memperoleh WBK, dan 3 unit kerja memperoleh WBBM;
8. Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2024 adalah sebagai berikut: 6 (enam) Sasaran Program tercapai dengan Kategori “Sangat Baik”, 1 (satu) Sasaran Program tercapai dengan Kategori “Baik”, dan 3 (tiga) sasaran program belum tercapai dengan kategori “Cukup”. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana tahun 2024 dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **104,57** dengan predikat **“Istimewa”;** dan
9. Penyerapan anggaran Inspektorat Utama tahun 2024 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 25.927.672.899** atau 93,62% (Realisasi

berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan Rp 25.908.284.126 atau 93,55% (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu Rp27.693.231.000 dengan *Automatic Adjustment* sebesar Rp999.793.000 dan efisiensi Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp816.301.000.

7.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM tahun 2024, antara lain:

1. Dengan adanya SOP audit yang baru, masih belum terdapat perspektif yang sama antara auditor dan auditan serta pemangku kebijakan;
2. Kompetensi auditor belum sepenuhnya merata pada level yang sama sehingga belum seluruh auditor dapat diberikan penugasan dengan kualitas yang prima pada bagian-bagian tertentu;
3. Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuain pelaksanaan kegiatan pengawasan intern.

7.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada tahun 2024, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala

untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;

2. Melaksanakan analisis dan reviu target Indikator Kinerja Utama sebagai salah satu pertimbangan untuk melakukan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029
3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian anggaran APBN-P di TA 2025;
4. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
5. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
6. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

LAMPIRAN

Lampiran 1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT I

INSPEKTORAT I							
Sasaran Kegiatan		**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)**		**Target 2024**	**Realisasi 2024**	**Capaian Terhadap 2024**	**Ket**
SK1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKSK 1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30%	50%	166,67	Berdasarkan jumlah akumulasi keberhasilan ZI (WBK/WBBM) di setiap wilayah pengawasan yang sudah melaksanakan pembangunan ZI: Inspektorat I: 15/30=50%
		IKSK 2	Nilai Survei Penilaian Integritas	83,48	83,98	100,60	Berdasarkan Nilai Survei Penialaian Integritas Tahun 2024 hasil resmi KPK
		IKSK 3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75	20,69	99,71	Berdasarkan Hasil dari ANRB No B/673/AA.05/2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2024
		IKSK 4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,85	4,09	106,23	Berdasarkan laporan BPKP No PE.09.03/SP-159/D2/03/2024 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2024
SK2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKSK 5	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01 %	99,97%	100,97	Nilai temuan BPOM Rp 490.717.656,49 Total Pagu BPOM 2024 Rp 2.191.058.412.575 Material 0,02% Nilai temuan Ir1 Rp 354.264.834,49 Total Pagu Wilayah Ir 1 2024 Rp 1.203.291.257.476 Material 0,03%
		IKSK 6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	96,15%	102,29	Menggunakan Risalah BPK sampai dengan Semester I Tahun 2024
SK3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSK 7	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	86	88,43	102,83	Berdasarkan Nota dinas No PI.06.73.12.24.275 Laporan Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2024
SK4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	IKSK 8	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,3	85,25	98,78	Berdasarkan Nota dinas No PI.06.73.12.24.284 Laporan Hasil Survei Kemanfaatan Kebijakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BPOM

INSPEKTORAT I							
Sasaran Kegiatan		**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)**		**Target 2024**	**Realisasi 2024**	**Capaian Terhadap 2024**	**Ket**
SK5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSK 9	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100%	100,00%	100,00	Target Ir1: 33 laporan Realisasi Ir 1: 33 laporan 100%
SK6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	IKSK 10	Persentase rekomendasi Pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	96%	93,45%	97,34	Berdasarkan Aplikasi SAPA APIP Per 10 Januari 2025: Inspektorat I: 93,45% (2397/2565)
		IKSK 11	Persentase pengaduan lingkup Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100,00%	100,00	Berdasarkan Laporan Pengaduan dan WBS TW IV 2024
		IKSK 12	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,57 %	100,00%	102,49	Berdasarkan Aplikasi SOLUSI Bulan Desember 2024: Inspektorat I: 100% (16/16)
SK7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKSK 13	Indeks RB Inspektorat I	86,7	88,99	102,64	Berdasarkan Surat Inspektur Utama no B-PI.06.06.7.11.24.608 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 pada Inspektorat I
		IKSK 14	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,6	3,77	104,72	Masih menunggu nilai resmi dari BPKP Berdasarkan penilaian sementara dari BPKP memperoleh skor 3,77 (level 3)
		IKSK 15	Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,5	97,69	100,19	Berdasarkan surat dari Biro Umum No B-KA.03.207.24.563 hal Penyampaian Nilai Final Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 Inspektorat I: 97,69
SK8	Terwujudnya SDM Inspektorat I yang berkinerja Optimal	IKSK 16	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	91,25	86,09	94,35	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama No B-KP.17.24.01.25.52 hal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2024
SK9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan	IKSK 17	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat I yang optimal	3	3,6	120,00	Berdasarkan arahan nota dinas sekretariat utama no PR.09.03.2.01.25.42 hal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024

INSPEKTORAT I							
Sasaran Kegiatan		**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)**		**Target 2024**	**Realisasi 2024**	**Capaian Terhadap 2024**	**Ket**
	Obat dan makanan Inspektorat I						
SK10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat I secara akuntabel	IKSK 18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	92%	100%	108,70	Berdasarkan perbandingan relisasi kinerja dan anggaran

Lampiran 2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT II

INSPEKTORAT II							
Sasaran Kegiatan		**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)**		**Target 2024**	**Realisasi 2024**	**Capaian Terhadap 2024**	**Ket**
SK1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKSK 1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30%	62,50%	208,33	Berdasarkan jumlah akumulasi keberhasilan ZI (WBK/WBBM) di setiap wilayah pengawasan yang sudah melaksanakan pembangunan ZI: Inspektorat II: 20/32=62,50%
		IKSK 2	Nilai Survei Penilaian Integritas	83,48	83,98	100,60	Berdasarkan Nilai Survei Penialaian Integritas Tahun 2024 hasil resmi KPK
		IKSK 3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75	20,69	99,71	Berdasarkan Hasil dari ANRB No B/673/AA.05/2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2024
		IKSK 4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,85	4,09	106,23	Berdasarkan laporan BPKP No PE.09.03/SP-159/D2/03/2024 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2024
SK2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKSK 5	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	99,99%	100,99	Nilai temuan BPOM Rp 490.717.656,49 Total Pagu BPOM 2024 Rp 2.191.058.412.575 Material 0,02% Nilai temuan Ir2 Rp 136.452.822 Total Pagu Wilayah Ir 2 2024 Rp 987.767.155.099 Material 0,01%
		IKSK 6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	96,15%	102,29	Menggunakan Risalah BPK sampai dengan Semester I Tahun 2024
SK3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSK 7	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	86	88,3	102,67	Berdasarkan Nota dinas No PI.06.73.12.24.275 Laporan Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2024
SK4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	IKSK 8	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,3	84,26	97,64	Berdasarkan Nota dinas No PI.06.73.12.24.284 Laporan Hasil Survei Kemanfaatan Kebijakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BPOM
SK5	Implementasi pengawasan	IKSK 9	Persentase laporan	100%	100,00%	100,00	Target Ir2: 33 Laporan Realisasi Ir2: 33 Laporan

INSPEKTORAT II							
Sasaran Kegiatan		**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)**		**Target 2024**	**Realisasi 2024**	**Capaian Terhadap 2024**	**Ket**
	intern yang efektif dan efisien		pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu				100%
SK6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	IKSK 10	Persentase rekomendasi Pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	96%	87,71%	91,36	Berdasarkan Aplikasi SAPA APIP Per 10 Januari 2025: Inspektorat II: 87,71% (1999/2279)
		IKSK 11	Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100,00%	100,00	Berdasarkan Laporan Pengaduan dan WBS TW IV 2024
		IKSK 12	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,57%	100,00%	102,49	Berdasarkan Aplikasi SOLUSI Bulan Desember 2024: Inspektorat II: 100% (21/21)
SK7	Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif	IKSK 13	Indeks RB Inspektorat II	86,7	83,80	96,66	Surat Inspektur Utama no B-PI.06.06.7.11.24.609 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 pada Inspektorat II
		IKSK 14	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,6	3,77	104,72	Masih menunggu nilai resmi dari BPKP Berdasarkan penilaian sementara dari BPKP memperoleh skor 3,77 (level 3)
		IKSK 15	Nilai Pengelolaan Kearsipan	95,79	100	104,40	Berdasarkan surat dari Biro Umum No B-KA.03.207.24.563 hal Penyampaian Nilai Final Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 Inspektorat II: 100
SK8	Terwujudnya SDM Inspektorat II yang berkinerja Optimal	IKSK 16	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat II	94,84	87,84	92,62	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama No B-KP.17.24.01.25.52 hal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2024

INSPEKTORAT UTAMA

INSPEKTORAT II							
Sasaran Kegiatan		**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)**		**Target 2024**	**Realisasi 2024**	**Capaian Terhadap 2024**	**Ket**
SK9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat II	IKSK 17	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat II yang optimal	3	3,6	120,00	Berdasarkan arahan nota dinas sekretariat utama no PR.09.03.2.01.25.42 hal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024
SK10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat II secara akuntabel	IKSK 18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	92%	100%	108,70	Berdasarkan perbandingan relisasi kinerja dan anggaran

Lampiran 3

Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Yan Setiadi
Jabatan	: Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Taruna Ikrar
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 September 2024

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Yan Setiadi	Taruna Ikrar

INSPEKTORAT UTAMA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	01 - Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30 Persen
		02 - Nilai Survei Penilaian Integritas	83.48 Nilai
		03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.75 Nilai
		04 - Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3.85 Nilai
2.	02 - Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	01 - Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99.01 Persen
		02 - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94 Persen
3.	03 - Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	86 Indeks
4.	04 - Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	01 - Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86.3 Indeks
5.	05 - Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	01 - Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100 Persen
6.	06 - Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	01 - Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96 Persen
		02 - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 Persen
		03 - Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97.57 Persen

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
7.	07 - Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang efektif	01 - Indeks reformasi birokrasi Inspektorat Utama	86.7 Indeks
		02 - Nilai AKIP Inspektorat Utama	84.35 Nilai
		03 - Nilai evakuasi Kapabilitas APIP	3.6 Nilai
		04 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.65 Nilai
8.	08 - Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	01 - Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92.48 Indeks
9.	09 - Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	01 - Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3 Indeks
10.	10 - Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	01 - Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	93.74 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	82.17 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	95 Nilai
		04 - Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60 Persen

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 27,693,231,000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4115 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	19,857,121,000
2.	WA.4116 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	7,836,110,000

Jakarta, 10 September 2024

Pihak Pertama
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Yan Setiadi

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Taruna Ikrar

Lampiran 4

Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	NSP	Kategori
SP1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKSP1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30%	56,45%	120,00	106,64	Tidak dapat disimpulkan
		IKSP2	Nilai Survei Penilaian Integritas	83,48	83,98	100,60		Sangat Baik
		IKSP3	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75	20,69	99,71		Cukup
		IKSP4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,85	4,09	106,23		Sangat Baik
SP2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKSP5	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	99,98%	100,98	101,63	Sangat Baik
		IKSP6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	96,15%	102,29		Sangat Baik
SP3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKSP7	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	86	88,25	102,62	102,62	Sangat Baik
Capaian Perspective Stakeholder							**103,63**	
SP4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKSP8	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	86,3	84,74	98,19	98,19	Cukup
SP5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKSP9	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100%	100,00%	100,00	100	Baik
SP6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKSP10	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	96%	90,75%	94,53	99,01	Cukup
		IKSP11	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	100%	100,00%	100,00		Baik
		IKSP12	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,57%	100,00%	102,49		Sangat Baik
Capaian Internal Process Perspective						**99,07**	**99,07**	
SP7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKSP13	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	86,7	86,39	99,64	100,84	Cukup
		IKSP14	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,35	81,58	96,72		Cukup
		IKSP15	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,6	3,77	104,72		Sangat Baik

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	NSP	Kategori
		IKSP16	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,65	98,84	102,27		Sangat Baik
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKSP17	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92,48	86,76	93,81	93,81	Cukup
SP9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKSP18	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	3	3,6	120,00	120,00	Sangat Baik
SP10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKSP19	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,74	98,75	105,34	112,23	Sangat Baik
		IKSP 20	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	82,17	100	120,00		Tidak dapat disimpulkan
		IKSP21	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	95	98,41	103,59		Sangat Baik
		IKSP22	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60%	97,22%	120,00		Tidak dapat disimpulkan
Capaian Learning & Growth Perspective							**111,02**	
NPSP TOTAL							**104,57**	

Lampiran 5

Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per sasaran	Nilai Kinerja per sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	100%	188,17%	100%	123,68%	1,24	1	0,24	Efisien
		Nilai Survei Penilaian Integritas	100%	100,60%						
		Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	100%	99,71%						
		Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	100%	106,23%						
2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100,98%	100%	101,64%	1,02	1	0,02	Efisien
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	100%	102,29%						
3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	100%	102,62%	100,00%	102,62%	1,03	1	0,03	Efisien
4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	100%	98,19%	100,00%	98,19%	0,98	1	-0,02	Tidak Efisien

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per sasaran	Nilai Kinerja per sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100%	100,00%	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	100%	94,53%	100,00%	99,01%	0,99	1	-0,01	Tidak Efisien
		Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	100%	100,00%						
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	99,99%	102,49%						
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	100%	99,64%	100%	100,84%	1,01	1	0,01	Efisien
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	99,99%	96,72%						
		Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	100%	104,72%						
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	100%	102,27%						
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	100%	93,81%	100,00%	93,81%	0,94	1	-0,06	Tidak Efisien

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per sasaran	Nilai Kinerja per sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	100%	120,00%	100,00%	120,00%	1,20	1	0,20	Efisien
10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	100%	105,34%	100,00%	123,17%	1,23	1	0,23	Efisien
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	100%	121,70%						
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	100%	103,59%						
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	162,03%						

Lampiran 6

Pengukuran Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	1.026.305.000	1.026.299.454	100,00	188,17	1,88	1	0,88	Efisien
Nilai Survei Penilaian Integritas	597.976.000	597.972.331	100,00	100,60	1,01	1	0,01	Efisien
Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	200.642.000	200.639.190	100,00	99,71	0,997	1	-0,003	Tidak Efisien
Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	723.222.000	723.216.261	100,00	106,23	1,06	1	0,06	Efisien
Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	980.295.000	980.289.349	100,00	100,98	1,01	1	0,01	Efisien
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	1.376.628.000	1.376.620.068	100,00	102,29	1,02	1	0,02	Efisien

INSPEKTORAT UTAMA

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	108.707.000	108.706.985	100,00	102,62	1,03	1	0,03	Efisien
Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	21.847.000	21.847.000	100,00	98,19	0,98	1	-0,02	Tidak Efisien
Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	2.757.805.000	2.757.795.708	100,00	100,00	1,00	1	0,00	Efisien
Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	187.724.000	187.722.552	100,00	94,53	0,95	1	-0,05	Tidak Efisien
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	193.348.000	193.347.043	100,00	100,00	1,00	1	0,00	Efisien
Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	1.564.000	1.563.900	99,99	102,49	1,03	1	0,03	Efisien
Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	1.235.504.000	1.235.501.369	100,00	99,64	0,996	1	-0,004	Tidak Efisien
Nilai AKIP Inspektorat Utama	5.799.000	5.798.500	99,99	96,72	0,97	1	-0,03	Tidak Efisien

INSPEKTORAT UTAMA

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	940.047.000	940.044.732	100,00	104,72	1,05	1	0,05	Efisien
Nilai Pengelolaan Kearsipan	80.740.000	80.739.417	100,00	102,27	1,02	1	0,02	Efisien
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	1.857.800.000	1.857.790.062	100,00	93,81	0,94	1	-0,06	Tidak Efisien
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	329.880.000	329.878.778	100,00	120,00	1,20	1	0,20	Efisien
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	9.518.614.500	9.518.577.393	100,00	105,34	1,05	1	0,05	Efisien
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	944.386.500	944.383.077	100,00	121,70	1,22	1	0,22	Efisien
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	1.901.222.500	1.901.216.655	100,00	103,59	1,04	1	0,04	Efisien
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	937.726.500	937.723.077	100,00	162,03	1,62	1	0,62	Efisien

Lampiran 7

Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2024

ID	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12	B10	B11	B12	(Dalam ribuan rupiah)	B10	B11	B12	B10	B11	B12
SP1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas			30%			56,45%			188,17	1.026.445	837.642	1.025.839	1.026.299	81,61%	99,94%	99,99%
		Nilai Survei Penilaian Integritas			83,48			83,98			100,60	597.976	404.992	470.496	597.972	67,73%	78,68%	100%
		Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM			20,75			20,69			99,71	200.642	155.526	197.466	200.639	77,51%	98,42%	100%
		Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM			3,85			4,09			106,23	723.222	682.326	723.216	723.216	94,35%	100,00%	100%
SP2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan			99,01%			99,98%			100,98	980.295	832.902	927.228	980.289	84,96%	94,59%	100%

INSPEKTORAT UTAMA

ID	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12	B10	B11	B12	(Dalam ribuan rupiah)	B10	B11	B12	B10	B11	B12
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM			94%			96,15%			102,29	1.376.628	285.064	761.080	1.376.620	20,71%	55,29%	100%
SP3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern			86			88,25			102,62	108.707	95.207	95.207	108.707	87,58%	87,58%	100%
SP4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern			86,3			84,74			98,19	21.847	21.847	21.847	21.847	100,00%	100,00%	100%
SP5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	2.757.805	2.564.223	2.706.124	2.757.796	92,98%	98,13%	100%

INSPEKTORAT UTAMA

ID	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12	B10	B11	B12	(Dalam ribuan rupiah)	B10	B11	B12	B10	B11	B12
SP6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96%	96%	96%	96,05%	94,64%	90,75%	100,05	98,58	94,53	187.724	148.834	148.834	187.723	79,28%	79,28%	100%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	85,00%	90,00%	100%	82,61%	91,30%	100,00%	97,19	101,44	100,00	193.348	144.466	151.623	193.347	74,72%	78,42%	100%
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97%	97%	97,57%	100,00%	100,00%	100,00%	103,09	103,09	102,49	1.564	1.564	1.564	1.564	99,99%	99,99%	99,99%
SP7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama			86,7			86,39			99,64	1.235.504	1.232.104	1.235.501	1.235.501	99,72%	100%	100%
		Nilai AKIP Inspektorat Utama			84,35			81,58			96,72	5.799	5.359	5.799	5.799	92,40%	99,99%	99,99%

INSPEKTORAT UTAMA

ID	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12	B10	B11	B12	(Dalam ribuan rupiah)	B10	B11	B12	B10	B11	B12
		Level Kapabilitas APIP			3,6			3,77			104,72	940.047	859.205	935.545	940.045	91,40%	99,52%	100%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan			96,65			98,84			102,27	80.740	80.739	80.739	80.739	100%	100%	100%
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	82,93	82,93	92,48	86,08	86,08	86,76	103,80	103,80	93,81	1.857.800	1.263.770	1.400.770	1.857.790	68,03%	75,40%	100%
SP9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	3	3	3	3	3,6	100	100	120	329.880	329.879	329.879	329.879	100%	100%	100%
SP10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama			93,74			98,75			105,34	9.518.615	8.840.454	9.288.779	9.518.577	92,88%	97,59%	100%

INSPEKTORAT UTAMA

ID	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12	B10	B11	B12	(Dalam ribuan rupiah)	B10	B11	B12	B10	B11	B12
	Utama secara akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa			82,17			100			121,70	944.387	729.401	787.715	944.383	77,24%	83,41%	100%
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara			95			98,41			103,59	1.901.223	1.502.915	1.650.654	1.901.217	79,05%	86,82%	100%
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri			60%			97,22%			162,03	937.727	724.951	783.265	937.723	77,31%	83,53%	100%
											TOTAL	**25.927.923**	**21.743.371**	**23.729.169**	**25.927.673**	**83,86%**	**91,52%**	**100,00%**

Lampiran 8

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Output Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
Program Dukungan Manajemen		**473**	**401**	**448**	**475**	**84,78%**	**94,71%**	**100,42%**	**25.927.783.000**	**21.743.371.499**	**23.729.169.455**	**25.927.672.899**	**83,86%**	**91,52%**	**100,00%**
A	**4115.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi**	**15**	**15**	**15**	**15**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**322.000.000**	**321.999.206**	**321.999.206**	**321.999.206**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
1	**Pengadaan Pengolah data dan komunikasi**	**15**	**15**	**15**	**15**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**322.000.000**	**321.999.206**	**321.999.206**	**321.999.206**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
1.A	Pengembangan Aplikasi Penunjang Pengawasan Intern	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	138.225.000	138.224.206	138.224.206	138.224.206	100,00%	100,00%	100,00%
2.A	Pengadaan alat pengolah data	14	14	14	14	100,00%	100,00%	100,00%	183.775.000	183.775.000	183.775.000	183.775.000	100,00%	100,00%	100,00%
B	**4115.EBA.956 Layanan BMN**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**8.000.000**	**-**	**-**	**8.000.000**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
054	**Penatausahaan BMN**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**8.000.000**	**-**	**-**	**8.000.000**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
A	Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat Utama	1	0	0	1	0,00%	0,00%	100,00%	8.000.000	0	0	8.000.000	0,00%	0,00%	100,00%
C	**4115.EBA.994 Layanan Perkantoran**	**36**	**30**	**33**	**36**	**83,33%**	**91,67%**	**100,00%**	**10.391.162.000**	**9.648.125.231**	**10.143.529.675**	**10.391.122.816**	**92,85%**	**97,62%**	**100,00%**
001	**Gaji dan tunjangan**	**12**	**10**	**11**	**12**	**83,33%**	**91,67%**	**100,00%**	**8.191.750.000**	**7.696.413.369**	**8.084.835.182**	**8.191.733.182**	**93,95%**	**98,69%**	**100,00%**
001.A	Pembayaran gaji dan tunjangan	12	10	11	12	83,33%	91,67%	100,00%	8.191.750.000	7.696.413.369	8.084.835.182	8.191.733.182	93,95%	98,69%	100,00%
002	**Operasional dan pemeliharaan kantor**	**24**	**20**	**22**	**24**	**83,33%**	**91,67%**	**100,00%**	**2.199.412.000**	**1.951.711.862**	**2.058.694.493**	**2.199.389.634**	**88,74%**	**93,60%**	**100,00%**

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
002.A	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12	10	11	12	83,33%	91,67%	100,00%	1.346.646.000	1.141.975.737	1.233.295.450	1.346.642.439	84,80%	91,58%	100,00%
002.B	Administrasi kegiatan	12	10	11	12	83,33%	91,67%	100,00%	852.766.000	809.736.125	825.399.043	852.747.195	94,95%	96,79%	100,00%
D	**4115.EBB.951 Layanan Sarana Internal**	**54**	**56**	**56**	**56**	**103,70%**	**103,70%**	**103,70%**	**250.000.000**	**249.999.300**	**249.999.300**	**249.999.300**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
001	**Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran**	**54**	**56**	**56**	**56**	**103,70%**	**103,70%**	**103,70%**	**250.000.000**	**249.999.300**	**249.999.300**	**249.999.300**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
001.A	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	54	56	56	56	**103,70%**	**103,70%**	**103,70%**	250.000.000	249.999.300	249.999.300	249.999.300	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
E	**4115.EBD.965 Layanan Audit Internal**	**156**	**121**	**146**	**156**	**77,56%**	**93,59%**	**100,00%**	**7.592.938.000**	**5.665.614.476**	**6.302.326.959**	**7.592.888.128**	**74,62%**	**83,00%**	**100,00%**
051	**Pengawalan Inspektorat I dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif**	**28**	**26**	**27**	**28**	**92,86%**	**96,43%**	**100,00%**	**1.004.989.000**	**880.369.617**	**1.004.980.112**	**1.004.980.112**	**87,60%**	**100,00%**	**100,00%**
A	Bimbingan Teknis Manajemen Risiko	5	5	5	5	100,00%	100,00%	100,00%	130.402.000	130.400.517	130.400.517	130.400.517	100,00%	100,00%	100,00%
B	Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM	5	5	5	5	100,00%	100,00%	100,00%	119.880.000	109.263.186	119.878.426	119.878.426	91,14%	100,00%	100,00%
C	Pembahasan Layanan Konsultansi Pengawasan Intern	1	0	0	1	0,00%	0,00%	100,00%	1.564.000	1.563.900	1.563.900	1.563.900	99,99%	99,99%	99,99%
D	Evaluasi SAKIP	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	35.222.000	35.221.056	35.221.056	35.221.056	100,00%	100,00%	100,00%
E	Penilaian Risiko, Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal	6	6	6	6	100,00%	100,00%	100,00%	61.751.000	61.749.343	61.749.343	61.749.343	100,00%	100,00%	100,00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
F	Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan WBS/Pengaduan, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	524.000	330.000	524.000	524.000	62,98%	100,00%	100,00%
G	Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM	5	5	5	5	100,00%	100,00%	100,00%	221.502.000	168.935.102	221.499.377	221.499.377	76,27%	100,00%	100,00%
H	Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	206.427.000	206.426.513	206.426.513	206.426.513	100,00%	100,00%	100,00%
I	Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	58.050.000	58.050.000	58.050.000	58.050.000	100,00%	100,00%	100,00%
J	Desk Maturitas Manajemen Risiko	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	108.430.000	108.430.000	108.430.000	108.430.000	100,00%	100,00%	100,00%
K	Sosialisasi SK LHKAN	1	0	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	61.237.000	0	61.236.980	61.236.980	0,00%	100,00%	100,00%
052	**Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM**	**25**	**20**	**23**	**25**	**80,00%**	**92,00%**	**100,00%**	**1.643.141.000**	**685.095.115**	**1.029.726.958**	**1.643.129.055**	**41,69%**	**62,67%**	**100,00%**
A	Reviu (LK, BMN, dan PIPK)	6	4	5	6	66,67%	83,33%	100,00%	9.072.000	4.697.000	9.072.000	9.072.000	51,77%	100,00%	100,00%
B	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	4	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	107.530.000	107.529.148	107.529.148	107.529.148	100,00%	100,00%	100,00%
C	Pendampingan Pemeriksaan BPK	6	6	6	6	100,00%	100,00%	100,00%	324.947.000	281.071.144	320.593.864	324.943.467	86,50%	98,66%	100,00%
D	SUB KOMPONEN DIHAPUS														

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
E	Asistensi Dalam Rangka Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	6	4	5	6	66,67%	83,33%	100,00%	238.595.000	166.223.040	190.642.160	238.594.312	69,67%	79,90%	100,00%
F	Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM	1	0	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	842.642.000	47.895.283	322.745.286	842.635.628	5,68%	38,30%	100,00%
G	Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	103.292.000	62.082.000	62.082.000	103.292.000	60,10%	60,10%	100,00%
H	Reviu RKAKL	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	17.063.000	15.597.500	17.062.500	17.062.500	91,41%	100,00%	100,00%
053	**Peningkatan kualitas pelayanan pengawasan intern Inspektorat I**	**2**	**2**	**2**	**2**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**157.857.000**	**144.356.985**	**144.356.985**	**157.856.985**	**91,45%**	**91,45%**	**100,00%**
A	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	108.707.000	95.206.985	95.206.985	108.706.985	87,58%	87,58%	100,00%
B	Pembangunan Zona Integritas Inspektorat I	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	49.150.000	49.150.000	49.150.000	49.150.000	100,00%	100,00%	100,00%
054	**Penyusunan dan evaluasi kebijakan pengawasan intern**	**1**	**1**	**1**	**1**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**21.517.000**	**21.517.000**	**21.517.000**	**21.517.000**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
A	Kajian/ Pedoman/ Peraturan Inspektorat I	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	21.517.000	21.517.000	21.517.000	21.517.000	100,00%	100,00%	100,00%
055	**Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I**	**40**	**36**	**38**	**40**	**90,00%**	**95,00%**	**100,00%**	**1.871.297.000**	**1.741.026.590**	**1.820.168.500**	**1.871.289.868**	**93,04%**	**97,27%**	**100,00%**
A	Audit	12	12	12	12	100,00%	100,00%	100,00%	995.660.000	966.775.018	995.658.278	995.658.278	97,10%	100,00%	100,00%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
B	Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I	8	6	7	8	75,00%	87,50%	100,00%	222.839.000	189.176.934	195.371.934	222.836.614	84,89%	87,67%	100,00%
C	Automatic Adjustment Inspektorat I								408.022.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
D	Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama	12	10	11	12	83,33%	91,67%	100,00%	444.276.000	376.554.366	420.618.016	444.274.704	84,76%	94,67%	100,00%
E	Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern (Bag TU)	8	8	8	8	100,00%	100,00%	100,00%	208.522.000	208.520.272	208.520.272	208.520.272	100,00%	100,00%	100,00%
F	Self Blocking Bagian TU								30.000.000						
G	Self Blocking Inspektorat I								680.229.000						
056	**Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I**	**5**	**4**	**4**	**5**	**80,00%**	**80,00%**	**100,00%**	**172.591.000**	**123.709.793**	**130.866.283**	**172.590.663**	**71,68%**	**75,82%**	**100,00%**
A	Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	1	0	0	1	0,00%	0,00%	100,00%	762.000	762.000	762.000	762.000	100,00%	100,00%	100,00%
B	Audit Tujuan Tertentu	4	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	171.829.000	122.947.793	130.104.283	171.828.663	71,55%	75,72%	100,00%
057	**Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat I**	**8**	**6**	**8**	**8**	**75,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**1.096.177.000**	**754.403.636**	**787.265.781**	**1.096.168.850**	**68,82%**	**71,82%**	**100,00%**
A	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, Laporan PPID dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	80.740.000	80.739.417	80.739.417	80.739.417	100,00%	100,00%	100,00%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
B	Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I	1	0	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	976.000	976.000	976.000	976.000	100,00%	100,00%	100,00%
C	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	5	4	5	5	80,00%	100,00%	100,00%	728.724.000	559.755.833	589.684.408	728.719.222	76,81%	80,92%	100,00%
D	Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	285.737.000	112.932.386	115.865.956	285.734.211	39,52%	40,55%	100,00%
E	Sub Komponen dihapus														
058	**Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern**	**47**	**26**	**43**	**47**	**55,32%**	**91,49%**	**100,00%**	**1.625.369.000**	**1.315.135.740**	**1.363.445.340**	**1.625.355.595**	**80,91%**	**83,89%**	**100,00%**
A	Penyiapan Dokumen RB BPOM penguatan sistem pengawasan (IKSP 1)	1	0	0	1	0,00%	0,00%	100,00%	460.000	-	-	460.000	0,00%	0,00%	100,00%
B	Penyusunan SK PKPT Tahun 2024	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	343.000	342.500	342.500	342.500	99,85%	99,85%	99,85%
C	Penyusunan laporan keuangan dan BMN Ittama BPOM	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	446.000	446.000	446.000	446.000	100,00%	100,00%	100,00%
D	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
E	Pelaksanaan Survei kemanfaatan kebijakan pengawasan intern (IKSP 7)	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	330.000	330.000	330.000	330.000	100,00%	100,00%	100,00%
F	Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan (IKSP 8)	1	0	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	1.213.000	349.500	661.900	1.212.100	28,81%	54,57%	99,93%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
G	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
H	Penyiapan Dokumen RB Inspektorat Utama (IKSP 12)	1	0	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	2.739.000	2.739.000	2.739.000	2.739.000	100,00%	100,00%	100,00%
I	Pengelolaan Akuntabilitas Inspektorat Utama (IKSP 13)	2	2	2	2	100,00%	100,00%	100,00%	5.799.000	5.358.500	5.798.500	5.798.500	92,40%	99,99%	99,99%
J	Evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama (IKSP 14)	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	241.804.000	241.802.403	241.802.403	241.802.403	100,00%	100,00%	100,00%
K	Pengelolaan Jabatan Fungsional	12	9	12	12	75,00%	100,00%	100,00%	704.253.000	468.035.727	498.235.727	704.248.282	66,46%	70,75%	100,00%
L	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
M	Pengelolaan TIK Inspektorat Utama	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	7.880.000	7.879.572	7.879.572	7.879.572	99,99%	99,99%	99,99%
N	Koordinasi Pengelolaan Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	2.475.000	2.474.500	2.474.500	2.474.500	99,98%	99,98%	99,98%
O	Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Ittama	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	23.259.000	11.756.500	12.646.500	23.258.700	50,55%	54,37%	100,00%
P	Pengelolaan Penggunaan Anggaran dan BMN	21	6	18	21	28,57%	85,71%	100,00%	97.766.000	40.419.100	53.489.100	97.764.400	41,34%	54,71%	100,00%
Q	Surveillan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016 (IKSP 13)	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	9.958.000	6.559.260	9.956.460	9.956.460	65,87%	99,98%	99,98%
R	Rapat Kerja Inspektorat Utama Tahun 2024	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	526.644.000	526.643.178	526.643.178	526.643.178	100,00%	100,00%	100,00%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
S	Sub Komponen dihapus														
F	**4116.EBD.965 Layanan Audit Internal**	**211**	**179**	**198**	**211**	**84,83%**	**93,84%**	**100,00%**	**7.363.683.000**	**5.857.633.286**	**6.711.314.315**	**7.363.663.449**	**79,55%**	**91,14%**	**100,00%**
071	**Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif**	**42**	**37**	**41**	**42**	**88,10%**	**97,62%**	**100,00%**	**1.821.701.000**	**1.479.123.520**	**1.691.043.230**	**1.821.693.453**	**81,19%**	**92,83%**	**100,00%**
A	Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	617.060.000	617.059.829	617.059.829	617.059.829	100,00%	100,00%	100,00%
C	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	985.000	985.000	985.000	985.000	100,00%	100,00%	100,00%
D	Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	143.752.000	16.275.000	16.275.000	143.751.723	11,32%	11,32%	100,00%
E	Desk evaluasi/Monev TL SAKIP	8	6	7	8	75,00%	87,50%	100,00%	165.420.000	120.304.610	162.244.634	165.418.134	72,73%	98,08%	100,00%
F	SUB KOMPONEN DI HAPUS								-						
G	Sosialisasi Kebijakan Pemabangunan ZI	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	59.360.000	59.360.000	59.360.000	59.360.000	100,00%	100,00%	100,00%
H	Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	65.135.000	65.135.000	65.135.000	65.135.000	100,00%	100,00%	100,00%
J	Intervensi ZI pada BB/BPOM	8	7	8	8	87,50%	100,00%	100,00%	181.435.000	107.231.638	181.433.402	181.433.402	59,10%	100,00%	100,00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
K	Bimbingan Teknis Implementasi ZI pada Loka POM Pilotting	5	5	5	5	100,00%	100,00%	100,00%	61.045.000	61.044.182	61.044.182	61.044.182	100,00%	100,00%	100,00%
L	SUB KOMPONEN DI HAPUS														
N	Bimtek dan Fasilitasi Pengisian LHKPN	2	1	2	2	50,00%	100,00%	100,00%	73.090.000	18.201.860	73.089.782	73.089.782	24,90%	100,00%	100,00%
O	Bimbingan Teknis Manajemen Risiko	5	5	5	5	100,00%	100,00%	100,00%	137.407.000	137.406.220	137.406.220	137.406.220	100,00%	100,00%	100,00%
P	Sosialisasi PerMenpanRB No 9 Tahun 2023 Bagi Evaluator	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	31.780.000	31.780.000	31.780.000	31.780.000	100,00%	100,00%	100,00%
R	Forum Diskusi Revisi Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM	2	1	2	2	50,00%	100,00%	100,00%	123.970.000	83.080.000	123.970.000	123.970.000	67,02%	100,00%	100,00%
S	Desk Penilaian Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	77.830.000	77.830.000	77.830.000	77.830.000	100,00%	100,00%	100,00%
T	SUB KOMPONEN DI HAPUS								-						
U	Pendampingan Evaluasi SPIPT Satuan Kerja	2	2	2	2	100,00%	100,00%	100,00%	73.068.000	73.066.960	73.066.960	73.066.960	100,00%	100,00%	100,00%
V	Penjaminan Kualitas Evaluasi SPIPT Satuan Kerja	3	3	3	3	100,00%	100,00%	100,00%	10.364.000	10.363.221	10.363.221	10.363.221	99,99%	99,99%	99,99%
072	**Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM**	**29**	**25**	**28**	**29**	**86,21%**	**96,55%**	**100,00%**	**713.782.000**	**432.870.735**	**658.581.012**	**713.780.362**	**60,64%**	**92,27%**	**100,00%**
A	Reviu	2	1	2	2	50,00%	100,00%	100,00%	8.785.000	6.685.000	8.785.000	8.785.000	76,10%	100,00%	100,00%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
B	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	8	8	8	8	100,00%	100,00%	100,00%	175.088.000	175.087.040	175.087.040	175.087.040	100,00%	100,00%	100,00%
C	Pendampingan Pemeriksaan BPK	11	10	11	11	90,91%	100,00%	100,00%	143.142.000	122.437.750	142.381.977	143.141.977	85,54%	99,47%	100,00%
D	Asistensi Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan/Laporan keuangan/PAPBJ	6	6	6	6	100,00%	100,00%	100,00%	122.121.000	119.620.945	122.120.945	122.120.945	97,95%	100,00%	100,00%
E	Pertemuan Peningkatan Sistem Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan	1	0	0	1	0,00%	0,00%	100,00%	9.040.000	9.040.000	9.040.000	9.040.000	100,00%	100,00%	100,00%
F	Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM	1	0	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	255.606.000	-	201.166.050	255.605.400	0,00%	78,70%	100,00%
073	**Peningkatan kualitas pelayanan pengawasan intern Inspektorat II**														
A	SUB KOMPONEN DI HAPUS														
074	**Penyusunan dan evaluasi kebijakan pengawasan intern**														
A	SUB KOMPONEN DI HAPUS														
075	**Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II**	**28**	**27**	**28**	**28**	**96,43%**	**100,00%**	**100,00%**	**963.888.000**	**901.438.641**	**963.885.140**	**963.885.140**	**93,52%**	**100,00%**	**100,00%**

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
A	Audit berbasis risiko	11	10	11	11	90,91%	100,00%	100,00%	691.007.000	628.559.341	691.005.840	691.005.840	90,96%	100,00%	100,00%
B	Bimbingan Teknis	3	3	3	3	100,00%	100,00%	100,00%	12.612.000	12.611.900	12.611.900	12.611.900	100,00%	100,00%	100,00%
C	Bimbingan Teknis Sang Integritas	9	9	9	9	100,00%	100,00%	100,00%	142.996.000	142.995.470	142.995.470	142.995.470	100,00%	100,00%	100,00%
D	Bimbingan Teknis Pelaksanaan SPI	5	5	5	5	100,00%	100,00%	100,00%	117.273.000	117.271.930	117.271.930	117.271.930	100,00%	100,00%	100,00%
E	SUB KOMPONEN DI HAPUS														
076	**Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II**	**1**	**1**	**1**	**1**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**21.519.000**	**21.518.380**	**21.518.380**	**21.518.380**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
A	Audit Tujuan Tertentu/Penelusuran Pengaduan	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	21.519.000	21.518.380	21.518.380	21.518.380	100,00%	100,00%	100,00%
077	**Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern lingkup Inspektorat II**	**23**	**20**	**22**	**23**	**86,96%**	**95,65%**	**100,00%**	**2.466.448.000**	**1.789.936.674**	**2.071.506.717**	**2.466.442.358**	**72,57%**	**83,99%**	**100,00%**
A	Refreshment ISO 9001:2015 Bagi Auditor Internal di Lingkungan Badan POM	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	180.700.000	180.700.000	180.700.000	180.700.000	100,00%	100,00%	100,00%
B	SUB KOMPONEN DI HAPUS								-						
C	Administrasi Keuangan	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	6.660.000	4.450.000	4.450.000	6.660.000	66,82%	66,82%	100,00%
D	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	12	10	11	12	83,33%	91,67%	100,00%	1.793.458.000	1.280.295.113	1.453.693.356	1.793.455.262	71,39%	81,06%	100,00%
E	SUB KOMPONEN DI HAPUS														

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
G	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	5	5	5	5	100,00%	100,00%	100,00%	186.962.000	148.071.912	148.071.912	186.960.552	79,20%	79,20%	100,00%
H	Pengawasan CASN	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	118.474.000	77.066.674	108.898.474	118.473.569	65,05%	91,92%	100,00%
I	SUB KOMPONEN DI HAPUS														
J	Automatic Adjustment								408.279.000			-			
L	SUB KOMPONEN DI HAPUS														
M	Konferensi Audit Internal	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	20.004.000	20.002.975	20.002.975	20.002.975	99,99%	99,99%	99,99%
N	FGD Penguatan Peran dan Mitigasi Risiko serta Akselerasi Zona Integritas	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	79.350.000	79.350.000	79.350.000	79.350.000	100,00%	100,00%	100,00%
O	Pembahasan Renstra dan PKPT Inspektorat Utama	1	0	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	80.840.000		76.340.000	80.840.000	0,00%	94,43%	100,00%
P	SUB KOMPONEN DI HAPUS														
078	**Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern**	**88**	**69**	**78**	**88**	**78,41%**	**88,64%**	**100,00%**	**1.376.345.000**	**1.232.745.336**	**1.304.779.836**	**1.376.343.756**	**89,57%**	**94,80%**	**100,00%**
A	Rapat Evaluasi Tingkat Ittama	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	647.013.000	647.012.731	647.012.731	647.012.731	100,00%	100,00%	100,00%
B	Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor	86	67	76	86	77,91%	88,37%	100,00%	629.310.000	485.710.830	557.745.330	629.309.250	77,18%	88,63%	100,00%
C	Automatic Adjustment Bag TU								8.722.000						

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
D	Konferensi Internal Audit/ Seminar Internal Auditor (SNIA)	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	100.022.000	100.021.775	100.021.775	100.021.775	100,00%	100,00%	100,00%

BADAN POM

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

Pengarah : Inspektur Utama
Penanggung Jawab : Inspektur I dan Inspektur II
Ketua : Plt. Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama

Tim Penyusun :

Alexander Arie Sanata D
Ardianto Nugroho
Brigitta Melati I.O
Tri Dahus Susanto
Nabila Emy Mayasar
Sarah Ayu Mutiah
Dara Putri Agnes R
Ardian Praba Agung Laksan
Nani Wardani
Sarah Olivia
Hans Samuel Joy
Aghnia Chairani
Alfira Prameswari Utami
Firdaus Ratna Kumala
Dini Nur Astria
Dhika Yoga Saputra



Biasakan yang Benar
Bukan Benarkan yang Biasa